



RANCANGAN PERUBAHAN
PRIORITAS DAN PLAFON
ANGGARAN SEMENTARA
[PPAS]

KABUPATEN BATANG TAHUN ANGGARAN 2024

PEMERINTAH KABUPATEN BATANG
TAHUN 2024

DAFTAR ISI

BAB I	PENDAHULUAN	I-1
	1.1. Latar Belakang Penyusunan Perubahan PPAS	I-1
	1.2. Tujuan Penyusunan Perubahan PPAS	I-2
	1.3. Dasar Hukum Penyusunan Perubahan PPAS	I-3
BAB II	RENCANA PERUBAHAN PENDAPATAN DAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	II-1
	2.1. Perubahan Pendapatan Daerah	II-2
	2.2. Perubahan Penerimaan Pembiayaan Daerah	II-4
BAB III	PRIORITAS BELANJA DAERAH	III-1
	3.1. Prioritas Pembangunan Tahun 2024	III-1
	3.2. Target Kinerja Pembangunan Tahun 2024	III-9
BAB IV	PLAFON PERUBAHAN ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM/KEGIATAN	IV-1
	4.1. Plafon Perubahan Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan Pemerintahan	IV-1
	4.2. Plafon Perubahan Anggaran Sementara Berdasarkan Perangkat Daerah	IV-9
	4.3. Plafon Perubahan Anggaran Sementara Berdasarkan Program Prioritas	IV-16
	4.4. Plafon Perubahan Anggaran Sementara Untuk Belanja Pegawai, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil, Bantuan Keuangan dan Belanja Tidak Terduga	IV- 134
BAB V	RENCANA PERUBAHAN PEMBIAYAAN DAERAH	V-1
	5.1. Rencana Perubahan Penerimaan Pembiayaan	V-1
	5.2. Rencana Perubahan Pengeluaran Pembiayaan	V-2
BAB VI	PENUTUP	VI-1

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1.	Target Perubahan Pendapatan Dan Penerimaan Pembiayaan Daerah Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2024	II-1
Tabel 3.1.	Penetapan Indikator Kinerja Utama Daerah Kabupaten Batang Tahun 2024	III-9
Tabel 3.2.	Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Kabupaten Batang Tahun 2024	III-10
Tabel 3.3.	Penetapan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Tahun 2024	III-32
Tabel 3.4.	Penetapan Indikator Kinerja dan Program Prioritas Kabupaten Batang Tahun 2024	III-45
Tabel 4.1	Plafon Perubahan Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Batang Tahun 2024	IV-2
Tabel 4.2	Perubahan Proporsi Anggaran Berdasarkan Perangkat Daerah Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2024	IV-9
Tabel 4.3	Plafon Perubahan Anggaran Sementara Berdasarkan Satuan Kerja Perangkat Daerah Per Subkegiatan	IV-97
Tabel 4.4	Plafon Perubahan Anggaran Sementara untuk Belanja Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2024	IV-134
Tabel 5.1	Rincian Plafon Perubahan Anggaran Pembiayaan Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2024	V-1
Tabel 5.2.	Ringkasan APBD Perubahan Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2024	V-2
Tabel 5.3.	Struktur APBD Perubahan Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2024	V-4

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG PENYUSUNAN PERUBAHAN PPAS

Perubahan PPAS Tahun Anggaran 2024 merupakan tahap lanjutan dari Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2024. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perubahan APBD disebabkan perkembangan yang tidak sesuai asumsi Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dapat berupa terjadinya pelampauan atau tidak tercapainya proyeksi pendapatan daerah, alokasi belanja daerah, sumber dan penggunaan pembiayaan yang semula ditetapkan dalam KUA. Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2024 merupakan tahapan lanjutan dari Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2024, yang disusun dengan tahapan menentukan skala prioritas pembangunan daerah, menentukan prioritas program untuk masing-masing urusan dan menyusun plafon anggaran sementara untuk masing-masing program/kegiatan.

Perubahan ini disebabkan adanya perubahan sumber pendapatan, belanja maupun pembiayaan serta terbitnya beberapa pedoman/petunjuk teknis baru baik dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi sehingga berakibat pada perubahan anggaran serta penyesuaian program maupun kegiatan di Perangkat Daerah.

Sebagaimana diamanatkan dalam pasal 162 ayat (2), Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa Kepala Daerah memformulasikan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi Kebijakan Umum Anggaran (KUA) ke dalam Rancangan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Rancangan Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) berdasarkan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dengan mengacu pada pedoman penyusunan APBD.

Pemerintah Kabupaten Batang telah menyusun Perubahan RKPD Tahun Anggaran 2024 dan telah ditetapkan melalui Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Batang Tahun 2024. Berdasarkan RKPD tersebut, Pemerintah Kabupaten Batang menyusun Perubahan PPAS APBD Tahun Anggaran 2024, sebagai landasan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (RAPBDP) Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2024

Perubahan PPAS ini juga merupakan landasan kebijakan operasional bagi segenap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Batang dalam penyusunan Rencana Anggaran Program/Kegiatan yang akan dilaksanakan pada perubahan anggaran tahun 2024. Dokumen Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (Perubahan PPAS) memuat substansi pokok sebagai berikut:

1. Prioritas program dan kegiatan yang mengalami perubahan baik karena penambahan, pergeseran, maupun pengurangan anggaran untuk masing-masing urusan.
2. Plafon anggaran yang masih bersifat sementara untuk masing-masing program dan kegiatan yang mengalami perubahan baik karena penambahan, pergeseran, maupun pengurangan anggaran.

Proses dan mekanisme penyusunan Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara APBD Kabupaten Batang Tahun 2024 telah mengacu pada ketentuan dan peraturan yang berlaku serta disusun berdasarkan Perubahan Kebijakan Umum APBD tahun 2024

1.2. TUJUAN PENYUSUNAN PERUBAHAN PPAS

Tujuan Penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kabupaten Batang Tahun 2024 adalah:

1. Sinkronisasi dan keterpaduan sasaran program dan kegiatan dengan kebijakan pemerintah daerah;

2. Menyinkronkan arah kebijakan umum anggaran pembangunan Kabupaten Batang tahun 2024 disesuaikan dengan perkembangan yang terjadi selama tahun anggaran berjalan.
3. Menjaga kelangsungan penyelenggaraan pemerintahan daerah, pembangunan, serta pelayanan masyarakat yang telah tercantum dalam RKPD;
4. Sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.
5. Sebagai dasar bagi Perangkat Daerah untuk menyusun perubahan RKA-PD mengingat terdapat perubahan pada program, kegiatan, sub kegiatan maupun capaian kinerja.
6. Menyesuaikan kebijakan pembangunan dengan kemampuan dan daya dukung anggaran.
7. Menyesuaikan kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan perubahan-perubahan yang terjadi selama semester pertama tahun 2024.
8. Mengefektifkan pelaksanaan rencana pembangunan dan penggunaan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun 2024.

1.3. DASAR HUKUM PENYUSUNAN PERUBAHAN PPAS

Landasan Hukum Penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kabupaten Batang Tahun 2024 adalah:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025;
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 13 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Batang Tahun 2005-2025;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 07 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Batang Tahun 2011-2031;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

16. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Batang Tahun 2017-2022.
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Kodefikasi, Klasifikasi Nomenklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Kodefikasi, Klasifikasi Nomenklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024.
22. Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Batang Tahun 2023-2026.
23. Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2023 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Batang Tahun 2024
24. Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2024 Tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (PRKPD) Kabupaten Batang Tahun 2024

BAB II

RENCANA PERUBAHAN PENDAPATAN DAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH

Rencana perubahan pendapatan daerah berisikan tentang rencana pendapatan daerah sebelum perubahan dan rencana pendapatan daerah setelah perubahan yang meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), pendapatan transfer dan lain-lain pendapatan daerah yang sah, berdasarkan kebijakan pendapatan daerah dalam Perubahan KUA. Pendapatan Asli Daerah merupakan cerminan kemampuan dan potensi daerah, sehingga besarnya penerimaan PAD dapat mempengaruhi kualitas kemandirian suatu daerah. Pendapatan Transfer terdiri dari dua jenis Transfer Pemerintah Pusat dan Transfer antar Daerah. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah terdiri atas hibah, dana darurat dan lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berikut adalah uraian tentang rincian perubahan pendapatan dan penerimaan pembiayaan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Batang Tahun 2024:

Tabel 2.1
Target Perubahan Pendapatan Dan Penerimaan Pembiayaan Daerah
Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2024

KODE AKUN	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ (BERKURANG)
4	PENDAPATAN DAERAH	1.902.452.411.838	1.931.427.986.590	28.975.574.752
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	315.624.540.238	335.410.556.590	19.786.016.352
4.1.01	Pajak Daerah	136.775.000.000	153.366.894.000	16.591.894.000
4.1.02	Retribusi Daerah	69.887.676.738	161.512.542.588	91.624.865.850
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	16.175.527.000	16.602.120.002	426.593.002
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	92.786.336.500	3.929.000.000	(88.857.336.500)
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	1.586.347.871.600	1.595.537.430.000	9.189.558.400
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.439.103.780.000	1.437.567.692.000	(1.536.088.000)
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	147.244.091.600	157.969.738.000	10.725.646.400
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	480.000.000	480.000.000	-

KODE AKUN	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ (BERKURANG)
4.3.01	Pendapatan Hibah	480.000.000	480.000.000	-
6	PEMBIAYAAN DAERAH			
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	61.582.200.395	143.716.847.078	82.134.646.683
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	61.582.200.395	143.716.847.078	82.134.646.683
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	7.500.000.000	7.500.000.000	-
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	7.500.000.000	7.500.000.000	-
	PEMBIAYAAN NETTO	54.082.200.395	136.216.847.078	82.134.646.683

Sumber: BPKAD Kab Batang Tahun 2024

2.1. PERUBAHAN PENDAPATAN DAERAH

Pendapatan daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Struktur Pendapatan Daerah pada APBD tahun 2024 mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Pendapatan daerah pada APBD tahun 2024 meliputi Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer Dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah.

Pendapatan Kabupaten Batang pada tahun 2024 diproyeksikan sebesar Rp. 1.902.452.411.838 Sedangkan Pada Perubahan Tahun Anggaran 2024 diproyeksikan sebesar Rp. 1.931.427.986.590, mengalami kenaikan sebesar Rp. 28.975.574.752. Kenaikan proyeksi pendapatan Daerah berasal dari perubahan Pendapatan Asli Daerah dari Rp. 315.624.540.238 menjadi Rp. 335.410.556.590 mengalami kenaikan sebesar Rp. 19.786.016.352, Pendapatan Tranfer dari Rp. 1.586.347.871.600 menjadi Rp. 1.595.537.430.000 mengalami kenaikan sebesar Rp. 9.189.558.400 dan Lain lain pendapatan daerah yang sah tidak mengalami perubahan yakni sebesar Rp. 480.000.000.

2.1.1. Perubahan Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan asli daerah (PAD) adalah pendapatan yang bersumber dan dipungut sendiri oleh Pemerintah Daerah, yang bersumber dari pajak

daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan (laba dari Badan Usaha Milik Daerah), dan Lain-lain PAD yang sah.

Perubahan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Batang Tahun 2024 ditargetkan dari Rp. 315.624.540.238 menjadi Rp. 335.410.556.590 mengalami kenaikan sebesar Rp. 19.786.016.352, dengan rincian sebagai berikut:

1. Perubahan Pendapatan Pajak Daerah tahun 2024 ditargetkan menjadi Rp. 153.366.894.000 mengalami kenaikan sebesar Rp. 16.591.894.000 atau sebesar 12,13% dari target sebelumnya.
2. Perubahan Hasil Retribusi Daerah tahun 2024 ditargetkan menjadi Rp. 161.512.542.588 mengalami kenaikan sebesar Rp. 91.581.759.850 atau sebesar 131,10% dari target sebelumnya .
3. Target PAD daari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan tahun 2024 mengalami perubahan menjadi Rp 16.602.120.002 mengalami kenaikan sebesar Rp. 426.593.002 atau sebesar 2,64% dari target sebelumnya .
4. Sedangkan Lain-lain PAD yang Sah tahun 2024 ditargetkan menjadi Rp 3.929.000.000 mengalami penurunan sebesar Rp. 88.857.336.500 atau sebesar 95,77% dari target sebelumnya .

2.1.2.Perubahan Pendapatan Transfer

Pendapatan transfer yang terdiri dari Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat dan Pendapatan Transfer Antar Daerah pada tahun 2024 ditargetkan sebesar Rp 1.586.347.871.600 mengalami perubahan target menjadi Rp. 1.595.537.430.000 mengalami kenaikan sebesar Rp. 9.189.558.400 atau mengalami kenaikan sebesar 0,58% dari target sebelumnya , dengan rincian sebagai berikut:

1. Perubahan Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat tahun 2024 semula ditargetkan Rp 1.439.103.780.000 menjadi Rp. 1.437.567.692.000

mengalami penurunan sebesar Rp. 1.536.088.000 atau sebesar 0,11% dari target sebelumnya.

2. Sedangkan Pendapatan Transfer Antar Daerah tahun 2024 yang awalnya ditargetkan Rp. 147.244.091.600 menjadi Rp. 157.969.738.000 mengalami kenaikan sebesar Rp. 10.725.646.400 atau sebesar 7,28% dari sebelumnya.

2.1.3. Perubahan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Pada aspek Lain-Lain Pendapatan Daerah yang sah untuk tahun 2024 tidak mengalami perubahan yakni sebesar Rp. 480.000.000 yang berasal dari pendapatan hibah.

2.2. PERUBAHAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH

Kebijakan pembiayaan daerah terdiri atas kebijakan penerimaan maupun pengeluaran pembiayaan yang akan dilaksanakan pada tahun 2024, dimana penerimaan pembiayaan tahun 2024 pada mulanya diproyeksikan sebesar Rp. 61.582.200.395 menjadi Rp. 143.716.847.078 mengalami kenaikan Rp. 82.134.646.683 atau sebesar 133,37%, penerimaan pembiayaan seluruhnya bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya yang selanjutnya digunakan sebagai Penyertaan Modal Daerah sebesar Rp. 7.500.000.000 sehingga perubahan Pembiayaan Netto naik sebesar Rp. 82.134.646.683 dari Rp. 54.082.200.395 menjadi Rp. 136.216.847.078

BAB III

PRIORITAS BELANJA DAERAH

Target dan prioritas pembangunan daerah tahun 2024 pada dasarnya merupakan rumusan prospektif dan direktif-indikatif bagi kebijakan pembangunan daerah berdasarkan permasalahan-permasalahan prioritas dan isu strategis pada tahun bersangkutan. Konstruksi permasalahan dan isu strategis sendiri merupakan hasil dari kajian atau evaluasi kinerja pembangunan pada tahun sebelumnya, hasil evaluasi capaian kinerja pembangunan dalam rentang waktu perencanaan RPJMD, perkiraan kemampuan keuangan daerah. Prioritas pembangunan ini didasarkan pada isu strategis di Kabupaten Tuban pada tahun terencana dengan memperhatikan urgensi, efisiensi, efektivitas, dan daya ungkit bagi kinerja pembangunan daerah.

3.1. PRIORITAS PEMBANGUNAN TAHUN 2024

Dengan menyongsong tema pembangunan Kabupaten Batang Tahun 2024 diarahkan pada **“Peningkatan daya saing melalui stabilisasi kondusifitas wilayah dan ketahanan daerah”** dengan prioritas sebagai berikut :

- a. Membangun kolaborasi multipihak dalam peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia, melalui :
 - a) Penguatan kolaborasi pemerintah daerah, pemerintah desa dan masyarakat dalam gerakan kembali ke sekolah.
- b. Peningkatan kualitas SDM melalui peningkatan akses dan kualitas pendidikan dan kesehatan :
 - a) Penguatan sistem kesehatan melalui peningkatan pemenuhan layanan dasar kesehatan, menurunkan kasus stunting serta penuntasan ODF;
 - b) Peningkatan kualitas pendidikan melalui peningkatan pemenuhan layanan dasar pendidikan serta peningkatan

- kompetensi dan kesejahteraan pendidik;
- c) Peningkatan upaya pengendalian penduduk melalui Keluarga Berencana.
- c. Meningkatkan pemberdayaan dan peran aktif masyarakat, kolaborasi dengan dunia usaha serta optimalisasi teknologi informasi untuk :
- a) Pelatihan berkelanjutan untuk pekerja berketerampilan rendah;
- b) Pemanfaatan potensi pariwisata berbasis pemberdayaan masyarakat dan peningkatan peran pokdarwis;
- c) Peningkatan partisipasi aktif pemuda dalam pembangunan;
- d) Peningkatan akses dan partisipasi masyarakat dalam olahraga;
- e) Pengembangan yang fokus pada sinergitas dan kolaborasi antar lembaga (pemerintah, masyarakat, dunia usaha) dalam penanggulangan kemiskinan.
- d. Perwujudan Kabupaten yang ramah perempuan dan layak anak, melalui:
- a) Meningkatkan pembangunan perempuan melalui Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender;
- b) Penguatan peran serta lembaga dan masyarakat terkait upaya perlindungan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak korban Kekerasan Seksual, TPPO, dan Penelantaran Anak;
- c) Perwujudan Kabupaten Layak Anak.
- e. Penguatan Sistem Kesehatan Integratif dan Holistik, melalui;
- a) Deteksi dini melalui perluasan case detection, skrining awal, surveilans penyakit menular dan tidak menular, rapid test

dan PCR;

- b) Penanganan dan pengobatan penyakit melalui karantina kesehatan, pemenuhan farmasi dan alkes;
 - c) Peningkatan upaya promotif dan preventif melalui Promkes, germas dan PHBS.
- f. Menciptakan nilai tambah sektor unggulan serta diversifikasi ekonomi , melalui :
- a) Mendorong iklim investasi melalui peningkatan pelayanan perijinan terpadu satu pintu, promosi investasi, pengurangan / penundaaan pembayaran pajak serta penciptaan lingkungan yang kondusif;
 - b) pengembangan kawasan industri yang berkualitas serta sektor perdagangan dan jasa di kawasan koridor jalan pantai utara (Pantura);
 - c) Meningkatkan produksi dan produktivitas sektor pertanian antara lain melalui bantuan alat, pemberian bantuan benih/bibit/ternak/pakan ternak, fasilitasi dan bantuan pemasaran produk, pemanfaatan pekarangan, serta intensifikasi pertanian;
 - d) Menjaga stabilitasasi harga barang kebutuhan masyarakat;
 - e) Peningkatan ketahanan pangan melalui peningkatan produksi & produktivitas pertanian, perkebunan, peningkatan produksi hasil peternakan & perikanan serta penyediaan;
 - f) Pengendalian alih fungsi lahan pertanian produktif;
 - g) Pengembangan fasilitas perikanan tangkap dan pengolahan hasil perikanan melalui pengembangan fasilitas pengolahan hasil perikanan; pengembangan kawasan minapolitan; dan pengembangan kegiatan perikanan tangkap dan perikanan

budidaya.

- g. Akselerasi pemulihan dan penguatan UMKM, difokuskan melalui peningkatan penciptaan peluang usaha melalui fasilitasi wirausaha melalui pendampingan, penyiapan SDM, fasilitasi standarisasi mutu dan sertifikasi produk UMKM, kemudahan perijinan usaha serta peningkatan promosi dan pemasaran produk.
- h. Mempertahankan pertumbuhan pendapatan penduduk yang berada di bawah 40% dari populasi pada tingkat yang lebih tinggi melalui :
 - a) Pengembangan daya saing dan kemandirian desa, dan pemerataan pendapatan;
 - b) Penciptaan dan perluasan lapangan kerja dengan padat karya di sektor infrastruktur, pelatihan kerja dan bantuan alat, *job market* serta fasilitasi penyelesaian kasus sengketa.
- i. Meningkatkan pemenuhan pelayanan kebutuhan dasar masyarakat miskin, melalui:
 - a) Peningkatan jangkauan pendidikan melalui beasiswa untuk siswa miskin dan optimalisasi pendidikan non formal;
 - b) Penyediaan Rumah Layak Huni pada masyarakat berpenghasilan rendah/miskin dan bagi korban bencana daerah;
 - c) Peningkatan rehabilitasi sosial penyandang disabilitas, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan tuna sosial diluar panti serta pemberian jaminan dan perlindungan social;
 - d) Penguatan dan peningkatan perlindungan dan jaminan sosial masyarakat utamanya bagi masyarakat rentan;
 - e) Sinergitas dan kerjasama lintas sektor dan tingkat pemerintahan terkait dalam penanggulangan kemiskinan.

- j. Pembangunan infrastruktur yang mendukung kawasan strategis serta pro lingkungan berkelanjutan, melalui :
 - a) Pembangunan infrastruktur untuk mendukung wilayah strategis dan konektivitas antar wilayah;
 - b) Penataan sistem transportasi, perluasan jangkauan pelayanan transportasi di perdesaan serta peningkatan keselamatan lalu lintas secara komprehensif dan terpadu;
 - c) Peningkatan ketersediaan dan cadangan sumber daya air;
 - d) Meningkatkan kualitas dan kapasitas prasarana sarana serta sistem penyediaan akses aman air minum dan sanitasi;
 - e) Peningkatan dan pengembangan infrastruktur air limbah;
 - f) Meningkatkan kualitas permukiman perkotaan padat dan/atau permukiman kumuh serta menyediakan sarana dan prasarana permukiman.
- k. Peningkatan kualitas pengelolaan lingkungan hidup, melalui:
 - a) Pengendalian pemanfaatan ruang sesuai peruntukan;
 - b) Optimalisasi Ruang Terbuka Hijau sebagai pusat interaksi dan pusat perekonomian dan fungsi lainnya;
 - c) Pengendalian pencemaran dan penanganan lahan kritis, pengendalian banjir dan kerusakan wilayah pesisir;
 - d) Peningkatan pengelolaan lingkungan hidup, pengelolaan sampah serta pengolahan limbah rumah tangga dan limbah industri.
- l. Reformasi Birokrasi di semua level pemerintahan :
 - a) Mengembangkan lembaga yang efektif, akuntabel, dan transparan di semua tingkat melalui pemanfaatan sistem informasi terintegrasi;
 - b) Peningkatan peran penelitian dan pengembangan (Litbang)

sebagai *Research Based Policy*;

- c) Peningkatan kualitas pengelolaan manajemen risiko.
- m. Intensifikasi dan ekstensifikasi potensi sumber pendanaan pembangunan melalui peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah
- n. Pengembangan inovasi pelayanan publik yang inklusif serta gesit, responsif, inovatif, melalui :
 - a) Pengembangan dan peningkatan budaya inovasi bagi perangkat daerah melalui Perangkat Daerah Inovatif maupun masyarakat melalui Krenova;
 - b) Peningkatan layanan dan inovasi administrasi kependudukan;
 - c) Peningkatan keterbukaan akses publik terhadap informasi;
 - d) Peningkatan kualitas dan ketersediaan data dan informasi yang valid dan *up to date* serta keterbukaan informasi dan satu data sebagai langkah berbenah dalam penyediaan data;
 - e) Meningkatkan kualitas layanan publik melalui optimalisasi Teknologi Informasi;
 - f) Meningkatkan kualitas sumber daya ASN melalui peningkatan kapasitas dan peningkatan pengelolaan manajemen ASN;
 - g) Optimalisasi pelaksanaan SKM sebagai dasar perbaikan pelayanan, utamanya pada perangkat daerah penyelenggara pelayanan publik.
- o. Penyiapan dan penguatan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana, fokus pada penyediaan informasi rawan bencana, Konservasi dan rehabilitasi lahan serta penyelamatan dan evakuasi korban bencana.
- p. Penguatan modal sosial untuk peningkatan kondusivitas wilayah, melalui:

- a) Peningkatan pendidikan karakter dan budaya sejak dini serta Meningkatkan pelestarian dan pengembangan seni dan budaya;
- b) Penguatan kapasitas kelompok masyarakat, komunitas dan tokoh2 agama tentang wawasan kebangsaan serta parpol dalam pengembangan etika budaya politik;
- c) Peningkatan ketertiban dan keamanan kenyamanan lingkungan dengan fokus pada pelibatan dan pemberdayaan masyarakat/ lembaga kemasyarakatan mulai dari tingkat dukuh, desa, RT/RW hingga Kel/Kec.

Arah kebijakan dan fokus pembangunan daerah Kabupaten Batang tahun 2024 merupakan upaya untuk mencapai target kinerja utama daerah tahun 2024 yaitu :

- 1. PDRB Per Kapita (ADHK) sebesar 22,3
- 2. Indeks Daya Saing Daerah sebesar 3,507
- 3. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 70,04
- 4. Indeks Pembangunan Gender (IPG) sebesar 91,98
- 5. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) sebesar 63,93
- 6. Pertumbuhan Ekonomi sebesar 5,70-6,20
- 7. Tingkat Pengeluaran Per kapita disesuaikan sebesar 9,803 riburupiah per tahun
- 8. Angka Ketimpangan (berdasarkan kriteria Bank Dunia) sebesar 21,6
- 9. Persentase Penduduk Miskin sebesar 8,34-7,90
- 10. Tingkat Pengangguran terbuka sebesar 5,6
- 11. Indeks Infrastruktur sebesar 197,04
- 12. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup sebesar 65,04
- 13. Indeks Reformasi Birokrasi sebesar 68,66

14. Nilai SAKIP Skor 70,5
15. Indeks Penerapan Manajemen Risiko (MRI) sebesar Level 3
16. Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah sebesar 79
17. Indeks Kepuasan Masyarakat sebesar 85,45
18. Indeks Risiko Bencana (IRBI) sebesar 155
19. Indeks Rasa Aman sebesar 4,2
20. Indeks Ketahanan Daerah sebesar 0,81
21. Indeks Demokrasi sebesar 72
22. Angka Kriminalitas sebesar 0,015 persen

Untuk mewujudkan tujuan, sasaran pembangunan maka ditetapkan 5 (lima) prioritas pembangunan sebagai berikut:

1. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia

Prioritas ini ditetapkan untuk Penguatan Kolaborasi dalam pemenuhan pelayanan dasar serta pengurangan beban pengeluaran pada masyarakat miskin, Pengembangan Kompetensi Tenaga Kerja melalui Pelatihan Tenaga Kerja berbasis Kompetensi, Pengendalian Penduduk, Penguatan sistem kesehatan masyarakat (pemenuhan layanan dasar, penurunan stunting dan ODF) serta upaya promotif dan preventif (GERMAS, PHBS), Peningkatan partisipasi aktif pemuda dalam pembangunan, serta Meningkatnya pengarusutamaan gender dan pemenuhan hak anak dalam pembangunan.

2. Penciptaan nilai tambah sektor unggulan serta penguatan perekonomian daerah berbasis ekonomi kerakyatan

Prioritas ini ditetapkan untuk mendorong iklim investasi masuk ke Kabupaten Batang, Pengembangan Kawasan Industri yang berkualitas, Pengendalian inflasi, Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN), Meningkatkan ketahanan pangan, serta

menciptakan peluang usaha baru bagi masyarakat Kabupaten Batang.

3. Mewujudkan Pembangunan berbasis Green Infrastruktur

Prioritas ini ditetapkan untuk Pembangunan infrastruktur di wilayah strategis, pengembangan konektivitas wilayah, Peningkatan Pengelolaan lingkungan dan Ruang Terbuka Hijau, Pencegahan dan Peningkatan kualitas lingkungan kumuh, Peningkatan kualitas permukiman padat, serta Pengendalian pencemaran dan penanganan lahan kritis.

4. Mewujudkan Agile Government

Prioritas ini ditetapkan untuk optimalisasi penggunaan Teknologi Informasi dalam peningkatan kualitas pelayanan publik, Pengelolaan manajemen risiko di lingkungan pemerintahan, pengembangan dan peningkatan budaya inovasi di pemerintahan dan masyarakat, peningkatan transparansi dan akuntabilitas sumber daya aparatur, serta peningkatan kualitas data informasi.

5. Meningkatkan kondusivitas wilayah

Prioritas ini ditetapkan untuk menjaga kondusivitas wilayah menuju pemilu serentak di tahun 2024, Penyiapan dan penguatan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana, Peningkatan pendidikan karakter dan budaya sejak dini, serta Peningkatan ketertiban dan keamanan kenyamanan lingkungan.

3.2. TARGET KINERJA PEMBANGUNAN TAHUN 2024

Dalam rangka upaya pencapaian prioritas pembangunan daerah tahun 2024, maka ditetapkan target pada indikator kinerja utama daerah tahun 2024 sebagai berikut:

Tabel 3.1.
Penetapan Indikator Kinerja Utama Daerah
Kabupaten Batang Tahun 2024

No.	Indikator Kinerja Utama Daerah	Satuan	Target Capaian Tahun 2024	Perangkat Daerah Koordinator
1	PDRB Per Kapita (ADHK)	juta rupiah	22,3	Sekretariat Daerah

No.	Indikator Kinerja Utama Daerah	Satuan	Target Capaian Tahun 2024	Perangkat Daerah Koordinator
2	Indeks Daya Saing Daerah	Indeks	3,507	Sekretariat Daerah
3	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Indeks	70,04	Sekretariat Daerah
4	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks	91,98	Sekretariat Daerah
5	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Indeks	63,93	Sekretariat Daerah
6	Pertumbuhan Ekonomi	Persen	5,7-6,20	Sekretariat Daerah
7	Tingkat Pengeluaran Per kapita disesuaikan	(Rp. 000/tahun)	9.803	
8	Angka Ketimpangan (berdasarkan kriteria Bank Dunia)	Persen	21,6	Sekretariat Daerah
9	Persentase Penduduk Miskin	Persen	8,34-7,90	Sekretariat Daerah
10	Tingkat Pengangguran terbuka	Persen	5,6	Sekretariat Daerah
11	Indeks Infrastruktur	Indeks	197,04	Sekretariat Daerah
12	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	65,04	Sekretariat Daerah
13	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	68,66	Sekretariat Daerah
14	Nilai SAKIP	Skor	70,5	Sekretariat Daerah
15	Indeks Penerapan Manajemen Risiko (MRI)	Indeks	Level 3	Sekretariat Daerah
16	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	Indeks	79	Sekretariat Daerah
17	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	85,45	Sekretariat Daerah
18	Indeks Risiko Bencana (IRBI)	Indeks	155	Sekretariat Daerah
19	Indeks Rasa Aman	Indeks	4,2	Sekretariat Daerah
20	Indeks Ketahanan Daerah	Indeks	0,81	Sekretariat Daerah
21	Indeks Demokrasi	Indeks	72	Sekretariat Daerah
22	Angka Kriminalitas	Persen	0,015	Sekretariat Daerah

Sumber : RPD Kabupaten Batang Tahun 2023-2026

Selanjutnya, Indikator kinerja daerah merupakan indikator kinerja yang ditetapkan sebagai ukuran kinerja seluruh penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten Batang tahun 2024, yang merupakan seluruh indikator tujuan dan sasaran, IKU perangkat daerah, serta indikator program perangkat daerah. Indikator kinerja daerah adalah sebagai berikut.

Tabel 3.2.

**Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja
Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Kabupaten Batang Tahun 2024**

No.	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Stn	Formulasi Perhitungan	Target Kinerja Tahun 2024	Perangkat Daerah
A	Aspek Kesejahteraan Masyarakat				

No.	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Stn	Formulasi Perhitungan	Target Kinerja Tahun 2024	Perangkat Daerah
1	Pertumbuhan Ekonomi (%)	%	$\{(PDRB \text{ th } n - PDRB \text{ th } (n-1)) : PDRB \text{ th } (n-1)\} \times 100$	5,7-6,2	Sekretariat Daerah
2	Laju Inflasi (%)	%	Angka Inflasi	2,3-3,3	Sekretariat Daerah
3	PDRB Per Kapita (Rp.juta)	juta rupiah	$PDRB \text{ th } n : \text{jumlah penduduk th } n$	22,3	Sekretariat Daerah
4	Angka Ketimpangan (berdasarkan kriteria Bank Dunia)	%	Persentase pendapatan penduduk 40 terendah terhadap total pendapatan	21,6	Sekretariat Daerah
5	Persentase Angka Kemiskinan (%)	%	Jumlah penduduk miskin di Kab. Batang : jumlah penduduk Kab. Batang	8,34-7,90	Sekretariat Daerah
6	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	indeks	Rata-rata geometrik dari indeks kesehatan, pendidikan, dan pengeluaran	70,04	Sekretariat Daerah
7	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	indeks	Rasio IPM Perempuan dibanding IPM Laki-Laki	91,98	Sekretariat Daerah
8	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	indeks	Peran serta wanita dalam kehidupan ekonomi dan politik	63,93	Sekretariat Daerah
9	Angka Harapan Hidup (tahun)	tahun	Angka perkiraan lama hidup rata-rata penduduk dengan asumsi tidak ada perubahan pola mortalitas menurut umur	74,89	Sekretariat Daerah
10	Harapan Lama Sekolah (th)	tahun	Lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang	12,4	Sekretariat Daerah
11	Rata-Rata Lama Sekolah (th)	tahun	Jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal	7,1	Sekretariat Daerah
12	Tingkat Pengeluaran Per kapita disesuaikan (Rp.000/tahun)	juta rupiah	Rata-rata pengeluaran penduduk pertahun	9.803	Sekretariat Daerah
13	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	%	$(\text{Jumlah penganggur terbuka usia angkatan kerja} : \text{Jumlah penduduk angkatan kerja}) \times 100$	5,6	Sekretariat Daerah
14	Persentase Desa Siaga Aktif Strata Mandiri	%	Jumlah Desa Siaga Aktif strata mandiri : jumlah desa/kelurahan x 100	12,9	Sekretariat Daerah
15	Tingkat Kesempatan kerja	%	$\text{Jumlah penduduk bekerja} : \text{jumlah angkatan kerja} \times 100$	97	Sekretariat Daerah
16	Rasio penduduk yang bekerja	%	$\text{Jumlah Penduduk 15 th ke atas} : \text{Angkatan Kerja} \times 100$	72	Sekretariat Daerah
17	Indeks Kepuasan Masyarakat	indeks	Hasil survei kepuasan masyarakat	85,45	Sekretariat Daerah
18	Persentase Peningkatan PAD	%	$[(\text{Realisasi PAD tahun } n) - (\text{Realisasi PAD Tahun } n-1)] : (\text{Realisasi PAD Tahun } n-1) \times 100$	2,03	Sekretariat Daerah
19	Opini BPK	opini	Penilaian opini yang di keluarkan oleh BPK terhadap laporan keuangan daerah	WTP	Sekretariat Daerah
20	Persentase penguatan cadangan pangdaerah	%	$\text{jumlah cadangan pangan tahun } n \text{ dikurangi tahun } n-1 : \text{tahun } n-1 \times 100$	0,024	Sekretariat Daerah
21	Pencapaian skor Pola Pangan Harapan (PPH)	skor	Hasil kali konsumsi energi dengan bobot dibandingkan dengan Skor Maksimal Kelompok Pangan	89,5	Sekretariat Daerah
22	Kontribusi sektor pertanian/perkebunan terhadap PDRB	%	$\text{jumlah Kontribusi PDRB dari sektor pertanian/perkebunan} : \text{Jumlah PDRB} \times 100$	24,76	Sekretariat Daerah
23	Persentase peningkatan pendapatan sektor pariwisata	%	$(\text{Jumlah pendapatan sektor pariwisata tahun } n \text{ dikurangi Jumlah pendapatan sektor pariwisata tahun } n-1 : \text{Jumlah pendapatan sektor pariwisata tahun } n-1) \times 100$	17	Sekretariat Daerah
24	Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB	%	Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB dari BPS	12,75	Sekretariat Daerah
25	Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB	%	Kontribusi sektor industri terhadap PDRB dari BPS	32,99	Sekretariat Daerah
B Aspek Daya Saing Daerah					
1	Indeks Daya Saing Daerah	indeks	Nilai IDSD	3,5067	Sekretariat Daerah
2	Indeks Reformasi Birokrasi	indeks	Capaian implementasi reformasi birokrasi yang meliputi 8 komponen	68,66	Sekretariat Daerah
3	Nilai SAKIP	skor	(30 perencanaan kinerja + 25 pengukuran kinerja + 15 pelaporan kinerja + 10 evaluasi internal + 20 capaian kinerja)	70,5	Sekretariat Daerah
4			Penilaian secara kualitatif melalui reuiu		Sekretariat Daerah

No.	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Stn	Formulasi Perhitungan	Target Kinerja Tahun 2024	Perangkat Daerah
	Indeks Penerapan Manajemen Risiko(MRI)	indeks	dokumen, kuesioner, wawancara, dan observasi terhadap 8 komponen, 28 aspek dan 69 kriteria yang telah ditetapkan	level 3	
5	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup(IKLH)	indeks	IKLH Kabupaten = $(0,376 \times \text{IKA}) + (0,405 \times \text{IKU}) + (0,219 \times \text{IKL})$	65,04	Sekretariat Daerah
6	Indeks Infrastruktur	indeks	Indeks Infrastruktur tingkat Kabupaten/Kota = $0,4122 \times \text{jalan} + 0,4149 \times \text{air} + 0,4620 \times \text{sanitasi} + 0,4368 \times \text{pkpl} + 0,5037 \times \text{telp_int}$	197,04	Sekretariat Daerah
7	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	indeks	Penilaian terhadap 6 dimensi yaitu: 1. Kesesuaian dokumen perencanaan dengan penganggaran; 2. Pengalokasian belanja APBD; 3. Transparansi pengelolaan keuangan daerah; 4. Penyerapan Anggaran; 5. Kondisi Keuangan Daerah; 6. Opini BPK atas LKPD	79	Sekretariat Daerah
8	Indeks Risiko Bencana (IRBI)	indeks	perhitungan pada komponen bahaya (hazard), kerentanan (vulnerability), dan kapasitas (capacity) di masing-masing provinsi dan kabupaten/ kota	155	Sekretariat Daerah
9	Indeks Rasa Aman	indeks	survei / kuisisioner kepada masyarakat	4,2	Sekretariat Daerah
10	Indeks Ketahanan Daerah	indeks	Kuantitatif & Kualitatif, melalui kuisisioner terhadap 7 Parameter Indeks Ketahanan Daerah	0,81	Sekretariat Daerah
11	Indeks Demokrasi	indeks	Kualitatif, melalui kuisisioner	72	Sekretariat Daerah
12	Persentase pengeluaran konsumsi non pangan perkapita	%	Total Pengeluaran RT Non Pangan : Total Pengeluaran x 100	47,27	Sekretariat Daerah
13	Rasio Ekspor + Impor terhadap PDB	rasio	Jumlah ekspor dan impor barang dan jasa / PDB	0,05	Sekretariat Daerah
14	Angka kriminalitas	rasio	Jumlah tindak kriminal dalam 1 tahun : Jumlah penduduk	0,015	Sekretariat Daerah
15	Angka Beban ketergantungan	%	(Penduduk usia 64 : Penduduk usia 15-64) x 100	42,8	Sekretariat Daerah
C	Aspek Pelayanan Umum				
	Urusan Wajib Pelayanan Dasar				
1	Pendidikan				
	Angka Partisipasi Sekolah	%	Jumlah peserta didik usia 5-15 tahun : jumlah penduduk usia 5-15 tahun x 100	100	Disdikbud
	Angka pendidikan yang ditamatkan	%	Persentase jumlah penduduk, baik yang masih sekolah ataupun tidak sekolah lagi, menurut pendidikan tertinggi yang telah ditamatkan	80	Disdikbud
	Persentase guru berkualifikasi S1/D4	%	Jumlah guru berkualifikasi S1/D4 : jumlah guru seluruhnya x 100	100	Disdikbud
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	Indeks	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	88,75	Disdikbud
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	skor	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	77,5	Disdikbud
	Persentase capaian SPM Pendidikan	%	Jumlah jenis layanan SPM Bidang Pendidikan yang tersedia : jumlah total jenis layanan SPM Bidang Pendidikan x 100	100	Disdikbud
	Persentase satuan pendidikan yang mengembangkan kurikulum muatan lokal	%	Jumlah satuan pendidikan yang mengembangkan kurikulum muatan lokal : jumlah seluruh satuan pendidikan x 100	90	Disdikbud
2	Kesehatan				
	Angka Kematian Ibu(AKI)	Per 100.000 KH	Jumlah kematian ibu maternal tetapi bukan disebabkan karena kecelakaan, bencana, cedera atau bunuh diri di suatu wilayah pada kurun waktu tertentu/jumlah kelahiran hidup di suatu wilayah dan pada kurun waktu yang sama x 100.000	136	Dinas Kesehatan
	Angka Kematian Bayi (AKB)	Per 1.000 KH	Jumlah bayi usia 0- 11 bulan yang meninggal di suatu wilayah pada kurun waktu tertentu/jumlah kelahiran hidup di suatu wilayah dan pada kurun waktu yang sama x 1.000	8,08	Dinas Kesehatan
	Angka prevalensi balita stunting	%	Jumlah balita usia 0-59 bulan dengan status pendek di suatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu/Jumlah Balita usia 0-59 bulan yang diukur panjang atau tinggi badan pada wilayah dan kurun waktu yang sama x 100	13,72	Dinas Kesehatan
	Persentase Penduduk yang mempunyai jaminan		Jumlah penduduk yang mempunyai		Dinas Kesehatan

No.	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Stn	Formulasi Perhitungan	Target Kinerja Tahun 2024	Perangkat Daerah
	kesehatan (UU No. 40 Th 2004 dan UU No.36 Th2009)	%	jaminan kesehatan :jumlah penduduk x100	89	
	Persentase puskesmas dengan tenaga sesuai standar (PMK 43. Th 2019)	%	Jumlah puskesmas dengan ketenagaan sesuai standar : jumlah puskesmas kali 100	80,95	Dinas Kesehatan
	Persentase Fasilitas kefarmasian yang sesuai standar (PMK No.73 Th. 2016, PMK No. 74 Th 2016, PMK No.34 Th 2021)	%	Jumlah Fasilitas kefarmasian yang sesuai standar : jumlah fasilitas pelayanan kefarmasian x 100	70	Dinas Kesehatan
	Persentase Desa Siaga Aktif StrataMandiri. Kepmenkes RI Nomor 1529/ MENKES/SK/ X/2010	%	Jumlah Desa SiagaAktif strata mandiri : jumlah desa: kelurahan x 100	11,69	Dinas Kesehatan
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	88,75	Dinas Kesehatan
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Skor	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	80	Dinas Kesehatan
	Angka HarapanHidup (AHH)	Tahun	Angka perkiraan lama hidup rata- rata penduduk dengan asumsi tidak ada perubahan pola mortalitas menurutumur	74,89	Dinas Kesehatan
	Rata-Rata capaian SPM bidang Kesehatan	%	Jumlah capaian masing masing indikator SPM : Jumlah indikatorSPM x 100	100	Dinas Kesehatan
	Persentase tenaga kesehatan yang berijin (SPM)	%	Jumlah tenaga kesehatan yang mempunyai SIP :jumlah tenaga kesehatan yang aktif x 100	100	Dinas Kesehatan
	Persentase sarana pelayanan kefarmasian yang berijin	%	Jumlah sarana pelayanan kefarmasian yang berijin : jumlah sarana pelayanan kefarmasian yang ada x 100	82	Dinas Kesehatan
	Rasio Posyandu Mandiri terhadap balita	rasio	Jumlah posyandu mandiri : jumlah balita x 100	12,24	Dinas Kesehatan
	Persentase Capaian Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit (RSUD Batang)	%	Jumlah sarana, prasarana dan alat sesuai standart yang dimiliki : dengan jumlah sarana prasarana dan alat sesuai standart yang seharusnya di milikix 100	100	RSUD Batang
	Persentase Capaian Standart Peningkatan Mutu dan Keselamatan Pasien	%	Nilai rata - rata unsur capaian Peningkatan Mutudan Keselamatan Pasien	86	RSUD Batang
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	99,25	RSUD Batang
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Skor	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	80	RSUD Batang
	Persentase tenaga kesehatan yang berijin (RSUD Batang) (SPM)	%	Jumlah tenaga kesehatan yang mempunyai SIP :jumlah tenaga kesehatan yang aktif x 100	100	RSUD Batang
	Persentase ketersediaan sarana, prasarana dan alat kesehatan di RSUD yang sesuai standar / Jumlah gedung, sarana dan prasarana yang diadakan / jumlahgedung yang dibangun (RSUD Batang)	%	jumlah sarana, prasarana dan alat sesuai standar yang dimiliki : dengan jumlah sarana prasarana dan alat sesuai standar yangseharusnya dimilikix 100	86	RSUD Batang
	Persentase Capaian Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit (RSUD Limbung)	%	jumlah sarana, prasarana dan alat sesuai standar yang dimiliki : dengan jumlah sarana prasarana dan alat sesuai standar yangseharusnya dimilikix 100	100	RSUD Limbung
	Persentase penyediaan jenis layanan SPM Bidang Kesehatan (RSUD Limbung)	%	Jumlah jenis layanan SPM Bidang Kesehatan yang tersedia : jumlah total jenis layanan SPM Bidang Kesehatan x100	100	RSUD Limbung
	Persentase Capaian Standar Peningkatan Mutu dan Keselamatan Pasien	%	Nilai rata-rata unsur capaian Peningkatan Mutudan Keselamatan Pasien	85	RSUD Limbung
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	99	RSUD Limbung
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Skor	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	80	RSUD Limbung
	Persentase tenaga kesehatan yang berijin (RSUD Limbung) (SPM)	%	Jumlah tenaga kesehatan yang mempunyai SIP :jumlah tenaga kesehatan yang aktif x 100	100	RSUD Limbung
3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang				
	Persentase Infrastruktur Wilayah kondisiBaik	%	Jumlah infrastruktur kondisi baik : jumlah total infrastruktur x 100	71,2	DPUPR
	Persentase Irigasi Kabupaten DalamKondisi Baik	%	Luas irigasi kabupaten dalam kondisi baik : luas irigasi kabupaten x100	69,87	DPUPR
	Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota (%)	%	Jumlah panjang jalan dalam kondisimantap : Jumlah total panjang jalan kabupaten/kota x 100	88,5	DPUPR
			Jumlah Gedung negara yang layak fungsi :		DPUPR

No.	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Stn	Formulasi Perhitungan	Target Kinerja Tahun 2024	Perangkat Daerah
	Persentase bangunan gedung yang layak fungsi	%	Jumlah bangunan gedung negara yang menjadi kewenangan Pemkab x 100	77,01	
	Presentase Pengaturan Rencana Detail Tata Ruang Daerah	%	Luas wilayah RDTR yang ditetapkan : Luas wilayah Kabupaten Batang x100	11,07	DPUPR
	Rasio Ruang Terbuka Hijau persatuan Luas Wilayah berHPL/HGB	%	Luas ruang terbuka hijau : Luas wilayah berHPL / HGB x 100	28,87	DPUPR
	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	%	Luas irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi yang dibangun (ha), ditingkatkan (ha), direhabilitasi (ha), dioperasikan danelihara (ha) di tahun eksisting : luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota x 100	4,26	DPUPR
	Persentase Jumlah Rumah Tangga yang mendapat akses air minum layak (SPM)	%	Jumlah Rumah Tangga yang mendapat akses air minum layak : Jumlah Rumah Tangga Seluruhnyax 100	100	DPUPR
	Persentase Jumlah Rumah Tangga yang mendapat akses air minum aman (SPM)	%	Jumlah Rumah Tangga yang mendapat akses air minum aman : Jumlah Rumah Tangga Seluruhnyax 100	100	DPUPR
	Persentase TPA dalam kondisi baik	%	Jumlah TPA dalam Kondisi baik : jumlah TPA seluruhnya x 100	100	DPUPR
	Persentase jumlah penduduk yang memperoleh layanan pengelolaan air limbah domestik (SPM)	%	Jumlah Rumah Tangga Bersanitasi : Jumlah Rumah Tangga Seluruhnya x100	100	DPUPR
	Persentase drainase dalam kondisi baik/pembuangan aliran air	%	Panjang drainase tersumbat pembuangan aliran air (Km) : Panjang seluruh drainase di daerah kabupaten (Km) x 100	64,41	DPUPR
	Persentase Infrastruktur Lingkungan Perumahan yang layak	%	Panjang jalan dan drainase lingkungan : Panjang jalan dan drainase lingkungan seluruhnya x100	56,04	DPUPR
	Persentase Pemanfaatan Gedung yang sesuai dengan peruntukan	%	Jumlah Gedung negara yang sesuai dengan peruntukkan : Jumlah Bangunan Gedung negara yang menjadi kewenangan Pemkab x100	100	DPUPR
	Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik (> 40KM/Jam)	%	Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik : Panjang seluruh jalan kabupaten di daerah tersebut x 100	88,65	DPUPR
	Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	%	Jumlah tenaga kerja konstruksi operator dan teknis/analisis : Jumlah kebutuhan tenaga operator dan teknis/analisis di wilayah Kabupaten/Kota x 100	12,5	DPUPR
	Persentase Penetapan Rencana Rinci Tata Ruang	%	Luas wilayah RRTR yang ditetapkan : luas wilayah RRTR yang ditargetkan x 100	81	DPUPR
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	Indeks	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	88,75	DPUPR
4	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman				
	Persentase Rumah Layak Huni	%	(Jumlah Rumah Layak Huni : Jumlah Rumah se Kab. Batang) x 100	63	DPRKP
	Presentase perumahan dan lingkungan permukiman yang dilengkapi PSU dalam kondisi baik	%	(Luasan Perumahan dan Permukiman dalam kondisi baik : Luas Total Perumahan dan Permukiman) x 100	81	DPRKP
	Persentase pemenuhan infrastruktur dasar perumahan dan permukiman yang layak	%	Jumlah infrastruktur yg dipenuhi : jumlah infrastruktur yg adax 100	63	DPRKP
	Persentase pengurangan pemukiman kumuh	%	(Luas lingkungan kumuh yg tertangani : Luas lingkungan kumuh laluj) x 100	63	DPRKP
	Persentase Perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	%	Jumlah Perumahan yang sdh dilengkapi PSU : Jumlah Perumahan se Kab. Batang x 100	81	DPRKP
	Persentase RLH bagi korban bencana / terdampak program pemerintah (SPM)	%	Jumlah rumah korban bencana yg ditangani : Jumlah Rumah Korban Bencana seluruhnya x 100	100	DPRKP
			Jumlah Luas kawasan kumuh yang tertangani : Jumlah luas kawasan kumuh		DPRKP

No.	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Stn	Formulasi Perhitungan	Target Kinerja Tahun 2024	Perangkat Daerah
	Persentase Luasan Kawasan Kumuh yang tertangani	%	seluruhnya x 100	63	
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	Indeks	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	65	DPRKP
5	Ketrentaman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat				
	IKM terhadap penanganan gangguan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat	Indeks	Hasil Survei IndeksKepuasan Masyarakat	75	Satpol PP
	Persentase penanganan gangguan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat	%	(Jumlah laporan penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum : jumlah keseluruhan gangguan ketentraman dan ketertiban umum) x100	75	Satpol PP
	Persentase luasan wilayah bencana kebakaran	%	(Luas wilayah bencana kebakaran : luas wilayah kabupaten) x100	4	Satpol PP
	Persentase penanganan bencana kebakaran dan non kebakaran	%	(Jumlah penanganan bencana kebakaran dan non kebakaran dalam tingkat waktu tanggap : jumlah seluruh kejadian kebakaran dan non kebakaran)x 100	72	Satpol PP
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	skor	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	72	Satpol PP
	Cakupan ketangguhan daerah menghadapi bencana	%	Jumlah Peduduk di kawasan Rawan Bencana yang mendapat informasi Rawan Bencana/ Jumlah Penduduk di kawasan RB x 100 + Jumlah Desa Tangguh Bencana/ Jumlah Deas Rawan Bencana x 100 + Jumlah Penanganan Tanggap Darurat yang dilakukan/ Jumlah Sasaran Dampak Bencana yang dilakukan tanggap Bencana x100 + Jumlah Kejadian Bencana yang direkomendasikan Rehabilitasi dan Rekontruksi/ Jumlah Kejadian Bencana yang harus di lakukan Rehabilitasi dan Rekontruksi x 100/4	67,44	BPBD
	Persentase Penanggulangan Bencana secara cepat dan akurat	%	Jumlah bencana yang tertangani : jumlah bencana x100	100	BPBD
	Persentase gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang tertangani (SPM)	%	Jumlah laporan gangguan trantib yang tertangani : jumlah seluruh laporan gangguan trantib x 100	100	Satpol PP
	Persentase Korban Bencana Alam Yang ditangani (SPM)	%	Jumlah korban bencana yang ditangani / Jumlah Korban Bencana X 100	100	BPBD
	Persentase Jumlah Desa/ Kel yang mendapat Pelayanan Penanggulangan Bencana (SPM)	%	(Jml desa Terkena bencana mendapat penanggulangan bencana/ Jml. desa terkena bencana) x100	100	BPBD
	Persentase waktu tanggap "respon time" (SPM)	%	Jumlah penanganan kebakaran sesuai respon time : jumlah kejadian kebakaran x 100	100	Satpol PP
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	Indeks	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	88,75	BPBD
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	skor	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	80	BPBD
6	Sosial				
	Persentase PMKS yg terpenuhi kebutuhan dasarnya, terlindungi hak- haknya dan mampu berfungsi sosial serta mampu hidup normatif dalam pengasuhan keluarga	%	Jumlah PMKS yg terpenuhi kebutuhan dasarnya, terlindungi hak- haknya dan mampu berfungsi sosial serta mampu hidup normatif dalam pengasuhan keluarga : Jumlah PMKS di kab Batang X 100	74	Dinas Sosial
	Presentase PSKS yang aktif dalam pembangunan Kesos	%	Jumlah PSKS yang aktif dalam pembangunan Kesos : Jumlah PSKS di kab batang X 100	85	Dinas Sosial
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	skor	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	86	Dinas Sosial
	Cakupan pengembangan Potensi sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten (SPM)	%	Jumlah Potensi sumber Kesejahteraan Sosial ditingkatkan kemampuannya : Jumlah PSKS di Daerah Kabupaten X 100	100	Dinas Sosial
	Persentase Warga Negara Migran korban tidak kekerasan yang berhasil dipulangkan	%	jumlah warga negara migran yang berhasil dipulangkan : Jumlah warga migran korban kekerasan x 100	40	Dinas Sosial
	Persentase PMKS yang terpenuhi kebutuhan dasarnya (SPM)	%	Jumlah PMKS yang terpenuhi kebutuhan dasarnya : Jumlah PMKS di Kabupaten Batang x 100	100	Dinas Sosial

No.	Aspek/Fokus/ Bidang Urutan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Stn	Formulasi Perhitungan	Target Kinerja Tahun 2024	Perangkat Daerah
	Persentase capaian layanan pemenuhan SPM sosial	%	Jumlah jenis layanan SPM Urusan sosial yang tersedia : jumlah total jenis layanan SPM Urusan sosial x 100	100	Dinas Sosial
	Persentase Korban Bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya (SPM)	%	jumlah korban bencana alam dan sosial terpenuhi kebutuhan dasarnya : Jumlah korban bencana alam dan sosial x 100	100	Dinas Sosial
	Persentase Taman Makam Pahlawan dalam kondisi baik	%	Presentase Taman Makam Pahlawan dalam kondisi baik : Jumlah Taman Makam Pahlawan x 100	100	Dinas Sosial
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	Indeks	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	84,71	Dinas Sosial
	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar				
1	Ketenagakerjaan				
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	Indeks	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	85	Dinas Ketenagakerjaan
	Tingkat Kesempatan kerja	%	Jumlah penduduk bekerja / jumlah angkatan kerja x 100	97	Dinas Ketenagakerjaan
	Persentase Perusahaan yang menerapkan tatakelola kerja yang layak	%	Perusahaan yang menerapkan tatakelola kerja yang layak : jumlah perusahaan x 100	31,17	Dinas Ketenagakerjaan
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	skor	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	70	Dinas Ketenagakerjaan
	Persentase Kegiatan yang mengacu RTK	%	Jumlah kegiatan keseluruhan yang dilaksanakan yang mengacu ke RTKD / Jumlah kegiatan keseluruhan yang dilaksanakan di Kabupaten / Kota x 100	100	Dinas Ketenagakerjaan
	Rasio penduduk yang bekerja	%	Jumlah Penduduk 15 th ke atas / Angkatan Kerja x 100	72	Dinas Ketenagakerjaan
	Persentase Pencari pekerja yang mendapat pekerjaan	%	Jumlah pencari kerja yang ditempatkan : dengan jumlah pencari kerja terdaftar x 100	36	Dinas Ketenagakerjaan
	Penurunan Jumlah Perselisihan HI	rasio	Jumlah sengketa pengusaha pekerja : jumlah perusahaan x 1000	14,6	Dinas Ketenagakerjaan
2	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak				
	Ratio KDRT	rasio	Jumlah KDRT : Jumlah Rumah Tangga X 100	0,0071	DP3AP2KB
	Persentase Jumlah Tenaga Kerja Dibawah Umur	%	Pekerja anak usia 5-14 tahun : Jumlah pekerja usia 5 tahun ke atas x 100	0	DP3AP2KB
	Persentase cakupan pernikahan anak	%	Jumlah Pernikahan Anak : Jumlah Pernikahan X 100	4,2747	DP3AP2KB
	Persentase ARG pada belanja pelaksanaan program dan kegiatan di APBD	%	Jml ARG pada Anggaran Program Kegiatan APBD : jml seluruh anggaran pada Program Kegiatan x 100	3,2	DP3AP2KB
	Cakupan perempuan korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih didalam unit pelayanan terpadu	%	Jml aduan kekerasan thd perempuan yg tertangani : Jml kekerasan thd perempuan yg dilaporkan x 100	100	DP3AP2KB
	Partisipasi angkatan kerja perempuan	%	Jumlah angkatan kerja perempuan : jumlah penduduk usia kerja perempuan x 100	1,64	DP3AP2KB
	cakupan data pilah gender dan anak	%	jumlah jenis data yang tersedia : jumlah jenis data yang dibutuhkan x 100	100	DP3AP2KB
	cakupan kecamatan layak anak	%	Jml Kec yg sudah layak anak : jml kecamatan x 100	80	DP3AP2KB
	Cakupan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih didalam unit pelayanan terpadu	%	Jml aduan kekerasan thd perempuan yg tertangani : Jml kekerasan thd perempuan yg dilaporkan x 100	100	DP3AP2KB
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	Indeks	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	88,75	DP3AP2KB
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	skor	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	80	DP3AP2KB
3	Pangan				
	Persentase penguatan cadangan pangandaerah	%	jumlah cadangan pangan tahun n dikurangi tahun n-1 : tahun n-1 x 100	0,024	Dinas Pangan dan Pertanian
	Ketersediaan Bahan Pangan Utama (Ton)				
			Produksi Gabah Kering Panen dikurangi Angka susut (benih, pakan, tercecce, susut) dikonversidengan rendemen beras 62,74		Dinas Pangan dan Pertanian

No.	Aspek/Fokus/ Bidang Urutan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Stn	Formulasi Perhitungan	Target Kinerja Tahun 2024	Perangkat Daerah
	a. Beras	Ton		119,615	
	b. Jagung	Ton	Produksi Jagung dikurangi Angka susut atau xkan dengan angka konversi jagung 89	71.156,00	Dinas Pangan dan Pertanian
	Cadangan PanganDaerah (Ton)	Ton	Jumlah cadangan pangan kabupaten : standar cadangan pangan kabupaten x 100	10,6	Dinas Pangan dan Pertanian
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	Indeks	Indeks KepuasanMasyarakat (IKM)	75,3	Dinas Pangan dan Pertanian
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	skor	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	67	Dinas Pangan dan Pertanian
	Persentase kegiatan pengelolaan sumber daya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan	%	Jumlah kegiatan pengelolaan sumber daya ekonomi untuk kedaulatan dan keamndirian pangan : jumlah seluruh kegiatan ketahanan pangan x100	12,5	Dinas Pangan dan Pertanian
	Skor Pola PanganHarapan	%	Hasil kali konsumsi energi dengan bobot dibandingkan dengan Skor Maksimal KelompokPangan	89,5	Dinas Pangan dan Pertanian
	Rasio Desa mandiriPangan	%	Desa yang mendapatkan fasilitas Desa Mandri Pangan : jumlah desa di Kab.Batang x100	16	Dinas Pangan dan Pertanian
	Persentase Pengawasan Keamanan Pangan	%	Jumlah daerah pengawasan keamanan pangan :jumlah daerah aman pangan x 100	100	Dinas Pangan dan Pertanian
4	Pertanahan				
	Tingkat penurunan kasus sengketa pertanahan	%	{ (jumlah sengketa tanah tahun berkenaan - jumlah sengketa tanah tahun lalu) : jumlah sengketa tanah tahun lalu } x 100	85	DPRKP
	Persentase penyelesaian kasus pertanahan	%	(Jumlah kasus yang ditangani : Jumlah kasus yang terdaftar) x 100	100	DPRKP
	Persentase permohonan fasilitasi penyelesaian permasalahan pertanahan yangtertangani	%	jumlah permohonan yang terfasilitasi : jumlah permohonantanah seluruhnya x100	80	DPRKP
5	Lingkungan Hidup				
	Persentase LuasRTH	%	Luas RTH : Luaslahan x 100	60	Dinas Lingkungan Hidup
	Indeks Kualitas Air	Indeks	ci baru = cim-ci (hasil pengukuran)/cim-LiJ	50	Dinas Lingkungan Hidup
	Indeks KualitasUdara	Indeks	100-(50/0.0 x ieu-0.1)	80	Dinas Lingkungan Hidup
	Indeks TutupanLahan	Indeks	Luas tutupan hutan : Luas wilayahadministrasi	68,5	Dinas Lingkungan Hidup
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	skor	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	62	Dinas Lingkungan Hidup
	Tingkat ketersediaan dokumen perencanaan Lingkungan Hidup yang diintegrasikandalam dokumen perencanaan daerah	%	jumlah dokumen yang disusun : jumlah dokumen yang dibutuhkan x100	100	Dinas Lingkungan Hidup
	Persentase persetujuan teknis pengelolaan limbah B3 yang diberikan	%	Jumlah persetujuan yang dikeluarkan : jumlah permohonanx 100	100	Dinas Lingkungan Hidup
	Ketaatan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan terhadapPPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah	%	Jumlah ketaatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH : izin yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerahkabupaten yang ditangani /Total penanggung jawab usaha dan atau kegiatan yang di bina dan diawasi terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten x100	60	Dinas Lingkungan Hidup
	Persentase masyarakat/ komunitas peduli LH yang mendapat edukasi Lingkungan Hidup	%	Jumlah komunitas pduli LH yang di edukasi : Jumlah komunitas LH yang direncanakan edukasix 100	100	Dinas Lingkungan Hidup
	Persentase Dunia Pendidikan yang mendapat penghargaan lingkungan tingkatkabupaten	%	Jumlah Dunia Pendidikan yang memenuhi nilai standar : jumlah sekolah yang mendaftar x 100	90	Dinas Lingkungan Hidup
	Persentase penangananansampah	%	Jumlah sampah yang tertangani : jumlah timbulansampah x 100	70	Dinas Lingkungan Hidup
6	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil				
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	Indeks	Indeks KepuasanMasyarakat (IKM)	91,45	Disdukcapil
	Persentase kepemilikan identitas Pendudukdan Akte Kelahiran		[(Jumlah Kepemilikan KIA : Jumlah Peduduk usia 0-17 th) + (Jumlah Penduduk Ber-KTP el		Disdukcapil

No.	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Stn	Formulasi Perhitungan	Target Kinerja Tahun 2024	Perangkat Daerah
		%	: Jumlah Peduduk usia di atas 17 th) + (jumlah penduduk ber-akta kelahiran usia 0-18 th : jumlah penduduk usia 0-18 th) : 3 x 100	85	
	Persentase menurunnya data ganda dan anomali	%tase	[(Jumlah Data ganda dan anomali tahun lalu - data ganda dan anomali tahun ini) : jumlah data ganda dan anomali tahun lalu] x 100	2,3	Disdukcapil
	Persentase identitaskependudukan (KTP dan KIA) yang telah diterbitkan	%	[(Jumlah penduduk memiliki KTP el : Jumlah penduduk usia 17 th ke atas) + (Jumlah penduduk memiliki KIA : jumlah penduduk dibawah usia 17 th) : 2 x 100	85	Disdukcapil
	Persentase penduduk yang memiliki akta nikah dan akta lahir	%	[(Jumlah kepemilikan akta nikah : jumlah pemohon) + (jumlah akta usia bayi 0-5 th : penduduk usia0-5 th) : 2 x 100	97,4	Disdukcapil
	Persentase penyajian data kependudukan yangvalid	%	(Jumlah data kependudukan yang valid : jumlah seluruh data kependudukan) x 100	95,4	Disdukcapil
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	skor	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	62	Disdukcapil
7	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa				
	Persentase Desa Maju dan Mandiri	%	jumlah desa maju : total jumlah se kab. batang x 100	23	Dispermades
	Indeks KetahananSosial	Indeks	Penilaian IndeksDesa Mandiri Terendah	0,56	Dispermades
	Indeks KetahananEkonomi	Indeks	Penilaian IndeksDesa Mandiri Terendah	0,78	Dispermades
	Indeks KetahananEkologi	Indeks	Penilaian IndeksDesa Mandiri Terendah	0,48	Dispermades
	Persentase sumbangan pendapatanperempuan	%	Jumlah pkk desa binaan : pkk desa sekab. Batang x 100	50,21	Dispermades
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	Indeks	Indeks KepuasanMasyarakat (IKM)	89	Dispermades
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	skor	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	67	Dispermades
	Persentase budaya desa yang dilestarikan	%	jumlah adat dan budaya desa yang dilestarikan : jumlah adat budaya desa x 100	40	Dispermades
	Persentase desa yang tertib administrasi yang sesuai dengan peraturan perundang undangan	desa	jumlah desa yang dibina dan diawasi penyelenggaraan administrasinya : total desa di Kabupaten Batang x100	46,03	Dispermades
	Persentase lembaga kemasyarakatan desa (LKD) yang aktif dalam pemberdayaan desa	%	jumlah LKD yang aktif : jumlah LKD keseluruhan x 100	70	Dispermades
8	Pengendalian Penduduk dan KB				
	Laju PertumbuhanPenduduk	%	$r = \{Pt/P0\} \times (1/t-1) \times 100$ r = laju pertumbuhanpenduduk Pt = Jumlah Penduduk tahun t P0 = Jumlah penduduk tahundersar t = selisih tahun Ptdengan P0	1,13	DP3AP2KB
	TFR (Total FertilityRate / Angka Kelahiran Total)	Index	5 Σ ASFR	3	DP3AP2KB
	Persentase jenis data kependudukan bidang keluarga berencana	%	Jml jenis data kependudukan bid KB : Target jml jenis data kependudukan bid. KB x 100	100	DP3AP2KB
	Peningkatan Cakupan KesertaanBer-KB	%	PUS yang ber-KB :Jum. PUS x 100	73,96	DP3AP2KB
	Cakupan pembangunan ketahananandan kesejahteraan keluarga melalui kelompok tribina (BKB, BKR, dan BKL)	%	Jumlah keluarga yang didampingi kelompok Tribina	78,21	DP3AP2KB
9	Perhubungan				
	Rasio ijin trayek	rasio	jumlah ijin trayek yang dikeluarkan :jumlah penduduk	1,5	Dinas Perhubungan
	Tingkat kelancaran dan keamanan lalu lintas	rasio	$v / c \text{ ratio JalanKabupaten}$ $v : \text{volumekendaraan}$ $c : \text{kapasitas jalan}$	0,5	Dinas Perhubungan
	Persentase terselenggaranya lalu lintas dan angkutan jalan yang lancar, aman, dan selamat	%	Jumlah kegiatan penyelenggaraan LLAJ yang dilaksanakan : jumlah kegiatan penyelenggaraan LLAJ yang ditetapkan x 100	87	Dinas Perhubungan
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	Indeks	Indeks KepuasanMasyarakat (IKM)	88,75	Dinas Perhubungan
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	skor	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	80	Dinas Perhubungan
10	Komunikasi dan Informatika				

No.	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Stn	Formulasi Perhitungan	Target Kinerja Tahun 2024	Perangkat Daerah
	Indeks SPBE	Indeks	Domain SPBE	3,5	Diskominfo
	Indeks Smart City	Indeks	Dimensi Smart City	3,47	Diskominfo
	Persentase informasi dan komunikasi publik yang bisa diakses lewat media komunikasi	%	Jumlah informasi yang diakses publik : dengan jumlah penyebaran informasi x 100	100	Diskominfo
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	skor	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	BB	Diskominfo
	Persentase penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/ kota	%	Jumlah informasi yang diakses publik : jumlah penyebaran informasi x 100	69	Diskominfo
	Persentase Jumlah Layanan yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi.	%	Jumlah layanan yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi : jumlah layanan x 100	70	Diskominfo
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	Indeks	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	88,75	Diskominfo
11	Koperasi dan UKM				
	Persentase koperasi aktif	%	(jumlah koperasi aktif : jumlah koperasi keseluruhan) x 100	68	Disperindagkop dan UKM
	Persentase peserta pelatihan dengan predikat baik	%	(jumlah peserta pelatihan/diklat yang lulus : jumlah peserta pelatihan/diklat) x 100	90	Disperindagkop dan UKM
	Persentase peserta diklat dengan predikat baik	%	(jumlah peserta pelatihan/diklat yang lulus : jumlah peserta pelatihan/diklat) x 100	90	Disperindagkop dan UKM
	Persentase Pertambahan Wira Usaha Baru	%	(jumlah UMKM Baru tahun n - jumlah UMKM tahun n-1) : jumlah UMKM tahun n-1 x 100	10	Disperindagkop dan UKM
	Persentase produk UMKM yang terstandarisasi	%	Jumlah UMKM yang terstandarisasi Tahun N - Jumlah UMKM yang terstandarisasi Tahun N-1 : Jumlah UMKM yang terstandarisasi Tahun N-1 X 100	15	Disperindagkop dan UKM
12	Penanaman Modal				
	Persentase peningkatan investasi di kabupaten / kota	%	(Investasi tahun lalu : investasi tahun ini) x 100	75	DPMPPTSP
	Jumlah Nilai Realisasi Investasi PMA/PMDN	Trilyun	Jumlah perusahaan yang berinvestasi di batang	2	DPMPPTSP
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	Indeks	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	88,5	DPMPPTSP
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	skor	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	70	DPMPPTSP
	Persentase indikator kinerja sasaran strategis Perangkat Daerah yang mencapai target	%	(jumlah indikator kinerja yang mencapai target : jumlah indikator kinerja seluruhnya) x 100	100	DPMPPTSP
	Persentase peningkatan jumlah investor	%	Jumlah investor tahun n dikurangi Jumlah investor tahun (n-1) : jumlah investor tahun n x 100	40	DPMPPTSP
	Persentase promosi di kabupaten Batang	%	Jumlah promosi yang direncanakan : jumlah promosi yang dilaksanakan x 100	100	DPMPPTSP
	Persentase ijin yang diterbitkan	%	Jumlah pemohon ijin usaha : jumlah ijin yang diterbitkan x 100	100	DPMPPTSP
	Persentase perusahaan yang mematuhi ketentuan penanaman modal	%	Jumlah Perusahaan yang menyampaikan LKPM : jumlah perusahaan	7,5	DPMPPTSP
	Persentase data dan informasi penanaman modal yang tersedia	%	Jumlah pemberian pelayanan data : jumlah pemohon data x 100	45	DPMPPTSP
13	Kepemudaan dan Olahraga				
	Persentase Organisasi Kepemudaan yang dibina	%	jumlah organisasi kepemudaan yang dibina : jumlah organisasi kepemudaan yang terdaftar x 100	32	Disparpora
	capaian medali kejuaraan	medali	Jumlah total medali yang didapat selama 1 Tahun	40	Disparpora
	Penghargaan yang diterima	%	Jumlah penghargaan yang diterima : jumlah kegiatan yang diikuti X 100	10	Disparpora
14	Statistik				
	Persentase pemanfaatan data statistik sektoral dalam penyusunan perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah.	%	Jumlah data statistik sektoral yang terintegrasi dalam sistem informasi : dengan jumlah data statistik sektoral yang terkumpul x 100	100	Diskominfo
			Jumlah data statistik sektoral yang terintegrasi dalam sistem informasi / Jumlah		Diskominfo

No.	Aspek/Fokus/ Bidang Urutan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Stn	Formulasi Perhitungan	Target Kinerja Tahun 2024	Perangkat Daerah
	Persentase ketersediaan data statistik sektoral	%	data statistik sektoral yang terkumpul x 100	100	
15	Persandian				
	Indeks KeamananInformasi	%	Jumlah sistem elektronik yang berhasil dilakukan pengamanan : dengan jumlah seluruh sistem elektronik yang tersedia setiap tahun x 100	100	Diskominfo
	Persentase capaian sistem elektronik yang dilakukan pengamanan setiahtahunnya	%	Jumlah Sistem Elektronik yang berhasil dilakukan pengamanan : dengan jumlah seluruh sistem elektronik yang tersedia setiap tahun x 100	100	Diskominfo
16	Kebudayaan				
	Persentase Terlestarikannya Cagar Budaya	%	Jumlah cagar budaya yang dilestarikan : jumlah keseluruhancagar budaya x 100	100	Disdikbud
	Persentase pengunjung festival kesenian tradisional yang diselenggarakan Pemerintah Daerah	%	Jumlah pengunjungfestival kesenian tradisional yang diselenggarakan Pemerintah Daerah : Jumlah target pengunjung kesenian tradisionalyang diselenggarakan x 100	70	Disdikbud
	Persentase festival seni yg dilaksanakan	%	jumlah festival seni yang diselenggarakan pada tahun berjalan (n) : jumlah festival seni yang ditargetkan x 100	100	Disdikbud
	Persentase Komunitas/sanggar kesenian yang difasilitasi	%	jumlah komunitas / sanggar kesenian yang difasilitasi : jumlah komunitas / sanggar seni yang terdaftar x 100	70	Disdikbud
17	Perpustakaan				
	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	Indeks	$TGM = (0,3 \times (FM + DM + JB)) + 0,05 \times (FAI + DAI)$	66,33	Disperpuska
	indeks pembangunan literasi masyarakat	Indeks	$IPLM = \sum UPLM / AM$	2,8	Disperpuska
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	skor	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	60,8	Disperpuska
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	Indeks	Indeks KepuasanMasyarakat (IKM)	87,66	Disperpuska
	Persentase peningkatan pengunjung perpustakaan per tahun	%	(Jumlah peningkatan pengunjung : Jumlah pengunjungtahun sebelumnya) x 100	0,16	Disperpuska
18	Kearsipan				
	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional	Indeks	$T = (a + i + s + j) / 4$ T = tingkat ketersediaan arsip a = tase arsip aktif yang telah dibuatkan daftar arsip i = tase arsip inaktif yang telah dibuatkan daftar arsip s = tase arsip statis yang telah dibuatkan sarana bantu temu balik j = tase arsip yang dimasukkan dalam SIKN melalui JIKN	75,4	Disperpuska
	Tingkat keberadaan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepetingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	Indeks	$T = (m + b + g + a + c + i) / 6$ T = tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawab a n m = tingkat kesesuaian kegiatan pemusnahan arsip dengan NSPK b = tingkat kesesuaian kegiatan perlindungan dan penyelamatan arsip dari bencana dengan NSPK g = tingkat kesesuaian kegiatan penyelamatan arsip Perangkat Daerah yang digabung dan atau dibubarkan dan pemekaran daerah kabupaten/kota dengan NSPK a = tingkat kesesuaian kegiatan autentikasi arsip statis dan arsip hasil alih media dengan NSPK c = tingkat kesesuaian kegiatan pencarian arsip statis dengan NSPK i = tingkat kesesuaian kegiatan penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup dengan NSPK	22,4	Disperpuska
	Urusan Pilihan				
1	Kelautan dan Perikanan				

No.	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Stn	Formulasi Perhitungan	Target Kinerja Tahun 2024	Perangkat Daerah
	Indeks tingkat kepuasan publik terhadap pelayanan yang dilaksanakan	Indeks	nilai rata- rata Indeks semua pelayanan yangdilaksanakan	84,5	Dislutkannak
	Kontribusi sektorPerikanan dan Peternakan terhadap PDRB ADHK	%	data dari bps (dirilissetiap bulan february)	21,9	Dislutkannak
	Persentase Capaian Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya)	%	Capaian produksi perikanan tangkap ditambah perikanan budidaya pada tahun n : target produksi perikanan tangkap ditambah target produksi perikanan budidayax 100	93,3	Dislutkannak
	Persentase Capaian Tingkat Konsumsi Makan Ikan	%	Capaian tingkat konsumsi makan ikan pada tahun n : target tingkat konsumsi makan ikan x 100	96	Dislutkannak
	Capaian Bina Kelompok Masyarakat Pengawas	%	(Realisasi Jumlah Pokmaswas yang Diberdayakan : Target) x 100	100	Dislutkannak
	Persentase Capaian Tingkat konsumsi makan ikan	%	(Realisasi Capaian Tingkat Konsumsi Makan Ikan : TargetTingkat Konsumsi Makan Ikan) x 100	96	Dislutkannak
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	skor	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	80	Dislutkannak
2	Pariwisata				
	Persentase Peningkatan kunjungan Wisatawan	%	(Jumlah wisatawan tahun n – Jumlah wisatawan tahun n- 1 : Jumlah wisatawan tahun n-1) x 100	21	Disparpora
	Persentase peningkatan pendapatan sektorpariwisata	%	(Jumlah pendapatan sektor pariwisata tahun n dikurangi Jumlah pendapatan sektor pariwisata tahun n- 1 : Jumlah pempadapatan sektor pariwisata tahun n- 1 x 100	10	Disparpora
	Persentase inovasiekonomi kreatif	%	(jumlah inovasi produk ekonomi kreatif : jumlah produk ekonomi kreatif/kajian yang dilaksanakan) x 100	10	Disparpora
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	skor	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	71	Disparpora
	Persentase jumlah ekonomi kreatif yang memiliki HAKI	%	jumlah produk ekonomi kreatif yang memiliki HAKI :jumlah produk ekonomi kreatif yang terdaftar X 100	20	Disparpora
	Persentase SDM Pariwisata dan ekonomi kreatif yang bersertifikat	%	Jumlah SDM Pariwisata dan ekonomi kreatif yang bersertifikat : Jumlah SDM Pariwisata dan ekonomi kreatif X 100	35	Disparpora
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	Indeks	Indeks KepuasanMasyarakat (IKM)	88,75	Disparpora
3	Pertanian				
	Kontribusi sektor pertanian terhadapPDRB ADHB	%	jumlah Kontribusi PDRB dari sektor pertanian : JumlahPDRB x 100	24,76	Dinas Pangan dan Pertanian
	Persentase Peningkatan Produksi Pertanian	%	Jumlah produksi pertanian (Pangan,Horti da Perkebunan) per hektar per tahun : luas panen x 100	0,0103	Dinas Pangan dan Pertanian
	Persentase Produksi Hasil Ternak (Daging, Telur dan Susu)	%	Capaian produksi tahun n : target produksi tahun n x100	87	Dislutkannak
	Persentase Hewan / Ternak yang Terobati	%	Capaian hewan ternak terobati pada tahun berjalan : target capaian hewan ternak terobati x 100	100	Dislutkannak
	Capaian Jumlah Hewan yang Terobati	%	(Realisasi Jumlah Hewan yang Terobati di Puskesmas : Target Hewan yang Terobati di Puskesmas) x 100	100	Dislutkannak
	Persentase Pengendalian dan penanggulangan Bencana Pertanian	%	(jumlah daerah pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian : jumlah seluruh daerah yang terkena bencana pertanian)*100	100	Dislutkannak
	Persentase Jumlah Asuransi Usaha Ternak Sapi/Kerbau dan Calon/Penerima (Orang/Perusahaan) Pendampingan Perizinan Usaha Peternakan	%	(Realisasi Jumlah Asuransi Usaha Ternak Sapi/Kerbau dan Calon/Penerima (Orang/Perusahaan) Pendampingan Perizinan Usaha Peternakan : Target)x 100	100	Dislutkannak
	Persentase kenaikan kualitas dan kapasitas SDM Penyuluh, pelaku utama dan pelaku usaha Bidang Pertanian	%	jumlah Penyuluh, pelaku utama dan pelaku usaha Bidang Pertanian yang mengikuti pelatihan : jumlah Penyuluh, pelaku utama dan pelaku usaha di Kabupatenx 100	100	Dinas Pangan dan Pertanian
					Dinas Pangan dan

No.	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Stn	Formulasi Perhitungan	Target Kinerja Tahun 2024	Perangkat Daerah
	Persentase validitasdata Pertanian	%	jumlah kesesuaian data yang tervalidasi : jumlahkesesuaian data yang ada x 100	100	Pertanian
	Persentase kenaikan pelaksanaan Penyelenggaraan Penyuluhan	%	jumlah data laporan yang tersedia : jumlah BPP x 100	100	Dinas Pangan dan Pertanian
	Produktivitas pertanian pangan per hektar per tahun	%	Jumlah produksi pertanian pangan per hektar per tahun : luas panenX 100	0,0103	Dinas Pangan dan Pertanian
	Persentase pelaksanaan kegiatan pembangunan prasarana pertanian	%	realisasi pelaksanaan kegiatan pembangunan prasarana pertanian : rencana kegiatan pembangunan prasarana pertanianX 100	100	Dinas Pangan dan Pertanian
	Persentase Pengendalian dan penanggulangan Bencana Pertanian	%	(jumlah daerah pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian : jumlah seluruh daerah yang terkena bencana pertanian)*100	100	Dinas Pangan dan Pertanian
4	Perdagangan				
	Kontribusi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Sektor Perdagangan	%	Data BPS	12,75	Disperindagkop dan UKM
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	skor	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	67	Disperindagkop dan UKM
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	Indeks	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	81	Disperindagkop dan UKM
	Persentase Verifikasi Teknis	%	Jumlah verifikasi teknis : Jumlah yang pengajuan x100	100	Disperindagkop dan UKM
	Persentase pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan	%	jumlah pasar rakyat dan Shelter PKL yang direvitalisasi/renovasi : jumlah pasar rakyat dan Shelter PKL keseluruhan x 100	36,36	Disperindagkop dan UKM
	Persentase barang kebutuhan pokok yang stabilitas harganya terjaga	%	barang pokok yang stabil harganya : seluruh barang kebutuhan pokok x100	75	Disperindagkop dan UKM
	nilai ekspor perdagangan	USD	nilai ekspor perdagangan -nilai impor pada tahun nkabupaten kota	59.034.726	Disperindagkop dan UKM
	Persentase alat2 ukur, timbang, takar dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	%	Jumlah UTTP bertera /tera ulang : Potensi UTTP x 100	75	Disperindagkop dan UKM
	Presentase Pelaksanaan Pameran dagang dalam negeri di Kabupaten Batang	%	Jumlah Pelaksanaan pameran : jumlah pameran yang direncanakan x 100	100	Disperindagkop dan UKM
5	Perindustrian				
	Persentase peningkatan jumlah pelaku IKM	%	jumlah pelaku IKM tahun n- jumlah pelaku IKM tahun n-1) : jumlah pelaku IKM tahun n-1 x 100	0,0078	Disperindagkop dan UKM
	Persentase peningkatan jumlah perijinan berusaha sektor industri	%	jumlah izin usaha tahun n- jumlah izin usaha tahun n-1) : jumlah izin usaha tahun n-1 x100	84	Disperindagkop dan UKM
	Persentase jumlah Industri dalam SIINas	%	jumlah Industri dalam SIINas tahun n- jumlah Industri dalam SIINas tahun n-1) : jumlah Industri dalam SIINas tahun n-1 x 100	84	Disperindagkop dan UKM
	Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan				
1	Sekretariat Daerah				
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	Indeks	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	85,45	Sekretariat Daerah
	Persentase OPD dengan Nilai SAKIPB	%	Jumlah PD yang mendapat nilai B : jumlah PD yang adax 100	90	Sekretariat Daerah
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	Indeks	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	85	Sekretariat Daerah
	Nilai EKPPD	Skor	Nilai hasil evaluasi LPPD nasional menurut Kemendagri	2,98	Sekretariat Daerah
	Persentase perangkat daerah yang menyusun LPPD tepat waktu	%	Jumlah tersusunnya LPPD tepat waktu : jumlah keseluruhan LPPD perangkat daerah x 100	100	Sekretariat Daerah
	Persentase Penyelenggaraan Administrasi Tata Pemerintahan yang difasilitasi	%	Jumlah penyelenggaraan administrasi tata pemerintahan yang terfasilitasi : jumlah keseluruhan administrasi tata pemerintahan x 100	100	Sekretariat Daerah
					Sekretariat Daerah

No.	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Stn	Formulasi Perhitungan	Target Kinerja Tahun 2024	Perangkat Daerah
	Presentase kegiatan keagamaan dan kemasyarakatan yang difasilitasi	%	jml kegiatan yang terlaksana : jml kegiatan yg direncanakan x 100	100	
	Persentase Penyusunan Produk Hukum Daerah yang berhasil difasilitasi	%	(realisasi persentase penyusunan produk hukum daerah yang berhasil difasilitasi + persentase perkara hukum yang terselesaikan + tase penyediaan informasi produk) : (persentase target penyusunan produk hukum daerah yang berhasil difasilitasi + tase perkara hukum yang terselesaikan + persentase penyediaan informasi produk hukum) x 100	95	Sekretariat Daerah
	Persentase Bagi Hasil BUMD terhadap APBD (Penyertaan Modal)	%	(Jumlah deviden : Jumlah Penyertaan Modal) x 100	15	Sekretariat Daerah
	Persentase kebijakan perekonomian dan SDA yang ditindaklanjuti	%	(Jumlah kebijakan yang ditindaklanjuti : jumlah kebijakan yang dikeluarkan baik pusat atau daerah)* 100	100	Sekretariat Daerah
	Persentase Pelaksanaan APBD pada SKPD yang sesuai target	%	Jumlah paket pekerjaan yang dilaksanakan : Jumlah seluruh paket pekerjaan yang direncanakan x 100	96	Sekretariat Daerah
	Persentase lelang melalui e-procurement	%	Jumlah Paket yang dilelang : Jumlah Total Rencana Paket Lelang x 100	100	Sekretariat Daerah
2	Sekretariat DPRD				
	Indeks Kepuasan Anggota DPRD atas Pelayanan Sekretariat DPRD	Indeks	Hasil Survey/Kuesioner Kepuasan Anggota DPRD atas Pelayanan Sekretariat DPRD	78	Sekretariat DPRD
	Indeks Kepuasan Anggota DPRD atas Pelayanan Sekretariat DPRD	Indeks	Hasil Survey/Kuesioner Kepuasan Anggota DPRD atas Pelayanan Sekretariat DPRD	78	Sekretariat DPRD
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	skor	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	62,5	Sekretariat DPRD
	Persentase Peraturan Daerah non APBD yang ditetapkan	%	Capaian Peraturan Daerah non APBD yang terbentuk : target Peraturan Daerah non APBD yang ditetapkan per tahun x 100 (ket: target Perda non APBD yang ditetapkan per tahun sebanyak 5 Perda)	100	Sekretariat DPRD
	Persentase kUA/PPA dan Perda APBD yang ditetapkan	%	Capaian Peraturan Daerah APBD yang terbentuk : target Peraturan Daerah APBD yang ditetapkan per tahun x 100 (ket: target Perda APBD yang ditetapkan per tahun sebanyak 3 Perda, dan 2 PerbupKUA/PPA)	100	Sekretariat DPRD
	Persentase pengawasan penyelenggaraan pemerintahan yang terlaksana dan Kode Etik DPRD	%	Capaian kegiatan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan yang terlaksana : target kegiatan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan x 100 (target sesuai jumlah kegiatan pengawasan yang dijadwalkan per tahun)	100	Sekretariat DPRD
	Persentase peningkatan kapasitas Anggota DPRD	%	Rata-rata capaian kinerja fasilitasi kegiatan fasilitasi peningkatan kapasitas DPRD	100	Sekretariat DPRD
	Persentase penyerapan aspirasi masyarakat	%	Jumlah Anggota DPRD yang melakukan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat oleh DPRD per tahun : jumlah seluruh anggota DPRD x 100	100	Sekretariat DPRD
	Persentase fasilitasi tugas Pimpinan dan Alat Kelengkapan DPRD	%	Jumlah kegiatan Alat Kelengkapan Dewan yang difasilitasi : jumlah kegiatan Alat Kelengkapan Dewan yang dijadwalkan x 100	100	Sekretariat DPRD
	Persentase fasilitasi layanan administrasi DPRD	%	Jumlah kegiatan administrasi Dewan yang difasilitasi : jumlah kegiatan administrasi Dewan yang dijadwalkan x 100	100	Sekretariat DPRD
	Persentase fasilitasi layanan keuangan dan kesejahteraan DPRD	%	Jumlah anggota DPRD yang mendapat layanan keuangan dan kesejahteraan DPRD : jumlah Anggota DPRD x 100	100	Sekretariat DPRD
	Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan				
1	Perencanaan				
	Indeks Perencanaan	Indeks	60 Capaian sasaran pemda + 20 sasaran perangkat daerah + 20 capaian program daerah	78	Bapelitbang

No.	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Stn	Formulasi Perhitungan	Target Kinerja Tahun 2024	Perangkat Daerah
	Persentase sasaran pembangunan daerah yang mencapai target	%	(Jumlah sasaran pembangunan daerah yang mencapai target : total sasaran pembangunan daerah) x 100	90,5	Bapelitbang
	Persentase kesesuaian perencanaan dan penganggaran	%	Jumlah Program dalam RKPD : Jumlah Program dalam APBD X 100	100	Bapelitbang
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	skor	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	62.50.00	Bapelitbang
	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan tepat waktu	%	jumlah dokumen perencanaan yang tersedia tepat waktu : jumlah dokumen yang dihasilkan x 100	100	Bapelitbang
	Persentase ketersediaan dokumen evaluasi dan pelaporan	%	jumlah dokumen evaluasi dan pelaporan yang dievaluasi : jumlah dokumen evaluasi dan pelaporan yang dihasilkan x 100	100	Bapelitbang
	Persentase ketersediaan data dan informasi sebagai bahan analisis perencanaan pembangunan daerah	%	jumlah elemen data/informasi yang tersedia : jumlah elemen data/informasi yang dibutuhkan sebagai bahan analisis x100	100	Bapelitbang
	Persentase indikator program prioritas pembangunan bidang PSDA yang mencapai target	%	(jumlah indikator program prioritas PD lingkup koord bid. PSDA yang mencapai target : jumlah indikator program prioritas PD lingkup koord bid. PSDA) x 100	90,5	Bapelitbang
	Persentase indikator program prioritas pembangunan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia yang mencapai target	%	(jumlah indikator program prioritas PD lingkup koord bid. PPM yang mencapai target : jumlah indikator program prioritas PD lingkup koord bid. PPM) x 100	90,5	Bapelitbang
	Persentase indikator program prioritas pembangunan bidang IPW yang mencapai target	%	(jumlah indikator program prioritas PD lingkup koord bid. IPW yang mencapai target : jumlah indikator program prioritas PD lingkup koord bid. IPW) x 100	90,5	Bapelitbang
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	Indeks	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	87,7	Bapelitbang
2	Keuangan				
	Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah	status	OPINI	WTP	BPKPAD
	Persentase Kepatuhan OPD dalam Penyusunan Laporan Keuangan	%	(Jumlah OPD yang menyusun laporan keuangan sesuai SAP / jumlah total OPD) x 100	100	BPKPAD
	Persentase peningkatan pendapatan daerah	%	[(Realisasi Pendapatan Daerah tahun n)-(Realisasi Pendapatan Daerah Tahun n-1)] : (Realisasi Pendapatan Daerah Tahun n-1) x 100	00,05	BPKPAD
	Persentase Peningkatan PAD	%	[(Realisasi PAD tahun n)-(Realisasi PAD Tahun n- 1)]/(Realisasi PAD Tahun n-1) x 100	2,03	BPKPAD
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	skor	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	64	BPKPAD
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	Indeks	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	88,75	BPKPAD
	Penyampaian Raperda APBD tepat waktu	status	Tepat waktu/tidak tepat waktu	Tepat waktu	BPKPAD
	Persentase tersusunnya dataaset Pemda menurut lokasi, legalitas kepemilikan, pemanfaatan dan kondisinya	%	Dokumen KIB per SKPD se Kabupaten Batang	100	BPKPAD
	Persentase Peningkatan Penerimaan PAD	%	[(Realisasi tahun n) - (Realisasi tahun n- 1)]/Realisasi tahun n- 1*100	2,03	BPKPAD
	Penyampaian Raperda Pertanggungjawaban tepat waktu	status	Tepat waktu/tidak tepat waktu	Tepat waktu	BPKPAD
	Persentase Realisasi belanja terhadap anggaran belanja	%	realisasi belanja : anggaran belanja x100	90	BPKPAD
3	Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan				
	Nilai Sistem Merit	Skor	(Jumlah Skor x Bobot dalam setiap aspek)	200	BKD
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	skor	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	69	BKD
	Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Kepegawaian	Skor	(Total Nilai Persepsi Responden Per Parameter : Total Parameter Yang Terisi) x (1/jumlah parameter) x Nilai Dasar 25	86	BKD
	Persentase ASN dengan nilai		(Jumlah ASN Kab Batang yang memiliki Kinerja x		BKD

No.	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Stn	Formulasi Perhitungan	Target Kinerja Tahun 2024	Perangkat Daerah
	kinerjakriteria "baik"	%	: Jumlah ASN Kab.Batang) x 100	100	
	Persentase ASN yang meningkat kemampuannya sesuai bidang tugas	%	(Jumlah realisasi ASN yg dilatih : Jumlah PendaftarPelatihan) x 100	70	BKD
	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian yang selesai tepat waktu	%	(Jumlah jenis layanan administrasi kepegawaian yang selesai tepat waktu :Jumlah semua layanan administrasi kepegawaian yang ada) x 100	100	BKD
	Persentase indikator program prioritas sub koordinator diklat yang mencapai target	%	(jumlah indikator program prioritas PD lingkup sub koordinator diklat yang mencapai target : jumlah indikator program prioritas PD lingkupsub koordinator diklat)x100	100	BKD
4	Penelitian dan Pengembangan				
	Indeks Inovasi Daerah	Indeks	ISP+rata-rata ISI	60.10.00	Bapelitbang
	Persentase pemanfaatan hasil kelitbang	%	(Jumlah pemanfaatan hasil kelitbang : Jumlah total hasilkelitbang) x 100	100	Bapelitbang
	Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah	%	(Jumlah perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah : jumlah total perangkat daerah) x 100	100	Bapelitbang
	Persentase rekomendasi hasil kegiatan penelitian dan pengembangan yang ditindaklanjuti	%	(Jumlah rekomendasi utama kegiatan kelitbang yg mjd bahan masukan penyusunan renja : Kegiatan kelitbang yang dilaksanakan) x100	55	Bapelitbang
	Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan				
1	Pengawasan				
	Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan	%	Jumlah laporan hasil pengawasan yang sudah ditindaklanjuti : jumlah laporan hasil pengawasan x100	85	Inspektorat Daerah
	Persentase pencapaian peningkatan akuntabilitas kinerja pemerintahdaerah	%	pencapaian nilai kondisi tahun berjalan dibandingkan dengan kondisi tahun sebelumnya x100	85	Inspektorat Daerah
	Persentase penanganan pengaduan masyarakat	%	jumlah laporan pengaduan masyarakat yg terselesaikan : jumlah laporan pengaduan masyarakat tahunberjalan x 100	85	Inspektorat Daerah
	Persentase Jumlah Pemeriksaan Yang Dilakukan	%	Jumlah LHP yang diterbitkan dibandingkan jumlah obrik x 100	100	Inspektorat Daerah
	Level SPIP	level	kondisi tahun berjalan dibandingkan dengan kondisi tahun sebelumnya dalam satu tahunanggaran	3	Inspektorat Daerah
	Persentase kapabilitas APIP	%	kondisi tahun berjalan dibandingkan dengan kondisi tahun sebelumnya dalam satu tahunanggaran	70	Inspektorat Daerah
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	Indeks	Indeks KepuasanMasyarakat (IKM)	88,75	Inspektorat Daerah
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	skor	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	80	Inspektorat Daerah
	Unsur Kewilayahan				
1	Kecamatan Batang				
	Skor Evaluasi Unit Pelayanan Publik	Indeks	Nilai kepuasan masyarakat terhadap PelayananPublik	2,80 (C)	Kecamatan Batang
	Persentase StatusDesa Maju dan Desa Mandiri di Kecamatan	%	(Jumlah Desa Maju dan Desa Mandiri : Jumlah Desa) x 100	50	Kecamatan Batang
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	Indeks	Indeks KepuasanMasyarakat (IKM)	90	Kecamatan Batang
	Persentase Desa Berkembang menjadi Desa Majudan Mandiri tiap tahun	%	(Jumlah Desa Maju dan Desa Mandiri : Jumlah Desa) x 100	50	Kecamatan Batang
	Presentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan	%	(Gangguan Trantibum yang terselesaikan : Gangguan Trantibum) x 100	100	Kecamatan Batang
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	skor	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	60	Kecamatan Batang
	Persentase usulan perencanaan pembangunan yang masuk dalam prioritas atau perankingan	%	(Usulan yang masuk perangkingan : Jumlah Usulan Perencanaan) x 100	75	Kecamatan Batang
	Persentase Lembaga Kemasyarakatan di Desa dan Kelurahanyang Aktif	%	(Jumlah LKD Aktif : Jumlah LKD) x 100 LKD terdiri atas LPM, PKK, Karang Taruna, Posyandu, RT, RW	90	Kecamatan Batang
	Persentase gangguan trantibum		(Gangguan Trantibum yang terselesaikan : Gangguan Trantibum) x 100		Kecamatan Batang

No.	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Stn	Formulasi Perhitungan	Target Kinerja Tahun 2024	Perangkat Daerah
	yang dapat diselesaikan	%		100	
	Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan dengan baik	%	(Jumlah acara yang dilaksanakan dalam rangka hari besar nasional, bintek wasbang, dan rakor forkompimcam dengan baik : jumlah acara) x 100	100	Kecamatan Batang
	Persentase desa yang melaksanakan administrasi serta pengelolaan keuangan desa yang tertib dan baik	%	(Jumlah desa dengan pengelolaan keuangan baik : Jumlah desa) x100	85	Kecamatan Batang
2	Kecamatan Banyuputih				
	Skor Evaluasi Unit Pelayanan Publik	Indeks	Nilai kepuasan masyarakat terhadap PelayananPublik	2,80 (C)	Kecamatan Banyuputih
	Presentase StatusDesa Maju dan Desa Mandiri di Kecamatan	%	(Jumlah Desa Maju dan Desa Mandiri : Jumlah Desa) x 100	60	Kecamatan Banyuputih
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	Indeks	Indeks KepuasanMasyarakat (IKM)	88	Kecamatan Banyuputih
	Jumlah Desa dengan Status majudan Mandiri	Desa	Jumlah Desa dengan Status maju dan Mandiri	5	Kecamatan Banyuputih
	Presentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan	%	(Gangguan Trantibum yang terselesaikan : Gangguan Trantibum) x 100	100	Kecamatan Banyuputih
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	skor	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	60	Kecamatan Banyuputih
	Persentase pelayanan PATEN yang sesuai SOP	%	(Pelayanan PATEN yang sesuai SOP : Jumlah Pelayanan PATEN) x 100	75	Kecamatan Banyuputih
	Persentase Lembaga Kemasyarakatan di Desa yang Aktif	%	(Jumlah LKD Aktif : Jumlah LKD) x 100 LKD terdiri atas LPM, PKK, Karang Taruna, Posyandu, RT, RW	90	Kecamatan Banyuputih
	Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan	%	(Gangguan Trantibum yang terselesaikan : Gangguan Trantibum) x 100	100	Kecamatan Banyuputih
	Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan dengan baik	%	(Jumlah acara yang dilaksanakan dalam rangka hari besar nasional, bintek wasbang, dan rakor forkompimcam dengan baik : jumlah acara) x 100	100	Kecamatan Banyuputih
	Persentase desa yang melaksanakan administrasi serta pengelolaan keuangan desa yang tertib dan baik	%	(Jumlah desa dengan pengelolaan keuangan baik : Jumlah desa) x100	85	Kecamatan Banyuputih
3	Kecamatan Bandar				
	Skor Evaluasi Unit Pelayanan Publik	Indeks	Nilai kepuasan masyarakat terhadap PelayananPublik	2,80 (C)	Kecamatan Bandar
	Presentase StatusDesa Maju dan Desa Mandiri di Kecamatan	%	(Jumlah Desa Maju dan Desa Mandiri : Jumlah Desa) x 100	41,18	Kecamatan Bandar
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	Indeks	Indeks KepuasanMasyarakat (IKM)	82,1	Kecamatan Bandar
	Jumlah Desa Berkembang menjadi Desa Majudan Mandiri tiap tahun	desa	Jumlah desa dengan status maju dan mandiri	7	Kecamatan Bandar
	Presentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan	%	(Gangguan Trantibum yang terselesaikan : Gangguan Trantibum) x 100	100	Kecamatan Bandar
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	skor	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	60	Kecamatan Bandar
	Persentase pelayanan PATEN yang sesuai SOP	%	(Pelayanan PATEN yang sesuai SOP : Jumlah Pelayanan PATEN) x 100	75	Kecamatan Bandar
	Persentase Lembaga Kemasyarakatan di Desa yang Aktif	%	(Jumlah LKD Aktif : Jumlah LKD) x 100 LKD terdiri atas LPM, PKK, Karang Taruna, Posyandu, RT, RW	90	Kecamatan Bandar
	Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan	%	(Gangguan Trantibum yang terselesaikan : Gangguan Trantibum) x 100	100	Kecamatan Bandar
	Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan dengan baik	%	(Jumlah acara yang dilaksanakan dalam rangka hari besar nasional, bintek wasbang, dan rakor forkompimcam dengan baik : jumlah acara) x 100	100	Kecamatan Bandar
	Persentase desa yang melaksanakan administrasi serta pengelolaan keuangan desa yang tertib dan baik	%	(Jumlah desa dengan pengelolaan keuangan baik : Jumlah desa) x100	85	Kecamatan Bandar
4	Kecamatan Bawang				
			Nilai kepuasan masyarakat terhadap		Kecamatan Bawang

No.	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Stn	Formulasi Perhitungan	Target Kinerja Tahun 2024	Perangkat Daerah
	Skor Evaluasi Unit Pelayanan Publik	Indeks	PelayananPublik	2,80 (C)	
	Presentase StatusDesa Maju dan Desa Mandiri di Kecamatan	%	(jumlah Desa yangmencapai target : jumlah desa seluruhnya) x 100	70	Kecamatan Bawang
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	Indeks	Indeks KepuasanMasyarakat (IKM)	87	Kecamatan Bawang
	Persentase JumlahDesa Berkembang menjadi Desa Majudan Mandiri tiap tahun	%	(Jumlah Desa Maju dan Desa Mandiri : Jumlah Desa) x 100	70	Kecamatan Bawang
	Presentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan	%	(Gangguan Trantibum yang terselesaikan : Gangguan Trantibum) x 100	100	Kecamatan Bawang
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	skor	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	66	Kecamatan Bawang
	Persentase pelayanan PATENyang sesuai SOP	%	(Pelayanan PATEN yang sesuai SOP : Jumlah Pelayanan PATEN) x 100	75	Kecamatan Bawang
	Persentase Lembaga Kemasyarakatan di Desa yang Aktif	%	(Jumlah LKD Aktif : Jumlah LKD) x 100 LKD terdiri atas LPM, PKK, Karang Taruna, Posyandu, RT, RW	90	Kecamatan Bawang
	Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan	%	(Gangguan Trantibum yang terselesaikan : Gangguan Trantibum) x 100	100	Kecamatan Bawang
	Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan dengan baik	%	(Jumlah acara yang dilaksanakan dalam rangka hari besar nasional, bintek wasbang, dan rakor forkompimcam dengan baik : jumlah acara) x 100	100	Kecamatan Bawang
	Persentase desa yang melaksanakan administrasi serta pengelolaan keuangan desa yang tertib dan baik	%	(Jumlah desa dengan pengelolaan keuangan baik : Jumlah desa) x100	85	Kecamatan Bawang
5	Kecamatan Blado				
	Skor Evaluasi Unit Pelayanan Publik	Indeks	Nilai kepuasan masyarakat terhadap PelayananPublik	2,80 (C)	Kecamatan Blado
	Presentase StatusDesa Maju dan Desa Mandiri di Kecamatan	%	(Jumlah Desa Maju dan Desa Mandiri : Jumlah Desa) x 100	33,6	Kecamatan Blado
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	Indeks	Indeks KepuasanMasyarakat (IKM)	85	Kecamatan Blado
	Persentase Desa Berkembang menjadi Desa Majudan Mandiri tiap tahun	%	(Jumlah Desa Maju dan Desa Mandiri : Jumlah Desa) x 100	33,6	Kecamatan Blado
	Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan	%	(Gangguan Trantibum yang terselesaikan : Gangguan Trantibum) x 100	100	Kecamatan Blado
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	skor	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	75	Kecamatan Blado
	Persentase pelayanan PATENyang sesuai SOP	%	(Pelayanan PATEN yang sesuai SOP : Jumlah Pelayanan PATEN) x 100	75	Kecamatan Blado
	Persentase Lembaga Kemasyarakatan di Desa yang Aktif	%	(Jumlah LKD Aktif : Jumlah LKD) x 100 LKD terdiri atas LPM, PKK, Karang Taruna, Posyandu, RT, RW	90	Kecamatan Blado
	Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan	%	(Gangguan Trantibum yang terselesaikan : Gangguan Trantibum) x 100	100	Kecamatan Blado
	Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan dengan baik	%	(Jumlah acara yang dilaksanakan dalam rangka hari besar nasional, bintek wasbang, dan rakor forkompimcam dengan baik : jumlah acara) x 100	100	Kecamatan Blado
	Persentase desa yang melaksanakan administrasi serta pengelolaan keuangan desa yang tertib dan baik	%	(Jumlah desa dengan pengelolaan keuangan baik : Jumlah desa) x100	85	Kecamatan Blado
6	Kecamatan Gringsing				
	Skor Evaluasi Unit Pelayanan Publik	Indeks	Nilai kepuasan masyarakat terhadap PelayananPublik	2,80 (C)	Kecamatan Gringsing
	Presentase StatusDesa Maju dan Desa Mandiri di Kecamatan	%	(Jumlah Desa Maju dan Desa Mandiri : Jumlah Desa) x 100	73,3	Kecamatan Gringsing
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	Indeks	Indeks KepuasanMasyarakat (IKM)	88	Kecamatan Gringsing
	Persentase JumlahDesa Berkembang menjadi Desa Majudan Mandiri tiap tahun	%	(Jumlah Desa Maju dan Desa Mandiri : Jumlah Desa) x 100	60	Kecamatan Gringsing
			(Gangguan Trantibum yang terselesaikan :		Kecamatan Gringsing

No.	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Stn	Formulasi Perhitungan	Target Kinerja Tahun 2024	Perangkat Daerah
	Presentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan	%	Gangguan Trantibum) x 100	100	
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	skor	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	66	Kecamatan Gringsing
	Persentase pelayanan PATEN yang sesuai SOP	%	(Pelayanan PATEN yang sesuai SOP : Jumlah Pelayanan PATEN) x 100	75	Kecamatan Gringsing
	Persentase Lembaga Kemasyarakatan di Desa yang Aktif	%	(Jumlah LKD Aktif : Jumlah LKD) x 100 LKD terdiri atas LPM, PKK, Karang Taruna, Posyandu, RT, RW	90	Kecamatan Gringsing
	Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan	%	(Gangguan Trantibum yang terselesaikan : Gangguan Trantibum) x 100	100	Kecamatan Gringsing
	Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan	%	(Gangguan Trantibum yang terselesaikan : Gangguan Trantibum) x 100	100	Kecamatan Gringsing
	Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan dengan baik	%	(Jumlah acara yang dilaksanakan dalam rangka hari besar nasional, bintek wasbang, dan rakor forkompimcam dengan baik : jumlah acara) x 100	85	Kecamatan Gringsing
7	Kecamatan Kandeman				
	Skor Evaluasi Unit Pelayanan Publik	Indeks	Nilai kepuasan masyarakat terhadap Pelayanan Publik	3,30 (B)	Kecamatan Kandeman
	Presentase Status Desa Maju dan Desa Mandiri di Kecamatan	%	(Jumlah Desa Maju dan Desa Mandiri : Jumlah Desa) x 100	65	Kecamatan Kandeman
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	Indeks	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	90	Kecamatan Kandeman
	Persentase Jumlah Desa Berkembang menjadi Desa Majudan Mandiri tiap tahun	%	(Jumlah Desa Maju dan Desa Mandiri : Jumlah Desa) x 100	85	Kecamatan Kandeman
	Presentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan	%	(Gangguan Trantibum yang terselesaikan : Gangguan Trantibum) x 100	100	Kecamatan Kandeman
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	skor	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	80	Kecamatan Kandeman
	Persentase pelayanan PATEN yang sesuai SOP	%	(Pelayanan PATEN yang sesuai SOP : Jumlah Pelayanan PATEN) x 100	75	Kecamatan Kandeman
	Persentase Lembaga Kemasyarakatan di Desa yang Aktif	%	(Jumlah LKD Aktif : Jumlah LKD) x 100 LKD terdiri atas LPM, PKK, Karang Taruna, Posyandu, RT, RW	90	Kecamatan Kandeman
	Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan	%	(Gangguan Trantibum yang terselesaikan : Gangguan Trantibum) x 100	100	Kecamatan Kandeman
	Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan dengan baik	%	(Jumlah acara yang dilaksanakan dalam rangka hari besar nasional, bintek wasbang, dan rakor forkompimcam dengan baik : jumlah acara) x 100	100	Kecamatan Kandeman
	Persentase Desa yang melaksanakan administrasi serta pengelolaan keuangan desa yang tertib dan baik	%	(Jumlah desa dengan pengelolaan keuangan baik : Jumlah desa) x100	85	Kecamatan Kandeman
8	Kecamatan Limpung				
	Skor Evaluasi Unit Pelayanan Publik	Indeks	Nilai kepuasan masyarakat terhadap Pelayanan Publik	2,80 (C)	Kecamatan Limpung
	Persentase Status Desa Maju dan Desa Mandiri di Kecamatan	%	(Jumlah Desa Maju dan Desa Mandiri : Jumlah Desa) x 100	58,82	Kecamatan Limpung
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	Indeks	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	90	Kecamatan Limpung
	Persentase Jumlah Desa Berkembang menjadi Desa Majudan Mandiri tiap tahun	%	(Jumlah Desa Maju dan Desa Mandiri : Jumlah Desa) x 100	41,18	Kecamatan Limpung
	Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan	%	(Gangguan Trantibum yang terselesaikan : Gangguan Trantibum) x 100	100	Kecamatan Limpung
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	skor	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	66	Kecamatan Limpung
	Persentase pelayanan PATEN yang sesuai SOP	%	(Pelayanan PATEN yang sesuai SOP : Jumlah Pelayanan PATEN) x 100	75	Kecamatan Limpung
	Persentase Lembaga Kemasyarakatan di Desa yang Aktif	%	(Jumlah LKD Aktif : Jumlah LKD) x 100 LKD terdiri atas LPM, PKK, Karang Taruna, Posyandu, RT, RW	90	Kecamatan Limpung
	Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan	%	(Gangguan Trantibum yang terselesaikan : Gangguan Trantibum) x 100	100	Kecamatan Limpung
	Cakupan Penyelenggaraan		(Jumlah acara yang dilaksanakan dalam		Kecamatan Limpung

No.	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Stn	Formulasi Perhitungan	Target Kinerja Tahun 2024	Perangkat Daerah
	Pemerintahan Umum yang dilaksanakan dengan baik	%	angka hari besar nasional, bintek wasbang, dan rakor forkompimcam dengan baik : jumlah acara) x 100	100	
	Persentase desa yang melaksanakan administrasi serta pengelolaan keuangan desa yang tertib dan baik	%	(Jumlah desa dengan pengelolaan keuangan baik : Jumlah desa) x100	85	Kecamatan Limpung
9	Kecamatan Pecalungan				
	Skor Evaluasi Unit Pelayanan Publik	Indeks	Nilai kepuasan masyarakat terhadap PelayananPublik	2,80 (C)	Kecamatan Pecalungan
	Presentase StatusDesa Maju dan Desa Mandiri di Kecamatan	%	(Jumlah Desa Maju dan Desa Mandiri : Jumlah Desa) x 100	70	Kecamatan Pecalungan
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	Indeks	Indeks KepuasanMasyarakat (IKM)	80	Kecamatan Pecalungan
	Persentase JumlahDesa Berkembang menjadi Desa Majudan Mandiri tiap tahun	%	(Jumlah Desa Maju dan Desa Mandiri : Jumlah Desa) x 100	65	Kecamatan Pecalungan
	Presentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan	%	(Gangguan Trantibum yang terselesaikan : Gangguan Trantibum) x 100	100	Kecamatan Pecalungan
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	skor	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	70	Kecamatan Pecalungan
	Persentase pelayanan PATENyang sesuai SOP	%	(Pelayanan PATEN yang sesuai SOP : Jumlah Pelayanan PATEN) x 100	75	Kecamatan Pecalungan
	Persentase Lembaga Kemasyarakatan di Desa yang Aktif	%	(Jumlah LKD Aktif :Jumlah LKD) x 100 LKD terdiri atas LPM, PKK, Karang Taruna, Posyandu, RT, RW	90	Kecamatan Pecalungan
	Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan	%	(Gangguan Trantibum yang terselesaikan : Gangguan Trantibum) x 100	100	Kecamatan Pecalungan
	Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan dengan baik	%	(Jumlah acara yangdilaksanakan dalam rangka hari besar nasional, bintek wasbang, dan rakorforkompimcam dengan baik : jumlah acara) x 100	100	Kecamatan Pecalungan
	Persentase desa yang melaksanakan administrasi serta pengelolaan keuangan desa yang tertib dan baik	%	(Jumlah desa dengan pengelolaan keuangan baik : Jumlah desa) x100	85	Kecamatan Pecalungan
10	Kecamatan Reban				
	Skor Evaluasi Unit Pelayanan Publik	Indeks	Nilai kepuasan masyarakat terhadap PelayananPublik	2,80 (C)	Kecamatan Reban
	PersentaseStatusDesa Maju dan Mandiri di Kecamatan	%	(Jumlah Desa Maju dan Desa Mandiri : Jumlah Desa) x 100	36,84	Kecamatan Reban
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	Indeks	Indeks KepuasanMasyarakat (IKM)	100	Kecamatan Reban
	Persentase Jumlah Desa Berkembang menjadi Desa Majan Mandiri tiap tahun	%	Jumlah Desa Berkembang menjadi Desa Majudan Mandiri/ Jumlah Desa) x 100	31,57	Kecamatan Reban
	Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan	%	(Gangguan Trantibum yang terselesaikan : Gangguan Trantibum) x 100	100	Kecamatan Reban
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	skor	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	75	Kecamatan Reban
	Persentase pelayanan PATENyang sesuai SOP	%	(Pelayanan PATEN yang sesuai SOP : Jumlah Pelayanan PATEN) x 100	75	Kecamatan Reban
	Persentase Lembaga Kemasyarakatan di Desa yang Aktif	%	(Jumlah LKD Aktif : Jumlah LKD) x 100 LKD terdiri atas LPM, PKK, Karang Taruna, Posyandu, RT, RW	90	Kecamatan Reban
	Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan	%	(Gangguan Trantibum yang terselesaikan : Gangguan Trantibum) x 100	100	Kecamatan Reban
	Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan	%	(Gangguan Trantibum yang terselesaikan : Gangguan Trantibum) x 100	100	Kecamatan Reban
	Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan dengan baik	%	(Jumlah acara yang dilaksanakan dalam rangka hari besar nasional, bintek wasbang, dan rakor forkompimcam dengan baik : jumlah acara) x 100	85	Kecamatan Reban
11	Kecamatan Subah				
	Skor Evaluasi Unit Pelayanan Publik	Indeks	Nilai kepuasan masyarakat terhadap PelayananPublik	2,80 (C)	Kecamatan Subah
	Presentase StatusDesa Maju dan Desa Mandiri di Kecamatan	%	(jumlah Desa yang Maju dan Mandiri : jumlah desa seluruhnya) x 100	35,29	Kecamatan Subah
	Indeks Kepuasan		Indeks KepuasanMasyarakat (IKM)		Kecamatan Subah

No.	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Stn	Formulasi Perhitungan	Target Kinerja Tahun 2024	Perangkat Daerah
	Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	Indeks		87	
	Persentase JumlahDesa Berkembang menjadi Desa Majudan Mandiri tiap tahun	%	(Jumlah Desa Maju dan Desa Mandiri : Jumlah Desa) x 100	35,29	Kecamatan Subah
	Presentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan	%	(Gangguan Trantibum yang terselesaikan : Gangguan Trantibum) x 100	100	Kecamatan Subah
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	skor	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	66	Kecamatan Subah
	Persentase pelayanan PATEN yang sesuai SOP	%	(Pelayanan PATEN yang sesuai SOP : Jumlah Pelayanan PATEN) x 100	75	Kecamatan Subah
	Persentase Lembaga Kemasyarakatan di Desa yang Aktif	%	(Jumlah LKD Aktif :Jumlah LKD) x 100 LKD terdiri atas LPM, PKK, Karang Taruna, Posyandu, RT, RW	90	Kecamatan Subah
	Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan	%	(Gangguan Trantibum yang terselesaikan : Gangguan Trantibum) x 100	100	Kecamatan Subah
	Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan	%	(Gangguan Trantibum yang terselesaikan : Gangguan Trantibum) x 100	100	Kecamatan Subah
	Persentase desa yang melaksanakan administrasi serta pengelolaan keuangan desa yang tertib dan baik	%	(Jumlah desa dengan pengelolaan keuangan baik : Jumlah desa) x100	85	Kecamatan Subah
12	Kecamatan Tersono				
	Skor Evaluasi Unit Pelayanan Publik	Indeks	Nilai kepuasan masyarakat terhadap PelayananPublik	2,80 (C)	Kecamatan Tersono
	Presentase StatusDesa Maju dan Desa Mandiri di Kecamatan	%	(Jumlah Desa Maju dan Desa Mandiri : Jumlah Desa) x 100	70	Kecamatan Tersono
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	Indeks	Indeks KepuasanMasyarakat (IKM)	88	Kecamatan Tersono
	Persentase JumlahDesa Berkembang menjadi Desa Majudan Mandiri tiap tahun	%	(Jumlah Desa Maju dan Desa Mandiri : Jumlah Desa) x 100	70	Kecamatan Tersono
	Presentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan	%	(Gangguan Trantibum yang terselesaikan : Gangguan Trantibum) x 100	100	Kecamatan Tersono
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	skor	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	60	Kecamatan Tersono
	Persentase pelayanan PATEN yang sesuai SOP	%	(Pelayanan PATEN yang sesuai SOP : Jumlah Pelayanan PATEN) x 100	75	Kecamatan Tersono
	Persentase Lembaga Kemasyarakatan di Desa yang Aktif	%	(Jumlah LKD Aktif : Jumlah LKD) x 100 LKD terdiri atas LPM, PKK, Karang Taruna, Posyandu, RT, RW	90	Kecamatan Tersono
	Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan	%	(Gangguan Trantibum yang terselesaikan : Gangguan Trantibum) x 100	100	Kecamatan Tersono
	Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan dengan baik	%	(Jumlah acara yang dilaksanakan dalam rangka hari besar nasional, bintek wasbang, dan rakorforkompimcam dengan baik : jumlah acara) x 100	100	Kecamatan Tersono
	Persentase desa yang melaksanakan administrasi serta pengelolaan keuangan desa yang tertib dan baik	%	(Jumlah desa dengan pengelolaan keuangan baik : Jumlah desa) x100	85	Kecamatan Tersono
13	Kecamatan Tulis				
	Skor Evaluasi Unit Pelayanan Publik	Indeks	Nilai kepuasan masyarakat terhadap PelayananPublik	3,57 (SB)	Kecamatan Tulis
	Presentase StatusDesa Maju dan Desa Mandiri di Kecamatan	%	(Jumlah Desa Maju dan Desa Mandiri : Jumlah Desa) x 100	70	Kecamatan Tulis
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	Indeks	Indeks KepuasanMasyarakat (IKM)	89	Kecamatan Tulis
	Persentase JumlahDesa Berkembang menjadi Desa Maju dan Mandiri tiaptahun	%	(Jumlah Desa Maju dan Desa Mandiri : Jumlah Desa) x 100	60	Kecamatan Tulis
	Presentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan	%	(Gangguan Trantibum yang terselesaikan : Gangguan Trantibum) x 100	100	Kecamatan Tulis
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	skor	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	75	Kecamatan Tulis
	Persentase pelayanan PATEN yang sesuai SOP	%	(Pelayanan PATEN yang sesuai SOP : Jumlah Pelayanan PATEN) x 100	75	Kecamatan Tulis
	Persentase Lembaga Kemasyarakatan di Desa yang	%	(Jumlah LKD Aktif : Jumlah LKD) x 100 LKD terdiri atas LPM, PKK, Karang Taruna, Posyandu, RT, RW	90	Kecamatan Tulis

No.	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Stn	Formulasi Perhitungan	Target Kinerja Tahun 2024	Perangkat Daerah
	Aktif				
	Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan	%	(Gangguan Trantibum yang terselesaikan : Gangguan Trantibum) x 100	100	Kecamatan Tulis
	Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan dengan baik	%	(Jumlah acara yang dilaksanakan dalam rangka hari besar nasional, bintek wasbang, dan rakorforkompimcam dengan baik : jumlah acara) x 100	100	Kecamatan Tulis
	Persentase desa yang melaksanakan administrasi serta pengelolaan keuangan desa yang tertib dan baik	%	(Jumlah desa dengan pengelolaan keuangan baik : Jumlah desa) x100	85	Kecamatan Tulis
14	Kecamatan Warungasem				
	Skor Evaluasi Unit Pelayanan Publik	Indeks	Nilai kepuasan masyarakat terhadap PelayananPublik	2,80 (C)	Kecamatan Warungasem
	Presentase StatusDesa Maju dan Desa Mandiri di Kecamatan	%	(Jumlah Desa Maju dan Desa Mandiri : Jumlah Desa) x 100	70	Kecamatan Warungasem
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	Indeks	Indeks KepuasanMasyarakat (IKM)	85	Kecamatan Warungasem
	Persentase JumlahDesa Berkembang menjadi Desa Maju dan Mandiri tiaptahun	%	(Jumlah Desa Maju dan Desa Mandiri : Jumlah Desa) x 100	85	Kecamatan Warungasem
	Presentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan	%	(Gangguan Trantibum yang terselesaikan : Gangguan Trantibum) x 100	100	Kecamatan Warungasem
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	skor	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	75	Kecamatan Warungasem
	Persentase pelayanan PATEN yang sesuai SOP	%	(Pelayanan PATEN yang sesuai SOP : Jumlah Pelayanan PATEN) x 100	75	Kecamatan Warungasem
	Persentase Lembaga Kemasyarakatan di Desa yang Aktif	%	(Jumlah LKD Aktif : Jumlah LKD) x 100 LKD terdiri atas LPM, PKK, Karang Taruna, Posyandu, RT, RW	90	Kecamatan Warungasem
	Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan	%	(Gangguan Trantibum yang terselesaikan : Gangguan Trantibum) x 100	100	Kecamatan Warungasem
	Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan	%	(Gangguan Trantibum yang terselesaikan : Gangguan Trantibum) x 100	100	Kecamatan Warungasem
	Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan dengan baik	%	(Jumlah acara yang dilaksanakan dalam rangka hari besar nasional, bintek wasbang, dan rakor forkompimcam dengan baik : jumlah acara) x 100	85	Kecamatan Warungasem
15	Kecamatan Wonotunggal				
	Skor Evaluasi Unit Pelayanan Publik	Indeks	Nilai kepuasan masyarakat terhadap PelayananPublik	2,80 (C)	Kecamatan Wonotunggal
	Presentase StatusDesa Maju dan Desa Mandiri di Kecamatan	%	(Jumlah Desa Maju dan Desa Mandiri : Jumlah Desa) x 100	33,3	Kecamatan Wonotunggal
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	Indeks	Indeks KepuasanMasyarakat (IKM)	3,42	Kecamatan Wonotunggal
	Persentase JumlahDesa Berkembang menjadi Desa Maju dan Mandiri tiaptahun	%	(Jumlah Desa Maju dan Desa Mandiri : Jumlah Desa) x 100	40	Kecamatan Wonotunggal
	Presentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan	%	(Gangguan Trantibum yang terselesaikan : Gangguan Trantibum) x 100	100	Kecamatan Wonotunggal
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	skor	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	75	Kecamatan Wonotunggal
	Persentase pelayanan PATEN yang sesuai SOP	%	(Pelayanan PATEN yang sesuai SOP : Jumlah Pelayanan PATEN) x 100	75	Kecamatan Wonotunggal
	Persentase Lembaga Kemasyarakatan di Desa yang Aktif	%	(Jumlah LKD Aktif :Jumlah LKD) x 100 LKD terdiri atas LPM, PKK, Karang Taruna, Posyandu,RT, RW	90	Kecamatan Wonotunggal
	Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan	%	(Gangguan Trantibum yang terselesaikan : Gangguan Trantibum) x 100	100	Kecamatan Wonotunggal
	Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan dengan baik	%	(Jumlah acara yang dilaksanakan dalam rangka hari besar nasional, bintek wasbang, dan rakorforkompimcam dengan baik : jumlah acara) x 100	100	Kecamatan Wonotunggal
	Persentase desa yang melaksanakan administrasi serta pengelolaan keuangan desa yang tertib dan baik	%	(Jumlah desa dengan pengelolaan keuangan baik : Jumlah desa) x100	85	Kecamatan Wonotunggal
	Unsur Pemerintahan Umum				Bakesbangpol
	Indeks Kerukunan	%	Dilakukan Survey (Toleransi+Kesetaraan+Kerjasama) : 3*100	75	
	Nilai SAKIP BadanKesbangpol	Skor	Nilai hasil evaluasi mplementasi SAKIP oleh Kemenpan RB	71,5	

No.	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Stn	Formulasi Perhitungan	Target Kinerja Tahun 2024	Perangkat Daerah
	Persentase demotertangani	%	(jumlah demo tertangani : jumlah demo yang ada)*100	100	
	Persentase potensi gangguan/konflik sosial keagamaan yang teratasi	%	(jumlah konflik sosial tahun berkenaan : jumlah konflik sosial tahun sebelumnya) * 100	100	
	Persentase Parpol dan Lembaga Pendidikan yang berperan aktif mendukung Pemerintah	%	(Jumlah Parpol dan Lembaga pendidikan yang berperan aktif dalam mendukung pemerintah : jumlah parpol dan lembaga pendidikan dibatang) x 100	100	Bakesbangpol
	Persentase Ormas yang mendapatkan fasilitasi dan pembinaan	%	(Jumlah Ormas yang mendapatkan fasilitasi dan pembinaan : Jumlah Ormas yang terdaftar resmi) x 100	100	Bakesbangpol
	Persentase masyarakat yang paham tentang ketahanan Ekosobud	%	(Jumlah masyarakat yang mengikuti sosialisasi dan paham terhadap ketahanan Ekosobud : jumlah masyarakat yang mengikuti sosialisasi) x 100 (Melalui Pretest dan posttest)	100	Bakesbangpol
	Persentase penurunan konflik sosial	%	(Jumlah konflik sosial tahun berkenaan : jumlah konflik sosial tahun sebelumnya) x 100	100	Bakesbangpol
	Persentase Parpol dan Lembaga Pendidikan yang berperan aktif mendukung Pemerintah	%	(Jumlah Parpol dan Lembaga pendidikan yang berperan aktif dalam mendukung pemerintah : jumlah parpol dan lembaga pendidikan dibatang) x 100	100	Bakesbangpol

Sumber:RKPD Kab Batang 2024

Indikator kinerja utama perangkat daerah merupakan indikator kinerja yang menjadi tanggung jawab Kepala Perangkat Daerah. Indikator ini berada pada level *intermediate outcome*, yang menghubungkan kinerja program dengan tujuan dan sasaran pembangunan daerah.

Tabel 3.3.

Penetapan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Tahun 2024

No.	Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	Satuan	Rumus Perhitungan	Target Tahun 2024	Kondisi Akhir Kinerja
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Angka Rata- Rata Lama sekolah	tahun	jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalankan pendidikan formal	7,1	7,3
		Angka Harapan Sekolah	tahun	lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang	12,4	12,6
		Angka Pendidikan yang ditamatkan penduduk	%	persentase jumlah penduduk, baik yang masih sekolah ataupun tidak sekolah lagi, menurut pendidikan tertinggi yang telah ditamatkan	80	81
		Persentase Terlestarikan Cagar Budaya nya	%	Jumlah cagar budaya yang dilestarikan : jumlah keseluruhan cagar budaya x 100	100	100
		Persentase pengunjung festival kesenian tradisional yang diselenggara kan Pemerintah Daerah	%	Jumlah pengunjung festival kesenian tradisional yang diselenggarakan Pemerintah Daerah : Jumlah target pengunjung kesenian tradisional yang diselenggarakan x 100	70	80
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	88,75	89,5
		Nilai SAKIP		Nilai SAKIP Perangkat Daerah		

No.	Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	Satuan	Rumus Perhitungan	Target Tahun 2024	Kondisi Akhir Kinerja
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7
		Perangkat Daerah	Skor		77,5	80
2	Dinas Kesehatan	Angka Kematian Ibu (AKI)	Per 100.000 KH	Jumlah kematianibu maternal tetapi bukan disebabkan karena kecelakaan, bencana, cidera atau bunuh diri di suatu wilayah pada kurun waktu tertentu/jumlah kelahiran hidup di suatu wilayah dan pada kurun waktu yang sama x 100.000	136	88
		Angka Kematian Bayi (AKB)	Per 1.000 KH	Jumlah bayi usia 0-11 bulan yang meninggal disuatu wilayah pada kurun waktu tertentu/jumlah kelahiran hidup di suatu wilayah dan pada kurun waktu yang sama x 1.000	8,08	7,2
		Angka prevalensibalita stunting	%	Jumlah balita usia 0-59 bulan dengan status pendek di suatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu/Jumlah Balita usia 0-59 bulan yang diukur panjang atau tinggi badanpada wilayah dan kurun waktu yang sama x 100	13,72	13,47
		Angka Harapan Hidup (AHH)	Tahun	Angka perkiraan lama hidup rata- rata penduduk dengan asumsi tidak ada perubahan pola mortalitas menurut umur	74,89	74,99
		Persentase Penduduk yang mempunyai jaminan kesehatan (UU No. 40 Th 2004 dan UU No.36 Th2009)	%	Jumlah penduduk yang mempunyai jaminan kesehatan : jumlah pendudukx 100	89	91
		Persentase puskesmas dengan tenaga sesuai standar (PMK 43. Th 2019)	%	Jumlah puskesmas dengan ketenagaan sesuai standar :jumlah puskesmas kali100	80,95	100
		Persentase Fasilitas kefarmasianyang sesuai standar (PMK No.73 Th. 2016, PMK No. 74 Th 2016, PMK No. 34 Th 2021)	%	Jumlah Fasilitas kefarmasian yang sesuai standar : jumlah fasilitas pelayanan kefarmasian x 100	70	80
		Persentase Desa Siaga Aktif StrataMandiri. Kepmenkes RI Nomor 1529/MENKES/ SK/X/2010	%	Jumlah Desa Siaga Aktif strata mandiri : jumlah desa: kelurahan x100	11,69	14,92
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	88,75	89,5
		Nilai SAKIP PerangkatDaerah	Skor	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	80	82
3	RSUD Batang	Persentase Capaian Standart Pelayanan Minimal Rumah Sakit	%	Jumlah sarana, prasarana dan alat sesuai standart yang dimiliki : dengan jumlah sarana prasarana dan alat sesuai standart yang seharusnya di miliki x 100 persen	86	90
		Persentase Capaian Standart PeningkatanMutu dan Keselamatan Pasien	%	Nilai rata - rata unsur capaian Peningkatan Mutu dan Keselamatan Pasien	86	90
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	99.25.00	99.35.00
		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Skor	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	80	82
	RSUD Limpung	Persentase Capaian Standart pelayanan Minimal Rumah Sakit		jumlah sarana, prasarana dan alat sesuai standar yang dimiliki : dengan jumlah sarana prasarana dan alat sesuai		

No.	Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	Satuan	Rumus Perhitungan	Target Tahun 2024	Kondisi Akhir Kinerja
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7
4			%	standar yang seharusnya dimiliki x 100	87	100
		Persentase Capaian Standar Peningkatan Mutu dan Keselamatan Pasien	%	Nilai rata-rata unsur capaian Peningkatan Mutu dan Keselamatan Pasien	85	95
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	99	99,5
		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Skor	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	80	82
5	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Persentase Infrastruktur Wilayah kondisi Baik	%	Jumlah infrastruktur kondisi baik : jumlah total infrastruktur x 100	71,2	77,98
		Persentase Irigasi Kabupaten Dalam Kondisi Baik	%	Luas irigasi kabupaten dalam kondisi baik : luas irigasi kabupaten x 100	69,87	78,45
		Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota (%)	%	Jumlah panjang jalan dalam kondisi mantap : Jumlah total panjang jalan kabupaten: kota x 100	88,5	94,5
		Persentase bangunan gedung yang layak fungsi	%	Jumlah Gedung negara yang layak fungsi : Jumlah bangunan gedung negara yang menjadi kewenangan Pemkab x 100	77,01	77,01
		Persentase Pengaturan Rencana Detail Tata Ruang Daerah	%	Luas wilayah RDTR yang ditetapkan : Luas wilayah Kabupaten Batang x 100	11,07	21,12
		Rasio Ruang Terbuka Hijau persatuan Luas Wilayah ber HPL/ HGB	Rasio	Luas ruang terbuka hijau : Luas wilayah ber HPL : HGB x 100	28,87	28,9
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	88,75	89,5
		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Skor	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	66,56	67,21
6	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Persentase Rumah Layak Huni	%	(Jumlah Rumah Layak Huni : Jumlah Rumah se Kab. Batang) x 100	63	64
		Persentase perumahan dan lingkungan permukiman yang dilengkapi PSU dalam kondisi baik	%	(Luasan Perumahan dan Permukiman dalam kondisi baik : Luas Total Perumahan dan Permukiman) x 100	81	86
		Persentase pemenuhan infrastruktur dasar perumahan dan permukiman yang layak	%	Jumlah infrastruktur yg dipenuhi : jumlah infrastruktur yg ada lalu x 100	63	67
		Persentase pengurangan permukiman kumuh	%	(Luas lingkungan kumuh yg tertangani : Luas lingkungan kumuh lalu) x 100	63	64
		Tingkat penurunan kasus sengketa pertanahan	%	{ (jumlah sengketa tanah tahun berkenaan - jumlah sengketa tanah tahun lalu) : jumlah sengketa tanah tahun lalu } x 100	85	90
		Persentase penyelesaian kasus pertanahan	%	(Jumlah kasus yang ditangani : Jumlah kasus yang terdaftar) x 100	100	100
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	65	75
		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	skor	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	66,5	68
7	Satuan Polisi Pamong Praja	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	75	80
		Persentase penanganan		(Jumlah laporan penanganan gangguan		

No.	Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	Satuan	Rumus Perhitungan	Target Tahun 2024	Kondisi Akhir Kinerja
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7
		gangguan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat	%	ketentraman danketertiban umum : jumlah keseluruhan gangguan ketentraman dan ketertiban umum) x 100	75	80
		Persentase luasan wilayah bencana kebakaran	%	(Luas wilayah bencana kebakaran : luas wilayah kabupaten) x 100	4	2
		Persentase penanganan bencana kebakaran dan non kebakaran	%	(Jumlah penanganan bencana kebakaran dan non kebakaran dalam tingkat waktu tanggap : jumlah seluruh kejadian kebakaran dan non kebakaran) x 100	72	74
		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Skor	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	72	74
8	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Indeks Kerukunan	%	Survei melalui 3 komponen yaitu : (Toleransi + kesetaraan + kerjasama) : 3 x100	75	90
		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Skor	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	70,8	71,3
		Persentase demo tertangani	%	(jumlah demo tertangani : jumlah demo yang ada) x 100	100	100
		Persentase potensi gangguan/konflik sosial keagamaan yang teratasi	%	(jumlah konflik sosial tahun berkenaan : jumlah konflik sosial tahun sebelumnya) x100	100	100
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	88,75	89,5
9	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Cakupan ketangguhan daerah menghadapi bencana	%	Jumlah Pedudukdikawasan Rawan Bencana yang mendapat informasi Rawan Bencana: Jumlah Penduduk dikawasan RB x 100 + Jumlah Desa Tangguh Bencana: Jumlah Desa Rawan Bencana x100 + Jumlah Penanganan Tanggap Darurat yang dilakukan: Jumlah Sasaran Dampak Bencana yang dilakukan tanggap Bencana x100 +Jumlah Kejadian Bencana yng direkomendasikan Rehabilitasi dan Rekontruksi: Jumlah Kejadian Bencana yang harus di lakukan Rehabilitasi dan Rekontruksi x 100 : 4	67,44	78,16
		Persentase Penanggulangan Bencanasecara cepat dan akurat	Indeks	Jumlah bencana yang tertangani : jumlah bencana x 100	100	100
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	88,75	89,5
		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Skor	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	80	82
10	Dinas Sosial	Persentase PMKS yang memperoleh pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan , jaminan sosial, dapat hidup mandiri, danberfungsi sosial	%	Jumlah PMKS yg terpenuhi kebutuhan dasarnya, terlindungi hak- haknya dan mampu berfungsi sosial serta mampu hidup normatif dalam pengasuhan keluarga : Jumlah PMKS di kab Batang X 100	74	78
		Presentase PSKS yang aktif dalam pembangunan Kesos	%	Jumlah PSKS yang aktif dalam pembangunan Kesos : Jumlah PSKS di kab batang X 100	85	95
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	84,71	85,41
		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	skor	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	86	88
11	Dinas TenagaKerja	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	85	90
		Tingkat Kesempatan kerja	%	Jumlah penduduk bekerja : jumlah angkatan kerja x100	97	97

No.	Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	Satuan	Rumus Perhitungan	Target Tahun 2024	Kondisi Akhir Kinerja
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7
		Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak	%	Perusahaan yang menerapkan tatakelola kerja yang layak : jumlah perusahaan x 100	31,17	32,8
		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Skor	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	70	75
		Persentase indikator kinerja sasaran strategis Perangkat Daerah yang mencapai target	%	Jumlah indikator sasaran strategis Perangkat Daerah yang mencapai target : Jumlah indikator sasaran strategis Perangkat Daerah x 100	80	80
12	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana	Laju Pertumbuhan Penduduk	%	$r = \frac{Pt - P0}{t - P0} \times 100$	1,13	1,11
				r = laju pertumbuhan penduduk		
				Pt = Jumlah Penduduk tahun t		
				P0 = Jumlah penduduk tahun dasar t = selisih tahun Pt dengan P0		
		TFR (Total Fertility Rate / Angka Kelahiran Total)	Indeks	5 Σ ASFR	3	2,9
		Ratio KDRT	Rasio	Jumlah KDRT: Jumlah Rumah Tangga X 100	0,0071	0,0067
		Persentase Jumlah Tenaga Kerja Dibawah Umur	%	Pekerja anak usia 5-14 tahun : Jumlah pekerja usia 5 tahun keatas x 100	0	0
		Persentase cakupan pernikahan anak	%	Jumlah Pernikahan Anak : Jumlah Pernikahan X100	4,2747	4,2587
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	88,75	89,5
		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Skor	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	80	82
13	Dinas Lingkungan Hidup	Persentase Luas RTH	%	Luas RTH: Luas lahan x 100	60	70
		Indeks Kualitas Air	Indeks	ci baru = cim-ci(hasil pengukuran): cim-LiJ	50	50
		Indeks Kualitas Udara	Indeks	100-(50: 0.0 x ieu-0.1)	80	80
		Indeks Tutupan Lahan	Indeks	Luas tutupan hutan: Luas wilayah administrasi	68,5	70
		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	62	65
		Persentase indikator kinerja sasaran strategis Perangkat Daerah yang mencapai target	%	jumlah indikator yang mencapai target: Jumlah indikator x 100	90	100
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	%	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	90	100
14	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa	Persentase Desa Maju dan Mandiri	%	jumlah desa maju : total jumlah se kab. batang x 100	23	25
		Indeks Ketahanan Sosial	Indeks	Penilaian Indeks Desa Mandiri Terendah	0,56	0,58
		Indeks Ketahanan Ekonomi	Indeks	Penilaian Indeks Desa Mandiri Terendah	0,78	0,84
		Indeks Ketahanan Ekologi	Indeks	Penilaian Indeks Desa Mandiri Terendah	0,48	0,55
		Persentase pkk aktif	%	Jumlah pkk aktif : jumlah pkk x100	50,21	75,31
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	89	90
		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Skor	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	67	69
15	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	91,45	92
				[(Jumlah Kepemilikan KIA :		

No.	Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	Satuan	Rumus Perhitungan	Target Tahun 2024	Kondisi Akhir Kinerja
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7
		Persentase kepemilikan identitas Penduduk dan Akte Kelahiran	%	Jumlah Peduduk usia 0-17 th) + (Jumlah Penduduk Ber- KTP el : Jumlah Penduduk usia di atas 17 th) + (jumlah penduduk ber- akta kelahiran usia 0-18 th : jumlah pendudukusia 0-18 th) : 3] x 100	85	91,67
		Menurunnya Presentasi Data Ganda dan Anomali	%	[(Jumlah Data ganda dan anomali tahun lalu - data gandan anomali tahun ini) : jumlah data ganda dan anomali tahun lalu] x 100	2,3	1,7
		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Skor	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	62	64
16	Dinas Perhubungan	Rasio ijin trayek	rasio	jumlah ijin trayek yang dikeluarkan: jumlah penduduk v / c ratio JalanKabupaten	1,5	1,5
		Tingkat kelancaran dan keamanan lalu lintas	rasio	v : volume kendaraan c : kapasitasjalan	0,5	0,53
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	88,75	89,5
		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Skor	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	80	82
17	Dinas Komunikasi dan Informatika	Indeks SPBE	Indeks	Domain SPBE	3,5	3,6
		Indeks Smart City	Indeks	Dimensi Smart City	3,47	3,49
		Indeks Keamanan Informasi	%	Jumlah sistem elektronik yang berhasil dilakukan pengamanan : dengan jumlah seluruh sistem elektronik yang tersedia setiap tahun x 100	100	100
		Persentase pemanfaatan data statistiksektoral dalam penyusunan perencanaan evaluasi pembangunan daerah.	%	Jumlah data statistik sektoral yang terintegrasi dalam sistem informasi : dengan jumlah data statistik sektoral yang terkumpul x 100	100	100
		Persentase informasi dan komunikasi publik yang bisa diakses lewat media komunikasi	%	Jumlah informasi yang diakses publik : dengan jumlah penyebaran informasi x 100	100	100
		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Skor	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	BB	BB
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	88,75	89,5
18	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Kecil Menengah	Kontribusi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Sektor Perdagangan	%	Data BPS	12,75	13,36
		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Skor	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	67	68
		Persentase indikator kinerja sasaran strategis Perangkat Daerah yangmencapai target	%	rata-rata capaian kinerja sasaran strategis Perangkat daerahJumlah capaian sasaran strategis Perangkat daerahx 100	78	80
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	81	83
19	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pntu	Persentase peningkatan investasi di kabupaten / kota	%	(Investasi tahun lalu : investasi tahun ini) x 100	75	83
		Persentase Peningkatan Jumlah Investor	%	Jml investor tahun n dikurangi jml investor tahun (n-1) dibagi jml investor tahun n x 100	40	80
		Indeks Kepuasan				

No.	Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	Satuan	Rumus Perhitungan	Target Tahun 2024	Kondisi Akhir Kinerja
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7
		Masyarakat (IKM)	Indeks	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	88,5	89
		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Skor	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	70	70
		Persentase indikator kinerja sasaran strategis Perangkat Daerah yang mencapaitarget	%	(jumlah indikator kinerja yang mencapai target : jumlah indikator kinerja seluruhnya) x 100	100	100
20	Dinas Pariwisata, Kepemudaan, dan Olahraga	Persentase peningkatan kunjungan wisatawan	%	(Jumlah wisatawan tahun n – Jumlah wisatawan tahun n-1 : Jumlah wisatawan tahun n-1) x 100	21	25
		Persentase peningkatan pendapatan sektor pariwisata	%	(Jumlah pendapatan sektor pariwisata tahun n dikurangi Jumlah pendapatan sektor pariwisata tahun n-1 : Jumlah pendapatan sektor pariwisata tahun n-1 kali 100	10	20
		Persentase inovasi ekonomi kreatif	%	(jumlah inovasi produk ekonomi kreatif : jumlah produk ekonomi kreatif : kajian yang dilaksanakan) x 100	10	15
		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Skor	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	71	72
		Jumlah medali yang diperoleh	Medali	Jumlah perolehan medali pada event olahraga nasional dan internasional	35	45
		Persentase peningkatan pemuda berprestasi	%	(Jumlah pemuda berprestasi atau yang memperoleh penghargaan tahun n – Jumlah pemuda berprestasi atau yang memperoleh penghargaan tahun n-1) : Jumlah pemuda berprestasi atau yang memperoleh penghargaan tahun n-1) x 100	4	4
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	88,75	89,5
21	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	Indeks	$TGM = (0,3 \times (FM+DM+JB))+0,05 \times (FAI+DAI)$	66,33	66,41
		index pembangunan literasi masyarakat	Indeks	$IPLM = \sum UPLM : AM$	2,8	3
		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Skor	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	60,8	61,6
		Persentase indikator kinerja sasaran strategis Perangkat Daerah yang mencapaitarget	%	(jumlah indikator kinerja yang mencapai target : jumlah indikator kinerja seluruhnya) x 100	85%	95%
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	87,66	87,72
		Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional	Indeks	$T = (a+i+s+j) : 4$	75,4	75,6
				T = tingkat ketersediaan arsip		
				a = persentase arsip aktif yang telah dibuat dan daftar arsip		
				i = persentase arsip inaktif yang telah dibuat dan daftar arsip		
				s = persentase arsip statis yang telah dibuatkan sarana bantu temu balik		
				j = persentase arsip yang dimasukkan dalam SIKN melalui JIKN		
		Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek		$T = (m+b+g+a+c+i) : 6$		
				T = tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban		
				m = tingkat kesesuaian kegiatan pemusnahan arsip dengan NSPK		
				b = tingkat kesesuaian kegiatan		

No.	Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	Satuan	Rumus Perhitungan	Target Tahun 2024	Kondisi Akhir Kinerja
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7
		kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepinginan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	Indeks	perlindungan dan penyelamatan arsip dari bencana dengan NSPK g = tingkat kesesuaian kegiatan penyelamatan arsip Perangkat Daerah yang digabung dan atau dibubarkan dan pemekaran daerah kabupaten: kota dengan NSPK a = tingkat kesesuaian kegiatan autentikasi arsip statis dan arsip hasil alih media dengan NSPK c = tingkat kesesuaian kegiatan pencarian arsip statis dengan NSPK i = tingkat kesesuaian kegiatan penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup dengan NSPK	22,4	22,8
22	Dinas Kelautan, Perikanan, dan Peternakan	Indeks tingkat kepuasan publik terhadap pelayanan yang di laksanakan	Indeks	nilai rata- rata Indeks semua pelayanan yang dilaksanakan	84,5	85,5
		Kontribusi sektor Perikanan dan Peternakan terhadap PDRB ADHK	%	data dari bps (dirilis setiap bulan februari)	21,9	22
		Persentase Capaian Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya)	%	Capaian produksi perikanan tangkap ditambah perikanan budidaya pada tahun n : target produksi perikanan tangkap ditambah target produksi perikanan budidaya x 100	93,3	97,7
		Persentase Capaian Tingkat Konsumsi Makan Ikan	%	Capaian tingkat konsumsi makan ikan pada tahun n : target tingkat konsumsi makan ikan x 100	96	100%
		Persentase Produksi Hasil Ternak(Daging, Telur dan Susu)	%	Capaian produksi tahun n : target produksi tahun nx 100	87	94
		Persentase Hewan / Ternak yang Terobati	%	Capaian hewan ternak terobati pada tahun berjalan : target capaian hewan ternak terobati x 100	100	100
		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Skor	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	80	82
23	Dinas Pangan dan Pertanian	Persentase penguatan cadangan pangan daerah	%	jumlah cadangan pangan tahun n dikurangi tahun n-1 : tahun n-1 x100	0,024	0,026
		Ketersediaan Bahan Pangan Utama (Ton)				
		a. Beras	Ton	Produksi Gabah Kering Panen dikurangi Angka susut (benih, pakan, tercecer, susut) dikonversidengan rendemen beras 62,74	119.615,00	125.272,00
		b. Jagung	Ton	Produksi Jagung dikurangi Angka susut atau xkan dengan angka konversi jaguang89	71.156,00	74.029,00
		Cadangan Pangan Daerah (Ton)	Ton	Jumlah cadangan pangan kabupaten : standar cadangan pangan kabupaten x 100	10,6	10,8
		Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB ADHB	%	jumlah Kontribusi PDRB dari sektor pertanian : Jumlah PDRB x 100	24,76	24,78
		Persentase Peningkatan Produksi Pertanian	%	Jumlah produksi pertanian (Pangan, Horti da Perkebunan) per hektar per tahun : luas panen *100	0,0103	0,0109
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	%	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	75,3	77
		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	skor	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	67	67,3
24	Sekretariat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	85,45	85,75

No.	Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	Satuan	Rumus Perhitungan	Target Tahun 2024	Kondisi Akhir Kinerja
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7
		(IKM)				
		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	%	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	90	100
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	85	88,5
		Nilai EKPPD	Skor	Nilai hasil evaluasi LPPD nasional menurut Kemendagri	2,98	3
25	Sekretariat DPRD	Indeks Kepuasan Anggota DPRD atas Pelayanan Sekretariat DPRD	Indeks	Hasil Survey: Kuesioner Kepuasan Anggota DPRD atas Pelayanan Sekretariat DPRD	78	80
		Indeks Kepuasan Anggota DPRD atas Pelayanan Sekretariat DPRD	Indeks	Hasil Survey: Kuesioner Kepuasan Anggota DPRD atas Pelayanan Sekretariat DPRD	78	80
		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Skor	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	62,5	70
26	Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah	Indeks Perencanaan	Indeks	60 Capaian sasaran pemda+20 sasaran perangkat daerah+20 capaian program daerah	78	80
		Persentase sasaran pembangunan daerah yang mencapai target	%	(Jumlah sasaran pembangunan daerah yang mencapai target : total sasaran pembangunan daerah) x 100	90,5	92
		Penjabaran Konsistensi Program RKPD kedalam APBD	%	Jumlah program dalam RKPD th berkenaan : jumlah program APBD th berkenaan x 100	100	100
		Indeks Inovasi Daerah	Indeks	ISP+rata-rata ISI	60.10.00	65.00.00
		Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan	%	(Jumlah pemanfaatan hasil kelitbangan : Jumlah total hasil kelitbangan) x 100	100	100
		Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah	%	(Jumlah perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah : jumlah total perangkat daerah) x 100	100	100
		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	skor	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	62.50.00	63.50.00
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	87,7	88
27	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan, dan Aset Daerah	Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah	status	STATUS	WTP	WTP
		Persentase Kepatuhan OPD dalam Penyusunan Laporan Keuangan	%	(Jumlah OPD yang menyusun laporan keuangan sesuai SAP : jumlah total OPD) x 100	100	100
		Persentase peningkatan pendapatan daerah	%	[(Realisasi Pendapatan Daerah tahun n)-(Realisasi Pendapatan Daerah Tahun n-1)]: (Realisasi Pendapatan Daerah Tahun n-1)*100	00.05	00.05
		Persentase Peningkatan PAD	%	[(Realisasi PAD tahun n)-(Realisasi PAD Tahun n-1)]: (Realisasi PAD Tahun n-1) x 100	2,03	2,25
		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Skor	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	64	65
28	Badan Kepegawaian Daerah	Nilai Sistem Merit	Skor	(Jumlah Skor x Bobot dalam setiap aspek)	200	250
		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Skor	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	69	71
		Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Kepegawaian	Skor	(Total Nilai Persepsi Responden Per Parameter : Total Parameter Yang Terisi) x (1: jumlah parameter) x Nilai Dasar 25	86	89
		Persentase ASN dengan nilai kinerja kriteria "baik"	%	(Jumlah ASN Kab/Batang yang memiliki Kinerja "baik" : Jumlah ASN Kab. Batang) x 100	100	100
		Persentase ASN				

No.	Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	Satuan	Rumus Perhitungan	Target Tahun 2024	Kondisi Akhir Kinerja
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7
		yang meningkat kemampuan nya sesuai bidang tugas	%	(Jumlah realisasi ASN yg dilatih : Jumlah Pendaftar Pelatihan) x 100	70	90
29	Inspektorat	Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan	%	Jumlah laporan hasil pengawasanyang sudah ditindaklanjuti : jumlah laporan hasil pengawasan x 100	85	85
		Persentase pencapaian peningkatan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah	%	pencapaian nilai kondisi tahun berjalan dibandingkan dengan kondisi tahun sebelumnya x100	85	85
		Persentase penanganan pengaduan masyarakat	%	jumlah laporan pengaduan masyarakat yg terselesaikan : jumlah laporan pengaduan masyarakat tahun berjalan x 100	85	85
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	88,75	89,5
		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Skor	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	80	82
30	Kecamatan Bandar	Skor Evaluasi Unit Pelayanan Publik	Indeks	Nilai kepuasan masyarakat terhadap Pelayanan Publik	2,80 (C)	3,20 (B)
		Presentase Status Desa Maju dan Desa Mandiri Kecamatan	%	(Jml desa maju dan desa mandiri : jumlah desa se Kecamatan) x 100	41	41
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	82,1	82,15
		Presentase Jumlah Desa Berkembang menjadi Desa Maju dan Mandiri tiap tahun	%	(Jumlah Desa Berkembang menjadi Desa Maju dan Mandiri : Jumlah Desa)x100	41	41
		Presentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan	%	(jumlah gangguan Trantibum yang terselesaikan : jumlah gangguan Trantibum seluruhnya) x 100	100	100
		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	skor	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	60	60
31	Kecamatan Banyuputih	Skor Evaluasi Unit Pelayanan Publik	Indeks	Nilai kepuasan masyarakat terhadap Pelayanan Publik	2,80 (C)	3,20 (B)
		Presentase Status Desa Maju dan Desa Mandiri Kecamatan	%	(Jml desa maju dan desa mandiri : jumlah desa se Kecamatan) x 100	60	75
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	88	95
		Persentase Desa Berkembang menjadi Desa Maju dan Mandiri tiap tahun	%	(Jumlah Desa Maju dan Desa Mandiri : Jumlah Desa) x100	45,5	45,5
		Presentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan	%	(jumlah gangguan Trantibum yang terselesaikan : jumlah gangguan Trantibum seluruhnya) x 100	100	100
		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Skor	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	60	60
32	Kecamatan Batang	Skor Evaluasi Unit Pelayanan Publik	Indeks	Nilai kepuasan masyarakat terhadap Pelayanan Publik	2,80 (C)	3,20 (B)
		Persentase Status Desa Maju dan Desa Mandiri di Kecamatan	%	(Jml desa maju dan desa mandiri : jumlah desa se Kecamatan) x 100	50	70
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	90	100
		Persentase Desa Berkembang menjadi Desa Maju dan Mandiri tiap tahun	%	(Jumlah Desa Maju dan Desa Mandiri : Jumlah Desa) x100	50	70
		Presentase gangguan		(jumlah gangguan Trantibum yang terselesaikan : jumlah		

No.	Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	Satuan	Rumus Perhitungan	Target Tahun 2024	Kondisi Akhir Kinerja
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7
		trantibum yang dapat diselesaikan	%	gangguan Trantibum seluruhnya) x 100	100	100
		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	skor	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	60	60
33	KecamatanBawang	Skor Evaluasi Unit Pelayanan Publik	Indeks	Nilai kepuasan masyarakat terhadap Pelayanan Publik	2,80 (C)	3,20 (B)
		Presentase Status Desa Maju dan Desa Mandiri di Kecamatan	%	(Jml desa maju dan desa mandiri : jumlah desa se Kecamatan) x 100	70	90
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	87	90
		Persentase Jumlah Desa Berkembang menjadi Desa Maju dan Mandiri tiap tahun	%	(Jumlah Desa Berkembang menjadi Desa Maju dan Mandiri: JumlahDesa) x 100	70	80
		Presentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan	%	(jumlah gangguan Trantibum yang terselesaikan : jumlah gangguan Trantibum seluruhnya) x 100	100	100
		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	skor	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	66	80
34	Kecamatan Blado	Skor Evaluasi Unit Pelayanan Publik	Indeks	Nilai kepuasan masyarakat terhadap Pelayanan Publik	2,80 (C)	3,20 (B)
		Persentase Status Desa Maju dan Desa Mandiri di Kecamatan	%	(Jml desa maju dan desa mandiri : jumlah desa se Kecamatan) x 100	33,6	38,8
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	85	100
		Persentase Desa Berkembang menjadi DesaMaju dan Mandiri tiaptahun	%	(Jumlah Desa Maju dan Mandiri: JumlahDesa) x 100	33,6	38,8
		Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan	%	(jumlah gangguan Trantibum yang terselesaikan : jumlah gangguan Trantibum seluruhnya) x 100	100	100
		Nilai SAKIP PerangkatDaerah	skor	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	75	85
		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	skor	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	66	80
35	KecamatanGringsing	Skor Evaluasi Unit Pelayanan Publik	Indeks	Nilai kepuasan masyarakat terhadap Pelayanan Publik	2,80 (C)	3,20 (B)
		Presentase Status Desa Maju dan Desa Mandiri di Kecamatan	%	(Jml desa maju dan desa mandiri : jumlah desa se Kecamatan) x 100	73,3	86,7
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	88	90
		Persentase Jumlah Desa Berkembang menjadi DesaMaju dan Mandiri tiap tahun	%	(Jumlah Desa Berkembang menjadi Desa Maju dan Mandiri : Jumlah Desa)x100	60	80
		Presentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan	%	(jumlah gangguan Trantibum yang terselesaikan : jumlah gangguan Trantibum seluruhnya) x 100	100	100
		Nilai SAKIP PerangkatDaerah	skor	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	66	68
36	Kecamatan Kandeman	Skor Evaluasi Unit Pelayanan Publik	Indeks	Nilai kepuasan masyarakat terhadap Pelayanan Publik	3,30 (B)	3,50 (B)
		Presentase Status Desa Maju dan Desa Mandiri di Kecamatan	%	(Jml desa maju dan desa mandiri : jumlah desa se Kecamatan) x 100	65	80
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	90	95
		Persentase Jumlah Desa Berkembang menjadi Desa Maju dan Mandiri tiap	%	(Jumlah Desa Berkembang menjadi Desa Maju dan Mandiri	85	90

No.	Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	Satuan	Rumus Perhitungan	Target Tahun 2024	Kondisi Akhir Kinerja
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7
		tahun		: Jumlah Desa)x100		
		Presentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan	%	(jumlah gangguan Trantibum yang terselesaikan : jumlah gangguan Trantibum seluruhnya) x 100	100	100
		Nilai SAKIP PerangkatDaerah	Skor	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	80	85
37	KecamatanLimpung	Skor Evaluasi Unit Pelayanan Publik	Indeks	Nilai kepuasan masyarakat terhadap Pelayanan Publik	2,80 (C)	3,20 (B)
		Persentase Status Desa Maju dan Desa Mandiri di Kecamatan	%	(Jml desa maju dan desa mandiri : jumlah desa se Kecamatan) x 100	58,82	82,35
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	90	95
		Persentase Jumlah Desa Berkembang menjadi DesaMaju dan Mandiri tiap tahun	%	(Jumlah Desa Berkembang menjadi Desa Maju dan Mandiri : Jumlah Desa)x100	41,18	52,94
		Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan	%	(jumlah gangguan Trantibum yang terselesaikan : jumlah gangguan Trantibum seluruhnya) x 100	100	100
		Nilai SAKIP PerangkatDaerah	skor	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	66	70
38	Kecamatan Pecalungan	Skor Evaluasi Unit Pelayanan Publik	Indeks	Nilai kepuasan masyarakat terhadap Pelayanan Publik	2,80 (C)	3,20 (B)
		Presentase Status Desa Maju dan Desa Mandiri Kecamatan	%	(Jml desa maju dan desa mandiri : jumlah desa se Kecamatan) x 100	70	90
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	80	82
		Persentase Jumlah Desa Berkembang menjadi DesaMaju dan Mandiri tiaptahun	%	(Jumlah Desa Berkembang menjadi Desa Maju dan Mandiri : Jumlah Desa)x100	65	80
		Presentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan	%	(jumlah gangguan Trantibum yang terselesaikan : jumlah gangguan Trantibum seluruhnya) x 100	100	100
		Nilai SAKIP PerangkatDaerah	Skor	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	70	80
39	Kecamatan Reban	Skor Evaluasi Unit Pelayanan Publik	Indeks	Nilai kepuasan masyarakat terhadap Pelayanan Publik	2,80 (C)	3,20 (B)
		PersentaseStatus Desa Maju dan Mandiri di Kecamatan	%	(Jumlah Desa Maju dan Desa Mandiri: JumlahDesa) x 100	36,84	52,63
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	100	100
		Persentase Jumlah Desa Berkembang menjadi Desa Majan Mandiri tiap tahun	%	Jumlah Desa Berkembang menjadi Desa Maju dan Mandiri: JumlahDesa) x 100	31,57	42,1
		Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan	%	(jumlah gangguan Trantibum yang terselesaikan : jumlah gangguan Trantibum seluruhnya) x 100	100	100
		Nilai SAKIP PerangkatDaerah	Skor	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	75	80
40	Kecamatan Subah	Skor Evaluasi Unit Pelayanan Publik	Indeks	Nilai kepuasan masyarakat terhadap Pelayanan Publik	2,80 (C)	3,20 (B)
		Presentase Status Desa Maju dan Desa Mandiri di Kecamatan	%	(Jml desa maju dan desa mandiri : jumlah desa se Kecamatan) x 100	35,29	41,18
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	87	90
		Persentase Jumlah Desa Berkembang menjadi DesaMaju dan	%	(Jumlah Desa Berkembang menjadi Desa Maju dan Mandiri : Jumlah Desa) x100	35,29	41,18

No.	Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	Satuan	Rumus Perhitungan	Target Tahun 2024	Kondisi Akhir Kinerja
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7
		Mandiri tiaptahun				
		Presentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan	%	(jumlah gangguan Trantibum yang terselesaikan : jumlah gangguan Trantibum seluruhnya) x 100	100	100
		Nilai SAKIP PerangkatDaerah	skor	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	66	70
41	Kecamatan Tersono	Skor Evaluasi Unit Pelayanan Publik	Indeks	Nilai kepuasan masyarakat terhadap Pelayanan Publik	2,80 (C)	3,20 (B)
		Presentase Status Desa Maju dan Desa Mandiri Kecamatan	%	(Jml desa maju dan desa mandiri : jumlah desa se Kecamatan) x 100	70	90
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	88	90
		Persentase Jumlah Desa Berkembang menjadi DesaMaju dan Mandiri tiap tahun	%	(Jumlah Desa Berkembang menjadi Desa Maju dan Mandiri : Jumlah Desa)x100	70	80
		Presentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan	%	(jumlah gangguan Trantibum yang terselesaikan : jumlah gangguan Trantibum seluruhnya) x 100	100	100
		Nilai SAKIP PerangkatDaerah	skor	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	60	60
42	Kecamatan Tulis	Skor Evaluasi Unit Pelayanan Publik	Indeks	Nilai kepuasan masyarakat terhadap Pelayanan Publik	3,57 (SB)	3,80 (SB)
		Presentase Status Desa Maju dan Desa Mandiri Kecamatan	%	(Jml desa maju dan desa mandiri : jumlah desa se Kecamatan) x 100	70	80
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	89	95
		Persentase Jumlah Desa Berkembang menjadi DesaMaju dan Mandiri tiaptahun	%	(Jumlah Desa Berkembang menjadi Desa Maju dan Mandiri : Jumlah Desa)x100	60	80
		Presentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan	%	(jumlah gangguan Trantibum yang terselesaikan : jumlah gangguan Trantibum seluruhnya) x 100	100	100
		Nilai SAKIP PerangkatDaerah	Skor	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	75	80
43	Kecamatan Warungasem	Skor Evaluasi Unit Pelayanan Publik	Indeks	Nilai kepuasan masyarakat terhadap Pelayanan Publik	2,80 (C)	3,20 (B)
		Presentase Status Desa Maju dan Desa Mandiri Kecamatan	%	(Jml desa maju dan desa mandiri : jumlah desa se Kecamatan) x 100	70	90
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	85	100
		Persentase Jumlah Desa Berkembang menjadi DesaMaju dan Mandiri tiaptahun	%	(Jumlah Desa Berkembang menjadi Desa Maju dan Mandiri : Jumlah Desa)x100	85	90
		Presentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan	%	(jumlah gangguan Trantibum yang terselesaikan : jumlah gangguan Trantibum seluruhnya) x 100	100	100
		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	skor	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	75	85
44	Kecamatan Wonotunggal	Skor Evaluasi Unit Pelayanan Publik	Indeks	Nilai kepuasan masyarakat terhadap Pelayanan Publik	2,80 (C)	3,20 (B)
		Presentase Status Desa Maju dan Desa Mandiri Kecamatan	%	(Jml desa maju dan desa mandiri : jumlah desa se Kecamatan) x 100	33,3	40
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	85	100
		Persentase Jumlah Desa Berkembang		Jumlah Desa Berkembang menjadi Desa Maju dan		

No.	Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	Satuan	Rumus Perhitungan	Target Tahun 2024	Kondisi Akhir Kinerja
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7
		menjadi DesaMaju dan Mandiri tiap tahun	%	Mandiri: JumlahDesa) x 100	40	53,3
		Presentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan	%	(jumlah gangguan Trantibum yang terselesaikan : jumlah gangguan Trantibum seluruhnya) x 100	100	100
		Nilai SAKIP PerangkatDaerah	Skor	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	75	85

Selanjutnya, seluruh indikator kinerja serta program prioritas pembangunan di Kabupaten Batang Tahun 2024 disajikan sebagai berikut:

Tabel 3.4.
Penetapan Indikator Kinerja dan Program Prioritas Kabupaten Batang Tahun 2024

No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Stn	Formulasi Perhitungan	Target indikator Program Tahun 2024
1	2	3	4	5	6
1.01	Pendidikan				
01.01.02	Program Pengelolaan Pendidikan	Angka Partisipasi Sekolah (SPM)	%	Jumlah peserta didik usia 5-15 tahun : jumlah pendudukusia 5-15 tahun x 100	100
		Persentase capaian SPM Pendidikan (SPM)	%	Jumlah jenis layanan SPM Bidang Pendidikan yangtersedia : jumlah totaljenis layanan SPM Bidang Pendidikanx100	100
01.01.03	Program Pengembangan Kurikulum	Persentase satuan pendidikan yang mengembangkann kurikulum muatan lokal	%	Jumlah satuan pendidikan yang mengembangkan kurikulum muatan lokal : jumlah seluruhsatuan pendidikan x 100	90
01.01.04	Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Persentase guru berkualifikasi S1/D4	%	Jumlah guruberkuualifikasi S1/D4 :jumlah guruseluruhnya x 100	100
1.02	Kesehatan				
01.02.02	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan DanUpaya KesehatanMasyarakat	Rata-Rata capaian SPM bidang Kesehatan	%	Jumlah capaiamasing masing indikator SPM : Jumlah indikatorSPM x 100	100
01.02.03	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya ManusiaKesehatan	Persentase tenaga kesehatan yangberijin	%	Jumlah tenaga kesehatan yang mempunyai SIP : jumlah tenagakesehatan yang aktif x100	100
01.02.04	Program Sediaan Farmasi, Alat KesehatanDan Makanan Minuman	Persentase sarana pelayanan kefarmasian yang berijin	%	Jumlah sarana pelayanan kefarmasian yang berijin : jumlahsarana pelayanankefarmasian yang adax 100	82
01.02.05	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Rasio PosyanduMandiri terhadap balita	rasio	Jumlah posyandumandiri : jumlah balita x 100	12,24
01.02.02	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan DanUpaya KesehatanMasyarakat	Persentase penyediaan jenislayanan SPM Bidang Kesehatan	%	Jumlah jenis layanan SPM Bidang Kesehatanyangtersedia : jumlah total jenis layanan SPM Bidang Kesehatan x 100	100
01.02.03	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase tenaga kesehatan yangberijin	%	Jumlah tenaga kesehatan yang mempunyai SIP : jumlah tenagakesehatan yang aktif x100	100

No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Proritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Stn	Formulasi Perhitungan	Target indikator Program Tahun 2024
1	2	3	4	5	6
01.02. 03	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase tenaga kesehatan yang berijin	%	Jumlah tenaga kesehatan yang mempunyai SIP : jumlah tenagakesehatan yang aktif x100	100
	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase ketersediaan sarana, prasarana dan alat kesehatan di RSUD yang sesuai standar / Jumlah gedung, sarana dan prasarana yang diadakan / jumlah gedung yang dibangun	%	jumlah sarana, prasarana dan alat sesuai standar yang dimiliki : dengan jumlah sarana prasarana dan alat sesuai standar yang seharusnya dimiliki x 100	86
1.03	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang				
01.03. 02	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	%	Luas irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi yang dibangun (ha), ditingkatkan (ha), direhabilitasi (ha), dioperasikan dan pelihara (ha) di tahun eksisting : luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota x100	4,25
01.03. 03	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Persentase Jumlah Rumah Tangga yang mendapat akses air minum layak	%	Jumlah Rumah Tangga yang mendapat akses air minum layak : Jumlah Rumah Tangga Seluruhnya x100	100
		Persentase Jumlah Rumah Tangga yang mendapat akses air minum aman	%	Jumlah Rumah Tangga yang mendapat akses air minum aman : Jumlah Rumah Tangga Seluruhnya x100	100
01.03. 04	Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	Persentase TPA dalam kondisi baik	%	Jumlah TPA dalam kondisi baik : Jumlah TPA seluruhnya x100	100
01.03. 05	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Persentase jumlah penduduk yang memperoleh layanan pengelolaan air limbah domestik (indikator SPM)	%	Jumlah Rumah Tangga Bersanitasi : Jumlah Rumah Tangga Seluruhnya x100	100
01.03. 06	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	Persentase drainase dalam kondisi baik/pembuangan aliran air	%	Panjang drainase tersumbat pembuangan aliran air (Km) : Panjang seluruh drainase di daerah kabupaten (Km) x 100	64,41
01.03. 07	Program Pengembangan Permukiman	Persentase Infrastruktur Lingkungan Perumahan yang layak	%	Panjang jalan dan drainase lingkungan : Panjang jalan dan drainase lingkungan seluruhnya x100	56,04
01.03. 08	Program Penataan Bangunan Gedung	Persentase Pemanfaatan Gedung yang sesuai dengan peruntukan	%	Jumlah Gedung negara yang sesuai dengan peruntukkan : Jumlah Bangunan Gedung negara yang menjadi kewenangan Pekab x 100	100
01.03. 10	Program Penyelenggaraan Jalan	Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik (> 40 KM/Jam)	%	Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik : Panjang seluruh jalan kabupaten di daerah tersebut x 100	60,5
01.03. 11	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Rasio tenaga operator/teknisi /analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	%	Jumlah tenaga kerja konstruksi operator dan teknis/analisis : Jumlah kebutuhan tenaga operator dan teknis/analisis di wilayah Kabupaten/Kota x100	12,5
01.03. 12	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Persentase Penetapan Rencana Rinci Tata Ruang	%	Luas wilayah RRTR yang ditetapkan : luas wilayah RRTR yang ditargetkan x 100	52,4
1.04	Perumahan dan Kawasan Permukiman				
01.04. 02	Program Pengembangan Perumahan	Persentase RLH bagi korban bencana / terdampak program pemerintah	%	Jumlah rumah korban bencana yg ditangani : Jumlah Rumah Korban Bencana seluruhnya x100	100
01.04.	Program Kawasan Permukiman	Persentase Luasan Kawasan Kumuh yang tertangani	%	Jumlah Luas kawasan kumuh yang tertangani : Jumlah luas kawasan kumuh seluruhnya x 100	63

No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Stn	Formulasi Perhitungan	Target indikator Program Tahun 2024
1	2	3	4	5	6
03					
01.04.05	Program Peningkatan Prasarana, Saranadan Utilitas Umum(PSU)	Persentase Perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	%	Jumlah Perumahan yang sdh dilengkapi PSU : Jumlah Perumahan se Kab. Batang x 100	81
1.05	Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat				
01.05.02	Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	Persentase gangguan ketenteraman dan ketertiban umum yang tertangani	%	Jumlah laporan gangguan trantib yang tertangani : jumlah seluruh laporan gangguan trantib*100	100
01.05.03	Program Penanggulangan Bencana	Persentase Korban Bencana Alam Yang ditangani (indikator SPM)	%	Jumlah korban bencana yang ditangani : Jumlah Korban Bencana X100	100
		Persentase Jumlah Desa/Kel yang mendapat Pelayanan Penanggulangan Bencana (Indikator SPM)	%	(Jml desa Terkena bencana mendapat penanggulangan bencana : Jml. desa terkena bencana) x 100	100
01.05.04	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	Persentase waktu tanggap "respon time" (indikator SPM)	%	Jumlah penanganan kebakaran sesuai respon time : jumlah kejadian kebakaran*100	100
01.06	Sosial				
01.06.02	Program Pemberdayaan Sosial	Cakupan pengembangan Potensi sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten (indikator SPM)	%	Jumlah Potensi sumber Kesejahteraan Sosial ditingkatkan kemampuannya : Jumlah PSKS di Daerah Kabupaten X100	100
01.06.03	Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	Persentase Warga Negara Migran korban tidak kekerasan yang berhasil dipulangkan	%	jumlah warga negara migran yang berhasil dipulangkan : Jumlah warga migran korban kekerasan x 100	40
01.06.04	Program Rehabilitasi Sosial	Persentase PMKS yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	%	Jumlah PMKS yang terpenuhi kebutuhan dasarnya : Jumlah PMKS di Kabupaten Batang x 100	100
01.06.05	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Persentase capaian layanan pemenuhan SPM sosial (SPM)	%	Jumlah jenis layanan SPM Urusan sosial yang tersedia : jumlah total jenis layanan SPM Urusan sosial x 100	100
01.06.06	Program Penanganan Bencana	Persentase Korban Bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya (SPM)	%	jumlah korban bencana alam dan sosial terpenuhi kebutuhan dasarnya : Jumlah korban bencana alam dan sosial x 100	100
01.06.07	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Persentase Taman Makam Pahlawan dalam kondisi baik	%	Persentase Taman Makam Pahlawan dalam kondisi baik : Jumlah Taman Makam Pahlawan x 100	100
2	Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar				
2.07	Tenaga Kerja				
02.07.02	Program Perencanaan Tenaga Kerja	Persentase Kegiatan yang mengacu RTK	%	Jumlah kegiatan keseluruhan yang mengacu ke RTKD : Jumlah kegiatan keseluruhan yang dilaksanakan di Kabupaten / Kota x 100	100
02.07.03	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Rasio penduduk yang bekerja	%	Jumlah Penduduk 15th ke atas : Angkatan Kerja x 100	72
02.07.04	Program Penempatan Tenaga Kerja	Persentase Pencari pekerjayang mendapat pekerjaan	%	Jumlah pencari kerja yang ditempatkan : dengan jumlah pencari kerja terdaftar x 100	36
02.07.05	Program Hubungan Industrial	Penurunan Jumlah Perselisihan HI	rasio	Jumlah sengketa pengusaha pekerja : jumlah perusahaan x 100	14,6
2.08	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak				

No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Stn	Formulasi Perhitungan	Target indikator Program Tahun 2024
1	2	3	4	5	6
02.08.02	Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	Persentase ARG pada belanja pelaksanaan program dan kegiatan di APBD	%	Jml ARG pada Anggaran Program Kegiatan APBD : jml seluruh anggaran pada Program Kegiatan x 100	3,2
02.08.03	Program Perlindungan Perempuan	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	Index	Jml Perempuan Yg Mengalami Kekerasan : Jml Penduduk Perempuan	100
02.08.04	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Prosentase lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga yang mendapatkan pembinaan dan penguatan kelembagaan	%	jml lembaga penyediaan layanan peningkatan kualitas keluarga yang mendapatkan pembinaan dan penguatan kelembagaan/jml lembaga penyediaan layanan peningkatan kualitas keluarga x 100	21,43
02.08.05	Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak	cakupan data pilah gender dan anak	%	jumlah jenis data yang tersedia : jumlah jenis data yang dibutuhkan x100	100
02.08.06	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	cakupan kecamatan layak anak	%	Jml Kec yg sudah layak anak : jml kecamatan x 100	80
02.08.07	Program Perlindungan Khusus Anak	Cakupan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih didalam unit pelayanan terpadu	%	Jml aduan kekerasan thd perempuan yg trtangani : Jml kekerasan thd perempuan yg dilaporkan x 100	100
2.09	Pangan				
02.09.02	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	Persentase kegiatan pengelolaan sumber daya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan	%	Jumlah kegiatan pengelolaan sumber daya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan : jumlah seluruh kegiatan ketahanan pangan x 100	12,5
02.09.03	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Skor Pola Pangan Harapan	%	Hasil kali konsumsi energi dengan bobot dibandingkan dengan Skor Maksimal Kelompok Pangan	89,5
02.09.04	Program Penanganan Kerawanan Pangan	Rasio Desamandiri Pangan	%	Desa yang mendapatkan fasilitas Desa Mandiri Pangan : jumlah desa di Kab. Batang x 100	16
02.09.05	Program Pengawasan Keamanan Pangan	Persentase Pengawasan Keamanan Pangan	%	Jumlah daerah pengawasan keamanan pangan : jumlah daerah aman pangan x100	100
2.10	Pertanahan				
02.10.05	Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	Persentase permohonan fasilitasi penyelesaian permasalahan pertanahan yang tertangani	%	jumlah permohonan yang terfasilitasi : jumlah permohonan tanah seluruhnya x 100	80
2.11	Lingkungan Hidup				
02.11.02	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Tingkat ketersediaan dokumen perencanaan Lingkungan Hidup yang diintegrasikan dalam dokumen perencanaan daerah	%	jumlah dokumen yang disusun : jumlah dokumen yang dibutuhkan x 100	100
02.11.03	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Air	indeks	Hasil perhitungan indeks kualitas air (Permendagri 86/2017)	50
		Indeks Kualitas Udara	indeks	Hasil perhitungan indeks kualitas udara (Permendagri 86/2017)	80
02.11.04	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Persentase RTH dalam kondisi baik	%	Jumlah RTH yang dikelola dalam kondisi baik : jumlah RTH eksisting x 100	60
02.11.05	Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)	Persentase persetujuan teknis pengelolaan limbah B3 yang diberikan	%	Jumlah persetujuan yang dikeluarkan : jumlah permohonan x 100	100
				Jumlah ketaatan	

No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Proritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Stn	Formulasi Perhitungan	Target indikator Program Tahun 2024
1	2	3	4	5	6
02.11.06	Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Ketaatan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan terhadap PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah	%	terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH : izin yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten yang ditangani : Total penanggung jawab usaha dan atau kegiatan yang di bina dan diawasi terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten x 100	60
02.11.08	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk masyarakat	Persentase masyarakat/komunitas peduli LH yang mendapat edukasi Lingkungan Hidup	%	Jumlah komunitas peduli LH yang diedukasi : Jumlah komunitas LH yang direncanakan edukasi x 100	100
02.11.09	Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Persentase Dunia Pendidikan yang mendapat penghargaan lingkungan tingkat kabupaten	%	Jumlah Dunia Pendidikan yang memenuhi nilai standar : jumlah sekolah yang mendaftar x 100	90
02.11.11	Program Pengelolaan Sampahan	Persentase penanganan sampah	%	Jumlah sampah yang tertangani : jumlah timbulan sampah x 100	70
2.12	Kependudukan dan Pencatatan Sipil				
02.12.02	Program Pendaftaran Penduduk	Persentase identitas kependudukan (KTP dan KIA) yang telah diterbitkan	%	[(Jumlah penduduk memiliki KTP el : Jumlah penduduk usia 17 th ke atas) + (Jumlah penduduk memiliki KIA : jumlah penduduk di bawah usia 17 th) : 2] x 100	85
02.12.03	Program Pencatatan Sipil	Persentase penduduk yang memiliki akta nikah dan akta lahir	%	[(Jumlah kepemilikan akta nikah : jumlah pemohon) + (jumlah akta usia bayi 0-5 th : penduduk usia 0-5 th) : 2] x 100	97,4
02.12.04	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase penyajian data kependudukan yang valid	%	(Jumlah data kependudukan yang valid : jumlah seluruh data kependudukan) x 100	95,4
2.13	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa				
02.13.02	Program Penataan Desa	persentase budaya desa yang dilestarikan	%	jumlah adat dan budaya desa yang dilestarikan : jumlah adat budaya desa x 100	40
02.13.04	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase desayang tertib administrasi yang sesuai dengan peraturan perundang undangan	desa	jumlah desa yang dibangun dan diawasi penyelenggaraan administrasinya : total desa di Kabupaten Batang x 100	46,03
02.13.05	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	Persentase lembaga kemasyarakatan desa (LKD) yang aktif dalam pemberdayaan desa	%	jumlah LKD yang aktif : jumlah LKD keseluruhan x 100	70
2.14	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana				
02.14.02	Program Pengendalian Penduduk	Persentase jenis data kependudukan bidang keluarga berencana	%	Jml jenis data kependudukan bid KB : Target jml jenis data kependudukan bid. KB x 100	100
02.14.03	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	%	Jml peserta KB Aktif Modern / Jml Pasangan Usia Subur x 100%	73,84
		Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	%	Jml PUS yg ingin ber-KB tetapi tidak terlayani/Jml Pasangan Usia Subur x 100%	13,36
02.14.04	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Cakupan pembangunan ketahanan dan kesejahteraan keluarga melalui kelompok tribina (BKB, BKR, dan BKL)	%	Jumlah keluarga yang didampingi kelompok Tribina : Jumlah Keluarga x 100	78,21
2.15	Perhubungan				

No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Stn	Formulasi Perhitungan	Target indikator Program Tahun 2024
1	2	3	4	5	6
02.15. 02	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Persentase terselenggaranya a lalu lintas dan angkutan jalan yang lancar, aman, dan selamat	%	Jumlah kegiatan penyelenggaraan LLAJ yang dilaksanakan : jumlah kegiatan penyelenggaraan LLAJ yang ditetapkan x 100	87
2.16	Komunikasi dan Informatika				
02.16. 02	Program Informasi Dan Komunikasi Publik	Persentase penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota	%	Jumlah informasi yang diakses publik : jumlah penyebaran informasi x 100	69
02.16. 03	Program Aplikasi Informatika	Persentase Jumlah Layanan yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi.	%	Jumlah layanan yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi : jumlah layanan x 100	70
2.17	Koperasi dan UKM				
02.17. 04	Program Penilaian dan Kesehatan KSP/USP Koperasi	Persentase koperasi aktif	%	(jumlah koperasi aktif : jumlah koperasi keseluruhan) x 100	68
02.17. 05	Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	persentase peserta pelatihan dengan predikat baik	%	(jumlah peserta pelatihan/diklat yang lulus : jumlah peserta pelatihan/diklat) x 100	90
02.17. 06	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	persentase peserta diklat dengan predikat baik	%	(jumlah peserta pelatihan/diklat yang lulus : jumlah peserta pelatihan/diklat) x 100	90
02.17. 07	Program Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil menengah UKM	Persentase Pertambahan Wira Usaha Baru	%	(jumlah UKM Baru tahun n - jumlah UKM tahun n-1) : jumlah UKM tahun n-1 } x 100	10
02.17. 08	Program Pengembangan UMKM	Persentase produk UMKM yang terstandarisasi	%	Jumlah UKM yang terstandarisasi Tahun N - Jumlah UKM yang terstandarisasi Tahun N-1 : Jumlah UMKM yang terstandarisasi Tahun N-1) X 100	15
	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Presentase Koperasi yang diawasi dan diperiksa	%	Jumlah Koperasi yang diawasi dan diperiksa pada tahun N : Jumlah Koperasi pada tahun n x 100	45,21
2.18	Penanaman Modal				
02.18. 02	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Persentase peningkatan jumlah investor	%	Jumlah investor tahun n dikurangi Jumlah investor tahun (n-1) : jumlah investor tahun n x 100	40
02.18. 03	Program Promosi Penanaman Modal	Persentase promosi di kabupaten Batang	%	Jumlah promosi yang direncanakan : jumlah promosi yang dilaksanakan x 100	100
02.18. 04	Program Pelayanan Penanaman Modal	Persentase ijin yang diterbitkan	%	Jumlah pemohon ijin usaha : jumlah ijin yang diterbitkan x 100	100
02.18. 05	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase perusahaan yang mematuhi ketentuan penanaman modal	%	Jumlah Perusahaan yang menyampaikan LKPM : jumlah perusahaan x 100	7,5
02.18. 06	Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Persentase data dan informasi penanaman modal yang tersedia	%	Jumlah pemberian pelayanan data : jumlah pemohon data x 100	45
2.19	Kepemudaan dan Olahraga				
02.19. 02	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Persentase Organisasi Kepemudaan yang dibina	%	jumlah organisasi kepemudaan yang dibina : jumlah organisasi kepemudaan yang terdaftar x 100	32
02.19. 03	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	capaian medali kejuaraan	medali	Jumlah total medali yang didapat selama 1 Tahun	40
02.19. 04	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	Penghargaan yang diterima	%	Jumlah penghargaan yang diterima : jumlah kegiatan yang diikuti X 100	10
2.20	Statistik				
02.20. 02	Program Penyelenggaraan Statistik Sektor	Persentase ketersediaan data statistik sektoral	%	Jumlah data statistik sektoral yang terintegrasi dalam sistem informasi : Jumlah data statistik sektoral yang terkumpul x 100	100

No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Stn	Formulasi Perhitungan	Target indikator Program Tahun 2024
1	2	3	4	5	6
2.21	Persandian				
02.21.02	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Persentase capaian sistem elektronik yang dilakukan pengamanan setiap tahunnya	%	Jumlah Sistem Elektronik yang berhasil dilakukan pengamanan : jumlah seluruh sistem elektronik yang tersedia setiap tahun x 100	100
2.22	Kebudayaan				
02.22.02	Program Pengembangan Kebudayaan	Persentase festival seni yang dilaksanakan	%	jumlah festival seni yang diselenggarakan pada tahun berjalan (n) : jumlah festival seni yang ditargetkan x 100	100
02.22.03	Program Pengembangan Kesenian Tradisional	Persentase Komunitas/sanggar kesenian yang difasilitasi	%	jumlah komunitas / sanggar kesenian yang difasilitasi : jumlah komunitas / sanggar seni yang terdaftar x 100	70
02.22.05	Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	Persentase benda cagar budaya yang dilestarikan	%	Jumlah benda cagar budaya yang dilestarikan : dengan jumlah seluruh benda cagar budaya x 100	80
2.23	Perpustakaan				
02.23.02	Program Pembinaan Perpustakaan	persentase peningkatan pengunjung perpustakaan per tahun	%	(Jumlah peningkatan pengunjung : Jumlah pengunjung tahun sebelumnya) x 100	0,16
2.24	Kearsipan				
02.24.02	Program Pengelolaan Arsip	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional (IKK outcome)	indeks	$T = \frac{(a + i + s + j)}{4}$ T = tingkat ketersediaan arsip, a = tase arsip aktif yang telah dibuatkan daftar arsip, i = tase arsip inaktif yang telah dibuatkan daftar arsip, s = tase arsip statis yang telah dibuatkan sarana bantu temu balik, j = tase arsip yang dimasukkan dalam SIKN melalui JIKN	75,4
02.24.03	Program Perlindungan Dan Penyelamatan Arsip	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat (IKK outcome)	indeks	$T = \frac{(m + b + g + a + c + i)}{6}$ m = tingkat kesesuaian kegiatan pemusnahan arsip dengan NSPK, b = tingkat kesesuaian kegiatan perlindungan dan penyelamatan arsip dari bencana dengan NSPK, g = tingkat kesesuaian kegiatan penyelamatan arsip Perangkat Daerah yang digabung dan atau dibubarkan dan pemekaran daerah kabupaten/kota dengan NSPK, a = tingkat kesesuaian kegiatan autentikasi arsip statis dan arsip hasil alih media dengan NSPK, c = tingkat kesesuaian kegiatan pencarian arsip statis dengan NSPK, i = tingkat kesesuaian kegiatan penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup dengan NSPK	22,4
3	Urusan Pilihan				
3.25	Kelautan dan Perikanan				
03.25.03	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Persentase Capaian Produksi Perikanan Tangkap	%	(Realisasi Capaian Produksi Perikanan Tangkap : Target Produksi Perikanan Tangkap) x 100	96
03.25.04	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Persentase Capaian Produksi Perikanan Budidaya	%	(Realisasi Produksi Perikanan Budidaya : Target Produksi Perikanan Budidaya) x 100	93
03.25.05	Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan	Capaian Bina Kelompok Masyarakat Pengawas	%	(Realisasi Jumlah Pokmaswas yang Diberdayakan : Target) x 100	100
03.25.06	Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	Persentase Capaian Tingkat konsumsi makan ikan	%	(Realisasi Capaian Tingkat Konsumsi Makan Ikan : Target Tingkat Konsumsi Makan Ikan) x 100	96
3.26	Pariwisata				

No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Proritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Stn	Formulasi Perhitungan	Target indikator Program Tahun 2024
1	2	3	4	5	6
03.26. 02	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Persentase peningkatan pendapatan sektor pariwisata	%	(Jumlah pendapatan sektor pariwisata tahun n dikurangi Jumlah pendapatan sektor pariwisata tahun n-1 : Jumlah pemdapatan sektor pariwisata tahun n-1x 100	17
03.26. 03	Program Pemasaran Pariwisata	Persentase peningkatan wisatawan	%	Jumlah wisatawan tahun n dikurangi Jumlah wisatawan tahun n-1 : Jumlah wisatawan tahun n-1 x 100	20
03.26. 04	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	Persentase jumlah ekonomikreatif yang memiliki HAKI	%	jumlah produk ekonomi kreatif yang memiliki HAKI :jumlah produkekonomi kreatif yang terdaftar X 100	20
03.26. 05	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	Persentase SDMPariwisata danekonomi kreatif yang bersertifikat	%	Jumlah SDM Pariwisata danekonomi kreatif yang bersertifikat : Jumlah SDM Pariwisata dan ekonomi kreatif X 100	35
3.27	Pertanian				
03.27. 02	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Produktivitas pertanian pangan per hektar per tahun	%	Jumlah produksi pertanian pangan per hektar per tahun : luas panen X 100	0,0103
03.27. 03	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Persentase pelaksanaan kegiatan pembangunan prasarana pertanian	%	realisasi pelaksanaan kegiatan pembangunan prasarana pertanian : rencana kegiatan pembangunan prasarana pertanianX 100	100
03.27. 04	Program Pengendalian Kesehatan HewanDan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Capaian Jumlah Hewan yang Terobati	%	(Realisasi Jumlah Hewan yang Terobati di Puskesmas : Target Hewan yang Terobati di Puskesmas) x 100	100
03.27. 05	Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Persentase Pengendalian dan penanggulangan Bencana Pertanian	%	(jumlah daerah pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian : jumlah seluruh daerah yang terkena bencana pertanian)x100	100
03.27. 06	Program Perizinan Usaha Pertanian	Persentase Jumlah Asuransi Usaha Ternak Sapi/Kerbau dan Calon/Penerima (Orang/Perusahaan) Pendampingan Perizinan Usaha Pernakanan	%	(Realisasi Jumlah Asuransi Usaha Ternak Sapi/Kerbau dan Calon/Penerima (Orang/Perusahaan) Pendampingan Perizinan UsahaPernakanan : Target) x 100	100
03.27. 07	Program Penyuluhan Pertanian	Persentase kenaikan kualitas dan kapasitas SDM Penyuluh, pelaku utama dan pelaku usaha Bidang Pertanian	%	jumlah Penyuluh, pelaku utama dan pelaku usaha Bidang Pertanian yang mengikuti pelatihan : jumlah Penyuluh, pelaku utama dan pelaku usaha di Kabupaten x 100	100
		Persentase validitas data Pertanian	%	jumlah kesesuaian data yang tervalidasi : jumlah kesesuaian data yang ada x 100	100
		Persentase kenaikan pelaksanaan Penyelenggaraan Penyuluhan	%	jumlah data laporan yang tersedia : jumlah BPP x 100	100
03.27. 02	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Prosentae Capaian Populasi Ternak dan Produksi Hasil Pernakanan	%	(Realisasi Populasi Ternak dan Produksi Hasil Pernakanan : Target) x 100	85
03.27. 03	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Capaian Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	%	(Realisasi Peningkatan Prasarana Pertanian yang Dilakukan Pembangunan, Perawatan dan Rehabilitasi : Target) x 100	100
03.27. 05	Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Persentase Capaian Jumlah Hewan yang Terobati	%	(Realisasi Jumlah Hewan Ternak yang Terobati : Target Hewan Ternak yang Terobati) x 100	100
3.30	Perdagangan				
03.30. 02	Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan	Persentase Verifikasi Teknis	%	Jumlah verifikasi teknis : Jumlah yang pengajuan x100	100
03.30. 03	Program Peningkatan Sarana Distribusi	Persentase pengembangan dan	%	jumlah pasar rakyat dan Shelter PKL yang direvitalisasi/renovasi : jumlah pasar rakyat dan Shelter	36,36

No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Stn	Formulasi Perhitungan	Target indikator Program Tahun 2024
1	2	3	4	5	6
	Perdagangan	pengelolaan sarana distribusi perdagangan		PKL keseluruhan x100	
03.30.04	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	Persentase barang kebutuhan pokok yang stabilitas harganya terjaga	%	barang pokok yang stabil harganya : seluruh barang kebutuhan pokok x 100	75
03.30.05	Program Pengembangan Ekspor	nilai ekspor perdagangan	USD	nilai ekspor perdagangan - nilai impor pada tahun n kabupaten kota	59.034.726
03.30.06	Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen	Persentase alat ukur, timbang, takar dan perlengkapannya (UTTP) bertanda terasah yang berlaku	%	Jumlah UTTP berterasa / tera ulang : Potensi UTTP x 100	75
03.30.07	Program Penggunaan dan Pemasaran Produk dalam negeri	Persentase Pelaksanaan Pameran dagang dalam negeri di Kabupaten Batang	%	Jumlah Pelaksanaan pameran : jumlah pameran yang direncanakan x 100	100
3.31	Perindustrian				
03.31.02	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	persentase peningkatan jumlah pelaku IKM	%	jumlah pelaku IKM tahun n- jumlah pelaku IKM tahun n-1) : jumlah pelaku IKM tahun n-1 x 100	0,0078
03.31.03	Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota	persentase peningkatan jumlah perijinan berusaha sektor industri	%	jumlah izin usaha tahun n- jumlah izin usaha tahun n-1) : jumlah izin usaha tahun n-1 x 100	84
03.31.04	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	persentase jumlah Industri dalam SIINas	%	jumlah Industri dalam SIINas tahun n- jumlah Industri dalam SIINas tahun n-1) : jumlah Industri dalam SIINas tahun n-1 x 100	84
3.32	Transmigrasi				
03.32.03	Program Pembangunan Kawasan transmigrasi	persentase transmigran yang berhasil ditempatkan	%	Jumlah Transmigran yang ditempatkan : Jumlah Transmigran yang mendaftar x 100	100
4	Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan				
4.01	Sekretariat Daerah				
04.01.02	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase perangkat daerah yang menyusun LPPD tepat waktu	%	Jumlah tersusunnya LPPD tepat waktu : jumlah keseluruhan LPPD perangkat daerah x 100	100
		Persentase Penyelenggaraan Administrasi Tata Pemerintahan yang difasilitasi	%	Jumlah penyelenggaraan administrasi tata pemerintahan yang terfasilitasi : jumlah keseluruhan administrasi tata pemerintahan x 100	100
		Presentase kegiatan keagamaan dan kemasyarakatan yang difasilitasi	%	jml kegiatan yang terlaksana : jml kegiatan yg direncanakan x 100	100
		Persentase Penyusunan Produk Hukum Daerah yang berhasil difasilitasi	%	(realisasi persentase penyusunan produk hukum daerah yang berhasil difasilitasi + persentase perkarahukum yang terselesaikan + persentase penyediaan informasi produk) : (persentase target penyusunan produk hukum daerah yang berhasil difasilitasi + persentase perkarahukum yang terselesaikan + persentase penyediaan informasi produk) x 100	95
04.01.03	Program Perekonomian Dan Pembangunan	Persentase Bagi Hasil BUMD terhadap APBD (Penyertaan Modal)	%	(Jumlah deviden : Jumlah Penyertaan Modal) x 100	15
		Persentase kebijakan perekonomian dan SDA yang ditindaklanjuti	%	(Jumlah kebijakan yang ditindaklanjuti : jumlah kebijakan yang	100

No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Stn	Formulasi Perhitungan	Target indikator Program Tahun 2024
1	2	3	4	5	6
				dikeluarkan baik pusat atau daerah) x 100	
		Persentase Pelaksanaan APBD pada SKPD yang sesuai target	%	Jumlah paket pekerjaan yang dilaksanakan : Jumlah seluruh paket pekerjaan yang direncanakan x 100	96
		Persentase lelang melalui e-procurement	%	Jumlah Paket yang dilelang : Jumlah Total Rencana Paket Lelang x 100	100
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Tingkat kematangan organisasi Perangkat Daerah (KOPD)	skor	Total nilai : jumlah PD	32 (sedang)
		Persentase Perangkat Daerah yang menerapkan Standar Operasional Prosedur (SOP)	%	Jumlah PD yang mendapat telah menerapkan SOP : jumlah PD x 100	100
		Persentase kegiatan keprotokolan, komunikasi pimpinan dan dokumentasi Kepala Daerah	%	Jumlah kegiatan pimpinan yang terfasilitasi : jumlah permohonan fasilitasi kegiatan pimpinan x 100	100
		Persentase kebutuhan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang terpenuhi	%	Realisasi Kegiatan Administrasi Keuangan dan operasional KDH dan WKDH, Fasilitasi Kerumahtanggaan Setda : target x 100	90
4.02	Sekretariat DPRD				
04.02.02	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD	Persentase Peraturan Daerah non APBD yang ditetapkan	%	Capaian Peraturan Daerah non APBD yang terbentuk : target Peraturan Daerah non APBD yang ditetapkan per tahun x 100 (ket: target Perda non APBD yang ditetapkan per tahun sebanyak 5 Perda)	100
		Persentase kUA/PPA dan Perda APBD yang ditetapkan	%	Capaian Peraturan Daerah APBD yang terbentuk : target Peraturan Daerah APBD yang ditetapkan per tahun x 100 (ket: target Perda APBD yang ditetapkan per tahun sebanyak 3 Perda, dan 2 Perbup KUA/PPA)	100
		Persentase pengawasan penyelenggaraan pemerintahan yang terlaksana dan Kode Etik DPRD	%	Capaian kegiatan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan yang terlaksana : target kegiatan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan x 100 (target sesuai jumlah kegiatan pengawasan yang dijadwalkan pertahun)	100
		Persentase peningkatan kapasitas Anggota DPRD	%	Rata-rata capaian kinerja fasilitasi kegiatan fasilitasi peningkatan kapasitas DPRD	100
		Persentase penyerapan aspirasi masyarakat	%	Jumlah anggota DPRD yg melaksanakan penyerapan aspirasi masyarakat : jumlah anggota DPRD x 100	100
		Persentase fasilitasi tugas Pimpinan dan Alat Kelengkapan DPRD	%	Jumlah kegiatan Alat Kelengkapan Dewan yang difasilitasi : jumlah kegiatan Alat Kelengkapan Dewan yang dijadwalkan x 100	100
		Persentase fasilitasi layanan administrasi DPRD	%	Jumlah kegiatan administrasi Dewan yang difasilitasi : jumlah kegiatan administrasi Dewan yang dijadwalkan x 100	100
		Persentase fasilitasi layanan keuangan dan kesejahteraan DPRD	%	Jumlah anggota DPRD yang mendapat layanan keuangan dan kesejahteraan DPRD : jumlah Anggota DPRD x 100	100
5	Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan				
5.01	Perencanaan				
05.01.	Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan tepat waktu	%	jumlah dokumen perencanaan yang tersedia tepat waktu : jumlah dokumen yang dihasilkan x 100	100

No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Stn	Formulasi Perhitungan	Target indikator Program Tahun 2024
1	2	3	4	5	6
02	Daerah				
		Persentase ketersediaan dokumen evaluasi dan pelaporan	%	jumlah dokumen evaluasi dan pelaporan yang dievaluasi : jumlah dokumen evaluasi dan pelaporan yang dihasilkan x 100	100
		Persentase ketersediaan data dan informasi sebagai bahan analisis perencanaan pembangunan daerah	%	jumlah elemen data/informasi yang tersedia : jumlah elemen data/informasi yang dibutuhkan sebagai bahan analisis x100	100
05.01.03	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase indikator program prioritas pembangunan bidang PSDA yang mencapai target	%	(jumlah indikator program prioritas PD lingkup koord bid. PSDA yang mencapai target : jumlah indikator program prioritas PD lingkup koord bid. PSDA) x 100	90,5
		Persentase indikator program prioritas pembangunan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia yang mencapai target	%	(jumlah indikator program prioritas PD lingkup koord bid. PPM yang mencapai target : jumlah indikator program prioritas PD lingkup koord bid. PPM) x 100	90,5
		Persentase indikator program prioritas pembangunan bidang IPW yang mencapai target	%	(jumlah indikator program prioritas PD lingkup koord bid. IPW yang mencapai target : jumlah indikator program prioritas PD lingkup koord bid. IPW) x 100	90,5
5.02	Keuangan				
05.02.03	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Penyampaian Raperda APBD tepat waktu	status	Tepat waktu/tidak tepat waktu	Tepat waktu
		Penyampaian Raperda Pertanggungjawaban tepat waktu	status	Tepat waktu/tidak tepat waktu	Tepat waktu
		Persentase Realisasi serapan belanja terhadap anggaran belanja	%	realisasi belanja : anggaran belanja x 100	90
05.02.03	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase tersusunnya data aset Pemdamerurut lokasi, legalitas kepemilikan, pemanfaatan dan kondisinya	%	Dokumen KIB per SKPD se Kabupaten Batang	100
05.02.04	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Peningkatan Penerimaan PAD	%	[(Realisasi tahun n) - (Realisasi tahun n-1)] : Realisasi tahun n-1 x 100	2,03
5.03	Kepegawaian				
05.03.02	Program Kepegawaian Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian yang selesai tepat waktu	%	(Jumlah jenis layanan administrasi kepegawaian yang selesai tepat waktu : Jumlah semua layanan administrasi kepegawaian yang ada) x 100	100
5.04	Pendidikan dan Pelatihan				
05.04.02	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Persentase indikator program prioritas sub koordinator diklat yang mencapai target	%	(jumlah indikator program prioritas PD lingkup sub koordinator diklat yang mencapai target : jumlah indikator program prioritas PD lingkup sub koordinator diklat) x 100	100
5.05	Penelitian dan Pengembangan				
05.05.02	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Persentase rekomendasi hasil kegiatan penelitian dan pengembangan yang ditindaklanjuti	%	(Jumlah rekomendasi utama kegiatan kelitbangan yg mjd bahan masukan penyusunan renja : Kegiatan kelitbangan yang dilaksanakan) x 100	55
6	Urusan Pengawasan Urusan Pemerintahan				
6.01	Pengawasan				
06.01.02	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Persentase Jumlah Pemeriksaan Yang Dilakukan	%	Jumlah LHP yang diterbitkan dibandingkan jumlah obrik x 100	100
06.01.03	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan	Level SPIP	level	kondisi tahun berjalan dibandingkan dengan kondisi tahun sebelumnya dalam satu	3

No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Stn	Formulasi Perhitungan	Target indikator Program Tahun 2024
1	2	3	4	5	6
	Asistensi			tahun anggaran	
		Persentase kapabilitas APIP	%	kondisi tahun berjalan : kondisi tahun sebelumnya dalam satu tahun anggaran x 100	70
7	Unsur Kewilayahan				
7.01	Kecamatan				
07.01. 02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase usulan perencanaan pembangunan yang masuk dalam prioritas atau perankingan	%	(Usulan yang masuk perankingan :Jumlah UsulanPerencanaan) x 100	75
07.01. 03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Lembaga Kemasyarakatan di Desa dan Kelurahan yang Aktif	%	(Jumlah LKD dan kelurahan Aktif : Jumlah LKD) x 100 LKD terdiri atas LPM, PKK, Karang Taruna, Posyandu, RT, RW	90
07.01. 04	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan	%	(Gangguan Trantibum yang terselesaikan :Gangguan Trantibum) x 100	100
07.01. 05	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan dengan baik	%	(Jumlah acara yang dilaksanakan dalam rangka hari besar nasional, bintek wasbang, dan rakor forkompimcam dengan baik : jumlah acara) x 100	100
07.01. 06	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase desayang melaksanakan administrasi serta pengelolaan keuangan desayang tertib dan baik	%	(Jumlah desa dengan pengelolaan keuangan baik :Jumlah desa) x100	85
07.01. 02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	persentase pelayanan PATEN yang sesuai SOP	%	(Pelayanan PATEN yang sesuai SOP :Jumlah Pelayanan PATEN) x 100	75
07.01. 03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Lembaga Kemasyarakatan di Desa yang Aktif	%	(Jumlah LKD dan kelurahan Aktif : Jumlah LKD) x 100 LKD terdiri atas LPM, PKK, Karang Taruna, Posyandu, RT, RW	90
07.01. 04	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan	%	(Gangguan Trantibum yang terselesaikan :Gangguan Trantibum) x 100	100
07.01. 05	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan dengan baik	%	(Jumlah acara yang dilaksanakan dalam rangka hari besar nasional, bintek wasbang, dan rakor forkompimcam dengan baik : jumlah acara) x 100	100
07.01. 06	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase desayang melaksanakan administrasi serta pengelolaan keuangan desayang tertib dan baik	%	(Jumlah desa dengan pengelolaan keuangan baik :Jumlah desa) x100	85
07.01. 02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	persentase pelayanan PATEN yang sesuai SOP	%	(Pelayanan PATEN yang sesuai SOP : Jumlah Pelayanan PATEN) x 100	75
07.01. 03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Lembaga Kemasyarakatan di Desa yang Aktif	%	(Jumlah LKD dan kelurahan Aktif : Jumlah LKD) x 100 LKD terdiri atas LPM, PKK, Karang Taruna, Posyandu, RT, RW	90
07.01. 04	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan	%	(Gangguan Trantibum yang terselesaikan :Gangguan Trantibum) x 100	100
07.01. 05	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan dengan baik	%	(Jumlah acara yang dilaksanakan dalam rangka hari besar nasional, bintek wasbang, dan rakor forkompimcam dengan baik : jumlah acara) x 100	100
07.01. 06	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase desayang melaksanakan administrasi serta pengelolaan keuangan desayang tertib dan baik	%	(Jumlah desa dengan pengelolaan keuangan baik :Jumlah desa) x100	85
07.01. 02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	persentase pelayanan PATEN yang sesuai SOP	%	(Pelayanan PATEN yang sesuai SOP : Jumlah Pelayanan PATEN) x 100	75
07.01. 03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Lembaga Kemasyarakatan di Desa yang Aktif	%	(Jumlah LKD dan kelurahan Aktif : Jumlah LKD) x 100 LKD terdiri atas LPM, PKK, Karang Taruna, Posyandu, RT, RW	90

No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Stn	Formulasi Perhitungan	Target indikator Program Tahun 2024
1	2	3	4	5	6
	Kelurahan	Desa yang Aktif		Posyandu, RT, RW	
07.01.04	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan	%	(Gangguan Trantibum yang terselesaikan : Gangguan Trantibum) x 100	100
07.01.05	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan dengan baik	%	(Jumlah acara yang dilaksanakan dalam rangka hari besar nasional, bintek wasbang, dan rakor forkompimcam dengan baik : jumlah acara) x 100	100
07.01.06	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase desayang melaksanakan administrasi serta pengelolaan keuangan desayang tertib dan baik	%	(Jumlah desa dengan pengelolaan keuangan baik : Jumlah desa) x100	85
07.01.02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	persentase pelayanan PATEN yang sesuai SOP	%	(Pelayanan PATEN yang sesuai SOP : Jumlah Pelayanan PATEN) x 100	75
07.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Lembaga Kemasyarakatan di Desa yang Aktif	%	(Jumlah LKD dan kelurahan Aktif : Jumlah LKD) x 100 LKD terdiri atas LPM, PKK, Karang Taruna, Posyandu, RT, RW	90
07.01.04	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan	%	(Gangguan Trantibum yang terselesaikan : Gangguan Trantibum) x 100	100
07.01.05	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan dengan baik	%	(Jumlah acara yang dilaksanakan dalam rangka hari besar nasional, bintek wasbang, dan rakor forkompimcam dengan baik : jumlah acara) x 100	100
07.01.06	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase desayang melaksanakan administrasi serta pengelolaan keuangan desayang tertib dan baik	%	(Jumlah desa dengan pengelolaan keuangan baik : Jumlah desa) x100	85
07.01.02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	persentase pelayanan PATEN yang sesuai SOP	%	(Pelayanan PATEN yang sesuai SOP : Jumlah Pelayanan PATEN) x 100	75
07.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Lembaga Kemasyarakatan di Desa yang Aktif	%	(Jumlah LKD dan kelurahan Aktif : Jumlah LKD) x 100 LKD terdiri atas LPM, PKK, Karang Taruna, Posyandu, RT, RW	90
07.01.04	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan	%	(Gangguan Trantibum yang terselesaikan : Gangguan Trantibum) x 100	100
07.01.05	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan dengan baik	%	(Jumlah acara yang dilaksanakan dalam rangka hari besar nasional, bintek wasbang, dan rakor forkompimcam dengan baik : jumlah acara) x 100	100
07.01.06	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desayang melaksanakan administrasi serta pengelolaan keuangan desa yang tertib dan baik	%	(Jumlah desa dengan pengelolaan keuangan baik : Jumlah desa) x100	85
07.01.02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	persentase pelayanan PATEN yang sesuai SOP	%	(Pelayanan PATEN yang sesuai SOP : Jumlah Pelayanan PATEN) x 100	75
07.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Lembaga Kemasyarakatan di Desa yang Aktif	%	(Jumlah LKD dan kelurahan Aktif : Jumlah LKD) x 100 LKD terdiri atas LPM, PKK, Karang Taruna, Posyandu, RT, RW	90
07.01.04	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan	%	(Gangguan Trantibum yang terselesaikan : Gangguan Trantibum) x 100	100
07.01.05	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan dengan baik	%	(Jumlah acara yang dilaksanakan dalam rangka hari besar nasional, bintek wasbang, dan rakor forkompimcam dengan baik : jumlah acara) x 100	100
07.01.	Program Pembinaan dan Pengawasan	Persentase desayang melaksanakan administrasi serta pengelolaan keuangan	%	(Jumlah desa dengan pengelolaan keuangan baik : Jumlah desa)	85

No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Stn	Formulasi Perhitungan	Target indikator Program Tahun 2024
1	2	3	4	5	6
06	Pemerintahan Desa	desayang tertib dan baik		x100	
07.01.02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	persentase pelayanan PATEN yang sesuai SOP	%	(Pelayanan PATEN yang sesuai SOP : Jumlah Pelayanan PATEN) x 100	75
07.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Lembaga Kemasyarakatan di Desa yang Aktif	%	(Jumlah LKD dan kelurahan Aktif : Jumlah LKD) x 100 LKD terdiri atas LPM, PKK, Karang Taruna, Posyandu, RT, RW	90
07.01.04	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan	%	(Gangguan Trantibum yang terselesaikan : Gangguan Trantibum) x 100	100
07.01.05	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan	%	(Gangguan Trantibum yang terselesaikan : Gangguan Trantibum) x 100	100
07.01.06	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase desayang melaksanakan administrasi serta pengelolaan keuangan desa yang tertib dan baik	%	(Jumlah desa dengan pengelolaan keuangan baik : Jumlah desa) x 100	85
07.01.02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	persentase pelayanan PATEN yang sesuai SOP	%	(Pelayanan PATEN yang sesuai SOP : Jumlah Pelayanan PATEN) x 100	75
07.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Lembaga Kemasyarakatan di Desa yang Aktif	%	(Jumlah LKD dan kelurahan Aktif : Jumlah LKD) x 100 LKD terdiri atas LPM, PKK, Karang Taruna, Posyandu, RT, RW	90
07.01.04	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan	%	(Gangguan Trantibum yang terselesaikan : Gangguan Trantibum) x 100	100
07.01.05	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan dengan baik	%	(Jumlah acara yang dilaksanakan dalam rangka hari besar nasional, bintek wasbang, dan rakor forkompimcam dengan baik : jumlah acara) x 100	100
07.01.06	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase desayang melaksanakan administrasi serta pengelolaan keuangan desayang tertib dan baik	%	(Jumlah desa dengan pengelolaan keuangan baik : Jumlah desa) x 100	85
07.01.02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	persentase pelayanan PATEN yang sesuai SOP	%	(Pelayanan PATEN yang sesuai SOP : Jumlah Pelayanan PATEN) x 100	75
07.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Lembaga Kemasyarakatan di Desa yang Aktif	%	(Jumlah LKD dan kelurahan Aktif : Jumlah LKD) x 100 LKD terdiri atas LPM, PKK, Karang Taruna, Posyandu, RT, RW	90
07.01.04	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan	%	(Gangguan Trantibum yang terselesaikan : Gangguan Trantibum) x 100	100
07.01.05	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan dengan baik	%	(Jumlah acara yang dilaksanakan dalam rangka hari besar nasional, bintek wasbang, dan rakor forkompimcam dengan baik : jumlah acara) x 100	100
07.01.06	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase desayang melaksanakan administrasi serta pengelolaan keuangan desa yang tertib dan baik	%	(Jumlah desa dengan pengelolaan keuangan baik : Jumlah desa) x 100	85
07.01.02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	persentase pelayanan PATEN yang sesuai SOP	%	(Pelayanan PATEN yang sesuai SOP : Jumlah Pelayanan PATEN) x 100	75
07.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Lembaga Kemasyarakatan di Desa yang Aktif	%	(Jumlah LKD dan kelurahan Aktif : Jumlah LKD) x 100 LKD terdiri atas LPM, PKK, Karang Taruna, Posyandu, RT, RW	90
07.01.04	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan	%	(Gangguan Trantibum yang terselesaikan : Gangguan Trantibum) x 100	100
07.01.	Program Penyelenggaraan Urusan	Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang	%	(Jumlah acara yang dilaksanakan dalam rangka hari besar nasional, bintek wasbang, dan rakor forkompimcam dengan	100

No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Stn	Formulasi Perhitungan	Target indikator Program Tahun 2024
1	2	3	4	5	6
05	Pemerintahan Umum	dilaksanakan dengan baik		baik : jumlah acara) x 100	
07.01.06	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase desayang melaksanakan administrasi serta pengelolaan keuangan desayang tertib dan baik	%	(Jumlah desa dengan pengelolaan keuangan baik :Jumlah desa) x100	85
07.01.02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	persentase pelayanan PATEN yang sesuai SOP	%	(Pelayanan PATEN yang sesuai SOP :Jumlah Pelayanan PATEN) x 100	75
07.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Lembaga Kemasyarakatan di Desa yang Aktif	%	(Jumlah LKD dan kelurahan Aktif : Jumlah LKD) x 100 LKD terdiri atas LPM, PKK, Karang Taruna, Posyandu, RT, RW	90
07.01.04	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan	%	(Gangguan Trantibum yang terselesaikan :Gangguan Trantibum) x 100	100
07.01.05	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan dengan baik	%	(Jumlah acara yang dilaksanakan dalam rangka hari besar nasional, bintek wasbang, dan rakor forkompimcam dengan baik : jumlah acara) x 100	100
07.01.06	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase desayang melaksanakan administrasi serta pengelolaan keuangan desayang tertib dan baik	%	(Jumlah desa dengan pengelolaan keuangan baik :Jumlah desa) x100	85
07.01.02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	persentase pelayanan PATEN yang sesuai SOP	%	(Pelayanan PATEN yang sesuai SOP : Jumlah Pelayanan PATEN) x 100	75
07.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Lembaga Kemasyarakatan di Desa yang Aktif	%	(Jumlah LKD dan kelurahan Aktif : Jumlah LKD) x 100 LKD terdiri atas LPM, PKK, Karang Taruna, Posyandu, RT, RW	90
07.01.04	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan	%	(Gangguan Trantibum yang terselesaikan :Gangguan Trantibum) x 100	100
07.01.05	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan dengan baik	%	(Jumlah acara yang dilaksanakan dalam rangka hari besar nasional, bintek wasbang, dan rakor forkompimcam dengan baik : jumlah acara) x 100	100
07.01.06	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase desayang melaksanakan administrasi serta pengelolaan keuangan desayang tertib dan baik	%	(Jumlah desa dengan pengelolaan keuangan baik :Jumlah desa) x100	85
07.01.02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	persentase pelayanan PATEN yang sesuai SOP	%	(Pelayanan PATEN yang sesuai SOP : Jumlah Pelayanan PATEN) x 100	75
07.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Lembaga Kemasyarakatan di Desa yang Aktif	%	(Jumlah LKD dan kelurahan Aktif : Jumlah LKD) x 100 LKD terdiri atas LPM, PKK, Karang Taruna, Posyandu, RT, RW	90
07.01.04	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan	%	(Gangguan Trantibum yang terselesaikan :Gangguan Trantibum) x 100	100
07.01.05	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan dengan baik	%	(Jumlah acara yang dilaksanakan dalam rangka hari besar nasional, bintek wasbang, dan rakor forkompimcam dengan baik : jumlah acara) x 100	100
07.01.06	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase desayang melaksanakan administrasi serta pengelolaan keuangan desayang tertib dan baik	%	(Jumlah desa dengan pengelolaan keuangan baik :Jumlah desa) x100	85
07.01.02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	persentase pelayanan PATEN yang sesuai SOP	%	(Pelayanan PATEN yang sesuai SOP : Jumlah Pelayanan PATEN) x 100	75
07.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Lembaga Kemasyarakatan di Desa yang Aktif	%	(Jumlah LKD dan kelurahan Aktif : Jumlah LKD) x 100 LKD terdiri atas LPM, PKK, Karang Taruna, Posyandu, RT, RW	90

No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Stn	Formulasi Perhitungan	Target indikator Program Tahun 2024
1	2	3	4	5	6
07.01.04	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan	%	(Gangguan Trantibum yang terselesaikan : Gangguan Trantibum) x 100	100
07.01.05	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan dengan baik	%	(Jumlah acara yang dilaksanakan dalam rangka hari besar nasional, bintek wasbang, dan rakor forkompimcam dengan baik : jumlah acara) x 100	100
07.01.06	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase desayang melaksanakan administrasi serta pengelolaan keuangan desayang tertib dan baik	%	(Jumlah desa dengan pengelolaan keuangan baik : Jumlah desa) x 100	85
8	Unsur Pemerintahan Umum				
8.01	Kesatuan Bangsa dan Politik				
08.01.02	Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	Persentase masyarakat yang mengamalkan ideologi Pancasila dan karakter bangsa yang bagus	%	(Jumlah masyarakat yang telah mendapat Sosialisasi wasbang yang mengamalkan ideologi dan karakter bangsa yang bagus : jumlah masyarakat yang telah mengikuti sosialisasi wasbang) x 100	95
08.01.03	Program Peningkatan Peran Partai Politik Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Persentase Parpol dan Lembaga Pendidikan yang berperan aktif mendukung Pemerintah	%	(Jumlah Parpol dan Lembaga pendidikan yang berperan aktif dalam mendukung pemerintah : jumlah parpol dan lembaga pendidikan dibatang) x 100	100
08.01.04	Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase Ormas yang mendapatkan fasilitasi dan pembinaan	%	(Jumlah Ormas yang mendapatkan fasilitasi dan pembinaan : Jumlah Ormas yang terdaftar resmi) x 100	100
08.01.05	Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	Persentase masyarakat yang paham tentang ketahanan Ekososbud	%	(Jumlah masyarakat yang mengikuti sosialisasi dan paham terhadap ketahanan Ekosbud : jumlah masyarakat yang mengikuti sosialisasi) x 100 (Melalui Pretest dan postest)	100
08.01.06	Program peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Persentase penurunan konflik sosial	%	(Jumlah konflik sosial tahun berkenaaan : jumlah konflik sosial tahun sebelumnya) x 100	100

Sumber : RKPD Kab Batang 2024

BAB IV
PLAFON PERUBAHAN ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN
URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM/KEGIATAN

4.1. PLAFON PERUBAHAN ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN
URUSAN PEMERINTAHAN

Perubahan Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan Daerah di Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.1

Plafon Perubahan Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Batang Tahun 2024

Urusan Pemerintah Daerah	Pendapatan		Belanja										
			Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Jumlah Sebelum	Jumlah Sesudah	Bertambah/ Berkurang
	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	131.717.013.238	137.659.825.588	1.000.110.393.494	1.021.975.411.145	127.902.181.266	151.249.048.411	-	-	-	-	1.128.012.574.760	1.173.224.459.556	45.211.884.796
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	-	-	600.597.118.176	584.901.748.330	22.722.397.362	51.206.501.091	-	-	-	-	623.319.515.538	636.108.249.421	12.788.733.883
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	131.357.013.238	137.366.825.588	303.775.339.130	341.372.797.058	27.188.575.811	28.814.288.110	-	-	-	-	330.963.914.941	370.187.085.168	39.223.170.227
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	360.000.000	293.000.000	54.087.418.717	54.794.399.087	68.260.142.553	60.049.777.733	-	-	-	-	122.347.561.270	114.844.176.820	-7.503.384.450
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	-	-	11.706.090.572	11.059.098.504	6.360.031.320	7.800.964.257	-	-	-	-	18.066.121.892	18.860.062.761	793.940.869
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	-	-	20.803.427.309	20.671.060.505	3.050.734.560	3.072.617.360	-	-	-	-	23.854.161.869	23.743.677.865	-110.484.004
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	-	-	9.140.999.590	9.176.307.661	320.299.660	304.899.860	-	-	-	-	9.461.299.250	9.481.207.521	19.908.271
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	18.915.000.000	18.763.717.000	127.269.166.393	129.423.595.789	5.950.601.239	7.990.038.471	-	-	22.082.500.000	27.219.500.000	155.302.267.632	164.633.134.260	9.330.866.628
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	1.000.000.000	800.000.000	4.819.230.642	4.968.164.669	2.031.367.450	3.812.618.722	-	-	-	-	6.850.598.092	8.780.783.391	1.930.185.299
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BEREKNCANA	0,00	0,00	10.950.929.528,00	10.940.470.528,00	760.500.000,00	826.199.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.711.429.528	11.766.669.528	55.240.000
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	65.000.000	66.235.000	1.442.000.000,00	1.369.865.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.442.000.000,00	1.369.865.000,00	-72.135.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	700.000.000	710.000.000	15.278.182.429	15.229.068.765	59.611.960	82.155.720	-	-	-	-	15.337.794.389	15.311.224.485	-26.569.904
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINIS TRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	-	-	7.391.998.062	6.613.610.153	557.796.600	674.796.600	-	-	-	-	7.949.794.662	7.288.406.753	-661.387.909
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	-	-	8.236.640.905	8.353.219.968	15.000.000	15.000.000	-	-	22.082.500.000	27.219.500.000	30.334.140.905	35.587.719.968	5.253.579.063
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	0,00	0,00	5.276.372.653,00	5.067.016.749,00	0,00	69.569.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.276.372.653	5.136.585.749	-139.786.904
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	1.130.000.000	1.079.376.000	34.490.297.809	34.550.384.948	1.463.000.000	1.116.245.400	-	-	-	-	35.953.297.809	35.666.630.348	-286.667.461
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	-	-	7.549.777.907	7.432.263.726	44.765.600	91.952.800	-	-	-	-	7.594.543.507	7.524.216.526	-70.326.981
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	5.820.000.000	5.618.106.000	9.027.295.711	8.797.972.612	12.000.000	14.000.000	-	-	-	-	9.039.295.711	8.811.972.612	-227.323.099
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	6.500.000.000	6.750.000.000	5.461.420.423	5.678.464.423	52.400.000	235.356.000	-	-	-	-	5.513.820.423	5.913.820.423	400.000.000
URUSAN PEMERINTAHAN	3.700.000.000,00	3.740.000.000,00	10.294.089.647	12.859.221.148	787.037.000	878.501.000	-	-	-	-	11.081.126.647	13.737.722.148	2.656.595.501

Urusan Pemerintah Daerah	Pendapatan		Operasi		Modal		Belanja		Transfer		Jumlah Sebelum	Jumlah Sesudah	Bertambah/ Berkurang
	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			
BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA													
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK	-	-	314.137.950	314.137.950	13.000.000	13.000.000	-	-	-	-	327.137.950	327.137.950	-
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN	-	-	100.000.000	100.000.000	-	-	-	-	-	-	100.000.000	100.000.000	-
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN			1.670.000.000	2.205.000.000							1.670.000.000	2.205.000.000	535.000.000
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	-	-	4.661.691.977	4.614.634.400	138.293.629	144.815.229	-	-	-	-	4.799.985.606	4.759.449.629	-40.535.977
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN	0,00	0,00	305.100.750,00	330.100.750,00	15.829.000,00	15.829.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320.929.750	345.929.750	25.000.000
URUSAN PILIHAN	3.900.000.000	3.523.000.000	44.868.804.787	48.955.886.558	3.307.933.000	3.706.650.629	-	-	-	-	48.176.737.787	52.662.537.187	4.485.799.400
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	3.900.000.000	3.523.000.000	8.970.653.853,00	9.012.520.022,00	72.089.800,00	64.538.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.042.743.653,00	9.077.058.922,00	34.315.269,00
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	0,00	0,00	2.250.744.771,00	2.454.026.371,00	2.403.171.600,00	2.516.290.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.653.916.371	4.970.316.371	316.400.000
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN			26.657.433.483	26.035.414.017	127.671.600	420.821.729	-	-	-	-	26.785.105.083	26.456.235.746	-328.869.337
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN			3.418.686.180	4.115.639.648	705.000.000	705.000.000	-	-	-	-	4.123.686.180	4.820.639.648	696.953.468
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN			3.462.500.000	7.229.500.000	-	-	-	-	-	-	3.462.500.000	7.229.500.000	3.767.000.000
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI			108.786.500	108.786.500	-	-	-	-	-	-	108.786.500	108.786.500	-
UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	16.175.527.000	16.602.120.002	113.456.806.194	120.125.389.375	1.527.379.465	2.605.999.065	-	-	-	-	114.984.185.659	122.731.388.440	7.747.202.781
SEKRETARIAT DAERAH	16.175.527.000	16.602.120.002	58.012.065.320	62.107.814.601	685.816.350	1.337.269.850	-	-	-	-	58.697.881.670	63.445.084.451	4.747.202.781
SEKRETARIAT DPRD	-	-	55.444.740.874	58.017.574.774	841.563.115	1.268.729.215	-	-	-	-	56.286.303.989	59.286.303.989	3.000.000.000
UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	1.731.744.871.600	1.754.879.324.000	402.865.586.908	124.337.356.547	2.386.930.417	6.762.242.937	12.000.000.000	7.669.716.371	13.959.954.076	338.960.824.821	431.212.471.401	477.730.140.676	46.517.669.275
PERENCANAAN	-	-	8.446.769.545	8.480.153.266	47.393.300	125.150.000	-	-	-	-	8.494.162.845	8.605.303.266	111.140.421
KEUANGAN	1.731.744.871.600	1.754.879.324.000	386.984.688.083	108.299.131.958	2.081.464.117	6.207.869.937	12.000.000.000	7.669.716.371	13.959.954.076	338.960.824.821	415.026.106.276	461.137.543.087	46.111.436.811
KEPEGAWAIAN	-	-	7.434.129.280	7.558.071.323	258.073.000	429.223.000	-	-	-	-	7.692.202.280	7.987.294.323	295.092.043
UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN	-	-	12.612.828.890	12.087.103.040	233.123.200	469.997.600	-	-	-	-	12.845.952.090	12.557.100.640	-288.851.450
INSPEKTORAT DAERAH	-	-	12.612.828.890	12.087.103.040	233.123.200	469.997.600	-	-	-	-	12.845.952.090	12.557.100.640	-288.851.450
UNSUR KEWILAYAHAN KECAMATAN	-	-	39.380.110.335	36.548.111.084	3.047.607.228	4.019.802.860	-	-	-	-	42.427.717.563	40.567.913.944	-1.859.803.619
	-	-	39.380.110.335	36.548.111.084	3.047.607.228	4.019.802.860	-	-	-	-	42.427.717.563	40.567.913.944	-1.859.803.619
UNSUR PEMERINTAHAN UMUM KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	-	-	23.549.050.941	23.459.504.565	23.654.400	78.654.400	-	-	-	-	23.572.705.341	23.538.158.965	-34.546.376
	-	-	23.549.050.941	23.459.504.565	23.654.400	78.654.400	-	-	-	-	23.572.705.341	23.538.158.965	-34.546.376
TOTAL	1.902.452.411.838	1.931.427.986.590	1.764.112.747.942	1.516.912.358.103	144.379.410.215	176.882.434.373	12.000.000.000	7.669.716.371	36.042.454.076	366.180.324.821	1.956.534.612.233	2.067.644.833.668	111.110.221.435

Sumber: BPKAD Kab Batang Tahun 2024

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan sebagai berikut:

- A. Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar pada tahun 2024 direncanakan sebesar Rp. 1.128.012.574.760 pada perubahan mengalami kenaikan sebesar Rp. 45.211.884.796 atau sebesar 4,01% menjadi Rp. 1.173.224.459.556 dengan rincian sebagai berikut:
1. Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan pada tahun 2024 direncanakan sebesar Rp. 623.319.515.538 pada perubahan mengalami kenaikan sebesar Rp. 12.788.733.883 atau sebesar 2,05% menjadi Rp. 636.108.249.421.
 2. Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan pada tahun 2024 direncanakan sebesar Rp. 330.963.914.941 pada perubahan mengalami kenaikan sebesar Rp. 39.223.170.227 atau sebesar 11,85% menjadi Rp. 370.187.085.168.
 3. Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang pada tahun 2024 direncanakan sebesar Rp. 122.347.561.270 pada perubahan mengalami penurunan sebesar Rp. 7.503.384.450 atau sebesar 6,13% menjadi Rp. 114.844.176.820.
 4. Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman pada tahun 2024 direncanakan sebesar Rp. 18.036.121.892 pada perubahan mengalami kenaikan sebesar Rp. 793.940.869 atau sebesar 4,39% menjadi Rp. 18.860.062.761.
 5. Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat pada tahun 2024 direncanakan sebesar Rp. 23.854.161.869 pada perubahan mengalami penurunan sebesar Rp. 110.484.004 atau sebesar 0,46% menjadi Rp. 23.743.677.865.
 6. Urusan Pemerintahan Bidang Sosial pada tahun 2024 direncanakan sebesar Rp. 9.461.299.250 pada perubahan

mengalami kenaikan sebesar Rp. 19.908.271 atau sebesar 0,21% menjadi Rp. 9.481.207.521.

B. Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar pada tahun 2024 direncanakan sebesar Rp. 155.302.267.632 pada perubahan mengalami kenaikan sebesar Rp. 9.330.866.628 atau sebesar 6,18% menjadi Rp. 164.633.134.260 dengan rincian sebagai berikut:

1. Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja pada tahun 2024 direncanakan sebesar Rp. 6.850.598.092 pada perubahan mengalami kenaikan sebesar Rp. 1.930.185.299 atau sebesar 28,18% menjadi Rp. 8.780.783.391.
2. Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana pada tahun 2024 direncanakan sebesar Rp. 11.711.429.528 pada perubahan mengalami kenaikan sebesar Rp. 55.240.000 atau sebesar 0,47% menjadi Rp. 11.766.669.528.
3. Urusan Pemerintahan Bidang Pangan pada tahun 2024 direncanakan sebesar Rp. 1.442.000.000 pada perubahan mengalami penurunan sebesar Rp 72.135.000 atau sebesar 5,00% sehingga menjadi Rp. 1.369.865.000.
4. Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup pada tahun 2024 direncanakan sebesar Rp. 15.337.794.389 pada perubahan mengalami penurunan sebesar Rp. 26.569.904 atau sebesar 0,17% menjadi Rp. 15.311.224.485.
5. Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil pada tahun 2024 direncanakan sebesar Rp. 7.949.794.662 pada perubahan mengalami penurunan sebesar Rp. 661.387.909 atau sebesar 8,32% menjadi Rp. 7.288.406.753.
6. Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa pada tahun 2024 direncanakan sebesar Rp. 30.334.140.905 pada perubahan mengalami kenaikan sebesar Rp. 5.253.579.063 atau sebesar 17,32% menjadi Rp. 35.587.719.968.

7. Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak pada tahun 2024 direncanakan sebesar Rp. 5.276.372.653 pada perubahan mengalami penurunan sebesar Rp. 139.786.904 atau sebesar 2,65% menjadi Rp. 5.136.585.749.
8. Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan pada tahun 2024 direncanakan sebesar Rp. 35.953.297.809 pada perubahan mengalami penurunan sebesar Rp. 286.667.461 atau sebesar 0,80% menjadi Rp. 35.666.630.348.
9. Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi Dan Informatika pada tahun 2024 direncanakan sebesar Rp. 7.594.543.507 pada perubahan mengalami penurunan sebesar Rp. 70.326.981 atau sebesar 0,93% menjadi Rp. 7.524.216.526.
10. Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah pada tahun 2024 direncanakan sebesar Rp. 9.039.295.711 pada perubahan mengalami penurunan sebesar Rp. 227.323.099 atau sebesar 2,51% menjadi Rp. 8.811.972.612.
11. Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal pada tahun 2024 direncanakan sebesar Rp. 5.513.820.423 pada perubahan mengalami kenaikan sebesar Rp. 400.000.000 atau sebesar 7,25% menjadi Rp. 5.913.820.423.
12. Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan Dan Olahraga pada tahun 2024 direncanakan sebesar Rp. 11.081.126.647 pada perubahan mengalami kenaikan sebesar Rp. 2.656.595.501 atau sebesar 23,97% menjadi Rp. 13.737.722.148.
13. Urusan Pemerintahan Bidang Statistik pada tahun 2024 direncanakan sebesar Rp. 327.137.950 pada perubahan tidak mengalami perubahan, tetap di angka Rp. 327.137.950.
14. Urusan Pemerintahan Bidang Persandian pada tahun 2024 direncanakan sebesar Rp. 100.000.000 pada perubahan tidak mengalami perubahan, tetap di angka Rp. 100.000.000.
15. Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan pada tahun 2024 direncanakan sebesar Rp. 1.670.000.000 pada perubahan

mengalami kenaikan sebesar Rp. 535.000.000 atau sebesar 32,04% menjadi Rp. 2.205.000.000.

16. Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan pada tahun 2024 direncanakan sebesar Rp. 4.799.985.606 pada perubahan mengalami penurunan sebesar Rp. 40.535.977 atau sebesar 0,84% menjadi Rp. 4.759.449.629.

17. Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan pada tahun 2024 direncanakan sebesar Rp. 320.929.750 pada perubahan mengalami kenaikan sebesar Rp. 25.000.000 atau sebesar 7,79% menjadi Rp. 345.929.750.

C. Urusan Pemerintahan Pilihan pada tahun 2024 direncanakan sebesar Rp. 48.176.737.787 pada perubahan mengalami kenaikan sebesar Rp. 4.485.799.400 atau sebesar 9,31% menjadi Rp. 52.662.537.187 dengan rincian sebagai berikut:

1. Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan Dan Perikanan pada tahun 2024 direncanakan sebesar Rp. 9.042.743.653 pada perubahan mengalami kenaikan sebesar Rp. 34.315.269 atau sebesar 0,38% menjadi Rp. 9.077.058.922.

2. Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata pada tahun 2024 direncanakan sebesar Rp. 4.653.916.371 pada perubahan mengalami kenaikan sebesar Rp. 316.400.000 atau sebesar 6,80% menjadi Rp. 4.970.316.371.

3. Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian pada tahun 2024 direncanakan sebesar Rp. 26.785.105.083 pada perubahan mengalami penurunan sebesar Rp. 328.869.337 atau sebesar 1,23% menjadi Rp. 26.456.235.746.

4. Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan pada tahun 2024 direncanakan sebesar Rp. 4.123.686.180 pada perubahan mengalami kenaikan sebesar Rp. 696.953.468 atau sebesar 16,90% menjadi Rp. 4.820.639.648.

5. Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian pada tahun 2024 direncanakan sebesar Rp. 3.462.500.000 pada perubahan

mengalami kenaikan sebesar Rp. 3.767.000.000 atau sebesar 108,79% menjadi Rp. 7.229.500.000.

6. Urusan Pemerintahan Bidang Transmigrasi pada tahun 2024 direncanakan sebesar Rp. 108.786.500 pada perubahan tidak mengalami perubahan, tetap di angka Rp. 108.786.500.

D. Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan pada tahun 2024 direncanakan sebesar Rp. 114.984.185.659 pada perubahan mengalami kenaikan sebesar Rp. 7.747.202.781 atau sebesar 6,74% menjadi Rp. 122.731.388.440 dengan penjabaran sebagai berikut:

1. Sekretariat Daerah pada tahun 2024 direncanakan sebesar Rp. 58.697.881.670 pada perubahan mengalami kenaikan sebesar Rp. 4.747.202.781 atau sebesar 8,09% menjadi Rp. 63.445.084.451.
2. Sekretariat DPRD pada tahun 2024 direncanakan sebesar Rp. 56.286.303.989 pada perubahan mengalami kenaikan sebesar Rp. 3.000.000.000 atau sebesar 5,33% menjadi Rp. 59.286.303.989..

E. Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan pada tahun 2024 direncanakan sebesar Rp. 431.212.471.401 pada perubahan mengalami kenaikan sebesar Rp. 46.517.669.275 atau sebesar 10,79% menjadi Rp. 477.730.140.676. dengan penjabaran sebagai berikut:

1. Perencanaan pada tahun 2024 direncanakan sebesar Rp. 8.494.162.845 pada perubahan mengalami kenaikan sebesar Rp. 111.104.421 atau sebesar 1,31% menjadi Rp. 8.605.303.266.
2. Keuangan pada tahun 2024 direncanakan sebesar Rp. 415.026.106.276 pada perubahan mengalami kenaikan sebesar Rp. 46.111.436.811 atau sebesar 11,11% menjadi Rp. 461.137.543.087.
3. Kepegawaian pada tahun 2024 direncanakan sebesar Rp. 7.692.202.280 pada perubahan mengalami kenaikan sebesar Rp. 295.092.043 atau sebesar 3,84% menjadi Rp. 7.987.294.323.

- F. Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah pada tahun 2024 direncanakan sebesar Rp. 12.845.952.090 pada perubahan mengalami penurunan sebesar Rp. 288.851.450 atau sebesar 2,25% menjadi Rp. 12.557.100.640.
- G. Unsur Kewilayahan yang dilaksanakan oleh kecamatan pada tahun 2024 direncanakan sebesar Rp. 42.427.717.563 pada perubahan mengalami penurunan sebesar Rp. 1.859.803.619 atau sebesar 4,38% menjadi Rp. 40.567.913.944..
- H. Unsur Pemerintahan Umum yang di laksanakan oleh kesbangpol pada tahun 2024 direncanakan sebesar Rp. 23.572.705.341 pada perubahan mengalami penurunan sebesar Rp. 34.546.376 atau sebesar 0,15% menjadi Rp. 23.538.158.965.

4.2. PLAFON PERUBAHAN ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN PERANGKAT DAERAH

Perubahan Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Perangkat Daerah di Kabupaten Batang pada tahun 2024 ditunjukkan dalam tabel berikut:

Tabel 4.2

Perubahan Proporsi Anggaran Berdasarkan Perangkat Daerah
Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2024

NO	NAMA SKPD	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG
1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	624.989.515.538,00	638.313.249.421,00	13.323.733.883
2	RSUD KABUPATEN BATANG	101.650.858.672,00	110.421.324.339,00	8.770.465.667
3	DINAS KESEHATAN	200.359.561.189,00	231.955.637.675,00	31.596.076.486
4	RSUD LIMPUNG	28.953.495.080,00	27.810.123.154,00	-1.143.371.926
5	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	122.347.561.270,00	114.844.176.820,00	-7.503.384.450
6	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	18.066.121.892,00	18.860.062.761,00	793.940.869
7	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	18.266.876.215,00	18.074.353.972,00	-192.522.243
8	BADAN PENANGGULANAN BENCANA DAERAH	5.587.285.654,00	5.669.323.893,00	82.038.239
9	DINAS SOSIAL	9.461.299.250,00	9.481.207.521,00	19.908.271
10	DINAS KETENAGAKERJAAN	6.959.384.592,00	8.889.569.891,00	1.930.185.299

NO	NAMA SKPD	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG
11	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	16.987.802.181,00	16.903.255.277,00	- 84.546.904
12	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN	26.458.826.683,00	26.162.822.346,00	- 296.004.337
13	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	15.337.794.389,00	15.311.224.485,00	- 26.569.904
14	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	7.949.794.662,00	7.288.406.753,00	- 661.387.909
15	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	30.334.140.905,00	35.587.719.968,00	- 5.253.579.063
16	DINAS PERHUBUNGAN	35.953.297.809,00	35.666.630.348,00	- 286.667.461
17	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	8.021.681.457,00	7.951.354.476,00	- 70.326.981
18	DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH	16.625.481.891,00	20.862.112.260,00	- 4.236.630.369
19	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	5.513.820.423,00	5.913.820.423,00	- 400.000.000
20	DINAS PARIWISATA KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	15.735.043.018,00	18.708.038.519,00	- 2.972.995.501
21	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	5.120.915.356,00	5.105.379.379,00	- 15.535.977
22	DINAS KELAUTAN PERIKANAN DAN PETERNAKAN	10.811.022.053,00	10.740.337.322,00	- 70.684.731
23	SEKRETARIAT DAERAH	58.697.881.670,00	63.445.084.451,00	- 4.747.202.781
24	SEKRETARIAT DPRD	56.286.303.989,00	59.286.303.989,00	- 3.000.000.000
25	BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	8.494.162.845,00	8.605.303.266,00	- 111.140.421
26	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH	415.026.106.276,00	461.137.543.087,00	- 46.111.436.811
27	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	7.692.202.280,00	7.987.294.323,00	- 295.092.043
28	INSPEKTORAT DAERAH	12.845.952.090,00	12.557.100.640,00	- 288.851.450
29	KECAMATAN BATANG	13.598.369.058,00	13.040.296.309,00	- 558.072.749
30	KECAMATAN TULIS	1.844.847.318,00	1.866.481.168,00	- 21.633.850
31	KECAMATAN WARUNGASEM	2.065.131.744,00	1.957.196.885,00	- 107.934.859
32	KECAMATAN WONOTUNGGAL	2.057.229.164,00	2.062.951.825,00	- 5.722.661
33	KECAMATAN BANDAR	2.542.495.914,00	2.469.355.857,00	- 73.140.057
34	KECAMATAN BLADO	1.960.448.668,00	1.714.875.196,00	- 245.573.472
35	KECAMATAN REBAN	2.390.039.084,00	2.401.376.279,00	- 11.337.195
36	KECAMATAN KANDEMAN	1.876.193.768,00	1.675.106.182,00	- 201.087.586
37	KECAMATAN TERSONO	2.004.704.642,00	2.047.654.501,00	- 42.949.859
38	KECAMATAN GRINGSING	1.852.487.301,00	1.624.160.168,00	- 228.327.133
39	KECAMATAN SUBAH	1.788.530.934,00	1.684.590.674,00	- 103.940.260
40	KECAMATAN LIMPUNG	2.112.501.175,00	2.110.701.175,00	- 1.800.000
41	KECAMATAN BANYUPUTIH	2.070.436.719,00	2.068.636.719,00	- 1.800.000
42	KECAMATAN PECALUNGAN	1.851.048.622,00	1.701.424.769,00	- 149.623.853

NO	NAMA SKPD	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG
43	KECAMATAN BAWANG	2.413.253.452,00	2.143.106.237,00	-270.147.215
44	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	23.572.705.341,00	23.538.158.965,00	-34.546.376
	JUMLAH	1.956.534.612.233,00	2.067.644.833.668,00	111.110.221.435

Sumber: BPKAD Kab Batang Tahun 2024

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa Plafon Perubahan anggaran sementara berdasarkan perangkat daerah adalah sebagai berikut:

1. Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan pada tahun 2024 diproyeksikan sebesar Rp. 624.989.515.538 pada perubahan anggaran mengalami kenaikan sebesar Rp. 13.323.733.883 atau sebesar 2,13% menjadi Rp. 638.313.249.421.
2. Rsud Kabupaten Batang pada tahun 2024 diproyeksikan sebesar Rp. 101.650.858.672 pada perubahan anggaran mengalami kenaikan sebesar Rp. 8.770.465.667 atau sebesar 8,63% menjadi Rp. 110.421.324.339.
3. Dinas Kesehatan pada tahun 2024 diproyeksikan sebesar Rp. 200.359.561.189 pada perubahan anggaran mengalami kenaikan sebesar Rp. 31.596.076.486 atau sebesar 15,77% menjadi Rp. 231.955.637.675.
4. Rsud Limpung pada tahun 2024 diproyeksikan sebesar Rp. 28.953.495.080 pada perubahan anggaran mengalami penurunan sebesar Rp. 1.143.371.926 atau sebesar 3,95% menjadi Rp. 27.810.123.154.
5. Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang pada tahun 2024 diproyeksikan sebesar Rp. 122.347.561.270 pada perubahan anggaran mengalami penurunan sebesar Rp. 7.503.384.450 atau sebesar 6,13% menjadi Rp. 114.844.176.820.
6. Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman pada tahun 2024 diproyeksikan sebesar Rp. 18.066.121.892 pada perubahan

anggaran mengalami kenaikan sebesar Rp. 793.940.869 atau sebesar 4,39% menjadi Rp. 18.860.062.761.

7. Satuan Polisi Pamong Praja pada tahun 2024 diproyeksikan sebesar Rp. 18.266.876.215 pada perubahan anggaran mengalami penurunan sebesar Rp. 192.522.243 atau sebesar 1,05% menjadi Rp. 18.074.353.972.
8. Badan Penanggulangan Bencana Daerah pada tahun 2024 diproyeksikan sebesar Rp. 5.587.285.654 pada perubahan anggaran mengalami kenaikan sebesar Rp. 82.038.239 atau sebesar 1,47% menjadi Rp. 5.669.323.893.
9. Dinas Sosial pada tahun 2024 diproyeksikan sebesar Rp. 9.461.299.250 pada perubahan anggaran mengalami kenaikan sebesar Rp. 19.908.271 atau sebesar 0,21% menjadi Rp. 9.481.207.521.
10. Dinas Ketenagakerjaan pada tahun 2024 diproyeksikan sebesar Rp. 6.959.384.592 pada perubahan anggaran mengalami kenaikan sebesar Rp. 1.930.185.299 atau sebesar 27,73% menjadi Rp. 8.889.569.891.
11. Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana pada tahun 2024 diproyeksikan sebesar Rp. 16.987.802.181 pada perubahan anggaran mengalami penurunan sebesar Rp. 84.546.904 atau sebesar 0,50% menjadi Rp. 16.903.255.277.
12. Dinas Pangan Dan Pertanian pada tahun 2024 diproyeksikan sebesar Rp. 26.458.826.683 pada perubahan anggaran mengalami penurunan sebesar Rp. 296.004.337 atau sebesar 1,12% menjadi Rp. 26.162.822.346.
13. Dinas Lingkungan Hidup pada tahun 2024 diproyeksikan sebesar Rp. 15.337.794.389 pada perubahan anggaran mengalami penurunan sebesar Rp. 26.569.904 atau sebesar 0,17% menjadi Rp. 15.311.224.485.

14. Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil pada tahun 2024 diproyeksikan sebesar Rp. 7.949.794.662 pada perubahan anggaran mengalami penurunan sebesar Rp. 661.387.909 atau sebesar 8,32% menjadi Rp. 7.288.406.753.
15. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa pada tahun 2024 diproyeksikan sebesar Rp. 30.334.140.905 pada perubahan anggaran mengalami kenaikan sebesar Rp. 5.253.579.063 atau sebesar 17,32% menjadi Rp. 35.587.719.968.
16. Dinas Perhubungan pada tahun 2024 diproyeksikan sebesar Rp. 35.953.297.809 pada perubahan anggaran mengalami penurunan sebesar Rp. 286.667.461 atau sebesar 0,80% menjadi Rp. 35.666.630.348.
17. Dinas Komunikasi Dan Informatika pada tahun 2024 diproyeksikan sebesar Rp. 8.021.681.457 pada perubahan anggaran mengalami penurunan sebesar Rp. 70.326.981 atau sebesar 0,88% menjadi Rp. 7.951.354.476.
18. Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah pada tahun 2024 diproyeksikan sebesar Rp. 16.625.481.891 pada perubahan anggaran mengalami kenaikan sebesar Rp. 4.236.630.369 atau sebesar 25,48% menjadi Rp. 20.862.112.260.
19. Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada tahun 2024 diproyeksikan sebesar Rp. 5.513.820.423 pada perubahan anggaran mengalami kenaikan sebesar Rp. 400.000.000 atau sebesar 7,25% menjadi Rp. 5.913.820.423.
20. Dinas Pariwisata Kepemudaan Dan Olah Raga pada tahun 2024 diproyeksikan sebesar Rp. 15.735.043.018 pada perubahan anggaran mengalami kenaikan sebesar Rp. 2.972.995.501 atau sebesar 18,89% menjadi Rp. 18.708.038.519.
21. Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan pada tahun 2024 diproyeksikan sebesar Rp. 5.120.915.356 pada perubahan anggaran mengalami

- penurunan sebesar Rp. 15.535.977 atau sebesar 0,30% menjadi Rp. 5.105.379.379.
22. Dinas Kelautan Perikanan Dan Peternakan pada tahun 2024 diproyeksikan sebesar Rp. 10.811.022.053 pada perubahan anggaran mengalami penurunan sebesar Rp. 70.684.731 atau sebesar 0,65% menjadi Rp. 10.740.337.322.
23. Sekretariat Daerah pada tahun 2024 diproyeksikan sebesar Rp. 58.697.881.670 pada perubahan anggaran mengalami kenaikan sebesar Rp. 4.747.202.781 atau sebesar 8,09% menjadi Rp. 63.445.084.451.
24. Sekretariat Dprd pada tahun 2024 diproyeksikan sebesar Rp. 56.286.303.989 pada perubahan anggaran mengalami kenaikan sebesar Rp. 3.000.000.000 atau sebesar 5,33% menjadi Rp. 59.286.303.989.
25. Badan Perencanaan Penelitian Dan Pengembangan pada tahun 2024 diproyeksikan sebesar Rp. 8.494.162.845 pada perubahan anggaran mengalami kenaikan sebesar Rp. 111.140.421 atau sebesar 1,31% menjadi Rp. 8.605.303.266.
26. Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan Dan Aset Daerah pada tahun 2024 diproyeksikan sebesar Rp. 415.026.106.276 pada perubahan anggaran mengalami kenaikan sebesar Rp. 46.111.436.811 atau sebesar 11,11% menjadi Rp. 461.137.543.087.
27. Badan Kepegawaian Daerah pada tahun 2024 diproyeksikan sebesar Rp. 7.692.202.280 pada perubahan anggaran mengalami kenaikan sebesar Rp. 295.092.043 atau sebesar 3,84% menjadi Rp. 7.987.294.323.
28. Inspektorat Daerah pada tahun 2024 diproyeksikan sebesar Rp. 12.845.952.090 pada perubahan anggaran mengalami penurunan sebesar Rp. 288.851.450 atau sebesar 2,25% menjadi Rp. 12.557.100.640.
29. Kecamatan Batang pada tahun 2024 diproyeksikan sebesar Rp. 13.598.369.058 pada perubahan anggaran mengalami penurunan

- sebesar Rp. 558.072.749 atau sebesar 4,10% menjadi Rp. 13.040.296.309.
30. Kecamatan Tulis pada tahun 2024 diproyeksikan sebesar Rp. 1.844.847.318 pada perubahan anggaran mengalami kenaikan sebesar Rp. 21.633.850 atau sebesar 1,17% menjadi Rp. 1.866.481.168.
31. Kecamatan Warungasem pada tahun 2024 diproyeksikan sebesar Rp. 2.065.131.744 pada perubahan anggaran mengalami penurunan sebesar Rp. 107.934.859 atau sebesar 5,23% menjadi Rp. 1.957.196.885.
32. Kecamatan Wonotunggal pada tahun 2024 diproyeksikan sebesar Rp. 2.057.229.164 pada perubahan anggaran mengalami kenaikan sebesar Rp. 5.722.661 atau sebesar 0,28% menjadi Rp. 2.062.951.825.
33. Kecamatan Bandar pada tahun 2024 diproyeksikan sebesar Rp. 2.542.495.914 pada perubahan anggaran mengalami penurunan sebesar Rp. 73.140.057 atau sebesar 2,88% menjadi Rp. 2.469.355.857.
34. Kecamatan Blado pada tahun 2024 diproyeksikan sebesar Rp. 1.960.448.668 pada perubahan anggaran mengalami penurunan sebesar Rp. 245.573.472 atau sebesar 12,53% menjadi Rp. 1.714.875.196.
35. Kecamatan Reban pada tahun 2024 diproyeksikan sebesar Rp. 2.390.039.084 pada perubahan anggaran mengalami kenaikan sebesar Rp. 11.337.195 atau sebesar 0,47% menjadi Rp. 2.401.376.279.
36. Kecamatan Kandeman pada tahun 2024 diproyeksikan sebesar Rp. 1.876.193.768 pada perubahan anggaran mengalami penurunan sebesar Rp. 201.087.586 atau sebesar 10,72% menjadi Rp. 1.675.106.182.
37. Kecamatan Tersono pada tahun 2024 diproyeksikan sebesar Rp. 2.004.704.642 pada perubahan anggaran mengalami kenaikan

- sebesar Rp. 42.949.859 atau sebesar 2,14% menjadi Rp. 2.047.654.501.
38. Kecamatan Gringsing pada tahun 2024 diproyeksikan sebesar Rp. 1.852.487.301 pada perubahan anggaran mengalami penurunan sebesar Rp. 228.327.133 atau sebesar 12,33% menjadi Rp. 1.624.160.168.
39. Kecamatan Subah pada tahun 2024 diproyeksikan sebesar Rp. 1.788.530.934 pada perubahan anggaran mengalami penurunan sebesar Rp. 103.940.260 atau sebesar 5,81% menjadi Rp. 1.684.590.674.
40. Kecamatan Limpung pada tahun 2024 diproyeksikan sebesar Rp. 2.112.501.175 pada perubahan anggaran mengalami penurunan sebesar Rp. 1.800.000 atau sebesar 0,09% menjadi Rp. 2.110.701.175.
41. Kecamatan Banyuputih pada tahun 2024 diproyeksikan sebesar Rp. 2.070.436.719 pada perubahan anggaran mengalami penurunan sebesar Rp. 1.800.000 atau sebesar 0,09% menjadi Rp. 2.068.636.719.
42. Kecamatan Pecalungan pada tahun 2024 diproyeksikan sebesar Rp. 1.851.048.622 pada perubahan anggaran mengalami penurunan sebesar Rp. 149.623.853 atau sebesar 8,08% menjadi Rp. 1.701.424.769.
43. Kecamatan Bawang pada tahun 2024 diproyeksikan sebesar Rp. 2.413.253.452 pada perubahan anggaran mengalami penurunan sebesar Rp. 270.147.215 atau sebesar 11,19% menjadi Rp. 2.143.106.237.
44. Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik pada tahun 2024 diproyeksikan sebesar Rp. 23.572.705.341 pada perubahan anggaran mengalami penurunan sebesar Rp. 34.546.376 atau sebesar 0,15% menjadi Rp. 23.538.158.965.

4.3. PLAFON PERUBAHAN ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN PROGRAM PRIORITAS

Pada bagian ini merupakan gabungan dari rincian plafon anggaran sementara untuk program yang diperoleh oleh setiap unit atau satuan kerja (Perangkat Daerah) sesuai dengan urusan yang dilaksanakan di Kabupaten Batang. Kemudian, akan disusun menjadi sebuah tabel atau matriks gabungan yang mencantumkan semua urusan dan semua Perangkat Daerah dalam satu kesatuan tabel.

Program dan kegiatan prioritas daerah adalah program dan kegiatan yang diselenggarakan oleh Perangkat Daerah, baik secara langsung maupun tidak langsung mendukung capaian prioritas dan sasaran pembangunan daerah, dan berhubungan dengan pemenuhan kebutuhan dasar dan syarat layanan minimal. Rencana program dan prioritas pembangunan daerah tahun 2024 dijabarkan dalam 6 (enam) urusan wajib pelayanan dasar, 18 (delapan belas) urusan wajib bukan pelayanan dasar, 8 (delapan) urusan pilihan dan 6 (enam) fungsi penunjang urusan pemerintahan.

A. Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar

1. Pendidikan

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Pengelolaan Pendidikan

Program ini diarahkan pada kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar, Pengelolaan pendidikan Sekolah Menengah Pertama, Pengelolaan pendidikan PAUD, dan Pengelolaan pendidikan Non Formal/Kesetaraan yang didukung dengan pembangunan atau Rehabilitasi sedang/berat unit sekolah baru, ruang kelas, ruang guru, serta fasilitas sekolah lainnya. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator angka partisipasi sekolah dan persentase capaian SPM Pendidikan.

b. Program Pengembangan Kurikulum

Program ini diarahkan pada kegiatan penyusunan kompetensi dasar muatan lokal pendidikan dasar melalui penyusunan kompetensi dasar dan silabus muatan lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal serta Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal dan kegiatan Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal melalui penyusunan kompetensi dasar dan silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal serta Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator Prosentase satuan pendidikan yang mengembangkan kurikulum muatan lokal.

c. Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Program ini diarahkan pada kegiatan Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan melalui Perhitungan, Pemetaan, serta penataan pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator persentase guru berkualifikasi S1/D4.

2. Kesehatan

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

a. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat

Program ini diarahkan pada kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah, kegiatan penyediaan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan, terselenggaranya sistem informasi kesehatan terintegrasi, serta kegiatan penerbitan izin rumah sakit kelas C,D dan Fasilitas Pelayanan. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator Rata-Rata capaian SPM bidang Kesehatan.

b. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan

Program ini diarahkan pada kegiatan Pemberian Izin Praktek Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten melalui Pengendalian perizinan praktik tenaga kesehatan, kegiatan pembinaan teknis, pengawasan praktik tenaga kesehatan di wilayah kabupaten melalui pembinaan dan pengawasan sumberdaya manusia kesehatan dan penyelenggaraan pelatihan untuk peningkatan kapasitas sumber daya manusia, kegiatan perencanaan kebutuhan dan pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten melalui Perencanaan, distribusi, pemerataan, pemenuhan sumber daya manusia kesehatan sesuai standar Serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan, Kegiatan Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota melalui Peningkatan Kompetensi Teknis dan kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan, Kegiatan Pembinaan dan pengawasan Sumber daya manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Tingkat Daerah Kabupaten Kota melalui Pembinaan dan pengawasan sumber daya manusia kesehatan dan Pengelolaan Sistem Informasi Sumber daya manusia kesehatan. Program ini dilaksanakan guna

mencapai indikator Persentase tenaga kesehatan yang berizin.

c. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman

Program ini diarahkan untuk kegiatan Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) melalui pengendalian, pengawasan, penyediaan dan pengelolaan Data Perizinan dan Tindak Lanjut Pengawasan Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT), kegiatan Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRTP sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga melalui Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga, kegiatan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM) melalui Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM), dan Kegiatan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga melalui Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan dan Penyediaan dan Pengelolaan Data Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Industri Rumah

Tangga. Program ini dilaksanakan untuk mencapai Persentase sarana pelayanan kefarmasian yang berizin.

d. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan

Program ini diarahkan pada kegiatan Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang didukung melalui Peningkatan upaya promosi kesehatan, advokasi kemitraan dan pemberdayaan masyarakat, Kegiatan Pelaksanaan Sehat dalam Rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang didukung melalui Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat, dan kegiatan Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang didukung melalui Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM). Program ini dilaksanakan guna mendukung pencapaian indikator Rasio Posyandu Mandiri terhadap balita.

3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

a. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)

Program ini diarahkan pada kegiatan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi yang luasnya di bawah 1000 Ha dalam Kabupaten Batang. Program ini dilakukan untuk mencapai indikator persentase luas sawah yang beririgasi dan rasio luas daerah irigasi kewenangan Kabupaten Batang yang dilayani oleh jaringan irigasi.

b. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum

Program ini diarahkan pada kegiatan fasilitasi dan pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) jaringan perpipaan di kawasan perdesaan Kabupaten Batang. Program ini dilakukan untuk mencapai indikator Persentase Jumlah Rumah Tangga yang mendapat akses air minum layak dan Persentase Jumlah Rumah Tangga yang mendapat akses air minum aman.

c. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah

Program ini diarahkan pada kegiatan fasilitasi dan pembangunan/ penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat (SPAL-T) Skala Permukiman. Program ini dilakukan untuk mencapai indikator persentase jumlah penduduk yang memperoleh layanan pengelolaan air limbah.

d. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase

Program ini diarahkan pada kegiatan pengelolaan dan pengembangan sistem drainase yang terhubung langsung dengan sungai dalam wilayah Kabupaten Batang. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator persentase drainase dalam kondisi baik/ pembuangan aliran air dalam kondisi baik.

e. Program Pengembangan Permukiman

Program ini diarahkan pada kegiatan penyelenggaraan infrastruktur pada permukiman di Kawasan Strategis Daerah. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator persentase infrastruktur lingkungan perumahan yang layak.

f. Program Penataan Bangunan Gedung

Program ini diarahkan pada kegiatan penyelenggaraan bangunan gedung di wilayah Kabupaten Batang, pemberian

Izin Mendirikan Bangunan (IMB), dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung. Program ini dilakukan untuk mencapai indikator persentase pemanfaatan gedung yang sesuai dengan peruntukan.

g. Program Penyelenggaraan Jalan

Penyelenggaraan jalan dilaksanakan melalui : penyusunan rencana, kebijakan, dan strategi pengembangan jaringan jalan serta perencanaan teknis penyelenggaraan jalan dan jembatan; pengelolaan leger jalan; survei kondisi jalan/ jembatan; pembangunan jalan; pelebaran jalan menuju standar; pelebaran jalan menambah lajur; rekonstruksi jalan; pemeliharaan berkala jalan; pemeliharaan rutin jalan; pembangunan jembatan; penggantian jembatan; pelebaran jembatan; rehabilitasi jembatan; pemeliharaan rutin jembatan; dan pemeliharaan berkala jembatan. Program penyelenggaraan jalan dilaksanakan untuk mencapai indikator persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik (> 40 km/jam).

h. Program Pengembangan Jasa Konstruksi

Program ini diarahkan pada kegiatan penyelenggaraan pelatihan tenaga terampil konstruksi. Program ini dilakukan untuk rasio tenaga operator/ teknisi/ analisis yang memiliki sertifikat kompetensi.

i. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang

Program ini diarahkan pada kegiatan Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten, koordinasi dan sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah beserta dengan pemanfaatan tata ruang. Program ini dilakukan guna mencapai indikator Persentase Penetapan Rencana Rinci Tata Ruang.

4. Perumahan dan Kawasan Permukiman

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

a. Program Pengembangan Perumahan

Program pengembangan perumahan ini diarahkan pada kegiatan pembangunan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program kabupaten. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator persentase RLH bagi korban bencana/ terdampak program pemerintah.

b. Program Kawasan Permukiman

Program ini diarahkan pada : kegiatan penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kawasan kumuh dengan luas di bawah 10 (sepuluh) Ha melalui koordinasi dan sinkronisasi pengendalian penataan pemugaran/ peremajaan permukiman kumuh; dan kegiatan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 (sepuluh) Ha melalui perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH). Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator persentase luasan kawasan kumuh yang tertangani.

c. Program Peningkatan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU)

Program ini dilaksanakan melalui penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) untuk menunjang fungsi hunian serta koordinasi dan sinkronisasi dalam rangka penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) perumahan. Program ini dilakukan untuk

memenuhi indikator persentase perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum).

5. Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

a. Program Peningkatan Ketentraman Dan Ketertiban Umum

Program ini diarahkan pada penanganan gangguan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat; Pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendukung dalam pelaksanaan penanganan gangguan Trantibum Linmas; Penegakan peraturan daerah Kabupaten/Kota dan peraturan Bupati/Walikota; Pembinaan penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota; Pengembangan kinerja dan kapasitas Satlinmas Kabupaten/Kota. Program ini ditujukan untuk mencapai indikator persentase gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang tertangani.

b. Program Penanggulangan Bencana

Program ini diarahkan pada pelayanan informasi rawan bencana kabupaten/kota; pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana; Penataan sistem dasar penanggulangan bencana. Program ini ditujukan untuk mencapai indikator Persentase Korban Bencana Alam Yang ditangani.

c. Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran

Program ini diarahkan pada Pencegahan, pengendalian, pemadaman, penyelamatan, dan penanganan bahan berbahaya dan beracun kebakaran; Inspeksi peralatan proteksi kebakaran; Pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan kebakaran; Penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia. Program ini ditujukan untuk mencapai indikator persentase waktu tanggap "*response time*".

6. Sosial

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

a. Program Pemberdayaan Sosial

Program ini diarahkan pada pengembangan potensi kesejahteraan sosial dengan meningkatkan kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota, kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota, kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota, kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota dan kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3). Pelaksanaan program ini guna mencapai indikator Cakupan pengembangan Potensi sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten.

b. Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan

Program ini diarahkan pada fasilitasi pemulangan warga negara migran tindak kekerasan dengan kegiatan Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal. pelaksanaan program ini guna mencapai indikator persentase Warga Negara Migran korban tindak kekerasan yang berhasil dipulangkan.

c. Program Rehabilitasi Sosial

Program ini diarahkan pada rehabilitasi sosial dasar melalui penyediaan permakanan, Sandang, Alat Bantu, Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak, Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar, Pemberian Layanan Data dan Pengaduan dan Pemberian Layanan Rujukan melalui kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial. Pelaksanaan program ini guna mencapai indikator Persentase PMKS yang terpenuhi kebutuhan dasarnya.

d. Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial

Program ini diarahkan pengelolaan anak terlantar dan data miskin kabupaten melalui penjangkauan anak-anak terlantar dan data fakir miskin serta fasilitasi bantuan pengembangan ekonomi masyarakat. Pelaksanaan program ini guna mencapai indikator Persentase capaian layanan pemenuhan SPM sosial.

e. Program Penanganan Bencana

Program ini diarahkan memenuhi kebutuhan dasar bencana alam dan sosial dengan kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota

dan kegiatan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota yang didukung dengan Penyediaan Makanan, Penyediaan Sandang, Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan, Pelayanan Dukungan Psikososial dan dengan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana. Pelaksanaan program ini guna mencapai indikator Persentase Korban Bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya.

f. Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan

Program ini diarahkan memelihara Taman Makam Pahlawan dengan kegiatan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota yang didukung dengan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana, pemeliharaan, serta pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota. Pelaksanaan program ini guna mencapai indikator Persentase Taman Makam Pahlawan dalam kondisi baik.

B. Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar

1. Tenaga Kerja

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Perencanaan Tenaga Kerja

Program ini diarahkan pada penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro melalui kegiatan Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK). Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator Persentase Kegiatan yang mengacu RTK

b. Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja

Program ini diarahkan pada pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja berdasarkan klaster kompetensi melalui kegiatan pelaksanaan pelatihan berdasarkan unit kompetensi dan pembinaan lembaga pelatihan kerja swasta melalui kegiatan pembinaan lembaga pelatihan kerja swasta serta pelaksanaan konsultasi produktivitas kepada perusahaan kecil. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja program yaitu rasio penduduk yang bekerja

c. Program Penempatan Tenaga Kerja

Program ini diarahkan pada proses pelayanan penempatan yang diberikan kepada pencari kerja untuk mempertemukan tenaga kerja dengan pemberi kerja sehingga tenaga kerja dapat memperoleh pekerjaan sesuai dengan bakat, minat dan kemampuan, serta pemberi Kerja dapat memperoleh tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhannya melalui kegiatan pelayanan antar kerja. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja program yaitu persentase pencari pekerja yang mendapat pekerjaan.

d. Program Hubungan Industrial

Program ini diarahkan pada pengesahan peraturan perusahaan bagi perusahaan dan penyelenggaraan pendataan dan informasi sarana hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga kerja serta pengupahan. Selain itu, melalui kegiatan pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, mogok kerja dan penutupan perusahaan, program hubungan industrial diarahkan untuk mencegah terjadinya perselisihan hubungan industrial, mogok kerja dan penutupan perusahaan. Program ini

dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja program yaitu penurunan jumlah perselisihan HI.

2. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan

Program ini diarahkan pada pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada lembaga pemerintah melalui koordinasi dan sinkronisasi perumusan kebijakan pelaksanaan PUG; Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan PUG; Advokasi kebijakan dan pendampingan pelaksanaan PUG termasuk PPRG; Sosialisasi kebijakan pelaksanaan PUG termasuk PPRG. Pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial, dan ekonomi pada organisasi kemasyarakatan melalui sosialisasi peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi; Advokasi kebijakan dan pendampingan peningkatan partisipasi perempuan dan politik, hukum, sosial dan ekonomi. Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan melalui advokasi kebijakan dan pendampingan kepada lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan; peningkatan kapasitas sumber daya lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan. Program ini ditujukan untuk mencapai indikator persentase ARG pada belanja langsung APBD.

b. Program Perlindungan Perempuan

Program ini diarahkan pada pencegahan kekerasan terhadap perempuan melalui koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan pencegahan kekerasan terhadap perempuan; Advokasi kebijakan dan

pendampingan layanan perlindungan perempuan. penyediaan layanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan yang memerlukan koordinasi melalui penyediaan layanan pengaduan masyarakat bagi perempuan korban kekerasan; Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penyediaan layanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan. Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan melalui advokasi kebijakan dan pendampingan penyediaan sarana prasarana layanan bagi perempuan korban kekerasan; Peningkatan kapasitas sumber daya lembaga penyedia layanan penanganan bagi perempuan korban kekerasan; Penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan. Program ini ditujukan untuk mencapai indikator cakupan perempuan korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih didalam unit pelayanan terpadu.

c. Program Peningkatan Kualitas Keluarga

Program ini diarahkan pada peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan hak anak melalui pengembangan kegiatan masyarakat untuk peningkatan kualitas keluarga. Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan KG dan hak anak melalui advokasi kebijakan dan pendampingan untuk mewujudkan KG dan perlindungan anak; Advokasi kebijakan dan pendampingan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga; Peningkatan kapasitas sumber daya lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga. Penyediaan layanan bagi keluarga dalam mewujudkan KG dan hak anak melalui pelaksanaan penyediaan layanan komprehensif bagi

keluarga dalam mewujudkan KG dan perlindungan anak. Program ini ditujukan untuk mencapai indikator partisipasi angkatan kerja perempuan

d. Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak

Program ini diarahkan pada pengumpulan, pengolahan analisis dan penyajian data gender dan anak dalam kelembagaan data melalui penyediaan data gender dan anak serta penyajian dan pemanfaatan data gender dan anak dalam kelembagaan data. Program ini ditujukan untuk mencapai indikator cakupan data pilah gender dan anak.

e. Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)

Program ini diarahkan pada pelembagaan pha pada lembaga pemerintah, non pemerintah, dan dunia usaha melalui advokasi kebijakan dan pendampingan pemenuhan hak anak pada lembaga pemerintah, non pemerintah, media dan dunia usaha; Koordinasi dan sinkronisasi pelembagaan pemenuhan hak anak. penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak melalui penyediaan layanan peningkatan kualitas hidup anak; Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan pendampingan peningkatan kualitas hidup anak; Pengembangan komunikasi, informasi dan edukasi pemenuhan hak anak bagi lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak; Penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak. Program ini ditujukan untuk mencapai indikator cakupan kecamatan layak anak.

f. Program Perlindungan Khusus Anak

Program ini diarahkan pada pencegahan kekerasan terhadap anak yang melibatkan para pihak melalui advokasi kebijakan dan pendampingan pelaksanaan kebijakan,

program dan kegiatan pencegahan kekerasan terhadap anak; Koordinasi dan sinkronisasi pencegahan kekerasan terhadap anak. penyediaan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memerlukan koordinasi melalui penyediaan layanan pengaduan masyarakat bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus; Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan pendampingan anak yang memerlukan perlindungan khusus; Penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan anak yang memerlukan perlindungan khusus. Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus melalui koordinasi dan sinkronisasi penyediaan sarana prasarana layanan; Koordinasi dan sinkronisasi peningkatan kapasitas sumber daya lembaga penyedia layanan; Koordinasi dan sinkronisasi penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan anak yang memerlukan perlindungan khusus. Indikator yang hendak dicapai dengan adanya program ini adalah cakupan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih didalam unit pelayanan terpadu.

3. Pangan

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan

Program ini diarahkan pada penyediaan infrastruktur dan seluruh pendukung kemandirian pangan, termasuk penyediaan infrastruktur lumbung pangan, penyediaan infrastruktur rantai jemur, serta penyediaan infrastruktur pendukung kemandirian pangan lainnya. program ini

memiliki indikator yang akan dicapai yaitu persentase kegiatan pengelolaan sumber daya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan.

b. Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat

Program ini diarahkan pada penyediaan dan penyaluran pangan pokok atau pangan lainnya sesuai dengan kebutuhan daerah melalui penyediaan informasi harga pangan dan neraca bahan makanan, penyediaan pangan berbasis sumber daya lokal, pengembangan kelembagaan dan jaringan distribusi pangan, pemantauan stok, pasokan dan harga pangan, dan pengembangan kelembagaan usaha pangan masyarakat dan toko tani Indonesia. Selain itu, program ini diarahkan pada pengelolaan dan keseimbangan cadangan pangan kabupaten. Adapun indikator yang akan dicapai dengan adanya program ini adalah Skor Pola Pangan Harapan.

c. Program Penanganan Kerawanan Pangan

Program ini diarahkan pada penyusunan peta kerentanan dan ketahanan pangan kecamatan serta penanganan kerawanan pangan. melalui penyusunan, pemutakhiran dan analisis peta ketahanan dan kerentanan pangan; koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan kewenangan kabupaten; pelaksanaan pengadaan, pengelolaan dan penyaluran cadangan pangan pada kerawanan pangan yang mencakup dalam satu daerah. Program ini diarahkan untuk mencapai sasaran meningkatnya ketersediaan pangan yang beragam, penganeekaragaman konsumsi pangan masyarakat serta keterjangkauan pangan masyarakat untuk pangan pokok.

Adapun indikator yang akan dicapai dengan adanya program ini adalah rasio desa mandiri pangan.

d. Program Pengawasan Keamanan Pangan

Program pengawasan keamanan pangan diarahkan untuk menjaga persentase pengawasan keamanan pangan yang merupakan indikator yang ingin dicapai dari adanya program ini melalui kegiatan pelaksanaan pengawasan keamanan pangan segar daerah.

4. Pertanahan

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah program penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan. Program ini diarahkan pada kegiatan koordinasi dan sinkronisasi penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan oleh pemerintah daerah. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator persentase fasilitasi hak atas tanah program daerah dan penyelesaian permasalahan pertanahan.

5. Lingkungan Hidup

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Perencanaan Lingkungan Hidup

Program ini diarahkan pada kegiatan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) melalui penyusunan dan penetapan RPPLH serta pengendalian pelaksanaan RPPLH Kabupaten Batang. Selain itu, program ini juga diarahkan pada kegiatan penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) melalui pembuatan dan pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang serta pembuatan dan pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD. Program ini dilaksanakan untuk memenuhi

indikator tingkat ketersediaan dokumen perencanaan lingkungan hidup yang diintegrasikan dalam dokumen perencanaan daerah.

b. Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup

Program ini diarahkan pada kegiatan pencegahan dan penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator indeks kualitas air dan indeks kualitas udara.

c. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)

Program ini dilaksanakan melalui pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) serta pengelolaan sarana dan prasarana keanekaragaman hayati. Program ini dilakukan untuk memenuhi indikator persentase Ruang Terbuka Hijau (RTH) dalam kondisi baik.

d. Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)

Program ini diarahkan pada fasilitasi pemenuhan komitmen izin penyimpanan sementara limbah B3 yang dilaksanakan melalui sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik. Selain itu, program ini juga diarahkan pada kegiatan verifikasi lapangan untuk memastikan pemenuhan persyaratan administrasi dan teknis penyimpanan sementara limbah B3. Program ini dilaksanakan untuk memenuhi indikator persentase persetujuan teknis pengelolaan limbah B3 yang diberikan.

e. Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)

Program ini diarahkan pada fasilitasi pemenuhan ketentuan dan kewajiban izin lingkungan dan/atau izin PPLH serta pengawasan usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan hidup, izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah. Program ini dilakukan untuk memenuhi indikator persentase ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah.

f. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk masyarakat

Program ini diarahkan untuk peningkatan kapasitas dan sumber daya manusia bidang lingkungan hidup bagi lembaga kemasyarakatan dengan pelaksanaan sosialisasi terhadap komunitas peduli LH. Program ini dilaksanakan untuk memenuhi indikator persentase masyarakat/komunitas peduli LH yang mendapat edukasi Lingkungan Hidup.

g. Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat

Program ini diarahkan pada kegiatan penilaian kinerja masyarakat/ lembaga masyarakat/ dunia pendidikan/ filantropi dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup melalui penilaian sekolah peduli dan berbudaya lingkungan di sekolah. Program ini dilaksanakan untuk memenuhi indikator persentase Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) yang mendapat penghargaan lingkungan tingkat kabupaten.

h. Program Pengelolaan Persampahan

Program ini diarahkan pada penyusunan kebijakan dan strategi daerah dalam pengelolaan sampah melalui penyusunan masterplan persampahan, peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan melalui

kegiatan pasukan got, koordinasi dan sinkronisasi penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan, serta penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator persentase penanganan sampah di Kabupaten Batang.

6. Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Pendaftaran Penduduk

Program ini diarahkan pada peningkatan pelayanan pendaftaran penduduk serta pencatatan, penatausahaan dan penerbitan dokumen, atas pelaporan peristiwa kependudukan. Program ini dilaksanakan untuk mencapai target indikator persentase identitas kependudukan (KTP dan KIA) yang telah diterbitkan.

b. Program Pencatatan Sipil

Program ini diarahkan pada peningkatan pelayanan pencatatan sipil serta pencatatan, penatausahaan dan penerbitan dokumen, atas pelaporan peristiwa penting. Program ini dilaksanakan untuk memenuhi indikator persentase penduduk yang memiliki akta nikah dan akta lahir.

c. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan

Program ini diarahkan pada kegiatan pengumpulan data kependudukan serta pemanfaatan dan penyajian database kependudukan. Program ini dilakukan dengan cara pengolahan dan penyajian data kependudukan untuk mencapai indikator persentase penyajian data kependudukan yang valid.

7. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Penataan Desa

Program ini diarahkan pada kegiatan penyelenggaraan penataan desa yang didukung fasilitasi penetapan kesatuan masyarakat hukum adat dan desa adat kewenangan kabupaten. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator persentase budaya desa yang dilestarikan.

b. Program Administrasi Pemerintahan Desa

Program ini diarahkan pada penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa melalui kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa yang didukung dengan adanya fasilitasi penyelenggaraan administrasi pmdes, fasilitasi pengelolaan keuangan desa serta penyelenggaraan kepala desa. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator persentase desa yang tertib administrasi sesuai peraturan yang berlaku.

c. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat

Program ini diarahkan pada penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan di Desa melalui kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten yang didukung dengan fasilitasi kelembagaan desa, penyediaan sarana dan prasarana kelembagaan desa, fasilitasi tim penggerak PKK, serta fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat dan

pemerintah desa dalam peningkatan PAD. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator Persentase lembaga kemasyarakatan desa (LKD) yang aktif dalam pemberdayaan desa.

8. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Pengendalian Penduduk

Program ini diarahkan pada pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah provinsi dengan pemerintah daerah Kabupaten/Kota dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk melalui penyerasian kebijakan pembangunan daerah Kabupaten/Kota terhadap Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (Program KKBPK); Penyusunan dan pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK); Penguatan kerjasama pelaksanaan pendidikan kependudukan jalur pendidikan formal; Penyediaan dan pengembangan materi pendidikan kependudukan jalur pendidikan formal sesuai isu lokal; Advokasi, sosialisasi dan fasilitasi pelaksanaan pendidikan kependudukan jalur formal di satuan pendidikan jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, jalur nonformal dan informal; Implementasi pendidikan kependudukan jalur pendidikan formal dan nonformal; Pelaksanaan sarasehan hasil pemutakhiran data keluarga; Pelaksanaan rapat pengendalian program KKBPK. Pemetaan perkiraan pengendalian penduduk melalui perumusan parameter kependudukan; Penyediaan dan pengolahan data kependudukan; penyusunan profil kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga; Membentuk rumah data kependudukan di kampung KB untuk memperkuat

integrasi program KKBPK di sektor lain; Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga; Pemanfaatan data hasil pemutakhiran data keluarga; Penyediaan data dan informasi keluarga; Pencatatan dan pengumpulan data keluarga; Pengolahan dan pelaporan data pengendalian lapangan dan pelayanan KB; Pembinaan dan pengawasan pencatatan dan pelaporan program KKBPK. Program ini ditujukan untuk mencapai indikator persentase jenis data kependudukan bidang keluarga berencana.

b. Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)

Program ini diarahkan pada pelaksanaan advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) pengendalian penduduk dan kb sesuai kearifan budaya lokal; Pendayagunaan tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB); Pengendalian dan pendistribusian kebutuhan alat dan obat kontrasepsi serta pelaksanaan pelayanan KB di daerah; dan Pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat daerah Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan pelayanan dan pembinaan kesertaan Ber-KB. Program ini ditujukan untuk mencapai indikator peningkatan cakupan kesertaan Ber-KB

c. Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)

Program ini diarahkan pada pelaksanaan pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga; serta pelaksanaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat daerah Kabupaten/ Kota dalam pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga. Program ini ditujukan untuk mencapai indikator Cakupan pembangunan

ketahanan dan kesejahteraan keluarga melalui kelompok tribina (BKB, BKR, dan BKL).

9. Perhubungan

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ). Program ini diarahkan pada kegiatan penetapan rencana induk jaringan LLAJ, penyediaan perlengkapan jalan di Jalan Kabupaten, pengelolaan terminal penumpang tipe C, penerbitan izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir, pengujian berkala kendaraan bermotor, pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan Jalan Kabupaten, pengadaan, pemasangan, perbaikan dan pemeliharaan perlengkapan jalan dalam rangka manajemen dan rekayasa lalu lintas, persetujuan hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten, peningkatan kapasitas penilai Andalalin, koordinasi dan sinkronisasi penilaian hasil Andalalin, pengawasan pelaksanaan rekomendasi Andalalin, serta audit dan inspeksi keselamatan LLAJ di jalan. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator persentase terselenggaranya lalu lintas dan angkutan jalan yang lancar, aman, dan selamat.

10. Komunikasi dan Informatika

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Informasi Dan Komunikasi Publik

Program ini diarahkan pada pengelolaan informasi dan komunikasi publik pemerintah daerah Kabupaten/Kota melalui pengelolaan media komunikasi publik; Layanan hubungan media; Pelayanan informasi publik; Penyelenggaraan hubungan masyarakat, media dan kemitraan komunitas; Monitoring opini dan aspirasi publik;

Manajemen komunikasi krisis; dan penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik. Program ini ditujukan untuk mencapai target indikator persentase penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah Kabupaten/Kota.

b. Program Aplikasi Informatika

Program ini diarahkan pada pengelolaan nama domain yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat dan sub domain di lingkup pemerintah daerah kabupaten melalui penyelenggaraan sistem jaringan intra pemerintah dan terselenggaranya pengelolaan E-Government di lingkup pemerintah daerah Kabupaten melalui Pengelolaan pusat data pemerintah daerah; Pengembangan dan pengelolaan ekosistem Kabupaten/Kota cerdas dan kota cerdas; dan Pengembangan aplikasi dan proses bisnis pemerintahan berbasis elektronik. Program ini ditujukan untuk mencapai indikator persentase jumlah layanan yang diselenggarakan secara *online* dan terintegrasi.

11. Koperasi dan UKM

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Penilaian dan Kesehatan KSP/USP Koperasi

Program ini diarahkan pada penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam koperasi yang wilayah keanggotaanya dalam satu daerah Kabupaten. Melalui pelaksanaan penilaian kesehatan KSP/USP koperasi dan penghargaan kesehatan KSP/USP koperasi, program ini diarahkan untuk mencapai indikator persentase koperasi aktif.

b. Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian

Program ini diarahkan pada peningkatan pemahaman dan pengetahuan perkoperasian serta kapasitas dan kompetensi SDM koperasi. Program ini diarahkan untuk mencapai indikator persentase peserta pelatihan dengan predikat baik.

c. Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi

Program ini diarahkan pada monitoring, evaluasi dan pendampingan koperasi yang wilayah keanggotaannya dalam daerah kabupaten serta pembinaan dan pengawasan koperasi. Program ini memiliki indikator kinerja yang akan dicapai yaitu persentase peserta diklat dengan predikat baik.

d. Program Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil menengah UMKM

Program ini diarahkan untuk memfasilitasi kemitraan usaha bagi Usaha Mikro Kecil Menengah melalui koordinasi dan sinkronisasi dengan para pemangku kepentingan dalam pemberdayaan usaha mikro. Program ini memiliki indikator kinerja yang akan dicapai yaitu persentase pertambahan wirausaha baru.

e. Program Pengembangan UMKM

Program ini diarahkan pada pengembangan usaha mikro dengan orientasi peningkatan skala usaha menjadi usaha kecil melalui fasilitasi usaha mikro menjadi usaha kecil dalam pengembangan produksi dan pengolahan, pemasaran, SDM, serta desain dan teknologi; promosi produk Usaha Kecil dan Menengah; dan monitoring, evaluasi dan pelaporan UMKM. Program ini memiliki indikator kinerja yang akan dicapai yaitu persentase produk UMKM yang terstandarisasi.

12. Penanaman Modal

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal

Program ini diarahkan pada penetapan pemberian fasilitas/insentif di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan melalui penetapan kebijakan daerah mengenai pemberian fasilitas/insentif dan kemudahan penanaman modal serta pembuatan peta potensi investasi Kabupaten/Kota melalui penyusunan rencana umum penanaman modal daerah Kabupaten/Kota; penyediaan peta potensi dan peluang usaha kabupaten/kota. Program ini memiliki indikator kinerja yang akan dicapai yaitu jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA).

b. Program Promosi Penanaman Modal

Program ini diarahkan pada penyelenggaraan promosi penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten/Kota melalui penyusunan strategi promosi penanaman modal dan pelaksanaan kegiatan promosi penanaman modal daerah Kabupaten/Kota. Indikator yang akan dicapai dengan adanya program ini adalah jumlah perusahaan baru yang berinvestasi di Kabupaten Batang.

c. Program Pelayanan Penanaman Modal

Program pelayanan penanaman modal diarahkan pada pelayanan perizinan dan non perizinan secara terpadu satu pintu di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten/ Kota melalui Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik; Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal; Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat

terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan; serta Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan pemberian Fasilitas/Insentif Daerah. Indikator yang akan dicapai dengan adanya program ini adalah jumlah izin usaha yang diterbitkan.

d. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

Program pengendalian pelaksanaan penanaman modal diarahkan pada pengendalian pelaksanaan penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten/Kota melalui koordinasi dan sinkronisasi pemantauan, pembinaan, dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal. Indikator yang akan dicapai dengan adanya program ini adalah persentase perusahaan yang mematuhi ketentuan penanaman modal.

e. Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal

Program ini diarahkan untuk pengelolaan data dan informasi perizinan dan nonperizinan yang terintegrasi pada tingkat daerah Kabupaten/Kota melalui pengolahan, penyajian dan pemanfaatan data dan informasi perizinan dan non perizinan berbasis sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik. Indikator yang akan dicapai dengan adanya program ini adalah persentase data dan informasi penanaman modal yang tersedia.

13. Kepemudaan dan Olahraga

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan

Program ini diarahkan untuk penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan pemuda dan

kepemudaan terhadap pemuda pelopor Kabupaten/Kota, wirausaha muda pemula, dan pemuda melalui koordinasi, sinkronisasi dan penyelenggaraan peningkatan kapasitas daya saing pemuda pelopor; koordinasi, sinkronisasi dan penyelenggaraan peningkatan kapasitas daya saing wirausaha pemula; koordinasi, sinkronisasi dan penyelenggaraan peningkatan kapasitas daya saing pemuda kader kabupaten/kota; pemenuhan hak setiap pemuda melalui perlindungan pemuda, advokasi, akses pengembangan diri, penggunaan prasarana dan sarana tanpa diskriminatif, partisipasi pemuda dalam proses perencanaan, pelaksanaan evaluasi dan pengambilan keputusan program strategis kepemudaan; pelaksanaan koordinasi strategis lintas sektor penyelenggaraan pelayanan kepemudaan melalui implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD tingkat Kabupaten/Kota; perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan prasarana dan sarana kepemudaan Kabupaten/Kota; pemberian penghargaan pemuda dan organisasi pemuda yang berjasa dan/atau berprestasi; peningkatan kepemimpinan, kepeloporan dan kesukarelawanan pemuda; dan penyelenggaraan seleksi dan pelatihan pasukan pengibar bendera. Selain itu, program pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan juga diarahkan pada pemberdayaan dan pengembangan organisasi kepemudaan tingkat daerah Kabupaten/Kota melalui koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan pemberdayaan pemuda atau organisasi kepemudaan melalui kemitraan dengan dunia usaha serta peningkatan kapasitas pemuda dan organisasi kepemudaan Kabupaten/Kota. Indikator yang akan dicapai dengan adanya program ini adalah persentase organisasi kepemudaan yang dibina.

b. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan

Program ini diarahkan pada pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan pada jenjang pendidikan yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten/Kota; penyelenggaraan kejuaraan olahraga tingkat daerah Kabupaten/Kota; pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi tingkat daerah provinsi; pembinaan dan pengembangan organisasi olahraga; serta pembinaan dan pengembangan olahraga rekreasi. Indikator yang akan dicapai dengan adanya program ini adalah capaian medali kejuaraan.

c. Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan

Program ini diarahkan pada pembinaan dan pengembangan organisasi kepramukaan melalui koordinasi dan sinkronisasi penyediaan data dan informasi kepramukaan berbasis elektronik; peningkatan kapasitas organisasi kepramukaan tingkat daerah; pengembangan kapasitas SDM kepramukaan tingkat daerah; penyediaan pusat pendidikan dan pelatihan kepramukaan di daerah Kabupaten/Kota; penyelenggaraan kegiatan kepramukaan tingkat daerah; penyediaan prasarana dan sarana kepramukaan tingkat daerah; perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan prasarana dan sarana kepramukaan tingkat daerah; serta partisipasi dan keikutsertaan dalam kegiatan kepramukaan. Indikator yang akan dicapai dengan adanya program ini adalah penghargaan yang diterima.

14. Statistik

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan dalam urusan statistik adalah program penyelenggaraan statistik sektoral. Program ini diarahkan pada koordinasi dan

sinkronisasi pengumpulan, pengolahan, analisis dan diseminasi data statistik sektoral, membangun metadata statistik sektoral, pengembangan infrastruktur melalui pemeliharaan dan pengembangan sistem statistik sektoral, serta peningkatan kapasitas SDM pemerintah daerah dalam peningkatan mutu statistik daerah yang terintegrasi. Program ini dilaksanakan untuk memenuhi indikator persentase ketersediaan data statistik sektoral.

15. Persandian

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan dalam urusan persandian adalah program penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi. Program ini diarahkan pada pelaksanaan keamanan informasi pemerintah daerah Kabupaten berbasis elektronik dan non elektronik. Program ini dilaksanakan untuk memenuhi indikator persentase capaian sistem elektronik yang dilakukan pengamanan setiap tahunnya.

16. Kebudayaan

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Pengembangan Kebudayaan

Program ini diarahkan pada kegiatan pengelolaan kebudayaan dan kegiatan pelestarian kesenian tradisional yang masyarakat pelakunya dalam daerah kabupaten/kota. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator peningkatan jumlah festival seni dan peristiwa budaya yang diselenggarakan Pemerintah Daerah.

b. Program Pengembangan Kesenian Tradisional

Program ini diarahkan pada kegiatan pembinaan kesenian yang masyarakat pelakunya dalam daerah kabupaten/kota melalui peningkatan pendidikan dan

pelatihan sumber daya manusia kesenian tradisional serta peningkatan kapasitas tata kelola lembaga kesenian tradisional.

c. Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya

Program ini diarahkan pada kegiatan perlindungan cagar budaya. Program ini dilaksanakan untuk memenuhi indikator persentase benda cagar budaya yang dilestarikan.

17. Perpustakaan

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah program pembinaan perpustakaan. Program ini diarahkan pada kegiatan pengelolaan perpustakaan tingkat daerah kabupaten/kota serta pembudayaan gemar membaca tingkat daerah kabupaten/kota. Program ini dilaksanakan untuk mencapai target persentase peningkatan pengunjung perpustakaan per tahun.

18. Kearsipan

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Pengelolaan Arsip

Program ini diarahkan pada kegiatan pengelolaan arsip dinamis daerah, pengelolaan arsip statis daerah, serta pengelolaan simpul jaringan informasi kearsipan nasional tingkat kabupaten. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional.

b. Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip

Program ini diarahkan pada kegiatan pemusnahan arsip di lingkungan pemerintah daerah kabupaten/kota

yang memiliki retensi di bawah 10 (sepuluh) tahun, kegiatan perlindungan dan penyelamatan arsip akibat bencana yang berskala kabupaten/kota, penyelamatan arsip perangkat daerah kabupaten/kota yang digabung dan/atau dibubarkan, dan pemekaran daerah kecamatan dan desa/kelurahan, kegiatan autentikasi arsip statis dan arsip hasil alih media kabupaten/kota, dan kegiatan pencarian arsip statis kabupaten/kota yang dinyatakan hilang. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat.

C. Urusan Pilihan

1. Kelautan dan Perikanan

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap

Program ini diarahkan pada pengelolaan penangkapan ikan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/ Kota; pemberdayaan nelayan kecil dalam daerah Kabupaten/Kota; pengelolaan dan penyelenggaraan tempat pelelangan ikan (TPI); serta penerbitan tanda daftar kapal perikanan berukuran sampai dengan 10 GT di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota. Indikator yang akan dicapai dengan adanya program ini adalah prosentase capaian produksi perikanan tangkap.

b. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya

Program ini diarahkan pada pemberdayaan pembudidaya ikan kecil melalui pengembangan kapasitas pembudidaya ikan kecil dan pelaksanaan fasilitasi bantuan pendanaan, bantuan pembiayaan, kemitraan usaha serta pengelolaan pembudidayaan ikan melalui penyediaan prasarana pembudidayaan ikan dalam satu daerah kabupaten/kota dan pembinaan dan pemantauan pembudidayaan ikan di darat. Indikator yang akan dicapai dengan adanya program ini adalah persentase capaian produksi perikanan budidaya.

c. Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan

Program ini diarahkan pada pengawasan sumber daya perikanan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air melalui pengawasan usaha perikanan tangkap di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan dalam Kabupaten/Kota. Indikator yang akan dicapai dengan adanya program ini adalah capaian bina kelompok masyarakat pengawas.

d. Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan

Program ini diarahkan pada penerbitan tanda daftar usaha pengolahan hasil perikanan bagi usaha skala mikro dan kecil melalui penyediaan data dan informasi usaha pemasaran dan pengolahan hasil perikanan dalam satu daerah Kabupaten/Kota serta penyediaan dan penyaluran bahan baku industri pengolahan ikan dalam satu daerah Kabupaten/ Kota melalui peningkatan ketersediaan ikan untuk konsumsi dan usaha pengolahan dalam 1 satu daerah Kabupaten/Kota. Indikator yang akan dicapai dengan adanya program ini adalah persentase capaian tingkat konsumsi makan ikan.

2. Pariwisata

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata

Program peningkatan daya tarik destinasi pariwisata diarahkan pada pengelolaan daya tarik wisata; pengelolaan kawasan strategis pariwisata;; pengelolaan destinasi pariwisata; dan penetapan tanda daftar usaha pariwisata daerah tingkat Kabupaten/Kota. Program ini ditujukan untuk mencapai target indikator persentase peningkatan pendapatan sektor pariwisata.

b. Program Pemasaran Pariwisata

Program pemasaran pariwisata diarahkan pada pemasaran pariwisata dalam dan luar negeri daya tarik, destinasi dan kawasan strategis pariwisata kabupaten/kota melalui penguatan promosi melalui media cetak, elektronik, dan media lainnya baik dalam dan luar negeri; fasilitasi kegiatan pemasaran pariwisata baik dalam dan luar negeri pariwisata Kabupaten/Kota; penyediaan data dan penyebaran informasi pariwisata Kabupaten/Kota, baik dalam dan luar negeri; peningkatan kerja sama dan kemitraan pariwisata dalam dan luar negeri; monitoring dan evaluasi pengembangan pemasaran pariwisata. Program ini ditujukan untuk mencapai target indikator persentase peningkatan wisatawan.

c. Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual

Program ini diarahkan pada penyediaan prasarana (zona kreatif/ruang kreatif/kota kreatif) sebagai ruang berekspresi, berpromosi dan berinteraksi bagi insan kreatif di daerah melalui pengembangan dan revitalisasi prasarana kota kreatif dan pengembangan ekosistem ekonomi kreatif melalui

pengembangan riset; pengembangan pendidikan; fasilitasi pendanaan dan pembiayaan; penyediaan infrastruktur; pengembangan sistem pemasaran; pemberian insentif; fasilitasi kekayaan intelektual; perlindungan hasil kreativitas; penyusunan rencana aksi pengembangan ekonomi kreatif; dan monitoring dan evaluasi pengembangan ekosistem ekonomi. Program ini ditujukan untuk mencapai target indikator persentase jumlah ekonomi kreatif yang memiliki HAKI.

d. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif

Program ini diarahkan pada pelaksanaan peningkatan kapasitas sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif tingkat dasar melalui peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan kemitraan pariwisata; pelatihan dasar sdm kepariwisataan bagi masyarakat, guru dan pelajar (mahasiswa dan/atau siswa); sertifikasi kompetensi bagi tenaga kerja bidang pariwisata; fasilitasi proses kreasi, produksi, distribusi konsumsi dan konservasi ekonomi kreatif; fasilitasi pengembangan kompetensi sumber daya manusia ekonomi kreatif, dan pengembangan kapasitas pelaku ekonomi kreatif melalui pelatihan, bimbingan teknis, dan pendampingan ekonomi kreatif; dukungan fasilitasi menghadapi perkembangan teknologi di dunia Usaha; Standarisasi Usaha dan Sertifikasi Profesi di Bidang Ekonomi Kreatif. Program ini ditujukan untuk mencapai target indikator persentase SDM Pariwisata dan ekonomi kreatif yang bersertifikat.

3. Pertanian

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian

Program ini diarahkan pada pengawasan penggunaan sarana pertanian melalui pengawasan penggunaan sarana pendukung pertanian sesuai dengan komoditas, teknologi dan spesifik lokasi; pendampingan penggunaan sarana pendukung pertanian, dan pengelolaan sumber daya genetik (SDG) hewan, tumbuhan dan mikroorganisme kewenangan Kabupaten/Kota melalui peningkatan kualitas SDG hewan / tanaman. Program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian ditujukan untuk mencapai target indikator produktivitas pertanian pangan per hektar per tahun.

b. Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian

Program ini diarahkan pada pengembangan prasarana pertanian melalui koordinasi dan sinkronisasi prasarana pendukung pertanian lainnya dan pembangunan prasarana pertanian melalui pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan jaringan irigasi usaha tani; pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan dam parit; pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan jalan usaha tani; pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan balai penyuluh di kecamatan serta sarana pendukungnya; dan pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana pertanian lainnya. Program ini ditujukan untuk mencapai target indikator persentase pelaksanaan kegiatan pembangunan prasarana pertanian.

c. Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner

Program ini ditujukan untuk mencapai target indikator capaian jumlah hewan yang terobati.

d. Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian

Program ini diarahkan pada pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian melalui pengendalian organisme pengganggu tumbuhan (OPT) tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan. program pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian ditujukan untuk mencapai target indikator persentase pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian.

e. Program Perizinan Usaha Pertanian

Program ini ditujukan untuk mencapai target indikator jumlah asuransi usaha ternak sapi/kerbau dan calon/penerima (orang/perusahaan) pendampingan perizinan usaha peternakan

f. Program Penyuluhan Pertanian

Program ini diarahkan pada pelaksanaan penyuluhan pertanian melalui peningkatan kapasitas kelembagaan penyuluh pertanian di kecamatan dan desa; pengembangan kapasitas kelembagaan petani di kecamatan dan desa; dan pembentukan badan usaha milik petani. Program ini ditujukan untuk mencapai target indikator Persentase kenaikan kualitas dan kapasitas SDM Penyuluh, pelaku utama dan pelaku usaha Bidang Pertanian, Persentase validitas data Pertanian, dan Persentase kenaikan pelaksanaan Penyelenggaraan Penyuluhan

4. Perdagangan

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan

Program ini diarahkan pada penerbitan izin pengelolaan pasar rakyat, pusat perbelanjaan, dan izin usaha toko swalayan; penerbitan tanda daftar gudang; penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk penerima waralaba dari waralaba dalam negeri; penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk penerima waralaba lanjutan dari waralaba luar negeri; dan pengendalian fasilitas penyimpanan bahan berbahaya dan pengawasan distribusi, pengemasan dan pelabelan bahan berbahaya di tingkat daerah Kabupaten/ Kota. Program ini ditujukan untuk mencapai indikator jumlah verifikasi teknis.

b. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan

Program ini diarahkan pada Pembangunan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan melalui penyediaan sarana distribusi perdagangan dan fasilitasi pengelolaan sarana distribusi perdagangan serta pembinaan terhadap pengelola sarana distribusi perdagangan masyarakat di wilayah kerjanya melalui pembinaan dan pengendalian pengelola sarana distribusi perdagangan dan pemberdayaan pengelola sarana distribusi perdagangan. Program ini ditujukan untuk mencapai target indikator persentase pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan.

c. Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting

Program ini diarahkan untuk menjamin ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat daerah Kabupaten/ Kota melalui koordinasi dan sinkronisasi ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat agen dan pasar rakyat; Koordinasi dan sinkronisasi peningkatan aksesibilitas barang kebutuhan pokok dan

barang penting di tingkat agen dan pasar rakyat; Pengendalian ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat agen dan pasar rakyat. Pengendalian harga, dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat pasar Kabupaten/Kota melalui pemantauan harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting pada pelaku usaha distribusi barang dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota; Pemantauan harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting pada pasar rakyat yang terintegrasi dalam sistem informasi perdagangan; dan pelaksanaan operasi pasar reguler dan pasar khusus yang berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota. Pengawasan pupuk dan pestisida bersubsidi di tingkat daerah Kabupaten/Kota melalui pemeriksaan kelengkapan legalitas dokumen perizinan; Pengawasan pengadaan pupuk dan pestisida bersubsidi; dan pengawasan penyaluran dan penggunaan pupuk dan pestisida bersubsidi. Program ini ditujukan untuk mencapai target indikator persentase barang kebutuhan pokok yang stabilitas harganya terjaga.

d. Program Pengembangan Ekspor

Program ini diarahkan pada penyelenggaraan promosi dagang melalui pameran dagang dan misi dagang bagi produk ekspor unggulan yang terdapat pada 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota melalui pembinaan dan pengembangan usaha produk ekspor unggulan Kabupaten/Kota; Pameran dagang nasional; Pameran dagang lokal; Misi dagang bagi produk ekspor unggulan; Peningkatan citra produk ekspor; dan pembinaan pelaku usaha ekspor. Program ini ditujukan untuk mencapai target indikator nilai ekspor perdagangan.

e. Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen

Program ini ditujukan untuk mencapai target indikator persentase alat-alat ukur, timbang, takar dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku.

f. Program Penggunaan dan Pemasaran Produk dalam negeri

Program ini diarahkan pada pelaksanaan promosi penggunaan produk dalam negeri di tingkat Kabupaten/Kota melalui pelaksanaan metrologi legal, berupa tera, tera ulang; Pengawasan/penyuluhan metrologi legal. Program ini ditujukan untuk mencapai target indikator Persentase pelaksanaan pameran dagang dalam negeri di Kabupaten Batang.

5. Perindustrian

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri

Program ini diarahkan pada penyusunan dan evaluasi rencana pembangunan industri Kabupaten/Kota melalui penyusunan rencana pembangunan industri Kabupaten/Kota; koordinasi, sinkronisasi, dan pelaksanaan kebijakan percepatan pengembangan, penyebaran dan perwilayahan industri; koordinasi, sinkronisasi, dan pelaksanaan pembangunan sumber daya industri; koordinasi, sinkronisasi, dan pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana industri; koordinasi, sinkronisasi, dan pelaksanaan pemberdayaan industri dan peran serta masyarakat; evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan industri. Program ini ditujukan untuk mencapai target indikator persentase peningkatan jumlah pelaku IKM.

b. Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota

Program ini diarahkan pada penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) kewenangan Kabupaten/Kota melalui fasilitasi pemenuhan komitmen perolehan IUI, IPUI, IUKI dan IPKI kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik; dan koordinasi dan sinkronisasi pengawasan perizinan di bidang industri dalam lingkup IUI, IPUI, IUKI dan IPKI kewenangan Kabupaten/ Kota. Program ini ditujukan untuk mencapai target indikator persentase peningkatan jumlah perizinan berusaha sektor industri.

c. Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional

Program ini diarahkan pada penyediaan informasi industri untuk informasi industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI kewenangan Kabupaten/Kota melalui fasilitasi pengumpulan, pengolahan dan analisis data industri, data kawasan industri serta data lain lingkup Kabupaten/Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas); diseminasi, publikasi data informasi dan analisa industri Kabupaten/Kota melalui SIINas; dan pemantauan dan evaluasi kepatuhan perusahaan industri dan perusahaan kawasan industri lingkup Kabupaten/Kota dalam penyampaian data ke SIINas. Program ini ditujukan untuk mencapai target indikator persentase jumlah industri dalam SIINas.

6. Transmigrasi

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah Program Pembangunan Kawasan transmigrasi. Program ini diarahkan pada kegiatan penataan persebaran penduduk yang

berasal dari 1 (satu) daerah Kabupaten/ Kota melalui pelaksanaan penataan penduduk setempat sekitar lokasi kawasan transmigrasi. Program ini ditujukan untuk mencapai target indikator persentase transmigran yang berhasil ditempatkan.

D. Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan

1. Sekretariat Daerah

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat

Program ini diarahkan pada kegiatan administrasi tata pemerintahan melalui penataan administrasi pemerintahan, pengelolaan administrasi kewilayahan serta fasilitasi pelaksanaan otonomi daerah, kegiatan pelaksanaan kebijakan kesejahteraan rakyat melalui fasilitasi pengelolaan bina mental spiritual pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan capaian kinerja terkait kesejahteraan sosial dan masyarakat, kegiatan fasilitasi dan koordinasi hukum melalui fasilitasi penyusunan produk hukum, bantuan hukum, dan pendokumentasian produk hukum dan pengelolaan informasi hukum, serta kegiatan fasilitasi kerjasama daerah melalui fasilitasi kerja sama dalam negeri. Program ini dilaksanakan guna mendukung pencapaian indikator Persentase perangkat daerah yang menyusun LPPD tepat waktu, Persentase Penyelenggaraan Administrasi Tata Pemerintahan yang difasilitasi, Presentase kegiatan keagamaan dan kemasyarakatan yang difasilitasi, dan

Persentase Penyusunan Produk Hukum Daerah yang berhasil difasilitasi

b. Program Perekonomian Dan Pembangunan

Program ini diarahkan pada kegiatan pelaksanaan kebijakan perekonomian yang didukung pengendalian dan distribusi perekonomian, perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil, dan Koordinasi, sinkronisasi, monitoring dan evaluasi kebijakan pengelolaan BUMD dan BLUD; kegiatan Pelaksanaan Administrasi Pembangunan yang didukung melalui Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan, Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan, dan Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan; kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa yang didukung melalui Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa, Pengelolaan layanan Pengadaan Secara Elektronik, dan Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa; serta kegiatan Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam yang didukung Koordinasi, sinkronisasi dan evaluasi kebijakan pertanian, kehutanan, kelautan dan perikanan dan Koordinasi, sinkronisasi dan evaluasi kebijakan Energi dan Air. Program ini dilaksanakan guna pencapaian indikator Persentase Bagi Hasil BUMD terhadap APBD (Penyertaan Modal), Persentase kebijakan perekonomian dan SDA yang ditindaklanjuti, Persentase Pelaksanaan APBD pada SKPD yang sesuai target, dan Persentase lelang melalui e-procurement.

c. Program Administrasi Umum

Beberapa kegiatan dalam Urusan Sekretariat Daerah ada yang masuk ke dalam program penunjang. Kegiatan ini diarahkan dalam Penataan Organisasi, Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala

Daerah, Fasilitas Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah, dan Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan. Program ini dilaksanakan guna pencapaian indikator Persentase Perangkat Daerah yang menerapkan Standar Operasional Prosedur (SOP), Tingkat Kematangan OPD, Persentase Kegiatan Keprotokolan, Komunikasi Pimpinan dan Dokumentasi Kepala Daerah, Persentase layanan kebutuhan kantor yang terpenuhi, Persentase layanan kepegawaian yang terpenuhi, Persentase kebutuhan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang terpenuhi.

2. Sekretariat DPRD

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD yang diarahkan pada pembentukan peraturan daerah dan peraturan DPRD, melalui penyusunan dan pembahasan program pembentukan peraturan daerah, pembahasan rancangan Perda, penyelenggaraan kajian perundang-undangan, dan fasilitasi penyusunan penjelasan/keterangan naskah akademik. Kemudian, program juga diarahkan pada Pembahasan Kebijakan Anggaran, melalui pembahasan KUA dan PPAS. pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS, pembahasan APBD, pembahasan APBD Perubahan, pembahasan Laporan Semester, dan pembahasan Pertanggungjawaban APBD. kemudian juga diarahkan pada pengawasan penyelenggaraan pemerintahan, melalui pengawasan urusan pemerintahan bidang pemerintahan dan hukum, pengawasan urusan pemerintahan bidang infrastruktur, pengawasan urusan pemerintahan bidang kesejahteraan rakyat, pengawasan urusan pemerintahan bidang perekonomian, pengawasan tindak lanjut hasil pemeriksaan laporan keuangan oleh badan pemeriksa keuangan, pengawasan penggunaan anggaran, dan pembahasan laporan keterangan

pertanggungjawaban kepala daerah. Setelah itu program juga diarahkan pada peningkatan kapasitas dprd melalui pendalaman tugas DPRD, publikasi dan dokumentasi dewan, penyediaan tenaga ahli fraksi, penyelenggaraan hubungan masyarakat, dan penyusunan program kerja DPRD. Arah lain dari program ini adalah pada penyerapan dan penghimpunan aspirasi masyarakat, melalui kunjungan kerja dalam daerah, penyusunan pokok-pokok pikiran DPRD, dan pelaksanaan reses. Arah lain yaitu pada pelaksanaan dan pengawasan kode etik DPRD, melalui pengawasan kode etik DPRD. yang terakhir program ini diarahkan pada fasilitasi tugas DPRD melalui koordinasi dan konsultasi pelaksanaan tugas DPRD, fasilitasi pelaksanaan tugas badan musyawarah, dan fasilitasi tugas pimpinan DPRD. Program ini ditujukan untuk mencapai target indikator persentase peraturan daerah non APBD yang ditetapkan, persentase perda APBD yang ditetapkan, serta persentase pengawasan penyelenggaraan pemerintahan yang terlaksana.

E. Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan

1. Perencanaan

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah

Program ini diarahkan pada kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan, melalui Analisis Kondisi Daerah, permasalahan, dan isu strategis Pembangunan Daerah, Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya, Pelaksanaan Konsultasi Publik, Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD, Pelaksanaan Musrenbang

Kabupaten/Kota, Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan, dan Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota. Kegiatan ini dilakukan untuk mencapai Jumlah dokumen perencanaan dan pendanaan yang disusun.

Kemudian program ini juga diarahkan pada kegiatan Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah, melalui: Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah, dan Penyusunan Profil pembangunan Daerah Kabupaten/Kota. kegiatan ini dilakukan untuk mencapai target Jumlah data dan informasi yang tersedia.

Selain itu, program ini juga diarahkan pada Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah, melalui Monitoring, evaluasi, dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah. kegiatan ini dilakukan untuk memenuhi target Jumlah Perangkat Daerah yang sudah melaporkan evaluasi tepat waktu

Program ini dilakukan untuk mencapai target Persentase ketersediaan dokumen perencanaan tepat waktu, persentase ketersediaan data dan informasi sebagai bahan analisis perencanaan pembangunan daerah, serta Persentase ketersediaan dokumen evaluasi dan pelaporan.

b. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah

Program ini diarahkan pada kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang pemerintahan dan Pembangunan Manusia, melalui: Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD), Pelaksanaan Monitoring dan

Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan, Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan, Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD), Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia, Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia, dan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia. Kegiatan ini untuk memenuhi Jumlah laporan hasil perencanaan bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia.

kemudian terdapat kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam), melalui: Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD), Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian, Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian, Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD), Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA, serta Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA. Kegiatan ini dilakukan untuk mencapai target Jumlah laporan hasil koordinasi bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam.

Selain itu, terdapat kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan, melalui: Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD), Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur, Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur, Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur, Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD), Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan, Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan, dan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan. Kegiatan ini dilakukan untuk mencapai target Jumlah laporan hasil perencanaan bidang IPW.

Program ini dilakukan untuk mencapai target persentase indikator program prioritas pembangunan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia yang mencapai target, persentase indikator program pembangunan bidang PSDA yang mencapai target, dan persentase indikator program pembangunan bidang IPW yang mencapai target.

2. Keuangan

a. Program Pengelolaan Keuangan Daerah

Program ini diarahkan pada kegiatan koordinasi dan penyusunan rencana anggaran daerah, koordinasi dan pengelolaan perbendaharaan daerah, serta koordinasi dan

pelaksanaan akuntansi dan pelaporan keuangan daerah. Program ini memiliki indikator yang harus dipenuhi yaitu penyampaian Raperda APBD tepat waktu.

b. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah

Program ini dilaksanakan melalui penyusunan standar harga penatausahaan barang milik daerah; pengamanan barang milik daerah; optimalisasi penggunaan, pemanfaatan, pemindahtanganan, pemusnahan, dan penghapusan barang milik daerah; serta pembinaan pengelolaan barang milik daerah pemerintah kabupaten/kota. Program ini dilakukan untuk mencapai indikator tersusunnya data aset Pemerintah Daerah menurut lokasi, legalitas kepemilikan, pemanfaatan, dan kondisinya.

c. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah

Program ini dilaksanakan melalui perencanaan pengelolaan pajak daerah penyuluhan dan penyebarluasan kebijakan pajak daerah; pendataan dan pendaftaran objek pajak daerah; pengolahan, pemeliharaan dan pelaporan basis data pajak daerah; penetapan wajib pajak daerah; pelayanan dan konsultasi pajak daerah; penagihan pajak daerah; serta pengendalian, pemeriksaan dan pengawasan pajak daerah. Program ini memiliki indikator yang harus dicapai yaitu persentase peningkatan penerimaan PAD, penyampaian raperda pertanggungjawaban tepat waktu, dan persentase realisasi serapan belanja terhadap anggaran belanja.

3. Kepegawaian

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah program kepegawaian daerah. Program ini diarahkan pada kegiatan pengadaan, pemberhentian dan informasi kepegawaian ASN, kegiatan mutasi dan promosi ASN, kegiatan pengembangan kompetensi ASN, dan kegiatan penilaian dan

evaluasi kinerja aparatur. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator persentase pelayanan administrasi kepegawaian yang selesai tepat waktu.

4. Pendidikan dan Pelatihan

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah program pengembangan sumber daya manusia. Program ini diarahkan pada kegiatan pengembangan kompetensi teknis serta kegiatan sertifikasi, kelembagaan, pengembangan kompetensi manajerial dan fungsional. Program ini dilaksanakan untuk memenuhi indikator persentase indikator program prioritas sub koordinator diklat yang mencapai target.

5. Penelitian dan Pengembangan

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah Program Penelitian dan Pengembangan Daerah, Program ini diarahkan pada kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan, melalui Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah, Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan, dan Perumusan Rekomendasi Atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan. kegiatan ini dilaksanakan untuk memenuhi target Jumlah hasil kajian bidang pemerintahan yang mendukung perencanaan pembangunan.

Kemudian Program ini juga diarahkan pada kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan, melalui Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek Aspek Sosial dan Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat. Kegiatan ini dilakukan untuk memenuhi target Jumlah rekomendasi kajian bidang sosial dan kependudukan yang mendukung perencanaan pembangunan.

Selain itu, program ini juga diarahkan pada kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi Dan Pembangunan, melalui Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan dan Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum. Kegiatan ini dilakukan untuk memenuhi target Jumlah rekomendasi kegiatan kelitbangan bidang ekonomi dan pembangunan yang mendukung perencanaan pembangunan.

Serta program ini juga diarahkan pada kegiatan Pengembangan Inovasi dan Teknologi, melalui Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi, Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi, Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Bersifat Inovatif, Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan, dan Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual. Kegiatan ini dilakukan untuk memenuhi target Jumlah perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah.

Program ini ini dilakukan untuk memenuhi target Persentase rekomendasi hasil kegiatan penelitian dan pengembangan yang ditindaklanjuti.

F. Urusan Pengawasan Urusan Pemerintahan

1. Pengawasan

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Penyelenggaraan Pengawasan

Program ini diarahkan pada penyelenggaraan pengawasan internal melalui penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor dan penyelenggaraan pengawasan

dengan tujuan tertentu melalui penyediaan bahan logistik kantor. Program ini ditujukan untuk mencapai target indikator persentase jumlah pemeriksaan yang dilakukan.

b. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi

Program ini diarahkan pada pendampingan dan asistensi melalui penyediaan barang cetakan dan penggandaan, dan perumusan kebijakan teknis di bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan melalui penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD; Pengawasan kinerja pemerintah daerah; Reviu laporan kinerja; Reviu laporan keuangan; Pengawasan desa; Monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI dan tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP; Kerjasama pengawasan internal; Monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI dan tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP; Penanganan penyelesaian kerugian negara/daerah; Pengawasan dengan tujuan tertentu; Pendampingan dan asistensi urusan pemerintahan daerah; Pendampingan, asistensi, verifikasi, dan penilaian reformasi birokrasi; Koordinasi, monitoring dan evaluasi serta verifikasi pencegahan dan pemberantasan korupsi; Perumusan kebijakan teknis di bidang pengawasan; dan Perumusan kebijakan teknis di bidang fasilitasi pengawasan. program ini ditujukan untuk mencapai indikator Level SPIP.

G. Unsur Kewilayahan

1. Kecamatan Batang

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

Program ini diarahkan dalam kegiatan koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan yang didukung dengan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan. Program ini diarahkan

untuk mencapai indikator Persentase pelayanan PATEN yang sesuai SOP.

b. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

Program ini diarahkan dalam kegiatan koordinasi pemberdayaan desa yang didukung Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan serta pemberdayaan lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan yang didukung melalui Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan. Program ini dilaksanakan guna mencapai indikator Persentase Lembaga Kemasyarakatan di Desa yang Aktif.

c. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Program ini diarahkan dalam kegiatan koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum yang didukung dengan mensinergikan dengan Kepolisian, Tentara dan instansi vertikal di wilayah kecamatan. Program ini dilaksanakan guna mencapai indikator Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan.

d. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

Program ini diarahkan pada fasilitasi, koordinasi, dan pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan kebangsaan dan Ketahanan Nasional serta pelaksanaan tugas forum koordinasi pimpinan di kecamatan melalui kegiatan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah. Program ini dilaksanakan untuk mencapai target dari indikator Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan dengan baik.

e. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Program ini diarahkan dalam kegiatan Fasilitasi rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan

pemerintahan desa yang didukung dengan fasilitasi penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa, fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa serta fasilitasi pengelolaan keuangan dan pendayagunaan aset desa. program ini dilaksanakan guna mencapai indikator Persentase desa yang melaksanakan administrasi serta pengelolaan keuangan desa yang tertib dan baik.

2. Kecamatan Wonotunggal

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

Program ini diarahkan dalam kegiatan koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan yang didukung dengan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan. Program ini diarahkan untuk mencapai indikator Persentase pelayanan PATEN yang sesuai SOP.

b. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

Program ini diarahkan dalam kegiatan koordinasi pemberdayaan desa yang didukung Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan serta pemberdayaan lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan yang didukung melalui Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan. Program ini dilaksanakan guna mencapai indikator Persentase Lembaga Kemasyarakatan di Desa yang Aktif.

c. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Program ini diarahkan dalam kegiatan koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum yang

didukung dengan mensinergikan dengan Kepolisian, Tentara dan instansi vertikal di wilayah kecamatan. Program ini dilaksanakan guna mencapai indikator Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan.

d. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

Program ini diarahkan pada fasilitasi, koordinasi, dan pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan kebangsaan dan Ketahanan Nasional serta pelaksanaan tugas forum koordinasi pimpinan di kecamatan melalui kegiatan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah. Program ini dilaksanakan untuk mencapai target dari indikator Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan dengan baik.

e. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Program ini diarahkan dalam kegiatan Fasilitasi rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa yang didukung dengan fasilitasi penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa, fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa serta fasilitasi pengelolaan keuangan dan pendayagunaan aset desa. program ini dilaksanakan guna mencapai indikator Persentase desa yang melaksanakan administrasi serta pengelolaan keuangan desa yang tertib dan baik.

3. Kecamatan Bandar

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

Program ini diarahkan dalam kegiatan koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan

yang didukung dengan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan. Program ini diarahkan untuk mencapai indikator Persentase pelayanan PATEN yang sesuai SOP.

b. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

Program ini diarahkan dalam kegiatan koordinasi pemberdayaan desa yang didukung Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan serta pemberdayaan lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan yang didukung melalui Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan. Program ini dilaksanakan guna mencapai indikator Persentase Lembaga Kemasyarakatan di Desa yang Aktif.

c. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Program ini diarahkan dalam kegiatan koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum yang didukung dengan mensinergikan dengan Kepolisian, Tentara dan instansi vertikal di wilayah kecamatan. Program ini dilaksanakan guna mencapai indikator Presentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan.

d. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

Program ini diarahkan pada fasilitasi, koordinasi, dan pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan kebangsaan dan Ketahanan Nasional serta pelaksanaan tugas forum koordinasi pimpinan di kecamatan melalui kegiatan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah. Program ini dilaksanakan untuk mencapai target dari indikator Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan dengan baik.

e. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Program ini diarahkan dalam kegiatan Fasilitasi rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa yang didukung dengan fasilitasi penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa, fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa serta fasilitasi pengelolaan keuangan dan pendayagunaan aset desa. program ini dilaksanakan guna mencapai indikator Persentase desa yang melaksanakan administrasi serta pengelolaan keuangan desa yang tertib dan baik.

4. Kecamatan Blado

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

Program ini diarahkan dalam kegiatan koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan yang didukung dengan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan. Program ini diarahkan untuk mencapai indikator Persentase pelayanan PATEN yang sesuai SOP.

b. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

Program ini diarahkan dalam kegiatan koordinasi pemberdayaan desa yang didukung Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan serta pemberdayaan lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan yang didukung melalui Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan. Program ini dilaksanakan guna mencapai indikator Persentase Lembaga Kemasyarakatan di Desa yang Aktif.

c. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Program ini diarahkan dalam kegiatan koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum yang didukung dengan mensinergikan dengan Kepolisian, Tentara dan instansi vertikal di wilayah kecamatan. Program ini dilaksanakan guna mencapai indikator Presentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan.

d. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

Program ini diarahkan pada fasilitasi, koordinasi, dan pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan kebangsaan dan Ketahanan Nasional serta pelaksanaan tugas forum koordinasi pimpinan di kecamatan melalui kegiatan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah. Program ini dilaksanakan untuk mencapai target dari indikator Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan dengan baik.

e. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Program ini diarahkan dalam kegiatan Fasilitasi rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa yang didukung dengan fasilitasi penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa, fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa serta fasilitasi pengelolaan keuangan dan pendayagunaan aset desa. program ini dilaksanakan guna mencapai indikator Persentase desa yang melaksanakan administrasi serta pengelolaan keuangan desa yang tertib dan baik.

5. Kecamatan Bawang

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

Program ini diarahkan dalam kegiatan koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan yang didukung dengan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan. Program ini diarahkan untuk mencapai indikator Persentase pelayanan PATEN yang sesuai SOP.

b. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

Program ini diarahkan dalam kegiatan koordinasi pemberdayaan desa yang didukung Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan serta pemberdayaan lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan yang didukung melalui Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan. Program ini dilaksanakan guna mencapai indikator Persentase Lembaga Kemasyarakatan di Desa yang Aktif.

c. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Program ini diarahkan dalam kegiatan koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum yang didukung dengan mensinergikan dengan Kepolisian, Tentara dan instansi vertikal di wilayah kecamatan. Program ini dilaksanakan guna mencapai indikator Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan.

d. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

Program ini diarahkan pada fasilitasi, koordinasi, dan pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan kebangsaan dan Ketahanan Nasional serta pelaksanaan tugas forum koordinasi pimpinan di kecamatan melalui kegiatan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah. Program ini dilaksanakan untuk mencapai target dari indikator Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan dengan baik.

e. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Program ini diarahkan dalam kegiatan Fasilitasi rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa yang didukung dengan fasilitasi penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa, fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa serta fasilitasi pengelolaan keuangan dan pendayagunaan aset desa. program ini dilaksanakan guna mencapai indikator Persentase desa yang melaksanakan administrasi serta pengelolaan keuangan desa yang tertib dan baik.

6. Kecamatan Kandeman

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

Program ini diarahkan dalam kegiatan koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan yang didukung dengan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan. Program ini diarahkan untuk mencapai indikator Persentase pelayanan PATEN yang sesuai SOP.

b. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

Program ini diarahkan dalam kegiatan koordinasi pemberdayaan desa yang didukung Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan serta pemberdayaan lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan yang didukung melalui Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan. Program ini dilaksanakan guna mencapai indikator Persentase Lembaga Kemasyarakatan di Desa yang Aktif.

c. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Program ini diarahkan dalam kegiatan koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum yang didukung dengan mensinergikan dengan Kepolisian, Tentara dan instansi vertikal di wilayah kecamatan. Program ini dilaksanakan guna mencapai indikator Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan.

d. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

Program ini diarahkan pada fasilitasi, koordinasi, dan pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan kebangsaan dan Ketahanan Nasional serta pelaksanaan tugas forum koordinasi pimpinan di kecamatan melalui kegiatan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah. Program ini dilaksanakan untuk mencapai target dari indikator Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan dengan baik.

e. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Program ini diarahkan dalam kegiatan Fasilitasi rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa yang didukung dengan fasilitasi penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa, fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa serta fasilitasi pengelolaan keuangan dan pendayagunaan aset desa. program ini dilaksanakan guna mencapai indikator Persentase desa yang melaksanakan administrasi serta pengelolaan keuangan desa yang tertib dan baik.

7. Kecamatan Tulis

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

Program ini diarahkan dalam kegiatan koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan yang didukung dengan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan. Program ini diarahkan untuk mencapai indikator Persentase pelayanan PATEN yang sesuai SOP.

b. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

Program ini diarahkan dalam kegiatan koordinasi pemberdayaan desa yang didukung Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan serta pemberdayaan lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan yang didukung melalui Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan. Program ini dilaksanakan guna mencapai indikator Persentase Lembaga Kemasyarakatan di Desa yang Aktif.

c. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Program ini diarahkan dalam kegiatan koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum yang didukung dengan mensinergikan dengan Kepolisian, Tentara dan instansi vertikal di wilayah kecamatan. Program ini dilaksanakan guna mencapai indikator Presentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan.

d. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

Program ini diarahkan pada fasilitasi, koordinasi, dan pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan kebangsaan dan Ketahanan Nasional serta pelaksanaan tugas forum koordinasi pimpinan di kecamatan melalui kegiatan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai

penugasan kepala daerah. Program ini dilaksanakan untuk mencapai target dari indikator Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan dengan baik.

e. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Program ini diarahkan dalam kegiatan Fasilitasi rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa yang didukung dengan fasilitasi penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa, fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa serta fasilitasi pengelolaan keuangan dan pendayagunaan aset desa. program ini dilaksanakan guna mencapai indikator Persentase desa yang melaksanakan administrasi serta pengelolaan keuangan desa yang tertib dan baik.

8. Kecamatan Subah

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

Program ini diarahkan dalam kegiatan koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan yang didukung dengan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan. Program ini diarahkan untuk mencapai indikator Persentase pelayanan PATEN yang sesuai SOP.

b. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

Program ini diarahkan dalam kegiatan koordinasi pemberdayaan desa yang didukung Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan serta pemberdayaan lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan yang didukung melalui Peningkatan Kapasitas

Lembaga Kemasyarakatan. Program ini dilaksanakan guna mencapai indikator Persentase Lembaga Kemasyarakatan di Desa yang Aktif.

c. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Program ini diarahkan dalam kegiatan koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum yang didukung dengan mensinergikan dengan Kepolisian, Tentara dan instansi vertikal di wilayah kecamatan. Program ini dilaksanakan guna mencapai indikator Presentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan.

d. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

Program ini diarahkan pada fasilitasi, koordinasi, dan pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan kebangsaan dan Ketahanan Nasional serta pelaksanaan tugas forum koordinasi pimpinan di kecamatan melalui kegiatan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah. Program ini dilaksanakan untuk mencapai target dari indikator Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan dengan baik.

e. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Program ini diarahkan dalam kegiatan Fasilitasi rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa yang didukung dengan fasilitasi penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa, fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa serta fasilitasi pengelolaan keuangan dan pendayagunaan aset desa. program ini dilaksanakan guna mencapai indikator Persentase desa yang melaksanakan administrasi serta pengelolaan keuangan desa yang tertib dan baik.

9. Kecamatan Pecalungan

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

Program ini diarahkan dalam kegiatan koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan yang didukung dengan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan. Program ini diarahkan untuk mencapai indikator Persentase pelayanan PATEN yang sesuai SOP.

b. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

Program ini diarahkan dalam kegiatan koordinasi pemberdayaan desa yang didukung Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan serta pemberdayaan lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan yang didukung melalui Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan. Program ini dilaksanakan guna mencapai indikator Persentase Lembaga Kemasyarakatan di Desa yang Aktif.

c. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Program ini diarahkan dalam kegiatan koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum yang didukung dengan mensinergikan dengan Kepolisian, Tentara dan instansi vertikal di wilayah kecamatan. Program ini dilaksanakan guna mencapai indikator Presentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan.

d. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

Program ini diarahkan pada fasilitasi, koordinasi, dan pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan kebangsaan dan Ketahanan Nasional serta pelaksanaan tugas

forum koordinasi pimpinan di kecamatan melalui kegiatan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah. Program ini dilaksanakan untuk mencapai target dari indikator Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan dengan baik.

e. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Program ini diarahkan dalam kegiatan Fasilitasi rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa yang didukung dengan fasilitasi penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa, fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa serta fasilitasi pengelolaan keuangan dan pendayagunaan aset desa. program ini dilaksanakan guna mencapai indikator Persentase desa yang melaksanakan administrasi serta pengelolaan keuangan desa yang tertib dan baik.

10. Kecamatan Tersono

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

Program ini diarahkan dalam kegiatan koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan yang didukung dengan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan. Program ini diarahkan untuk mencapai indikator Persentase pelayanan PATEN yang sesuai SOP.

b. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

Program ini diarahkan dalam kegiatan koordinasi pemberdayaan desa yang didukung Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan

serta pemberdayaan lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan yang didukung melalui Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan. Program ini dilaksanakan guna mencapai indikator Persentase Lembaga Kemasyarakatan di Desa yang Aktif.

c. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Program ini diarahkan dalam kegiatan koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum yang didukung dengan mensinergikan dengan Kepolisian, Tentara dan instansi vertikal di wilayah kecamatan. Program ini dilaksanakan guna mencapai indikator Presentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan.

d. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

Program ini diarahkan pada fasilitasi, koordinasi, dan pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan kebangsaan dan Ketahanan Nasional serta pelaksanaan tugas forum koordinasi pimpinan di kecamatan melalui kegiatan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah. Program ini dilaksanakan untuk mencapai target dari indikator Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan dengan baik.

e. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Program ini diarahkan dalam kegiatan Fasilitasi rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa yang didukung dengan fasilitasi penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa, fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa serta fasilitasi pengelolaan keuangan dan pendayagunaan aset desa. program ini dilaksanakan guna mencapai indikator Persentase desa yang melaksanakan administrasi serta pengelolaan keuangan desa yang tertib dan baik.

11. Kecamatan Limpung

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

Program ini diarahkan dalam kegiatan koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan yang didukung dengan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan. Program ini diarahkan untuk mencapai indikator Persentase pelayanan PATEN yang sesuai SOP.

b. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

Program ini diarahkan dalam kegiatan koordinasi pemberdayaan desa yang didukung Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan serta pemberdayaan lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan yang didukung melalui Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan. Program ini dilaksanakan guna mencapai indikator Persentase Lembaga Kemasyarakatan di Desa yang Aktif.

c. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Program ini diarahkan dalam kegiatan koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum yang didukung dengan mensinergikan dengan Kepolisian, Tentara dan instansi vertikal di wilayah kecamatan. Program ini dilaksanakan guna mencapai indikator Presentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan.

d. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

Program ini diarahkan pada fasilitasi, koordinasi, dan pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan

kebangsaan dan Ketahanan Nasional serta pelaksanaan tugas forum koordinasi pimpinan di kecamatan melalui kegiatan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah. Program ini dilaksanakan untuk mencapai target dari indikator Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan dengan baik.

e. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Program ini diarahkan dalam kegiatan Fasilitasi rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa yang didukung dengan fasilitasi penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa, fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa serta fasilitasi pengelolaan keuangan dan pendayagunaan aset desa. program ini dilaksanakan guna mencapai indikator Persentase desa yang melaksanakan administrasi serta pengelolaan keuangan desa yang tertib dan baik.

12. Kecamatan Banyuputih

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

Program ini diarahkan dalam kegiatan koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan yang didukung dengan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan. Program ini diarahkan untuk mencapai indikator Persentase pelayanan PATEN yang sesuai SOP.

b. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

Program ini diarahkan dalam kegiatan koordinasi pemberdayaan desa yang didukung Peningkatan Efektifitas

Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan serta pemberdayaan lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan yang didukung melalui Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan. Program ini dilaksanakan guna mencapai indikator Persentase Lembaga Kemasyarakatan di Desa yang Aktif.

c. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Program ini diarahkan dalam kegiatan koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum yang didukung dengan mensinergikan dengan Kepolisian, Tentara dan instansi vertikal di wilayah kecamatan. Program ini dilaksanakan guna mencapai indikator Presentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan.

d. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

Program ini diarahkan pada fasilitasi, koordinasi, dan pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan kebangsaan dan Ketahanan Nasional serta pelaksanaan tugas forum koordinasi pimpinan di kecamatan melalui kegiatan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah. Program ini dilaksanakan untuk mencapai target dari indikator Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan dengan baik.

e. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Program ini diarahkan dalam kegiatan Fasilitasi rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa yang didukung dengan fasilitasi penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa, fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa serta fasilitasi pengelolaan keuangan dan pendayagunaan aset desa. program ini dilaksanakan guna mencapai indikator

Persentase desa yang melaksanakan administrasi serta pengelolaan keuangan desa yang tertib dan baik.

13. Kecamatan Gringsing

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

Program ini diarahkan dalam kegiatan koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan yang didukung dengan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan. Program ini diarahkan untuk mencapai indikator Persentase pelayanan PATEN yang sesuai SOP.

b. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

Program ini diarahkan dalam kegiatan koordinasi pemberdayaan desa yang didukung Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan serta pemberdayaan lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan yang didukung melalui Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan. Program ini dilaksanakan guna mencapai indikator Persentase Lembaga Kemasyarakatan di Desa yang Aktif.

c. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Program ini diarahkan dalam kegiatan koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum yang didukung dengan mensinergikan dengan Kepolisian, Tentara dan instansi vertikal di wilayah kecamatan. Program ini dilaksanakan guna mencapai indikator Presentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan.

d. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

Program ini diarahkan pada fasilitasi, koordinasi, dan pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan kebangsaan dan Ketahanan Nasional serta pelaksanaan tugas forum koordinasi pimpinan di kecamatan melalui kegiatan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah. Program ini dilaksanakan untuk mencapai target dari indikator Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan dengan baik.

e. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Program ini diarahkan dalam kegiatan Fasilitasi rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa yang didukung dengan fasilitasi penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa, fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa serta fasilitasi pengelolaan keuangan dan pendayagunaan aset desa. program ini dilaksanakan guna mencapai indikator Persentase desa yang melaksanakan administrasi serta pengelolaan keuangan desa yang tertib dan baik.

14. Kecamatan Warungasem

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

Program ini diarahkan dalam kegiatan koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan yang didukung dengan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan. Program ini diarahkan untuk mencapai indikator Persentase pelayanan PATEN yang sesuai SOP.

b. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

Program ini diarahkan dalam kegiatan koordinasi pemberdayaan desa yang didukung Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan serta pemberdayaan lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan yang didukung melalui Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan. Program ini dilaksanakan guna mencapai indikator Persentase Lembaga Kemasyarakatan di Desa yang Aktif.

c. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Program ini diarahkan dalam kegiatan koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum yang didukung dengan mensinergikan dengan Kepolisian, Tentara dan instansi vertikal di wilayah kecamatan. Program ini dilaksanakan guna mencapai indikator Presentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan.

d. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

Program ini diarahkan pada fasilitasi, koordinasi, dan pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan kebangsaan dan Ketahanan Nasional serta pelaksanaan tugas forum koordinasi pimpinan di kecamatan melalui kegiatan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah. Program ini dilaksanakan untuk mencapai target dari indikator Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan dengan baik.

e. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Program ini diarahkan dalam kegiatan Fasilitasi rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa yang didukung dengan fasilitasi penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa, fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa serta fasilitasi pengelolaan keuangan dan pendayagunaan aset desa.

program ini dilaksanakan guna mencapai indikator Persentase desa yang melaksanakan administrasi serta pengelolaan keuangan desa yang tertib dan baik.

15. Kecamatan Reban

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

Program ini diarahkan dalam kegiatan koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan yang didukung dengan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan. Program ini diarahkan untuk mencapai indikator Persentase pelayanan PATEN yang sesuai SOP.

b. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

Program ini diarahkan dalam kegiatan koordinasi pemberdayaan desa yang didukung Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan serta pemberdayaan lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan yang didukung melalui Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan. Program ini dilaksanakan guna mencapai indikator Persentase Lembaga Kemasyarakatan di Desa yang Aktif.

c. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Program ini diarahkan dalam kegiatan koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum yang didukung dengan mensinergikan dengan Kepolisian, Tentara dan instansi vertikal di wilayah kecamatan. Program ini dilaksanakan guna mencapai indikator Presentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan.

d. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

Program ini diarahkan pada fasilitasi, koordinasi, dan pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan kebangsaan dan Ketahanan Nasional serta pelaksanaan tugas forum koordinasi pimpinan di kecamatan melalui kegiatan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah. Program ini dilaksanakan untuk mencapai target dari indikator Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan dengan baik.

e. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Program ini diarahkan dalam kegiatan Fasilitasi rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa yang didukung dengan fasilitasi penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa, fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa serta fasilitasi pengelolaan keuangan dan pendayagunaan aset desa. program ini dilaksanakan guna mencapai indikator Persentase desa yang melaksanakan administrasi serta pengelolaan keuangan desa yang tertib dan baik.

H. Unsur Pemerintahan Umum

1. Kesatuan Bangsa dan Politik

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan

Program ini diarahkan dalam kegiatan Perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan Bidang Ideologi pancasila dan karakter kebangsaan melalui Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran

Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan. Program ini dilaksanakan untuk mencapai target persentase masyarakat yang mengikuti Wasbang.

b. Program Peningkatan Peran Partai Politik Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik

Program ini diarahkan dalam kegiatan Perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, serta pemantauan situasi politik, melalui Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah, Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah, dan Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah. Program ini dilaksanakan untuk mencapai target Persentase parpol dan lembaga pendidikan yang berperan aktif mendukung pemerintah.

c. Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan

Program ini diarahkan dalam kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan melalui Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah. Program ini dilaksanakan untuk mencapai target Persentase Ormas yang mendapatkan fasilitasi dan pembinaan.

d. Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya

Program ini diarahkan dalam kegiatan Perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya, melalui Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah dan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah. Program ini dilaksanakan untuk mencapai target Persentase masyarakat yang paham ketahanan Ekososbud.

e. Program peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial

Program ini diarahkan dalam kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial melalui Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah,

Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah, dan Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota. Program ini dilaksanakan untuk mencapai target Persentase penurunan konflik sosial.

Tabel 4.3**Plafon Perubahan Anggaran Sementara Berdasarkan Satuan Kerja Perangkat Daerah Per Subkegiatan**

SKPD	NAMA SUB KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ (BERKURANG)
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	26.862.000,00	26.862.000,00	-
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	386.859.117	838.109.117,00	451.250.000,00
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	62.637.360	62.637.360,00	-
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	107.007.790	107.007.790,00	-
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	Pengelolaan Data Kepegawaian	73.999.840	62.899.840,00	- 11.100.000,00
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	Pengelolaan Mutasi ASN	17.620.000	17.620.000,00	-
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	32.000.000	32.000.000,00	-
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	Pengelolaan Promosi ASN	588.321.000	610.321.000,00	22.000.000,00
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	101.555.840	48.305.840,00	- 53.250.000,00
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	81.020.000	81.020.000,00	-
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai	168.702.200	168.702.200,00	-
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	Pembinaan Disiplin ASN	112.365.200	136.415.200,00	24.050.000,00
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	91.170.000	65.628.600,00	- 25.541.400,00
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	25.000.000	25.000.000,00	-
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.367.777.133	3.142.869.176,00	- 224.907.957,00
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	23.460.000	23.460.000,00	-
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	34.635.400	34.635.400,00	-
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	80.083.250	85.699.250,00	5.616.000,00
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	14.750.400	14.750.400,00	-
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	112.694.500	127.444.500,00	14.750.000,00
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	91.420.000	91.420.000,00	-
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	40.388.600	47.408.600,00	7.020.000,00
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	9.000.000	9.000.000,00	-
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	156.324.500	149.064.500,00	- 7.260.000,00
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.113.000	2.113.000,00	-
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	243.137.700	243.137.700,00	-
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	45.000.000	59.225.400,00	14.225.400,00
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	137.645.700	144.905.700,00	7.260.000,00
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	189.800.000	182.780.000,00	- 7.020.000,00
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	198.495.000	371.495.000,00	173.000.000,00
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	117.031.150	117.031.150,00	-
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	953.325.600	858.325.600,00	- 95.000.000,00
		7.692.202.280	7.987.294.323	295.092.043
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	345.096.600,00	329.984.914,00	- 15.111.686,00
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	255.000.000,00	305.000.000,00	50.000.000,00
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Pembentukan Paskibraka	470.163.500,00	467.978.850,00	- 2.184.650,00
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila	29.836.500,00	60.000.000,00	30.163.500,00
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	183.130.000,00	232.215.000,00	49.085.000,00
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	17.675.534.000,00	17.708.379.833,00	32.845.833,00
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	220.000.000,00	212.400.000,00	- 7.600.000,00
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	30.000.000,00	43.280.000,00	13.280.000,00
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	206.000.000,00	203.544.950,00	- 2.455.050,00

SKPD	NAMA SUB KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ (BERKURANG)
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	65.991.600,00	61.941.600,00	- 4.050.000,00
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	312.672.400,00	349.542.400,00	36.870.000,00
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	670.000.000,00	582.580.000,00	- 87.420.000,00
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	10.436.700,00	13.436.700,00	3.000.000,00
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.593.319.341,00	2.355.562.134,00	- 237.757.207,00
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	36.960.000,00	41.202.000,00	4.242.000,00
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2.320.000,00	2.320.000,00	-
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	10.000.000,00	10.000.000,00	-
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.663.800,00	2.663.800,00	-
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	20.443.200,00	43.797.500,00	23.354.300,00
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	1.500.000,00	6.426.900,00	4.926.900,00
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	14.995.000,00	14.995.000,00	-
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	15.859.800,00	49.003.300,00	33.143.500,00
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2.820.000,00	2.820.000,00	-
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	51.137.972,00	63.588.668,00	12.450.696,00
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		-	-
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	23.654.400,00	23.654.400,00	-
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.000.000,00	3.000.000,00	1.000.000,00
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	25.000.000,00	22.000.000,00	- 3.000.000,00
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	100.612.128,00	98.327.616,00	- 2.284.512,00
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	130.158.400,00	154.808.400,00	24.650.000,00
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	55.000.000,00	55.000.000,00	-
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	5.520.000,00	13.825.000,00	8.305.000,00
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	4.880.000,00	4.880.000,00	-
		23.572.705.341,00	23.538.158.965,00	- 34.546.376,00
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	114.880.000	114.880.000,00	-
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)	70.250.000	71.250.000,00	1.000.000,00
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	50.845.000	50.845.000,00	-
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	8.950.000	8.950.000,00	-
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	Penyusunan Rencana Kontijensi	73.700.000	73.700.000,00	-
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana			-
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana			-
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	11.300.000	10.300.000,00	- 1.000.000,00
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota			-
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota			-
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota	325.269.000	325.269.000,00	-
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	161.075.000	118.950.000,00	- 42.125.000,00
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota			-
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas	13.500.000	13.500.000,00	-
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	189.102.250	241.721.195,00	52.618.945,00
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	35.000.000	35.000.000,00	-
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	92.034.150	99.860.205,00	7.826.055,00
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemi/Wabah Penyakit			-
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	29.940.000	11.620.000,00	- 18.320.000,00
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota			-
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota			-
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	59.129.400	37.129.400,00	- 22.000.000,00
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	59.779.600	52.954.600,00	- 6.825.000,00
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana			-
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	112.573.000	141.398.000,00	28.825.000,00
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	24.011.000	21.511.000,00	- 2.500.000,00
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.889.387.394	2.971.425.633,00	82.038.239,00
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	25.560.000,00	25.560.000,00	-
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	8.170.000,00	8.170.000,00	-
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	-	-	-

SKPD	NAMA SUB KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ (BERKURANG)
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	25.000.000,00	25.000.000,00	-
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.076.300,00	4.076.300,00	-
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	19.576.900,00	19.576.900,00	-
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	23.800.000,00	23.800.000,00	-
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	10.164.000,00	10.164.000,00	-
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2.400.000,00	2.400.000,00	-
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	77.433.260	74.504.310,00	- 2.928.950,00
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	570.000.000,00	570.000.000,00	-
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	81.284.200	81.238.200,00	- 46.000,00
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	150.000.000,00	150.000.000,00	-
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.012.500,00	3.012.500,00	-
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	45.400.000	50.874.950,00	5.474.950,00
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	51.001.700,00	51.001.700,00	-
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	154.181.000,00	154.181.000,00	-
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	15.500.000,00	15.500.000,00	-
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		-	-
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		-	-
		5.587.285.654	5.669.323.893	82.038.239
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	134.729.800	134.729.800,00	-
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	134.598.500	145.798.500,00	11.200.000,00
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	343.328.600	176.169.600,00	- 167.159.000,00
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	149.677.350	117.074.350,00	- 32.603.000,00
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	18.677.000	13.872.000,00	- 4.805.000,00
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	14.715.500	12.715.500,00	- 2.000.000,00
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	349.802.000	300.312.000,00	- 49.490.000,00
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	334.869.700	339.408.700,00	4.539.000,00
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	9.308.497.031	6.421.975.759,00	- 2.886.521.272,00
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	52.773.000	52.773.000,00	-
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	154.590.000	169.016.000,00	14.426.000,00
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	30.810.348	30.810.348,00	-
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH	Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	288.099.800	305.873.800,00	17.774.000,00
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	33.384.750	33.384.750,00	-
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	315.443.800	316.271.800,00	828.000,00
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	15.593.000	15.593.000,00	-
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyeteroran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	117.387.600	118.465.100,00	1.077.500,00
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	128.401.050	128.401.050,00	-
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	187.513.700	311.418.200,00	123.904.500,00
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	309.292.300	336.757.300,00	27.465.000,00

SKPD	NAMA SUB KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ (BERKURANG)
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	37.059.500	37.059.500,00	-
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	112.389.200	112.389.200,00	-
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	303.345.100	403.345.100,00	100.000.000,00
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	222.184.700	366.660.700,00	144.476.000,00
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	71.271.100	71.271.100,00	-
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH	Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	94.401.800	94.401.800,00	-
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	123.650.300	123.650.300,00	-
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	325.428.452.200	324.307.657.400,00	- 1.120.794.800,00
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	12.000.000.000	7.669.716.371,00	- 4.330.283.629,00
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH	Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	13.959.954.076	14.653.167.421,00	693.213.345,00
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH	Penyusunan Standar Harga	237.000.000	248.194.550,00	11.194.550,00
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	0	66.914.450,00	66.914.450,00
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH	Penatausahaan Barang Milik Daerah	1.055.000.650	873.874.650,00	- 181.126.000,00
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH	Pengamanan Barang Milik Daerah	173.983.600	490.543.600,00	316.560.000,00
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	376.280.500	521.280.500,00	145.000.000,00
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	108.597.400	117.297.400,00	8.700.000,00
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	100.681.700	118.180.950,00	17.499.250,00
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	115.261.750	109.262.500,00	- 5.999.250,00
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	1.393.939.000	1.544.221.200,00	150.282.200,00
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	157.885.000	254.400.000,00	96.515.000,00
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH	Penetapan Wajib Pajak Daerah	100.000.000	133.030.000,00	33.030.000,00
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	195.965.050	223.465.050,00	27.500.000,00
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH	Penagihan Pajak Daerah	844.209.700	969.709.700,00	125.500.000,00
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	287.083.100	232.296.100,00	- 54.787.000,00
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	15.355.000	15.355.000,00	-
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	11.637.500	11.637.500,00	-
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	19.500.000	19.500.000,00	-
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	39.349.911.906	87.072.138.453,00	47.722.226.547,00
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	88.420.000	88.420.000,00	-
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	50.000.000	50.000.000,00	-

SKPD	NAMA SUB KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ (BERKURANG)
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	779.695.800	1.216.684.200,00	436.988.400,00
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	32.000.900	32.000.900,00	-
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.045.249.767	1.888.003.787,00	842.754.020,00
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	72.883.000	46.504.000,00	- 26.379.000,00
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	156.592.000	188.366.000,00	31.774.000,00
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	83.686.000	82.486.000,00	- 1.200.000,00
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	5.500.000	5.500.000,00	-
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	180.527.508	280.527.508,00	100.000.000,00
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	181.278.000	3.373.400.000,00	3.192.122.000,00
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	10.000.000	12.500.000,00	2.500.000,00
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	524.000.000	625.000.000,00	101.000.000,00
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	647.216.640	644.462.640,00	- 2.754.000,00
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	714.175.000	748.250.000,00	34.075.000,00
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	85.000.000	85.000.000,00	-
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	923.000.000	1.171.550.000,00	248.550.000,00
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	129.697.000	257.447.000,00	127.750.000,00
		415.026.106.276	461.137.543.087	46.111.436.811
BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	85.250.000,00	85.250.000,00	-
BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	15.000.000,00	15.000.000,00	-
BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	Pelaksanaan Konsultasi Publik	49.258.500,00	34.098.500,00	- 15.160.000,00
BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	48.648.000,00	46.948.000,00	- 1.700.000,00
BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	127.575.355,00	93.914.000,00	- 33.661.355,00
BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	17.000.000,00	6.351.000,00	- 10.649.000,00
BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	413.824.000,00	470.190.000,00	56.366.000,00
BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	139.831.200,00	197.981.200,00	58.150.000,00
BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	30.280.500,00	30.280.500,00	-
BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	222.000.100,00	222.000.100,00	-
BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	280.000.000,00	276.030.000,00	- 3.970.000,00
BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	254.990.800,00	248.960.800,00	- 6.030.000,00
BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	59.995.000,00	59.995.000,00	-

SKPD	NAMA SUB KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ (BERKURANG)
BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	170.415.000,00	174.935.000,00	4.520.000,00
BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	43.872.000,00	41.072.000,00	- 2.800.000,00
BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	11.250.000,00	10.650.000,00	- 600.000,00
BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	138.985.000,00	135.465.000,00	- 3.520.000,00
BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	35.963.000,00	32.113.000,00	- 3.850.000,00
BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	8.975.000,00	5.225.000,00	- 3.750.000,00
BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	340.496.000,00	330.496.000,00	- 10.000.000,00
BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	56.980.000,00	56.980.000,00	-
BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	73.020.000,00	73.020.000,00	-
BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	172.532.000,00	172.532.000,00	-
BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	8.819.600,00	8.819.600,00	-
BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	6.800.000,00	6.800.000,00	-
BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8.000.000,00	8.000.000,00	-
BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	13.000.000,00	13.000.000,00	-
BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.710.881.743,00	3.422.962.164,00	- 287.919.579,00
BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	106.860.000,00	106.860.000,00	-
BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5.000.000,00	5.000.000,00	-
BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	61.800.000,00	61.800.000,00	-
BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	11.129.600,00	11.129.600,00	-
BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	31.038.650,00	31.038.650,00	-
BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	65.508.000,00	85.448.000,00	19.940.000,00
BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	20.890.000,00	20.490.000,00	- 400.000,00
BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.500.000,00	1.500.000,00	-
BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	76.076.597,00	116.566.847,00	40.490.250,00
BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	47.393.300,00	125.150.000,00	77.756.700,00
BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.002.000,00	3.002.000,00	-
BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	136.600.000,00	161.700.000,00	25.100.000,00
BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	131.734.400,00	131.734.400,00	-
BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	209.987.500,00	198.264.905,00	- 11.722.595,00
BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	40.000.000,00	45.050.000,00	5.050.000,00

SKPD	NAMA SUB KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ (BERKURANG)
BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	226.000.000,00	395.500.000,00	169.500.000,00
BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	380.000.000,00	403.000.000,00	23.000.000,00
BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	30.000.000,00	30.000.000,00	-
BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat	70.000.000,00	115.000.000,00	45.000.000,00
BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	Penelitian, Pengembangan, dan Perekrayaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	135.000.000,00	135.000.000,00	-
BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	50.000.000,00	50.000.000,00	-
BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	55.000.000,00	50.000.000,00	- 5.000.000,00
BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	26.000.000,00	23.000.000,00	- 3.000.000,00
BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	30.000.000,00	20.000.000,00	- 10.000.000,00
		8.494.162.845,00	8.605.303.266,00	111.140.421,00
DINAS KELAUTAN PERIKANAN DAN PETERNAKAN	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan			
DINAS KELAUTAN PERIKANAN DAN PETERNAKAN	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Rp 123.000.000,00	123.000.000,00	-
DINAS KELAUTAN PERIKANAN DAN PETERNAKAN	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil			-
DINAS KELAUTAN PERIKANAN DAN PETERNAKAN	Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	Rp 14.000.000,00	14.000.000,00	-
DINAS KELAUTAN PERIKANAN DAN PETERNAKAN	Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha			-
DINAS KELAUTAN PERIKANAN DAN PETERNAKAN	Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Rp 1.553.647.800,00	1.553.307.800,00	- 340.000,00
DINAS KELAUTAN PERIKANAN DAN PETERNAKAN	Pelayanan Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT	Rp 25.000.000,00	25.000.000,00	-
DINAS KELAUTAN PERIKANAN DAN PETERNAKAN	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	Rp 47.355.000,00	47.355.000,00	-
DINAS KELAUTAN PERIKANAN DAN PETERNAKAN	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Rp 195.645.000,00	185.645.000,00	- 10.000.000,00
DINAS KELAUTAN PERIKANAN DAN PETERNAKAN	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	Rp 60.000.000,00	67.000.000,00	7.000.000,00
DINAS KELAUTAN PERIKANAN DAN PETERNAKAN	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota			-
DINAS KELAUTAN PERIKANAN DAN PETERNAKAN	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			-
DINAS KELAUTAN PERIKANAN DAN PETERNAKAN	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Rp 38.000.000,00	38.000.000,00	-
DINAS KELAUTAN PERIKANAN DAN PETERNAKAN	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp 28.200.000,00	13.420.000,00	- 14.780.000,00
DINAS KELAUTAN PERIKANAN DAN PETERNAKAN	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Rp 120.000.000,00	92.400.000,00	- 27.600.000,00
DINAS KELAUTAN PERIKANAN DAN PETERNAKAN	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp 30.000.000,00	11.486.100,00	- 18.513.900,00
DINAS KELAUTAN PERIKANAN DAN PETERNAKAN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp 5.821.330.153,00	5.867.445.422,00	46.115.269,00
DINAS KELAUTAN PERIKANAN DAN PETERNAKAN	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Rp 339.818.000,00	365.218.000,00	25.400.000,00
DINAS KELAUTAN PERIKANAN DAN PETERNAKAN	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Rp 25.000.000,00	28.000.000,00	3.000.000,00
DINAS KELAUTAN PERIKANAN DAN PETERNAKAN	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Rp 54.000.000,00	52.200.000,00	- 1.800.000,00
DINAS KELAUTAN PERIKANAN DAN PETERNAKAN	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp 5.000.000,00	5.000.000,00	-
DINAS KELAUTAN PERIKANAN DAN PETERNAKAN	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp 16.794.600,00	62.243.200,00	45.448.600,00
DINAS KELAUTAN PERIKANAN DAN PETERNAKAN	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp 20.000.000,00	26.610.000,00	6.610.000,00
DINAS KELAUTAN PERIKANAN DAN PETERNAKAN	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp 128.517.500,00	127.837.500,00	- 680.000,00
DINAS KELAUTAN PERIKANAN DAN PETERNAKAN	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp 44.000.000,00	51.732.600,00	7.732.600,00
DINAS KELAUTAN PERIKANAN DAN PETERNAKAN	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Rp 1.250.000,00	1.250.000,00	-
DINAS KELAUTAN PERIKANAN DAN PETERNAKAN	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp 140.000.000,00	139.200.000,00	- 800.000,00
DINAS KELAUTAN PERIKANAN DAN PETERNAKAN	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp 91.927.000,00	91.558.300,00	- 368.700,00
DINAS KELAUTAN PERIKANAN DAN PETERNAKAN	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp 63.150.000,00	83.150.000,00	20.000.000,00
DINAS KELAUTAN PERIKANAN DAN PETERNAKAN	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp 5.000.000,00	5.000.000,00	-
DINAS KELAUTAN PERIKANAN DAN PETERNAKAN	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian			-
DINAS KELAUTAN PERIKANAN DAN PETERNAKAN	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Rp 80.000.000,00	80.000.000,00	-
DINAS KELAUTAN PERIKANAN DAN PETERNAKAN	Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	Rp 22.500.000,00	22.500.000,00	-
DINAS KELAUTAN PERIKANAN DAN PETERNAKAN	Pengawasan Peredaran Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak			-
DINAS KELAUTAN PERIKANAN DAN PETERNAKAN	Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Peredaran Obat Hewan			-
DINAS KELAUTAN PERIKANAN DAN PETERNAKAN	Pengendalian Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	Rp 60.000.000,00	60.000.000,00	-
DINAS KELAUTAN PERIKANAN DAN PETERNAKAN	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Rp 20.000.000,00	20.000.000,00	-
DINAS KELAUTAN PERIKANAN DAN PETERNAKAN	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Rp 30.000.000,00	65.000.000,00	35.000.000,00

SKPD	NAMA SUB KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ (BERKURANG)
DINAS KELAUTAN PERIKANAN DAN PETERNAKAN	Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan dan operasionalisasi Rumah Potong Hewan	Rp 67.053.300,00	67.053.300,00	-
DINAS KELAUTAN PERIKANAN DAN PETERNAKAN	Pelestarian dan Pemanfaatan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak	Rp 465.000.000,00	250.000.000,00	- 215.000.000,00
DINAS KELAUTAN PERIKANAN DAN PETERNAKAN	Pengelolaan Lahan Penggembalaan Umum			-
DINAS KELAUTAN PERIKANAN DAN PETERNAKAN	Pelaksanaan Surveilans Penyakit Hewan dan Zoonosis pada Hewan	Rp 130.000.000,00	130.000.000,00	-
DINAS KELAUTAN PERIKANAN DAN PETERNAKAN	Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM)	Rp 20.000.000,00	20.000.000,00	-
DINAS KELAUTAN PERIKANAN DAN PETERNAKAN	Penyediaan Pelayanan Jasa Laboratorium			-
DINAS KELAUTAN PERIKANAN DAN PETERNAKAN	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Rp 628.725.100,00	628.725.100,00	-
DINAS KELAUTAN PERIKANAN DAN PETERNAKAN	Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	Rp 110.000.000,00	110.000.000,00	-
DINAS KELAUTAN PERIKANAN DAN PETERNAKAN	Penanggulangan Bencana Non Alam yang Bersifat Zoonosis	Rp 125.000.000,00	200.000.000,00	75.000.000,00
DINAS KELAUTAN PERIKANAN DAN PETERNAKAN	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan standar dan Izin Usaha Pertanian	Rp 10.000.000,00	10.000.000,00	-
		10.758.913.453,00	10.740.337.322,00	- 18.576.131,00
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	30.000.000	27.039.000,00	- 2.961.000,00
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	438.326.000	441.287.000,00	2.961.000,00
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	312.708.000	315.669.000,00	2.961.000,00
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	102.100.000	99.139.000,00	- 2.961.000,00
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	51.717.200	53.838.200,00	2.121.000,00
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Facilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	989.593.220	978.869.220,00	- 10.724.000,00
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	111.109.400	100.711.400,00	- 10.398.000,00
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.357.089.502	3.670.701.593,00	- 686.387.909,00
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	20.100.000	20.100.000,00	-
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	102.000.000	102.000.000,00	-
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya			-
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	311.582.800	314.543.800,00	2.961.000,00
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	121.413.800	119.163.800,00	- 2.250.000,00
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	43.475.000	50.375.000,00	6.900.000,00
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	8.000.000	8.000.000,00	-
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.000.000	5.000.000,00	-
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	339.300.000	359.650.000,00	20.350.000,00
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	119.861.240	119.861.240,00	-
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	276.910.000	241.840.000,00	- 35.070.000,00
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	125.005.000	124.500.000,00	- 505.000,00
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	84.503.500	136.118.500,00	51.615.000,00
		7.949.794.662,00	7.288.406.753,00	- 661.387.909,00
RSUD LIMPUNG	Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	2.486.977.895,00	2.486.977.895,00	-
RSUD LIMPUNG	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	2.050.000.000,00	2.250.000.000,00	200.000.000,00
RSUD LIMPUNG	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	7.104.866.256,00	23.073.145.259,00	15.968.279.003,00
RSUD LIMPUNG	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	16.500.000.000,00	-	- 16.500.000.000,00
RSUD LIMPUNG	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-
		28.141.844.151,00	27.810.123.154,00	- 331.720.997,00
DINAS KESEHATAN	Pembangunan Puskesmas	5.993.034.960,00	5.912.026.900,00	- 81.008.060,00
DINAS KESEHATAN	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya	7.343.089.400,00	7.287.624.000,00	- 55.465.400,00
DINAS KESEHATAN	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	1.165.360.000,00	1.163.120.000,00	- 2.240.000,00
DINAS KESEHATAN	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	-	-	-
DINAS KESEHATAN	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	302.008.000,00	302.008.000,00	-
DINAS KESEHATAN	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	57.179.000,00	57.179.000,00	-
DINAS KESEHATAN	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	7.174.915.154,00	7.174.915.154,00	-
DINAS KESEHATAN	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan	50.703.900,00	47.703.900,00	- 3.000.000,00
DINAS KESEHATAN	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	983.440.000,00	983.440.000,00	-
DINAS KESEHATAN	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	412.863.000,00	412.863.000,00	-
DINAS KESEHATAN	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	256.376.800,00	256.376.800,00	-
DINAS KESEHATAN	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	92.000.000,00	92.000.000,00	-
DINAS KESEHATAN	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	650.787.500,00	650.787.500,00	-
DINAS KESEHATAN	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	33.290.750,00	23.390.750,00	- 9.900.000,00
DINAS KESEHATAN	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	44.780.000,00	44.780.000,00	-

SKPD	NAMA SUB KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ (BERKURANG)
DINAS KESEHATAN	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	15.600.000,00	15.600.000,00	-
DINAS KESEHATAN	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	1.096.926.196,00	1.086.390.196,00	- 10.536.000,00
DINAS KESEHATAN	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	15.600.000,00	15.600.000,00	-
DINAS KESEHATAN	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	961.625.000,00	941.225.000,00	- 20.400.000,00
DINAS KESEHATAN	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	330.225.000,00	325.425.000,00	- 4.800.000,00
DINAS KESEHATAN	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	100.000.000,00	100.000.000,00	-
DINAS KESEHATAN	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	10.000.000,00	10.000.000,00	-
DINAS KESEHATAN	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	9.039.264.000,00	9.081.377.500,00	42.113.500,00
DINAS KESEHATAN	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	71.550.000,00	61.700.000,00	- 9.850.000,00
DINAS KESEHATAN	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	723.490.000,00	723.490.000,00	-
DINAS KESEHATAN	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	390.483.000,00	370.483.000,00	- 20.000.000,00
DINAS KESEHATAN	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	28.946.500,00	38.946.500,00	10.000.000,00
DINAS KESEHATAN	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	735.416.000,00	735.416.000,00	-
DINAS KESEHATAN	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	32.250.000,00	41.922.000,00	9.672.000,00
DINAS KESEHATAN	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	39.800.000,00	31.800.000,00	- 8.000.000,00
DINAS KESEHATAN	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	3.794.218.190,00	3.866.214.990,00	71.996.800,00
DINAS KESEHATAN	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	30.423.605.958,00	40.723.605.958,00	10.300.000.000,00
DINAS KESEHATAN	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	72.500.000,00	72.500.000,00	-
DINAS KESEHATAN	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	-	-	-
DINAS KESEHATAN	Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	-	-	-
DINAS KESEHATAN	Operasional Pelayanan Puskesmas	2.514.522.000,00	2.535.402.000,00	20.880.000,00
DINAS KESEHATAN	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	742.720.000,00	739.720.000,00	- 3.000.000,00
DINAS KESEHATAN	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	115.000.000,00	63.574.000,00	- 51.426.000,00
DINAS KESEHATAN	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	129.660.000,00	129.660.000,00	-
DINAS KESEHATAN	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	90.000.000,00	80.000.000,00	- 10.000.000,00
DINAS KESEHATAN	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	926.799.800,00	1.075.594.800,00	148.795.000,00
DINAS KESEHATAN	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	232.195.000,00	224.195.000,00	- 8.000.000,00
DINAS KESEHATAN	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	218.767.000,00	215.967.000,00	- 2.800.000,00
DINAS KESEHATAN	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	57.560.000,00	57.560.000,00	-
DINAS KESEHATAN	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	206.692.000,00	206.692.000,00	-
DINAS KESEHATAN	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	1.628.348.000,00	1.628.348.000,00	-
DINAS KESEHATAN	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	-	-	-
DINAS KESEHATAN	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	-	-	-
DINAS KESEHATAN	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	191.221.000,00	165.201.000,00	- 26.020.000,00
DINAS KESEHATAN	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya	11.000.000,00	11.000.000,00	-
DINAS KESEHATAN	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	241.000.000,00	217.080.000,00	- 23.920.000,00
DINAS KESEHATAN	Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	15.000.000,00	15.000.000,00	-
DINAS KESEHATAN	Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	40.324.500,00	40.324.500,00	-
DINAS KESEHATAN	Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	20.100.000,00	20.100.000,00	-
DINAS KESEHATAN	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	78.000.000,00	78.000.000,00	-
DINAS KESEHATAN	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	147.345.000,00	147.345.000,00	-
DINAS KESEHATAN	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.241.567.000,00	1.236.562.000,00	- 5.005.000,00
DINAS KESEHATAN	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	112.370.000,00	112.370.000,00	-
DINAS KESEHATAN	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	149.369.000,00	149.369.000,00	-
DINAS KESEHATAN	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	44.500.000,00	37.500.000,00	- 7.000.000,00
DINAS KESEHATAN	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	332.792.000,00	332.792.000,00	-
DINAS KESEHATAN	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	92.100.000,00	92.100.000,00	-
DINAS KESEHATAN	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	230.000.000,00	230.000.000,00	-
DINAS KESEHATAN	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	1.525.283.000,00	1.525.283.000,00	-
DINAS KESEHATAN	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	96.475.000,00	85.134.000,00	- 11.341.000,00
DINAS KESEHATAN	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	130.524.000,00	130.524.000,00	-
DINAS KESEHATAN	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	74.499.000,00	84.425.600,00	9.926.600,00
DINAS KESEHATAN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	80.961.929.578,00	80.267.559.990,00	- 694.369.588,00
DINAS KESEHATAN	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	486.554.000,00	524.035.700,00	37.481.700,00

SKPD	NAMA SUB KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ (BERKURANG)
DINAS KESEHATAN	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2.967.000,00	6.338.000,00	3.371.000,00
DINAS KESEHATAN	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	3.094.600,00	6.094.600,00	3.000.000,00
DINAS KESEHATAN	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	30.000.000,00	-	30.000.000,00
DINAS KESEHATAN	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	31.365.000,00	31.365.000,00	-
DINAS KESEHATAN	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	231.397.250,00	275.257.250,00	43.860.000,00
DINAS KESEHATAN	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	37.865.000,00	37.865.000,00	-
DINAS KESEHATAN	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	121.650.000,00	111.650.000,00	- 10.000.000,00
DINAS KESEHATAN	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	60.890.000,00	50.911.000,00	- 9.979.000,00
DINAS KESEHATAN	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	5.820.900,00	5.820.900,00	-
DINAS KESEHATAN	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	150.000.000,00	225.555.000,00	75.555.000,00
DINAS KESEHATAN	Pengadaan Mebel	94.930.200,00	94.930.200,00	-
DINAS KESEHATAN	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	7.000.000,00	7.000.000,00	-
DINAS KESEHATAN	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	494.100.000,00	460.200.000,00	- 33.900.000,00
DINAS KESEHATAN	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	35.555.000,00	-	- 35.555.000,00
DINAS KESEHATAN	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	432.800.000,00	452.800.000,00	20.000.000,00
DINAS KESEHATAN	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	30.000.000,00	30.000.000,00	-
DINAS KESEHATAN	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	371.440.000,00	376.540.000,00	5.100.000,00
DINAS KESEHATAN	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	403.986.000,00	403.986.000,00	-
DINAS KESEHATAN	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	51.060.000,00	51.060.000,00	-
DINAS KESEHATAN	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	45.107.013.238,00	54.219.934.987,00	9.112.921.749,00
		213.228.479.374,00	231.955.637.675,00	18.727.158.301,00
DINAS KETENAGAKERJAAN	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	-	-	-
DINAS KETENAGAKERJAAN	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	546.860.000,00	726.860.000,00	180.000.000,00
DINAS KETENAGAKERJAAN	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	10.300.000,00	10.300.000,00	-
DINAS KETENAGAKERJAAN	Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil	497.585.850,00	522.585.850,00	25.000.000,00
DINAS KETENAGAKERJAAN	Pelayanan antar Kerja	258.404.399,00	298.404.399,00	40.000.000,00
DINAS KETENAGAKERJAAN	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	74.658.000,00	94.658.000,00	20.000.000,00
DINAS KETENAGAKERJAAN	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	63.685.865,00	63.685.865,00	-
DINAS KETENAGAKERJAAN	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	72.135.800,00	72.135.800,00	-
DINAS KETENAGAKERJAAN	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	10.000.000,00	10.000.000,00	-
DINAS KETENAGAKERJAAN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.380.266.593,00	2.329.300.620,00	- 50.965.973,00
DINAS KETENAGAKERJAAN	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	214.451.200,00	214.451.200,00	-
DINAS KETENAGAKERJAAN	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	25.000.000,00	25.000.000,00	-
DINAS KETENAGAKERJAAN	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.976.000,00	5.976.000,00	-
DINAS KETENAGAKERJAAN	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	29.592.900,00	29.592.900,00	-
DINAS KETENAGAKERJAAN	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	33.400.000,00	33.400.000,00	-
DINAS KETENAGAKERJAAN	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	13.304.000,00	13.304.000,00	-
DINAS KETENAGAKERJAAN	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3.000.000,00	3.000.000,00	-
DINAS KETENAGAKERJAAN	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	40.000.000,00	51.100.000,00	11.100.000,00
DINAS KETENAGAKERJAAN	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	-	-
DINAS KETENAGAKERJAAN	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	2.200.000.000,00	3.851.151.272,00	1.651.151.272,00
DINAS KETENAGAKERJAAN	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.750.000,00	4.450.000,00	700.000,00
DINAS KETENAGAKERJAAN	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	114.577.185,00	154.277.185,00	39.700.000,00
DINAS KETENAGAKERJAAN	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	105.700.300,00	111.700.300,00	6.000.000,00
DINAS KETENAGAKERJAAN	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	8.500.000,00	8.500.000,00	-
DINAS KETENAGAKERJAAN	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	95.000.000,00	102.500.000,00	7.500.000,00
DINAS KETENAGAKERJAAN	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	11.450.000,00	11.450.000,00	-
DINAS KETENAGAKERJAAN	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	33.000.000,00	33.000.000,00	-
DINAS KETENAGAKERJAAN	Pelaksanaan Penataan Penduduk Setempat Sekitar Lokasi Kawasan Transmigrasi	108.786.500,00	108.786.500,00	-
		6.959.384.592,00	8.889.569.891,00	1.930.185.299,00
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	354.488.000	332.543.000,00	- 21.945.000,00
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Pelayanan Informasi Publik	65.000.000	86.945.000,00	21.945.000,00
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Layanan Hubungan Media	774.756.000	774.756.000,00	-
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	50.000.000	50.000.000,00	-
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	125.000.000	170.000.000,00	45.000.000,00

SKPD	NAMA SUB KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ (BERKURANG)
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	120.000.000	120.000.000,00	-
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	760.000.000	760.000.000,00	-
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	15.000.000	15.000.000,00	-
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.413.461.847	3.343.134.866,00	- 70.326.981,00
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	59.374.000	59.374.000,00	-
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12.152.000	12.152.000,00	-
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	39.024.800	54.024.800,00	15.000.000,00
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	70.008.000	80.008.000,00	10.000.000,00
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	19.577.500	19.577.500,00	-
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	6.000.000	6.000.000,00	-
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	120.629.660	145.629.660,00	25.000.000,00
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Pengadaan Mebel	7.026.600	7.026.600,00	-
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		10.187.200,00	10.187.200,00
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.625.000	5.625.000,00	-
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	993.936.000	873.748.800,00	- 120.187.200,00
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	187.484.100	187.484.100,00	-
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	150.000.000	165.000.000,00	15.000.000,00
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	30.000.000	30.000.000,00	-
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	175.000.000	175.000.000,00	-
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	16.000.000	16.000.000,00	-
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	25.000.000	25.000.000,00	-
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	102.137.950	102.137.950,00	-
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	100.000.000	100.000.000,00	-
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Membangun Metadata Statistik Sektoral	25.000.000	25.000.000,00	-
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Pengembangan Infrastruktur	100.000.000	100.000.000,00	-
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	100.000.000	100.000.000,00	-
		8.021.681.457,00	7.951.354.476,00	- 70.326.981,00
DINAS LINGKUNGAN HIDUP	Penyusunan RPPLH Kabupaten/Kota	-		-
DINAS LINGKUNGAN HIDUP	Penyelenggaraan KLHS Rencana Tata Ruang	-		-
DINAS LINGKUNGAN HIDUP	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	31.545.600,00	29.545.600,00	- 2.000.000,00
DINAS LINGKUNGAN HIDUP	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	38.649.900,00	38.649.900,00	-
DINAS LINGKUNGAN HIDUP	Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	134.200.000,00	134.200.000,00	-
DINAS LINGKUNGAN HIDUP	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	-		-
DINAS LINGKUNGAN HIDUP	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati	418.404.600,00	417.042.700,00	- 1.361.900,00
DINAS LINGKUNGAN HIDUP	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan	-		-
DINAS LINGKUNGAN HIDUP	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	32.360.000,00	34.360.000,00	2.000.000,00
DINAS LINGKUNGAN HIDUP	Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	49.162.400,00	49.162.400,00	-
DINAS LINGKUNGAN HIDUP	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	90.849.900,00	90.849.900,00	-
DINAS LINGKUNGAN HIDUP	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	99.963.000,00	117.713.000,00	17.750.000,00
DINAS LINGKUNGAN HIDUP	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan	1.350.557.700,00	1.513.467.800,00	162.910.100,00
DINAS LINGKUNGAN HIDUP	Monitoring dan Evaluasi Pemenuhan Target dan Standar Pelayanan Pengelolaan Sampah	274.651.300,00	265.445.300,00	- 9.206.000,00
DINAS LINGKUNGAN HIDUP	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	38.761.900,00	38.761.900,00	-
DINAS LINGKUNGAN HIDUP	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.973.913.764,00	4.768.493.860,00	- 205.419.904,00
DINAS LINGKUNGAN HIDUP	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	77.764.600,00	54.464.400,00	- 23.300.200,00
DINAS LINGKUNGAN HIDUP	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	199.988.100,00	199.988.100,00	-
DINAS LINGKUNGAN HIDUP	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	-		-
DINAS LINGKUNGAN HIDUP	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.000.000,00	5.000.000,00	-
DINAS LINGKUNGAN HIDUP	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	37.228.700,00	45.783.700,00	8.555.000,00
DINAS LINGKUNGAN HIDUP	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	42.455.000,00	47.455.000,00	5.000.000,00
DINAS LINGKUNGAN HIDUP	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	18.658.500,00	24.657.300,00	5.998.800,00
DINAS LINGKUNGAN HIDUP	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3.060.000,00	2.160.000,00	- 900.000,00
DINAS LINGKUNGAN HIDUP	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	148.253.905,00	158.402.245,00	10.148.340,00
DINAS LINGKUNGAN HIDUP	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	20.611.960,00	43.155.720,00	22.543.760,00
DINAS LINGKUNGAN HIDUP	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.000.000,00	1.604.400,00	- 3.395.600,00

SKPD	NAMA SUB KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ (BERKURANG)
DINAS LINGKUNGAN HIDUP	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	92.550.000,00	94.295.600,00	1.745.600,00
DINAS LINGKUNGAN HIDUP	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	4.838.636.240,00	4.829.163.640,00	- 9.472.600,00
DINAS LINGKUNGAN HIDUP	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	144.087.200,00	144.937.200,00	850.000,00
DINAS LINGKUNGAN HIDUP	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	2.147.480.120,00	2.138.464.820,00	- 9.015.300,00
DINAS LINGKUNGAN HIDUP	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	24.000.000,00	24.000.000,00	-
			15.311.224.485,00	
DINAS PANGAN DAN PERTANIAN	Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya	-	-	-
DINAS PANGAN DAN PERTANIAN	Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya	3.000.000	3.000.000,00	-
DINAS PANGAN DAN PERTANIAN	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	24.200.000	24.200.000,00	-
DINAS PANGAN DAN PERTANIAN	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	29.381.000	29.381.000,00	-
DINAS PANGAN DAN PERTANIAN	Pengembangan Kelembagaan Distribusi Pangan Kabupaten/kota	12.100.000	12.100.000,00	-
DINAS PANGAN DAN PERTANIAN	Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)	6.170.000	6.170.000,00	-
DINAS PANGAN DAN PERTANIAN	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/kota	954.640.000	954.640.000,00	-
DINAS PANGAN DAN PERTANIAN	Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota	148.499.000	76.364.000,00	- 72.135.000,00
DINAS PANGAN DAN PERTANIAN	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	-	-	-
DINAS PANGAN DAN PERTANIAN	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	50.000.000	50.000.000,00	-
DINAS PANGAN DAN PERTANIAN	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota	176.500.000	176.500.000,00	-
DINAS PANGAN DAN PERTANIAN	Penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	37.510.000	37.510.000,00	-
DINAS PANGAN DAN PERTANIAN	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	2.101.083.129	2.287.450.968,00	186.367.839,00
DINAS PANGAN DAN PERTANIAN	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	25.000.000	25.000.000,00	-
DINAS PANGAN DAN PERTANIAN	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	40.000.000	40.000.000,00	-
DINAS PANGAN DAN PERTANIAN	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	640.844.000	875.844.000,00	235.000.000,00
DINAS PANGAN DAN PERTANIAN	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	755.000.000	755.000.000,00	-
DINAS PANGAN DAN PERTANIAN	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Parit	488.420.000	488.420.000,00	-
DINAS PANGAN DAN PERTANIAN	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	3.958.450.000	5.010.132.447,00	1.051.682.447,00
DINAS PANGAN DAN PERTANIAN	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	1.041.580.000	-	- 1.041.580.000,00
DINAS PANGAN DAN PERTANIAN	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	45.000.000	45.000.000,00	-
DINAS PANGAN DAN PERTANIAN	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	435.082.950	435.459.950,00	377.000,00
DINAS PANGAN DAN PERTANIAN	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	262.500.000	262.500.000,00	-
DINAS PANGAN DAN PERTANIAN	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	-	-	-
DINAS PANGAN DAN PERTANIAN	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	65.491.390	65.491.390,00	-
DINAS PANGAN DAN PERTANIAN	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	13.540.000	13.540.000,00	-
DINAS PANGAN DAN PERTANIAN	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	36.548.162	36.548.162,00	-
DINAS PANGAN DAN PERTANIAN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	12.255.541.683	11.332.689.931,00	- 922.851.752,00
DINAS PANGAN DAN PERTANIAN	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	35.280.000	35.280.000,00	-
DINAS PANGAN DAN PERTANIAN	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	25.000.000	25.000.000,00	-
DINAS PANGAN DAN PERTANIAN	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	15.128.300	19.013.300,00	3.885.000,00
DINAS PANGAN DAN PERTANIAN	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	108.066.600	125.716.600,00	17.650.000,00
DINAS PANGAN DAN PERTANIAN	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	77.500.000	77.500.000,00	-
DINAS PANGAN DAN PERTANIAN	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	41.400.000	47.490.000,00	6.090.000,00
DINAS PANGAN DAN PERTANIAN	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	4.800.000	4.800.000,00	-
DINAS PANGAN DAN PERTANIAN	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	130.275.000	120.300.000,00	- 9.975.000,00
DINAS PANGAN DAN PERTANIAN	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	7.000.000	7.000.000,00	-
DINAS PANGAN DAN PERTANIAN	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	245.054.303	245.054.303,00	-
DINAS PANGAN DAN PERTANIAN	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	43.300.000	43.300.000,00	-
DINAS PANGAN DAN PERTANIAN	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.478.431.416	1.460.781.416,00	- 17.650.000,00
DINAS PANGAN DAN PERTANIAN	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	131.785.150	146.785.150,00	15.000.000,00
DINAS PANGAN DAN PERTANIAN	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	454.724.600	454.724.600,00	-
DINAS PANGAN DAN PERTANIAN	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	55.000.000	307.135.129,00	252.135.129,00
		26.458.826.683,00	26.162.822.346,00	- 296.004.337,00
DINAS PARIWISATA KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor	75.000.000,00	75.000.000,00	-
DINAS PARIWISATA KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemuda			-
DINAS PARIWISATA KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Kabupaten/Kota	40.000.000,00	40.000.000,00	-
DINAS PARIWISATA KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan Melalui Implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat Kabupaten/Kota	70.000.000,00	70.000.000,00	-
DINAS PARIWISATA KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepemudaan Kabupaten/Kota			-

SKPD	NAMA SUB KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ (BERKURANG)
DINAS PARIWISATA KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda	70.000.000,00	70.000.000,00	-
DINAS PARIWISATA KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	1.140.000.000,00	1.580.000.000,00	440.000.000,00
DINAS PARIWISATA KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembentukan dan Pengembangan Pusat Pembinaan dan Pelatihan Olahraga serta Sekolah Olahraga yang Diselenggarakan oleh Masyarakat dan Dunia Usaha			-
DINAS PARIWISATA KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Dasar			-
DINAS PARIWISATA KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	-
DINAS PARIWISATA KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota	282.500.000,00	499.500.000,00	217.000.000,00
DINAS PARIWISATA KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan	717.500.000,00	717.500.000,00	-
DINAS PARIWISATA KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	Seleksi Atlet Daerah	-	200.000.000,00	200.000.000,00
DINAS PARIWISATA KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	Pemusatan Latihan Daerah, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)			-
DINAS PARIWISATA KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota			-
DINAS PARIWISATA KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	Pemberian Penghargaan Olahraga Kabupaten/Kota	-	47.000.000,00	47.000.000,00
DINAS PARIWISATA KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Sektoral Olahraga	15.000.000,00	15.000.000,00	-
DINAS PARIWISATA KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	Standardisasi Organisasi Keolahragaan			-
DINAS PARIWISATA KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	Pengembangan Organisasi Keolahragaan	2.175.000.000,00	3.875.000.000,00	1.700.000.000,00
DINAS PARIWISATA KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota dengan Lembaga Terkait			-
DINAS PARIWISATA KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	Pemberian Penghargaan bagi Organisasi Keolahragaan Berprestasi			-
DINAS PARIWISATA KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	-	206.673.594,00	206.673.594,00
DINAS PARIWISATA KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi			-
DINAS PARIWISATA KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	Penyediaan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi	565.368.328,00	580.368.328,00	15.000.000,00
DINAS PARIWISATA KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	Pengembangan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan			-
DINAS PARIWISATA KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	Pemanfaatan Olahraga Tradisional dalam Masyarakat			-
DINAS PARIWISATA KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah	200.000.000,00	200.000.000,00	-
DINAS PARIWISATA KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	Pengembangan Kapasitas SDM Kepramukaan Tingkat Daerah			-
DINAS PARIWISATA KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	Penyediaan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kepramukaan di Daerah Kabupaten/Kota			-
DINAS PARIWISATA KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah			-
DINAS PARIWISATA KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	Penyediaan Prasarana dan Sarana Kepramukaan Tingkat Daerah			-
DINAS PARIWISATA KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepramukaan Tingkat Daerah			-
DINAS PARIWISATA KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Kegiatan Kepramukaan			-
DINAS PARIWISATA KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	67.677.347,00	67.677.347,00	-
DINAS PARIWISATA KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	86.447.599,00	71.447.599,00	- 15.000.000,00
DINAS PARIWISATA KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.985.725.900,00	3.786.496.507,00	- 199.229.393,00
DINAS PARIWISATA KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	81.902.210,00	69.652.210,00	- 12.250.000,00
DINAS PARIWISATA KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	8.347.200,00	8.347.200,00	-
DINAS PARIWISATA KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	24.885.950,00	36.349.950,00	11.464.000,00
DINAS PARIWISATA KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			-
DINAS PARIWISATA KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	51.891.000,00	43.950.000,00	- 7.941.000,00
DINAS PARIWISATA KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	53.477.200,00	46.039.200,00	- 7.438.000,00
DINAS PARIWISATA KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	129.365.435,00	139.439.635,00	10.074.200,00
DINAS PARIWISATA KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	Pengadaan Mebel			-
DINAS PARIWISATA KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			-
DINAS PARIWISATA KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.000.000,00	2.000.000,00	-
DINAS PARIWISATA KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	69.883.420,00	69.883.420,00	-
DINAS PARIWISATA KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	11.285.000,00	15.691.100,00	4.406.100,00
DINAS PARIWISATA KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	30.981.705,00	30.981.705,00	-
DINAS PARIWISATA KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	32.050.000,00	32.050.000,00	-
DINAS PARIWISATA KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			-
DINAS PARIWISATA KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	94.838.353,00	100.138.353,00	5.300.000,00
DINAS PARIWISATA KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	41.536.000,00	41.536.000,00
DINAS PARIWISATA KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana			-
DINAS PARIWISATA KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	Penetapan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota			-
DINAS PARIWISATA KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	51.151.600,00	79.761.600,00	28.610.000,00
DINAS PARIWISATA KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	Penetapan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota			-
DINAS PARIWISATA KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota			-
DINAS PARIWISATA KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	278.889.107,00	461.529.107,00	182.640.000,00
DINAS PARIWISATA KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota			-
DINAS PARIWISATA KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota			-

SKPD	NAMA SUB KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ (BERKURANG)
DINAS PARIWISATA KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	Penetapan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota			-
DINAS PARIWISATA KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota			-
DINAS PARIWISATA KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	2.250.000.000,00	2.250.000.000,00	-
DINAS PARIWISATA KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	1.379.477.349,00	1.368.227.349,00	- 11.250.000,00
DINAS PARIWISATA KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	300.000.000,00	300.000.000,00	-
DINAS PARIWISATA KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	Perencanaan Destinasi Pariwisata MICE Kabupaten/Kotamadya			-
DINAS PARIWISATA KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota			-
DINAS PARIWISATA KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	Penyediaan Layanan Konsultasi Pendaftaran Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pariwisata di Tingkat Kab/Kota			-
DINAS PARIWISATA KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	Sertifikat standar usaha pariwisata yg diterbitkan oleh lembaga OSS (tanpa verifikasi)		-	-
DINAS PARIWISATA KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	Kesediaan pelaku usaha memenuhi standar usaha pariwisata di Kabupaten/Kota			-
DINAS PARIWISATA KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	Pengelolaan Investasi Pariwisata Kab/Kota			-
DINAS PARIWISATA KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	23.400.105,00	23.400.105,00	-
DINAS PARIWISATA KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	76.598.105,00	76.598.105,00	-
DINAS PARIWISATA KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	Facilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	50.000.000,00	48.200.000,00	- 1.800.000,00
DINAS PARIWISATA KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	50.000.000,00	100.000.000,00	50.000.000,00
DINAS PARIWISATA KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	Pengembangan Pendidikan			-
DINAS PARIWISATA KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	Facilitasi Pendanaan dan Pembiayaan		-	-
DINAS PARIWISATA KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	Penyediaan Infrastruktur		-	-
DINAS PARIWISATA KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	Pengembangan Sistem Pemasaran	93.900.105,00	163.900.105,00	70.000.000,00
DINAS PARIWISATA KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	Penyusunan Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif		-	-
DINAS PARIWISATA KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	Facilitasi pemberian insentif			-
DINAS PARIWISATA KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	Pengembangan Sistem Pemasaran Berbasis Kekayaan Intelektual			-
DINAS PARIWISATA KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif		-	-
DINAS PARIWISATA KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	Facilitasi Pendaftaran Kekayaan Intelektual	11.370.000,00	11.370.000,00	-
DINAS PARIWISATA KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	Facilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif	50.000.000,00	48.200.000,00	- 1.800.000,00
DINAS PARIWISATA KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	Facilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	10.975.000,00	10.975.000,00	-
DINAS PARIWISATA KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	Facilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	-	-	-
DINAS PARIWISATA KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	28.155.000,00	28.155.000,00	-
DINAS PARIWISATA KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	Dukungan Facilitasi Menghadapi Perkembangan Teknologi di Dunia Usaha			-
DINAS PARIWISATA KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			-
		15.735.043.018,00	18.708.038.519,00	2.972.995.501,00
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan		-	-
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	5.372.439.436	5.372.439.436,00	-
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	3.996.000.000	3.996.000.000,00	-
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	563.423.800	711.703.500,00	148.279.700,00
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	249.256.072	164.115.000,00	- 85.141.072,00
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	293.924.000	258.183.500,00	- 35.740.500,00
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	8.472.173.628	8.108.207.878,00	- 363.965.750,00
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	1.000.000.000	801.000.000,00	- 199.000.000,00
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman Berbasis Masyarakat	4.935.790.000	5.054.118.000,00	118.328.000,00
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	634.211.900	581.851.900,00	- 52.360.000,00
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	4.239.363.936	4.239.363.936,00	-
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat (IPAL) di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota	492.870.000	484.550.000,00	- 8.320.000,00
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	9.494.760.000	11.734.780.604,00	2.240.020.604,00
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Pembangunan Jalan	6.918.647.000	6.913.939.700,00	- 4.707.300,00
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Rekonstruksi Jalan	10.000.000.000	-	- 10.000.000.000,00
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Rehabilitasi Jembatan	15.626.950.000	15.414.162.600,00	- 212.787.400,00
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Rehabilitasi Jalan	29.761.227.953	30.287.722.653,00	526.494.700,00
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Pemeliharaan Rutin Jalan	2.613.235.200	2.802.259.323,00	189.024.123,00
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis	75.000.000	75.000.000,00	-
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	425.040.000	370.200.500,00	- 54.839.500,00
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan dan pedoman Bidang Penataan ruang	50.000.000	53.502.500,00	3.502.500,00
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota	600.960.000	593.497.000,00	- 7.463.000,00
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota	150.000.000	186.000.000,00	36.000.000,00
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang	400.000.000	290.138.400,00	- 109.861.600,00
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Sistem Informasi dan komunikasi penataan ruang			-
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	450.000.000	435.000.000,00	- 15.000.000,00

SKPD	NAMA SUB KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ (BERKURANG)
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	25.000.200	25.000.200,00	-
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	11.845.954.254	11.699.716.470,00	- 146.237.784,00
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	607.300.000	607.300.000,00	-
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	412.160.000	412.160.000,00	-
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	272.917.000	272.917.000,00	-
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	42.459.300	29.360.300,00	- 13.099.000,00
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	41.651.900	42.465.600,00	813.700,00
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	26.700.000	26.700.000,00	-
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	35.487.000	32.787.000,00	- 2.700.000,00
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2.220.000	-	- 2.220.000,00
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	107.456.608	105.901.933,00	- 1.554.675,00
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	340.100.100	554.007.434,00	213.907.334,00
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	340.567.700	408.469.700,00	67.902.000,00
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	25.000.000	20.625.000,00	- 4.375.000,00
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	466.880.000	455.140.439,00	- 11.739.561,00
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	22.800.000	22.800.000,00	-
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	227.688.050	373.133.081,00	145.445.031,00
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	576.916.233	666.916.233,00	90.000.000,00
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	113.030.000	161.040.000,00	48.010.000,00
		122.347.561.270,00	114.844.176.820,00	- 7.503.384.450,00
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	Facilitasi Penetapan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dan Desa Adat Kewenangan Kabupaten/Kota	35.000.000,00	35.000.000,00	-
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	Facilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	65.000.000,00	115.000.000,00	50.000.000,00
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	Facilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	3.490.440.500,00	3.332.440.500,00	- 158.000.000,00
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	35.000.000,00	35.000.000,00	-
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	40.000.000,00	40.000.000,00	-
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	Facilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	35.000.000,00	20.000.000,00	- 15.000.000,00
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	Facilitasi Penyusunan Profil Desa			-
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	Facilitasi Pengelolaan Aset Desa	20.000.000,00	20.000.000,00	-
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	Pelaksanaan Penugasan Urusan/Kewenangan Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan oleh Desa	20.362.500.000,00	25.127.280.000,00	4.764.780.000,00
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	Facilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	25.000.000,00	25.000.000,00	-
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	Facilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	560.499.900,00	557.703.900,00	- 2.796.000,00
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	Facilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	150.000.000,00	235.000.000,00	85.000.000,00
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	Facilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	1.975.000.000,00	2.345.000.000,00	370.000.000,00
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	Facilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	114.904.500,00	114.904.500,00	-
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	Facilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	400.000.000,00	430.000.000,00	30.000.000,00
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4.335.000,00	4.335.000,00	-
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.642.782.155,00	2.660.785.218,00	18.003.063,00
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	62.021.550,00	49.731.550,00	- 12.290.000,00
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	-	-	#VALUE!
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	25.000.000,00	75.000.000,00	50.000.000,00
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.418.700,00	2.418.700,00	-
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	15.000.000,00	15.000.000,00	-
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	7.038.000,00	7.038.000,00	-
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	9.495.900,00	9.495.900,00	-
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3.600.000,00	3.600.000,00	-
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	44.000.000,00	63.404.500,00	19.404.500,00
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	-	-	#VALUE!
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	Pengadaan Mebel	-	-	#VALUE!
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.137.500,00	1.525.000,00	387.500,00
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	45.000.000,00	50.400.000,00	5.400.000,00
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	74.967.200,00	80.157.200,00	5.190.000,00
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	65.000.000,00	85.000.000,00	20.000.000,00
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	4.000.000,00	7.500.000,00	3.500.000,00
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	20.000.000,00	40.000.000,00	20.000.000,00
		30.334.140.905,00	35.587.719.968,00	#VALUE!

SKPD	NAMA SUB KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ (BERKURANG)
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	46.700.000,00	46.700.000,00	-
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	50.000.000,00	75.000.000,00	25.000.000,00
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	25.000.000,00	25.000.000,00	-
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	7.835.000,00	7.835.000,00	-
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	10.000.000,00	10.000.000,00	-
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	14.425.000,00	14.425.000,00	-
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	10.425.000,00	10.425.000,00	-
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	-	-	-
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	34.565.000,00	34.565.000,00	-
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	25.000.000,00	25.000.000,00	-
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	47.450.000,00	47.450.000,00	-
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	13.405.000,00	13.405.000,00	-
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.473.915.971,00	3.214.369.067,00	- 259.546.904,00
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	62.040.000,00	62.040.000,00	-
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	25.000.000,00	91.813.398,00	66.813.398,00
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.700.800,00	5.700.800,00	-
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	45.857.150,00	115.086.150,00	69.229.000,00
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	32.030.000,00	40.780.000,00	8.750.000,00
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	8.563.500,00	8.563.500,00	-
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	188.711.332,00	188.261.332,00	- 450.000,00

SKPD	NAMA SUB KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ (BERKURANG)
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.000.000,00	5.000.000,00	-
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	76.500.000,00	100.000.000,00	23.500.000,00
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	875.023.900,00	691.191.502,00	- 183.832.398,00
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	84.250.000,00	195.000.000,00	110.750.000,00
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	98.975.000,00	98.975.000,00	-
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	10.000.000,00	10.000.000,00	-
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	100.000.000,00	100.000.000,00	-
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	60.000.000,00	60.000.000,00	-
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	187.200.000,00	187.200.000,00	-
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	254.916.000,00	254.916.000,00	-
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Pengendalian Program KKBPK	80.000.000,00	80.000.000,00	-
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana	465.000.000,00	465.000.000,00	-
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangsa Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	225.000.000,00	225.000.000,00	-
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Promosi dan KIE Program Bangsa Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	100.000.000,00	100.000.000,00	-
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangsa Kencana sesuai Kearifan Budaya Lokal	27.508.028,00	27.508.028,00	-
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Advokasi Program Bangsa kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	250.000.000,00	250.000.000,00	-
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Penggerakan Kader Institut Masyarakat Pedesaan (IMP)	1.806.600.000,00	1.806.600.000,00	-
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	28.800.000,00	28.800.000,00	-
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	1.993.512.000,00	1.993.512.000,00	-
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	850.947.500,00	846.187.500,00	- 4.760.000,00
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	152.996.000,00	152.996.000,00	-

SKPD	NAMA SUB KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ (BERKURANG)
ANAK PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA				
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi		60.000.000,00	60.000.000,00
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	3.750.000,00	3.750.000,00	-
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas	551.500.000,00	551.500.000,00	-
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)	336.600.000,00	336.600.000,00	-
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	300.000.000,00	300.000.000,00	-
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	1.851.000.000,00	1.851.000.000,00	-
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	2.086.100.000,00	2.086.100.000,00	-
		16.987.802.181,00	16.903.255.277,00	- 84.546.904,00
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	-	-	-
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	87.200.000,00	87.200.000,00	-
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	-	-	-
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota	49.000.000,00	84.000.000,00	35.000.000,00
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	366.290.110,00	390.901.610,00	24.611.500,00
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	90.758.250,00	90.758.250,00	-
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	68.270.400,00	59.058.900,00	- 9.211.500,00
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	65.688.000,00	43.530.000,00	- 22.158.000,00
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	269.357.000,00	302.387.000,00	33.030.000,00
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	Pengawasan Penanaman Modal	95.502.000,00	84.630.000,00	- 10.872.000,00
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	89.746.400,00	89.746.400,00	-
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	15.718.000,00	11.000.000,00	- 4.718.000,00
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.926.837.241,00	2.939.337.241,00	12.500.000,00
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	25.320.000,00	25.320.000,00	-
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	25.000.000,00	26.400.000,00	1.400.000,00
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	-		-
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.958.200,00	5.957.200,00	- 1.000,00
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	43.000.000,00	43.000.000,00	-

SKPD	NAMA SUB KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ (BERKURANG)
SATU PINTU				
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	20.207.000,00	20.207.000,00	-
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	75.815.000,00	58.825.000,00	- 16.990.000,00
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	44.999.800,00	44.999.800,00	-
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3.996.000,00	3.996.000,00	-
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100.000.000,00	116.400.000,00	16.400.000,00
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	-	-
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	52.842.000,00	72.298.000,00	19.456.000,00
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.000.000,00	5.000.000,00	-
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	344.729.222,00	361.115.222,00	16.386.000,00
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	410.293.200,00	364.182.200,00	- 46.111.000,00
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	171.211.000,00	183.389.000,00	12.178.000,00
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	35.181.600,00	372.681.600,00	337.500.000,00
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	25.500.000,00	27.500.000,00	2.000.000,00
		5.513.420.423,00	5.913.820.423,00	400.400.000,00
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	-	330.000.000,00	330.000.000,00
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	300.000.000,00	240.000.000,00	- 60.000.000,00
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	1.630.000.000,00	1.052.449.271,00	- 577.550.729,00
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	767.000.000,00	832.921.692,00	65.921.692,00
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	-	120.000.000,00	120.000.000,00
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	400.000.000,00	365.000.000,00	- 35.000.000,00
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	340.000.000,00	656.000.000,00	316.000.000,00
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	1.503.500.000,00	857.295.493,00	- 646.204.507,00
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	400.000.000,00	480.000.000,00	80.000.000,00
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	29.063.749.600,00	15.333.339.600,00	- 13.730.410.000,00
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	57.383.900.000,00	57.499.534.102,00	115.634.102,00
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	200.000.000,00	200.000.000,00	-
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar	-	1.440.000.000,00	1.440.000.000,00
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	100.000.000,00	-	- 100.000.000,00
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	150.000.000,00	-	- 150.000.000,00
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	100.000.000,00	-	- 100.000.000,00
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Pembangunan Ruang Kelas Baru	520.000.000,00	344.506.000,00	- 175.494.000,00
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	592.000.000,00	553.992.907,00	- 38.007.093,00
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	100.000.000,00	-	- 100.000.000,00
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	200.000.000,00	450.000.000,00	250.000.000,00
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	4.414.079.000,00	7.847.745.019,00	3.433.666.019,00
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	-	299.970.000,00	299.970.000,00
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	1.402.000.000,00	1.161.218.000,00	- 240.782.000,00
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	1.253.500.000,00	4.992.494.820,00	3.738.994.820,00
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	-	89.991.000,00	89.991.000,00
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	525.300.000,00	388.564.000,00	- 136.736.000,00
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium	806.600.000,00	1.722.833.000,00	916.233.000,00
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	373.500.000,00	792.296.727,00	418.796.727,00
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	544.500.000,00	2.180.256.453,00	1.635.756.453,00
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	400.000.000,00	500.000.000,00	100.000.000,00

SKPD	NAMA SUB KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ (BERKURANG)
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	9.258.112.927,00	7.018.618.157,00	- 2.239.494.770,00
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	25.956.700.000,00	27.225.100.000,00	1.268.400.000,00
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	150.000.000,00	250.000.000,00	100.000.000,00
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kepala Sekolah	-	99.834.000,00	99.834.000,00
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	75.000.000,00	-	- 75.000.000,00
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	50.000.000,00	-	- 50.000.000,00
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	100.000.000,00	-	- 100.000.000,00
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	200.000.000,00	250.000.000,00	50.000.000,00
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Pembangunan Ruang Kelas Baru	-	1.140.960.000,00	1.140.960.000,00
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	100.000.000,00	-	- 100.000.000,00
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	1.022.788.000,00	1.223.234.727,00	200.446.727,00
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	1.254.895.000,00	420.975.862,00	- 833.919.138,00
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	430.000.000,00	453.673.000,00	23.673.000,00
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Pengadaan Mebel PAUD	150.000.000,00	150.000.000,00	-
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Pengadaan Perlengkapan PAUD	-	750.000.000,00	750.000.000,00
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	219.000.000,00	545.200.000,00	326.200.000,00
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	790.000.000,00	112.500.000,00	- 677.500.000,00
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	1.478.000.000,00	1.717.000.000,00	239.000.000,00
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	16.174.318.553,00	16.959.612.553,00	785.294.000,00
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD	-	250.000.000,00	250.000.000,00
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	125.000.000,00	-	- 125.000.000,00
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	200.000.000,00	-	- 200.000.000,00
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Pembangunan Ruang Kelas Baru	1.050.000.000,00	446.879.526,00	- 603.120.474,00
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Nonformal/Kesetaraan	500.000.000,00	813.507.000,00	313.507.000,00
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan	307.000.000,00	265.662.085,00	- 41.337.915,00
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	4.235.700.000,00	4.982.500.000,00	746.800.000,00
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	225.000.000,00	150.000.000,00	- 75.000.000,00
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	150.000.000,00	-	- 150.000.000,00
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	75.000.000,00	-	- 75.000.000,00
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	200.000.000,00	200.000.000,00	-
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	300.000.000,00	1.550.000.000,00	1.250.000.000,00
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Pelaksanaan penilaian/penelaahan buku teks muatan lokal Pendidikan Dasar	200.000.000,00	1.200.000.000,00	1.000.000.000,00
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	1.650.000.000,00	1.400.000.000,00	- 250.000.000,00
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	1.100.000.000,00	900.000.000,00	- 200.000.000,00
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	300.000.000,00	232.000.000,00	- 68.000.000,00
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	50.000.000,00	100.000.000,00	50.000.000,00
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.454.400.000,00	1.286.706.000,00	- 167.694.000,00
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	395.685.892.640,00	456.174.978.037,00	60.489.085.397,00
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1.516.470.000,00	1.549.902.000,00	33.432.000,00
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	50.000.000,00	75.000.000,00	25.000.000,00
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	250.000.000,00	250.000.000,00	-
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	15.000.000,00	40.000.000,00	25.000.000,00
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	35.000.000,00	55.000.000,00	20.000.000,00
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	85.000.000,00	185.000.000,00	100.000.000,00
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	25.000.000,00	275.000.000,00	250.000.000,00
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	25.000.000,00	49.626.600,00	24.626.600,00
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	300.000.000,00	1.035.320.590,00	735.320.590,00
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	150.000.000,00	150.000.000,00	-
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	20.000.000,00	20.000.000,00	-
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	11.821.000,00	11.821.000,00	-
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	120.000.000,00	120.000.000,00	-
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	100.828.000,00	-	- 100.828.000,00
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.000.000,00	5.000.000,00	-
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	395.600.000,00	395.600.000,00	-
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	234.580.000,00	234.580.000,00	-
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.492.260.000,00	1.086.328.000,00	- 405.932.000,00
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	500.073.000,00	654.363.000,00	154.290.000,00
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	26.000.000,00	141.000.000,00	115.000.000,00

SKPD	NAMA SUB KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ (BERKURANG)
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	350.000.000,00	350.000.000,00	-
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	100.000.000,00	425.359.200,00	325.359.200,00
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	100.000.000,00	100.000.000,00	-
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	330.000.000,00	330.000.000,00	-
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	865.000.000,00	1.375.000.000,00	510.000.000,00
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Pelindungan Cagar Budaya	275.000.000,00	275.000.000,00	-
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Pengembangan Cagar Budaya	100.000.000,00	125.000.000,00	25.000.000,00
		576.164.067.720,00	638.313.249.421,00	62.149.181.701,00
DINAS PERHUBUNGAN	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	300.000.000,00	298.500.000,00	- 1.500.000,00
DINAS PERHUBUNGAN	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	1.336.160.000,00	825.160.000,00	- 511.000.000,00
DINAS PERHUBUNGAN	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	1.669.134.000,00	1.744.419.000,00	75.285.000,00
DINAS PERHUBUNGAN	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	1.801.940.000,00	1.659.815.000,00	- 142.125.000,00
DINAS PERHUBUNGAN	Pengawasan Operasional Terminal Penumpang Tipe C	292.294.000,00	309.794.000,00	17.500.000,00
DINAS PERHUBUNGAN	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	392.640.600,00	400.480.600,00	7.840.000,00
DINAS PERHUBUNGAN	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	13.048.600,00	10.048.600,00	- 3.000.000,00
DINAS PERHUBUNGAN	Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor	193.943.000,00	195.247.000,00	1.304.000,00
DINAS PERHUBUNGAN	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	125.000.000,00	62.500.000,00	- 62.500.000,00
DINAS PERHUBUNGAN	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	141.605.000,00	137.605.000,00	- 4.000.000,00
DINAS PERHUBUNGAN	Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	200.000.000,00	200.000.000,00	-
DINAS PERHUBUNGAN	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	0,00	102.125.000,00	102.125.000,00
DINAS PERHUBUNGAN	Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	16.600.000,00	16.600.000,00	-
DINAS PERHUBUNGAN	Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin	48.500.000,00	48.500.000,00	-
DINAS PERHUBUNGAN	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal	245.906.000,00	245.906.000,00	-
DINAS PERHUBUNGAN	Perumusan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten/Kota	83.628.850,00	83.023.850,00	- 605.000,00
DINAS PERHUBUNGAN	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	10.699.400,00	7.549.400,00	- 3.150.000,00
DINAS PERHUBUNGAN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.007.044.961,00	4.996.959.961,00	- 10.085.000,00
DINAS PERHUBUNGAN	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	33.060.000,00	33.060.000,00	-
DINAS PERHUBUNGAN	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	138.225.000,00	132.215.000,00	- 6.010.000,00
DINAS PERHUBUNGAN	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	19.702.900,00	19.702.900,00	-
DINAS PERHUBUNGAN	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	66.476.900,00	66.476.900,00	-
DINAS PERHUBUNGAN	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	29.000.000,00	29.000.000,00	-
DINAS PERHUBUNGAN	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	200.000.000,00	200.000.000,00	-
DINAS PERHUBUNGAN	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	4.200.000,00	4.200.000,00	-
DINAS PERHUBUNGAN	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	115.628.201,00	115.673.801,00	45.600,00
DINAS PERHUBUNGAN	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	46.500.000,00	176.989.400,00	130.489.400,00
DINAS PERHUBUNGAN	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.000.000,00	4.000.000,00	-
DINAS PERHUBUNGAN	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	22.099.120.000,00	22.107.198.536,00	8.078.536,00
DINAS PERHUBUNGAN	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	547.080.400,00	547.077.400,00	- 3.000,00
DINAS PERHUBUNGAN	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	547.360.000,00	512.200.000,00	- 35.160.000,00
DINAS PERHUBUNGAN	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	37.200.000,00	37.200.000,00	-
DINAS PERHUBUNGAN	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	137.599.997,00	251.100.000,00	113.500.003,00
DINAS PERHUBUNGAN	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	50.000.000,00	86.303.000,00	36.303.000,00
		35.953.297.809,00	35.666.630.348,00	- 286.667.461,00
DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH	Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	25.000.000,00	25.000.000,00
DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH	Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota			-
DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH	Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	188.827.950,00	188.827.950,00	-
DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH	Penilaian Kesehatan Koperasi Meliputi Tata Kelola, Profil Risiko, Kinerja Keuangan, dan Permodalan	20.375.700,00	20.375.700,00	-
DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	209.265.650,00	209.265.650,00	-
DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH	Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	-	40.000.000,00	40.000.000,00
DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOPERASI DAN	Pemberdayaan Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota			-

SKPD	NAMA SUB KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ (BERKURANG)
USAHA KECIL DAN MENENGAH				
DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH	Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	208.613.400,00	208.613.400,00	-
DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH	Pengembangan Usaha Mikro	29.624.300,00	29.624.300,00	-
DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10.200.000,00	10.200.000,00	-
DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	7.129.310.728,00	6.713.061.629,00	- 416.249.099,00
DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD			-
DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	10.000.000,00	10.000.000,00	-
DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD	28.740.000,00	28.740.000,00	-
DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	25.000.000,00	46.300.000,00	21.300.000,00
DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	35.000.100,00	35.000.100,00	-
DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	75.000.000,00	75.000.000,00	-
DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	42.000.000,00	58.180.000,00	16.180.000,00
DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	100.000.000,00	106.210.000,00	6.210.000,00
DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	5.400.000,00	5.400.000,00	-
DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	151.916.483,00	167.872.483,00	15.956.000,00
DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	13.149.900,00	14.809.900,00	1.660.000,00
DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			-
DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.500.000,00	5.500.000,00	-
DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	400.080.000,00	442.200.000,00	42.120.000,00
DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	97.601.500,00	97.601.500,00	-
DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	42.000.000,00	52.500.000,00	10.500.000,00
DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	196.690.000,00	196.690.000,00	-
DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH	Pemeliharaan Mebel			-
DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	15.000.000,00	25.000.000,00	10.000.000,00
DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	22.400.000,00	22.400.000,00	-
DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	1.150.000.000,00	1.741.700.000,00	591.700.000,00
DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	2.668.819.680,00	2.774.073.148,00	105.253.468,00
DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH	Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	34.700.000,00	34.700.000,00	-
DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	43.080.000,00	43.080.000,00	-
DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	33.730.000,00	33.730.000,00	-
DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOPERASI DAN	Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan	67.305.000,00	67.305.000,00	-

SKPD	NAMA SUB KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ (BERKURANG)
USAHA KECIL DAN MENENGAH				
DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	87.020.000,00	87.020.000,00	-
DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	16.631.500,00	16.631.500,00	-
DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	70.000.000,00	15.000.000,00	- 55.000.000,00
DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	3.042.500.000,00	6.784.500.000,00	3.742.000.000,00
DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	300.000.000,00	380.000.000,00	80.000.000,00
DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	50.000.000,00	50.000.000,00	-
		16.625.481.891,00	20.862.112.260,00	4.236.630.369,00
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	51.989.300,00	76.989.300,00	25.000.000,00
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	45.000.000,00	20.000.000,00	- 25.000.000,00
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota	4.425.000,00	4.425.000,00	-
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	Pengembangan Bahan Pustaka	102.647.229,00	102.647.229,00	-
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	20.306.200,00	20.306.200,00	-
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	5.575.000,00	5.575.000,00	-
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	167.040.000,00	167.040.000,00	-
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	96.044.450,00	96.044.450,00	-
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	22.354.400,00	22.354.400,00	-
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	Pemilihan Duta Baca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	7.690.000,00	7.690.000,00	-
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	9.388.867,00	9.388.867,00	-
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.567.389.997,00	3.461.854.020,00	- 105.535.977,00
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	19.500.000,00	19.500.000,00	-
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		5.187.663,00	5.187.663,00
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	35.575.950,00	42.097.550,00	6.521.600,00
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	27.797.500,00	28.797.500,00	1.000.000,00
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	7.440.000,00	7.440.000,00	-
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	7.000.000,00	7.000.000,00	-
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	42.000.000,00	87.075.900,00	45.075.900,00
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	10.080.000,00	10.080.000,00	-
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.000.000,00	3.000.000,00	-
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	140.570.400,00	139.570.400,00	- 1.000.000,00
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	260.744.800,00	233.670.300,00	- 27.074.500,00
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	104.410.000,00	143.810.000,00	39.400.000,00
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	Pemeliharaan Mebel	998.850,00	2.198.850,00	1.200.000,00
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	5.000.000,00	5.000.000,00	-
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	22.000.000,00	22.000.000,00	-
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	6.830.000,00	8.707.000,00	1.877.000,00
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	2.000.000,00	-	- 2.000.000,00
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	93.846.630,00	118.846.630,00	25.000.000,00
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	30.202.220,00	30.202.220,00	-
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	138.901.500,00	138.901.500,00	-
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN	16.386.000,00	16.386.000,00	-
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	36.670.000,00	36.670.000,00	-
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	2.749.500,00	2.749.500,00	-
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Statis Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	2.173.900,00	2.173.900,00	-
		5.115.727.693,00	5.105.379.379,00	- 10.348.314,00
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Identifikasi Perumahan di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	65.000.000,00	61.000.000,00	- 4.000.000,00
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	130.000.000,00	119.000.000,00	- 11.000.000,00
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	87.500.000,00	37.500.000,00	- 50.000.000,00

SKPD	NAMA SUB KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ (BERKURANG)
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Pembangunan Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Kabupaten/Kota	-	-	-
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	3.177.500.000,00	3.526.500.000,00	349.000.000,00
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	5.346.490.280,00	5.817.623.640,00	471.133.360,00
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Pendataan dan Verifikasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Kumuh	155.000.000,00	135.500.000,00	- 19.500.000,00
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	3.670.842.500,00	3.869.928.700,00	199.086.200,00
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	300.000.000,00	248.636.280,00	- 51.363.720,00
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	11.029.000,00	12.462.000,00	1.433.000,00
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.720.432.692,00	3.484.911.701,00	- 235.520.991,00
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	332.208.500,00	291.299.500,00	- 40.909.000,00
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	16.845.000,00	31.245.000,00	14.400.000,00
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	75.000.000	75.000.000,00	-
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	14.300.000	14.300.000,00	-
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	29.155.500	36.739.200,00	7.583.700,00
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	46.302.000	52.282.000,00	5.980.000,00
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	10.500.000	10.500.000,00	-
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	6.000.000,00	6.000.000,00	-
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	85.250.000,00	86.030.280,00	780.280,00
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	55.000.000,00	50.000.000,00	- 5.000.000,00
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	80.000.000,00	159.171.000,00	79.171.000,00
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	109.057.720,00	183.344.160,00	74.286.440,00
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	88.393.600,00	90.774.200,00	2.380.600,00
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6.600.000,00	6.600.000,00	-
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	80.000.000,00	76.000.000,00	- 4.000.000,00
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	17.500.000,00	17.500.000,00	-
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	13.650.100,00	13.650.100,00	-
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	276.565.000,00	276.565.000,00	-
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	15.000.000,00	25.000.000,00	10.000.000,00
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	15.000.000,00	15.000.000,00	-
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	30.000.000,00	30.000.000,00	-
		18.066.121.892,00	18.860.062.761,00	793.940.869,00

SKPD	NAMA SUB KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ (BERKURANG)
DINAS SOSIAL	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	20.771.000	20.771.000,00	-
DINAS SOSIAL	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	204.950.000	204.950.000,00	-
DINAS SOSIAL	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	201.233.400	201.233.400,00	-
DINAS SOSIAL	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	54.460.000	54.460.000,00	-
DINAS SOSIAL	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	86.600.000	86.600.000,00	-
DINAS SOSIAL	Facilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	3.500.000	3.500.000,00	-
DINAS SOSIAL	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	1.066.000	1.066.000,00	-
DINAS SOSIAL	Penyediaan Alat Bantu	75.000.000	75.000.000,00	-
DINAS SOSIAL	Facilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	1.250.300	1.250.300,00	-
DINAS SOSIAL	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	100.000.000	100.000.000,00	-
DINAS SOSIAL	Pemberian Layanan Rujukan	42.660.000	42.660.000,00	-
DINAS SOSIAL	Penjangkauan Anak-Anak Terlantar	1.572.000.000	1.572.000.000,00	-
DINAS SOSIAL	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	106.423.700	106.423.700,00	-
DINAS SOSIAL	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	38.976.700	38.976.700,00	-
DINAS SOSIAL	Facilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	2.358.840.000	2.418.840.000,00	60.000.000,00
DINAS SOSIAL	Facilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	101.950.000	101.950.000,00	-
DINAS SOSIAL	Penyediaan Sandang	5.250.000	5.250.000,00	-
DINAS SOSIAL	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	551.565.100	551.565.100,00	-
DINAS SOSIAL	Pelayanan Dukungan Psikososial	28.275.000	28.275.000,00	-
DINAS SOSIAL	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	37.985.000	37.985.000,00	-
DINAS SOSIAL	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	68.780.200	68.780.200,00	-
DINAS SOSIAL	Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	19.200.000	19.200.000,00	-
DINAS SOSIAL	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	16.184.000	16.184.000,00	-
DINAS SOSIAL	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.423.885.567	2.288.748.648,00	- 135.136.919,00
DINAS SOSIAL	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	298.501.850	298.501.850,00	-
DINAS SOSIAL	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	15.000.000	15.000.000,00	-
DINAS SOSIAL	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	7.953.000	17.953.000,00	10.000.000,00
DINAS SOSIAL	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	28.725.750	28.725.750,00	-
DINAS SOSIAL	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	46.640.000	50.740.000,00	4.100.000,00
DINAS SOSIAL	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	9.313.500	9.313.500,00	-
DINAS SOSIAL	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	4.800.000	690.000,00	- 4.110.000,00
DINAS SOSIAL	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	103.570.000	103.570.000,00	-
DINAS SOSIAL	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	97.256.460	97.256.460,00	-
DINAS SOSIAL	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	8.500.000	8.500.000,00	-
DINAS SOSIAL	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	90.950.000	90.950.000,00	-
DINAS SOSIAL	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	97.398.000	97.398.000,00	-
DINAS SOSIAL	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	161.111.700	161.110.100,00	- 1.600,00
DINAS SOSIAL	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	23.950.000	19.600.000,00	- 4.350.000,00
DINAS SOSIAL	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	313.499.823	408.545.013,00	95.045.190,00
DINAS SOSIAL	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	33.323.200	27.684.800,00	- 5.638.400,00
		9.461.299.250,00	9.481.207.521,00	19.908.271,00
INSPEKTORAT DAERAH	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	150.660.000,00	273.240.000,00	122.580.000,00
INSPEKTORAT DAERAH	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	75.330.000,00	273.240.000,00	197.910.000,00
INSPEKTORAT DAERAH	Reviu Laporan Kinerja	75.330.000,00	35.000.000,00	- 40.330.000,00
INSPEKTORAT DAERAH	Reviu Laporan Keuangan	150.660.000,00	33.280.000,00	- 117.380.000,00
INSPEKTORAT DAERAH	Pengawasan Desa	325.610.000,00	281.309.999,00	- 44.300.001,00
INSPEKTORAT DAERAH	Kerja Sama Pengawasan Internal	298.576.000,00	298.576.000,00	-
INSPEKTORAT DAERAH	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	658.884.100,00	824.618.750,00	165.734.650,00
INSPEKTORAT DAERAH	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	66.579.450,00	66.579.450,00	-
INSPEKTORAT DAERAH	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	337.950.000,00	278.670.000,00	- 59.280.000,00
INSPEKTORAT DAERAH	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	120.830.000,00	150.283.800,00	29.453.800,00
INSPEKTORAT DAERAH	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	112.260.000,00	138.344.000,00	26.084.000,00
INSPEKTORAT DAERAH	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	42.071.950,00	42.071.950,00	-
INSPEKTORAT DAERAH	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	396.870.000,00	81.165.000,00	- 315.705.000,00
INSPEKTORAT DAERAH	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	426.568.250,00	422.137.750,00	- 4.430.500,00
INSPEKTORAT DAERAH	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	25.000.000,00	25.000.000,00	-

SKPD	NAMA SUB KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ (BERKURANG)
INSPEKTORAT DAERAH	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	37.260.000,00	37.260.000,00	-
INSPEKTORAT DAERAH	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6.875.109.950,00	6.336.258.500,00	- 538.851.450,00
INSPEKTORAT DAERAH	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	52.600.000,00	13.300.000,00	- 39.300.000,00
INSPEKTORAT DAERAH	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	55.560.000	41.560.000,00	- 14.000.000,00
INSPEKTORAT DAERAH	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	130.975.000,00	107.920.000,00	- 23.055.000,00
INSPEKTORAT DAERAH	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	250.000.000,00	315.787.500,00	65.787.500,00
INSPEKTORAT DAERAH	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	250.000.000,00	250.000.000,00	-
INSPEKTORAT DAERAH	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	15.146.900,00	33.255.400,00	18.108.500,00
INSPEKTORAT DAERAH	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	149.987.500,00	196.645.700,00	46.658.200,00
INSPEKTORAT DAERAH	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	130.000.000,00	156.650.000,00	26.650.000,00
INSPEKTORAT DAERAH	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	123.660.800,00	127.037.300,00	3.376.500,00
INSPEKTORAT DAERAH	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	5.000.000,00	1.200.000,00	- 3.800.000,00
INSPEKTORAT DAERAH	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	197.110.000,00	288.860.000,00	91.750.000,00
INSPEKTORAT DAERAH	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	233.123.200,00	318.123.200,00	85.000.000,00
INSPEKTORAT DAERAH	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.000.000,00	6.500.000,00	2.500.000,00
INSPEKTORAT DAERAH	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	150.000.000,00	188.817.351,00	38.817.351,00
INSPEKTORAT DAERAH	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	124.210.400,00	114.010.400,00	- 10.200.000,00
INSPEKTORAT DAERAH	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	185.000.000,00	160.500.000,00	- 24.500.000,00
INSPEKTORAT DAERAH	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	301.179.000,00	213.609.000,00	- 87.570.000,00
INSPEKTORAT DAERAH	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	228.700.000,00	227.000.000,00	- 1.700.000,00
INSPEKTORAT DAERAH	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	84.149.590,00	199.289.590,00	115.140.000,00
		12.845.952.090,00	12.557.100.640,00	- 288.851.450,00
KECAMATAN BANDAR	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	14.128.000	13.600.000,00	- 528.000,00
KECAMATAN BANDAR	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	5.000.000	5.000.000,00	-
KECAMATAN BANDAR	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	6.000.000	6.000.000,00	-
KECAMATAN BANDAR	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	6.000.000	6.000.000,00	-
KECAMATAN BANDAR	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	52.200.000	52.200.000,00	-
KECAMATAN BANDAR	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.928.826.514	1.857.486.457,00	- 71.340.057,00
KECAMATAN BANDAR	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	24.300.000	24.300.000,00	-
KECAMATAN BANDAR	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	9.800.000	9.800.000,00	-
KECAMATAN BANDAR	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	27.000.000	25.200.000,00	- 1.800.000,00
KECAMATAN BANDAR	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	14.050.000	14.050.000,00	-
KECAMATAN BANDAR	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	7.499.000	7.499.000,00	-
KECAMATAN BANDAR	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	36.406.400	126.963.400,00	90.557.000,00
KECAMATAN BANDAR	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	15.600.000	15.600.000,00	-
KECAMATAN BANDAR	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	6.000.000	6.000.000,00	-
KECAMATAN BANDAR	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2.500.000	2.500.000,00	-
KECAMATAN BANDAR	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	14.400.000	19.400.000,00	5.000.000,00
KECAMATAN BANDAR	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.000.000	2.000.000,00	-
KECAMATAN BANDAR	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	15.000.000	13.500.000,00	- 1.500.000,00
KECAMATAN BANDAR	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	31.600.000	23.900.000,00	- 7.700.000,00
KECAMATAN BANDAR	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	48.658.000	48.658.000,00	-
KECAMATAN BANDAR	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	271.628.000	185.799.000,00	- 85.829.000,00
KECAMATAN BANDAR	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	3.900.000	3.900.000,00	-
		2.542.495.914,00	2.469.355.857,00	- 73.140.057,00
KECAMATAN BANYUPUTIH	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	18.182.500,00	18.182.500,00	-
KECAMATAN BANYUPUTIH	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	5.000.000,00	5.000.000,00	-
KECAMATAN BANYUPUTIH	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	3.890.000,00	3.890.000,00	-
KECAMATAN BANYUPUTIH	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	4.765.000,00	4.765.000,00	-
KECAMATAN BANYUPUTIH	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	3.975.000,00	3.975.000,00	-
KECAMATAN BANYUPUTIH	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.434.285.359,00	1.360.447.287,00	- 73.838.072,00
KECAMATAN BANYUPUTIH	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	87.676.000,00	67.276.000,00	- 20.400.000,00
KECAMATAN BANYUPUTIH	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	20.700.000,00	20.700.000,00	-
KECAMATAN BANYUPUTIH	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	20.719.000,00	20.719.000,00	-
KECAMATAN BANYUPUTIH	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	4.800.000,00	4.800.000,00	-
KECAMATAN BANYUPUTIH	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	6.750.000,00	6.750.000,00	-

SKPD	NAMA SUB KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ (BERKURANG)
KECAMATAN BANYUPUTIH	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	27.000.000,00	25.200.000,00	- 1.800.000,00
KECAMATAN BANYUPUTIH	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	2.954.300,00	2.954.300,00	-
KECAMATAN BANYUPUTIH	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	8.611.000,00	8.611.000,00	-
KECAMATAN BANYUPUTIH	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	9.106.000,00	9.106.000,00	-
KECAMATAN BANYUPUTIH	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	15.950.000,00	15.950.000,00	-
KECAMATAN BANYUPUTIH	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	3.600.000,00	3.600.000,00	-
KECAMATAN BANYUPUTIH	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3.600.000,00	3.600.000,00	-
KECAMATAN BANYUPUTIH	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	11.030.000,00	11.030.000,00	-
KECAMATAN BANYUPUTIH	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	4.758.400,00	4.758.400,00	-
KECAMATAN BANYUPUTIH	Pengadaan Mebel	33.196.900,00	33.196.900,00	-
KECAMATAN BANYUPUTIH	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	36.293.200,00	36.293.200,00	-
KECAMATAN BANYUPUTIH	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.500.000,00	2.500.000,00	-
KECAMATAN BANYUPUTIH	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	25.000.000,00	25.000.000,00	-
KECAMATAN BANYUPUTIH	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	20.740.300,00	20.740.300,00	-
KECAMATAN BANYUPUTIH	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	22.980.000,00	22.980.000,00	-
KECAMATAN BANYUPUTIH	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	7.500.000,00	7.500.000,00	-
KECAMATAN BANYUPUTIH	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	16.873.760,00	112.396.832,00	95.523.072,00
KECAMATAN BANYUPUTIH	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	208.000.000,00	206.715.000,00	- 1.285.000,00
		2.070.436.719,00	2.068.636.719,00	- 1.800.000,00
KECAMATAN BATANG	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	22.483.400,00	22.483.400,00	-
KECAMATAN BATANG	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	5.650.000,00	5.650.000,00	-
KECAMATAN BATANG	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	63.462.750,00	63.462.750,00	-
KECAMATAN BATANG	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	1.260.000.000,00	1.260.000.000,00	-
KECAMATAN BATANG	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1.512.000.000,00	1.512.000.000,00	-
KECAMATAN BATANG	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	30.000.000,00	35.000.000,00	5.000.000,00
KECAMATAN BATANG	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	10.423.000,00	10.423.000,00	-
KECAMATAN BATANG	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	4.070.000,00	4.070.000,00	-
KECAMATAN BATANG	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	5.000.000,00	5.000.000,00	-
KECAMATAN BATANG	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	11.520.000,00	11.520.000,00	-
KECAMATAN BATANG	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	7.603.500,00	7.603.500,00	-
KECAMATAN BATANG	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	8.556.613.298,00	8.000.340.549,00	- 556.272.749,00
KECAMATAN BATANG	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	839.601.300,00	717.536.800,00	- 122.064.500,00
KECAMATAN BATANG	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	27.000.000,00	25.200.000,00	- 1.800.000,00
KECAMATAN BATANG	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	30.458.300,00	30.458.300,00	-
KECAMATAN BATANG	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	69.017.550,00	76.267.550,00	7.250.000,00
KECAMATAN BATANG	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	89.640.000,00	107.510.000,00	17.870.000,00
KECAMATAN BATANG	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	58.948.000,00	72.085.400,00	13.137.400,00
KECAMATAN BATANG	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	13.980.000,00	13.980.000,00	-
KECAMATAN BATANG	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	10.000.000,00	13.000.000,00	3.000.000,00
KECAMATAN BATANG	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	143.954.800,00	158.664.800,00	14.710.000,00
KECAMATAN BATANG	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	8.287.500,00	8.287.500,00	-
KECAMATAN BATANG	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	138.440.350,00	141.540.350,00	3.100.000,00
KECAMATAN BATANG	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	430.020.160,00	425.020.160,00	- 5.000.000,00
KECAMATAN BATANG	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	169.909.750,00	144.273.350,00	- 25.636.400,00
KECAMATAN BATANG	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	48.877.600,00	132.511.100,00	83.633.500,00
KECAMATAN BATANG	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	31.407.800,00	36.407.800,00	5.000.000,00
		13.598.369.058,00	13.040.296.309,00	- 558.072.749,00
KECAMATAN BAWANG	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	21.505.000,00	21.505.000,00	-
KECAMATAN BAWANG	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	5.480.000,00	17.280.000,00	11.800.000,00
KECAMATAN BAWANG	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	5.000.000,00	5.000.000,00	-
KECAMATAN BAWANG	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	22.090.300,00	10.000.000,00	- 12.090.300,00
KECAMATAN BAWANG	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	15.000.000,00	15.000.000,00	-
KECAMATAN BAWANG	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa			
KECAMATAN BAWANG	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.799.839.264,00	1.503.292.049,00	- 296.547.215,00
KECAMATAN BAWANG	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	45.060.000,00	45.060.000,00	-

SKPD	NAMA SUB KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ (BERKURANG)
KECAMATAN BAWANG	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	30.000.000,00	30.000.000,00	-
KECAMATAN BAWANG	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	4.800.000,00	4.800.000,00	-
KECAMATAN BAWANG	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	9.350.000,00	9.350.000,00	-
KECAMATAN BAWANG	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	54.000.000,00	50.400.000,00	- 3.600.000,00
KECAMATAN BAWANG	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.080.600,00	5.080.600,00	-
KECAMATAN BAWANG	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	8.582.800,00	17.117.800,00	8.535.000,00
KECAMATAN BAWANG	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	30.000.000,00	30.000.000,00	-
KECAMATAN BAWANG	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	10.096.200,00	10.096.200,00	-
KECAMATAN BAWANG	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.440.000,00	1.440.000,00	-
KECAMATAN BAWANG	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	32.282.712,00	32.200.000,00	- 82.712,00
KECAMATAN BAWANG	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	5.000.000,00	5.000.000,00	-
KECAMATAN BAWANG	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	20.250.000,00	18.800.000,00	- 1.450.000,00
KECAMATAN BAWANG	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.100.000,00	1.100.000,00	-
KECAMATAN BAWANG	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	8.800.000,00	8.800.000,00	-
KECAMATAN BAWANG	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	26.094.300,00	67.639.588,00	41.545.288,00
KECAMATAN BAWANG	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	2.000.000,00	5.000.000,00	3.000.000,00
KECAMATAN BAWANG	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	250.402.276,00	229.145.000,00	- 21.257.276,00
		2.413.253.452,00	2.143.106.237,00	- 270.147.215,00
KECAMATAN BLADO	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	15.340.000,00	15.340.000,00	-
KECAMATAN BLADO	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	5.000.000,00	5.000.000,00	-
KECAMATAN BLADO	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	5.505.000,00	5.505.000,00	-
KECAMATAN BLADO	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	6.280.000,00	6.280.000,00	-
KECAMATAN BLADO	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	1.500.000,00	1.500.000,00	-
KECAMATAN BLADO	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.382.198.668,00	1.138.425.196,00	- 243.773.472,00
KECAMATAN BLADO	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	11.040.000,00	11.040.000,00	-
KECAMATAN BLADO	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	21.738.300,00	21.738.300,00	-
KECAMATAN BLADO	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	4.800.000,00	4.800.000,00	-
KECAMATAN BLADO	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	27.000.000,00	25.200.000,00	- 1.800.000,00
KECAMATAN BLADO	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	5.000.000,00	5.000.000,00	-
KECAMATAN BLADO	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	9.473.700,00	9.473.700,00	-
KECAMATAN BLADO	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	27.001.000,00	27.001.000,00	-
KECAMATAN BLADO	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	24.750.000,00	31.350.000,00	6.600.000,00
KECAMATAN BLADO	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	14.251.200,00	13.801.200,00	- 450.000,00
KECAMATAN BLADO	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2.580.000,00	2.580.000,00	-
KECAMATAN BLADO	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	23.750.000,00	22.210.000,00	- 1.540.000,00
KECAMATAN BLADO	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	3.150.000,00	3.150.000,00	-
KECAMATAN BLADO	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	30.000.000,00	30.000.000,00	-
KECAMATAN BLADO	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	5.000.000,00	5.000.000,00	-
KECAMATAN BLADO	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.000.000,00	5.000.000,00	-
KECAMATAN BLADO	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	13.090.000,00	9.000.000,00	- 4.090.000,00
KECAMATAN BLADO	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	68.624.400,00	68.624.400,00	-
KECAMATAN BLADO	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	38.876.400,00	38.356.400,00	- 520.000,00
KECAMATAN BLADO	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	9.500.000,00	9.500.000,00	-
KECAMATAN BLADO	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	200.000.000,00	200.000.000,00	-
KECAMATAN BLADO	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	-	-
		1.960.448.668,00	1.714.875.196,00	- 245.573.472,00
KECAMATAN GRINGSING	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	15.395.000	15.395.000,00	-
KECAMATAN GRINGSING	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	-	-	-
KECAMATAN GRINGSING	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	5.000.000	5.000.000,00	-
KECAMATAN GRINGSING	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	25.000.000	25.000.000,00	-
KECAMATAN GRINGSING	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	-	-	-
KECAMATAN GRINGSING	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	5.000.000	5.000.000,00	-
KECAMATAN GRINGSING	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	-	-	-
KECAMATAN GRINGSING	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	5.000.000	5.000.000,00	-
KECAMATAN GRINGSING	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	-	-	-

SKPD	NAMA SUB KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ (BERKURANG)
KECAMATAN GRINGSING	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	-	-	-
KECAMATAN GRINGSING	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	884.943.716	1.207.755.120,00	322.811.404,00
KECAMATAN GRINGSING	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	17.100.000	17.100.000,00	-
KECAMATAN GRINGSING	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	-	-	-
KECAMATAN GRINGSING	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	4.800.000	4.800.000,00	-
KECAMATAN GRINGSING	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	-	-	-
KECAMATAN GRINGSING	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	27.000.000	25.200.000,00	- 1.800.000,00
KECAMATAN GRINGSING	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	9.534.000	9.534.000,00	-
KECAMATAN GRINGSING	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	15.155.100	15.155.100,00	-
KECAMATAN GRINGSING	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	6.634.448	6.164.048,00	- 470.400,00
KECAMATAN GRINGSING	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	24.000.000	24.000.000,00	-
KECAMATAN GRINGSING	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	-	-	-
KECAMATAN GRINGSING	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2.340.000	2.340.000,00	-
KECAMATAN GRINGSING	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	17.000.000	17.000.000,00	-
KECAMATAN GRINGSING	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	-	-	-
KECAMATAN GRINGSING	Pengadaan Mebel	16.146.500	16.146.500,00	-
KECAMATAN GRINGSING	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	21.800.000	22.670.400,00	870.400,00
KECAMATAN GRINGSING	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	21.000.000	20.600.000,00	- 400.000,00
KECAMATAN GRINGSING	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.500.000	2.500.000,00	-
KECAMATAN GRINGSING	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	42.280.000	42.280.000,00	-
KECAMATAN GRINGSING	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	84.000.000	84.000.000,00	-
KECAMATAN GRINGSING	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	26.120.000	26.120.000,00	-
KECAMATAN GRINGSING	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	8.000.000	8.000.000,00	-
KECAMATAN GRINGSING	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	17.400.000	17.400.000,00	-
		1.303.148.764,00	1.624.160.168,00	321.011.404,00
KECAMATAN KANDEMAN	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	19.408.000,00	19.408.000,00	-
KECAMATAN KANDEMAN	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	4.999.800,00	4.999.800,00	-
KECAMATAN KANDEMAN	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	-	600.000,00	600.000,00
KECAMATAN KANDEMAN	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	-	700.000,00	700.000,00
KECAMATAN KANDEMAN	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	-	350.000,00	350.000,00
KECAMATAN KANDEMAN	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	-	350.000,00	350.000,00
KECAMATAN KANDEMAN	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum			
KECAMATAN KANDEMAN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.411.323.191,00	1.197.435.605,00	- 213.887.586,00
KECAMATAN KANDEMAN	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	14.240.000,00	14.240.000,00	-
KECAMATAN KANDEMAN	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	15.000.000,00	15.000.000,00	-
KECAMATAN KANDEMAN	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	4.800.000,00	4.800.000,00	-
KECAMATAN KANDEMAN	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	4.448.500,00	4.448.500,00	-
KECAMATAN KANDEMAN	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	27.000.000,00	25.200.000,00	- 1.800.000,00
KECAMATAN KANDEMAN	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.301.000,00	5.301.000,00	-
KECAMATAN KANDEMAN	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	15.579.800,00	15.579.800,00	-
KECAMATAN KANDEMAN	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	18.907.000,00	18.907.000,00	-
KECAMATAN KANDEMAN	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	8.255.000,00	8.255.000,00	-
KECAMATAN KANDEMAN	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2.400.000,00	2.400.000,00	-
KECAMATAN KANDEMAN	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	7.958.600,00	7.958.600,00	-
KECAMATAN KANDEMAN	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	6.100.500,00	6.100.500,00	-
KECAMATAN KANDEMAN	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			
KECAMATAN KANDEMAN	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.000.000,00	3.000.000,00	-
KECAMATAN KANDEMAN	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	26.650.000,00	39.250.000,00	12.600.000,00
KECAMATAN KANDEMAN	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	33.637.100,00	33.637.100,00	-
KECAMATAN KANDEMAN	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	34.451.449,00	34.451.449,00	-
KECAMATAN KANDEMAN	Pemeliharaan Mebel	2.000.000,00	2.000.000,00	-
KECAMATAN KANDEMAN	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	208.233.828,00	208.233.828,00	-
KECAMATAN KANDEMAN	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	2.500.000,00	2.500.000,00	-
		1.876.193.768,00	1.675.106.182,00	- 201.087.586,00
KECAMATAN LIMPUNG	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	18.177.400	18.177.400,00	-
KECAMATAN LIMPUNG	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	5.000.000	5.000.000,00	-

SKPD	NAMA SUB KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ (BERKURANG)
KECAMATAN LIMPUNG	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	5.000.000	5.000.000,00	-
KECAMATAN LIMPUNG	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	5.775.000	5.775.000,00	-
KECAMATAN LIMPUNG	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	13.812.500	13.812.500,00	-
KECAMATAN LIMPUNG	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.494.810.455	1.494.810.455,00	-
KECAMATAN LIMPUNG	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	18.300.000	18.300.000,00	-
KECAMATAN LIMPUNG	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	22.800.000	22.800.000,00	-
KECAMATAN LIMPUNG	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	4.800.000	4.800.000,00	-
KECAMATAN LIMPUNG	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	6.750.000	6.750.000,00	-
KECAMATAN LIMPUNG	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	27.000.000	25.200.000,00	- 1.800.000,00
KECAMATAN LIMPUNG	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.539.000	5.539.000,00	-
KECAMATAN LIMPUNG	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	17.091.000	17.091.000,00	-
KECAMATAN LIMPUNG	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	9.678.600	9.678.600,00	-
KECAMATAN LIMPUNG	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2.100.000	2.100.000,00	-
KECAMATAN LIMPUNG	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	21.991.500	21.991.500,00	-
KECAMATAN LIMPUNG	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	5.000.000	5.000.000,00	-
KECAMATAN LIMPUNG	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	27.172.000	27.172.000,00	-
KECAMATAN LIMPUNG	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.375.000	3.375.000,00	-
KECAMATAN LIMPUNG	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	20.245.000	20.245.000,00	-
KECAMATAN LIMPUNG	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	80.169.100	80.169.100,00	-
KECAMATAN LIMPUNG	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	60.834.320	60.834.320,00	-
KECAMATAN LIMPUNG	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	41.990.000	41.990.000,00	-
KECAMATAN LIMPUNG	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	2.500.000	2.500.000,00	-
KECAMATAN LIMPUNG	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	190.000.000	190.000.000,00	-
KECAMATAN LIMPUNG	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	2.590.300	2.590.300,00	-
		2.112.501.175,00	2.110.701.175,00	- 1.800.000,00
KECAMATAN PEALUNGAN	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	11.337.200,00	11.337.200,00	-
KECAMATAN PEALUNGAN	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1.358.000,00	1.358.000,00	-
KECAMATAN PEALUNGAN	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	5.000.000,00	5.000.000,00	-
KECAMATAN PEALUNGAN	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	5.000.000,00	5.000.000,00	-
KECAMATAN PEALUNGAN	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	5.000.000,00	5.000.000,00	-
KECAMATAN PEALUNGAN	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	7.000.000,00	7.000.000,00	-
KECAMATAN PEALUNGAN	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	2.000.000,00	2.000.000,00	-
KECAMATAN PEALUNGAN	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	7.000.000,00	7.000.000,00	-
KECAMATAN PEALUNGAN	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	1.500.000,00	1.500.000,00	-
KECAMATAN PEALUNGAN	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	1.500.000,00	1.500.000,00	-
KECAMATAN PEALUNGAN	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1.940.000,00	1.940.000,00	-
KECAMATAN PEALUNGAN	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.220.000,00	1.220.000,00	-
KECAMATAN PEALUNGAN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.302.798.622,00	1.154.974.769,00	- 147.823.853,00
KECAMATAN PEALUNGAN	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		-	-
KECAMATAN PEALUNGAN	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	16.860.000,00	16.860.000,00	-
KECAMATAN PEALUNGAN	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.220.000,00	1.220.000,00	-
KECAMATAN PEALUNGAN	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	42.000.000,00	42.000.000,00	-
KECAMATAN PEALUNGAN	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	4.200.000,00	4.200.000,00	-
KECAMATAN PEALUNGAN	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	7.200.000,00	7.200.000,00	-
KECAMATAN PEALUNGAN	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	27.000.000,00	25.200.000,00	- 1.800.000,00
KECAMATAN PEALUNGAN	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	5.000.000,00	5.000.000,00	-
KECAMATAN PEALUNGAN	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	29.894.000,00	2.989.400,00	- 26.904.600,00
KECAMATAN PEALUNGAN	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	14.538.200,00	14.538.200,00	-
KECAMATAN PEALUNGAN	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	13.955.000,00	20.705.000,00	6.750.000,00
KECAMATAN PEALUNGAN	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	3.170.700,00	3.170.700,00	-
KECAMATAN PEALUNGAN	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2.100.000,00	2.100.000,00	-
KECAMATAN PEALUNGAN	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	11.000.000,00	11.000.000,00	-
KECAMATAN PEALUNGAN	Pengadaan Mebel	38.700.000,00	38.700.000,00	-
KECAMATAN PEALUNGAN	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	73.607.000,00	73.607.000,00	-
KECAMATAN PEALUNGAN	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	45.000.000,00	45.000.000,00	-
KECAMATAN PEALUNGAN	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	34.037.500,00	34.037.500,00	-
KECAMATAN PEALUNGAN	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.000.000,00	2.000.000,00	-

SKPD	NAMA SUB KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ (BERKURANG)
KECAMATAN PECALUNGAN	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	20.189.000,00	20.189.000,00	-
KECAMATAN PECALUNGAN	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	67.222.000,00	55.972.000,00	- 11.250.000,00
KECAMATAN PECALUNGAN	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	19.622.000,00	24.122.000,00	4.500.000,00
KECAMATAN PECALUNGAN	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	6.000.000,00	6.000.000,00	-
KECAMATAN PECALUNGAN	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	40.784.000,00	40.784.000,00	-
		1.877.953.222,00	1.701.424.769,00	- 176.528.453,00
KECAMATAN REBAN	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	17.768.000	17.768.000,00	-
KECAMATAN REBAN	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	5.000.000	5.000.000,00	-
KECAMATAN REBAN	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	5.000.000	5.000.000,00	-
KECAMATAN REBAN	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	5.000.000	5.000.000,00	-
KECAMATAN REBAN	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	5.000.000	5.000.000,00	-
KECAMATAN REBAN	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	6.250.000	2.000.000,00	- 4.250.000,00
KECAMATAN REBAN	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	5.000.000	5.000.000,00	-
KECAMATAN REBAN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.758.289.084	1.773.226.279,00	14.937.195,00
KECAMATAN REBAN	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	18.300.000	18.300.000,00	-
KECAMATAN REBAN	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	21.060.122	21.060.122,00	-
KECAMATAN REBAN	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	4.800.000	4.800.000,00	-
KECAMATAN REBAN	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	-	-	-
KECAMATAN REBAN	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	54.000.000	50.400.000,00	- 3.600.000,00
KECAMATAN REBAN	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.449.500	8.999.500,00	3.550.000,00
KECAMATAN REBAN	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	18.073.100	18.073.100,00	-
KECAMATAN REBAN	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	17.934.000	17.934.000,00	-
KECAMATAN REBAN	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	9.200.000	9.200.000,00	-
KECAMATAN REBAN	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.680.000	1.680.000,00	-
KECAMATAN REBAN	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	21.430.000	21.430.000,00	-
KECAMATAN REBAN	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	3.150.000	3.150.000,00	-
KECAMATAN REBAN	Pengadaan Mebel	20.000.000	4.250.000,00	- 15.750.000,00
KECAMATAN REBAN	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	31.979.500	36.379.500,00	4.400.000,00
KECAMATAN REBAN	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.500.000	1.500.000,00	-
KECAMATAN REBAN	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	13.000.000	13.000.000,00	-
KECAMATAN REBAN	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	67.180.366	67.180.366,00	-
KECAMATAN REBAN	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	46.290.412	48.340.412,00	2.050.000,00
KECAMATAN REBAN	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	7.705.000	7.705.000,00	-
KECAMATAN REBAN	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	200.000.000	200.000.000,00	-
KECAMATAN REBAN	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	20.000.000	30.000.000,00	10.000.000,00
		2.390.039.084,00	2.401.376.279,00	11.337.195,00
KECAMATAN SUBAH	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum			
KECAMATAN SUBAH	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	24.000.000	24.000.000,00	-
KECAMATAN SUBAH	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	10.000.000	10.000.000,00	-
KECAMATAN SUBAH	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	4.400.000	4.400.000,00	-
KECAMATAN SUBAH	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	10.000.000	10.000.000,00	-
KECAMATAN SUBAH	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	16.000.000	16.000.000,00	-
KECAMATAN SUBAH	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.414.030.934	1.311.890.674,00	- 102.140.260,00
KECAMATAN SUBAH	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	45.924.000	45.924.000,00	-
KECAMATAN SUBAH	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	19.500.000	19.500.000,00	-
KECAMATAN SUBAH	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	20.562.000	20.562.000,00	-
KECAMATAN SUBAH	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	4.800.000	4.800.000,00	-
KECAMATAN SUBAH	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya			-
KECAMATAN SUBAH	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	40.350.000	38.550.000,00	- 1.800.000,00
KECAMATAN SUBAH	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.004.000	3.004.000,00	-
KECAMATAN SUBAH	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	13.320.000	13.320.000,00	-
KECAMATAN SUBAH	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	3.000.000	3.000.000,00	-
KECAMATAN SUBAH	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	26.080.000	26.080.000,00	-
KECAMATAN SUBAH	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	9.000.000	9.000.000,00	-
KECAMATAN SUBAH	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.800.000	1.800.000,00	-

SKPD	NAMA SUB KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ (BERKURANG)
KECAMATAN SUBAH	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	6.000.000	6.000.000,00	-
KECAMATAN SUBAH	Pengadaan Mebel	19.588.800	19.588.800,00	-
KECAMATAN SUBAH	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	16.000.000	17.000.000,00	1.000.000,00
KECAMATAN SUBAH	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	750.000	750.000,00	-
KECAMATAN SUBAH	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	24.059.200	22.059.200,00	- 2.000.000,00
KECAMATAN SUBAH	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	16.362.000	16.362.000,00	-
KECAMATAN SUBAH	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	27.000.000	27.000.000,00	-
KECAMATAN SUBAH	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	3.000.000	4.000.000,00	1.000.000,00
KECAMATAN SUBAH	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	10.000.000	10.000.000,00	-
		1.788.530.934,00	1.684.590.674,00	- 103.940.260,00
KECAMATAN TERSONO	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	10.000.000,00	10.000.000,00	-
KECAMATAN TERSONO	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	20.000.000,00	20.000.000,00	-
KECAMATAN TERSONO	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	5.000.000,00	5.000.000,00	-
KECAMATAN TERSONO	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	11.420.000,00	11.420.000,00	-
KECAMATAN TERSONO	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	8.000.000,00	8.000.000,00	-
KECAMATAN TERSONO	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	14.796.000,00	14.796.000,00	-
KECAMATAN TERSONO	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	3.000.000,00	3.000.000,00	-
KECAMATAN TERSONO	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	5.000.000,00	5.000.000,00	-
KECAMATAN TERSONO	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	7.000.000,00	7.000.000,00	-
KECAMATAN TERSONO	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	5.000.000,00	5.000.000,00	-
KECAMATAN TERSONO	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.326.165.282,00	1.372.715.141,00	46.549.859,00
KECAMATAN TERSONO	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	5.000.000,00	5.000.000,00	-
KECAMATAN TERSONO	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	17.300.000,00	17.300.000,00	-
KECAMATAN TERSONO	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	4.800.000,00	4.800.000,00	-
KECAMATAN TERSONO	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	6.000.000,00	6.000.000,00	-
KECAMATAN TERSONO	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	54.000.000,00	50.400.000,00	- 3.600.000,00
KECAMATAN TERSONO	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.500.000,00	5.500.000,00	-
KECAMATAN TERSONO	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	26.068.360,00	27.288.360,00	1.220.000,00
KECAMATAN TERSONO	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	25.000.000,00	25.000.000,00	-
KECAMATAN TERSONO	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	25.000.000,00	28.204.000,00	3.204.000,00
KECAMATAN TERSONO	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2.280.000,00	2.280.000,00	-
KECAMATAN TERSONO	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12.000.000,00	23.550.000,00	11.550.000,00
KECAMATAN TERSONO	Pengadaan Mebel	5.000.000,00	5.000.000,00	-
KECAMATAN TERSONO	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	3.000.000,00	-	- 3.000.000,00
KECAMATAN TERSONO	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.375.000,00	4.375.000,00	-
KECAMATAN TERSONO	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12.000.000,00	13.800.000,00	1.800.000,00
KECAMATAN TERSONO	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	5.000.000,00	5.000.000,00	-
KECAMATAN TERSONO	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	103.020.000,00	91.470.000,00	- 11.550.000,00
KECAMATAN TERSONO	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	5.000.000,00	5.000.000,00	-
KECAMATAN TERSONO	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	6.000.000,00	9.900.000,00	3.900.000,00
KECAMATAN TERSONO	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	241.980.000,00	241.980.000,00	-
KECAMATAN TERSONO	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	21.000.000,00	13.876.000,00	- 7.124.000,00
		2.004.704.642,00	2.047.654.501,00	42.949.859,00
KECAMATAN TULIS	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	21.000.000,00	21.000.000,00	-
KECAMATAN TULIS	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	5.000.000,00	5.000.000,00	-
KECAMATAN TULIS	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	20.000.000,00	20.000.000,00	-
KECAMATAN TULIS	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	10.000.000,00	10.000.000,00	-
KECAMATAN TULIS	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	10.400.000,00	10.400.000,00	-
KECAMATAN TULIS	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	15.000.000,00	15.000.000,00	-
KECAMATAN TULIS	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.442.007.318,00	1.467.331.168,00	25.323.850,00
KECAMATAN TULIS	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	13.440.000,00	13.440.000,00	-
KECAMATAN TULIS	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	4.800.000,00	4.800.000,00	-
KECAMATAN TULIS	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	5.000.000,00	5.000.000,00	-
KECAMATAN TULIS	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	54.000.000,00	50.400.000,00	- 3.600.000,00
KECAMATAN TULIS	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.230.000,00	2.230.000,00	-

SKPD	NAMA SUB KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ (BERKURANG)
KECAMATAN TULIS	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	53.000.000,00	53.000.000,00	-
KECAMATAN TULIS	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	20.000.000,00	20.000.000,00	-
KECAMATAN TULIS	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	5.000.000,00	5.000.000,00	-
KECAMATAN TULIS	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	960.000,00	960.000,00	-
KECAMATAN TULIS	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	23.000.000,00	23.000.000,00	-
KECAMATAN TULIS	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.000.000,00	1.750.000,00	- 250.000,00
KECAMATAN TULIS	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12.840.000,00	18.837.000,00	5.997.000,00
KECAMATAN TULIS	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	48.347.000,00	42.600.000,00	- 5.747.000,00
KECAMATAN TULIS	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	60.983.000,00	60.983.000,00	-
KECAMATAN TULIS	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	12.750.000,00	12.750.000,00	-
KECAMATAN TULIS	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	3.000.000,00	3.000.000,00	-
		1.844.757.318,00	1.866.481.168,00	21.723.850,00
KECAMATAN WARUNGASEM	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	24.820.000	24.820.000,00	-
KECAMATAN WARUNGASEM	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	5.500.000	5.500.000,00	-
KECAMATAN WARUNGASEM	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	10.774.000	10.774.000,00	-
KECAMATAN WARUNGASEM	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	2.705.000	2.705.000,00	-
KECAMATAN WARUNGASEM	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	7.000.000	3.000.000,00	- 4.000.000,00
KECAMATAN WARUNGASEM	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	11.955.000	11.955.000,00	-
KECAMATAN WARUNGASEM	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.505.631.744	1.399.496.885,00	- 106.134.859,00
KECAMATAN WARUNGASEM	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	18.240.000	18.240.000,00	-
KECAMATAN WARUNGASEM	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	32.000.000	30.200.000,00	- 1.800.000,00
KECAMATAN WARUNGASEM	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.500.000	4.500.000,00	-
KECAMATAN WARUNGASEM	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	10.874.500	10.874.500,00	-
KECAMATAN WARUNGASEM	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	20.525.000	20.525.000,00	-
KECAMATAN WARUNGASEM	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	19.467.500	22.937.900,00	3.470.400,00
KECAMATAN WARUNGASEM	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2.340.000	960.000,00	- 1.380.000,00
KECAMATAN WARUNGASEM	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	10.000.000	9.800.000,00	- 200.000,00
KECAMATAN WARUNGASEM	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	55.300.000	55.300.000,00	-
KECAMATAN WARUNGASEM	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.100.000	2.100.000,00	-
KECAMATAN WARUNGASEM	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	8.400.000	9.540.000,00	1.140.000,00
KECAMATAN WARUNGASEM	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	62.299.000	63.268.600,00	969.600,00
KECAMATAN WARUNGASEM	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	40.200.000	40.200.000,00	-
KECAMATAN WARUNGASEM	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	200.000.000	200.000.000,00	-
KECAMATAN WARUNGASEM	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	7.000.000	7.000.000,00	-
KECAMATAN WARUNGASEM	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	3.500.000	3.500.000,00	-
		2.065.131.744,00	1.957.196.885,00	- 107.934.859,00
KECAMATAN WONOTUNGGAL	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	25.086.100,00	25.076.100,00	- 10.000,00
KECAMATAN WONOTUNGGAL	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	5.000.000,00	5.000.000,00	-
KECAMATAN WONOTUNGGAL	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	8.090.000,00	8.090.000,00	-
KECAMATAN WONOTUNGGAL	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	8.125.000,00	8.125.000,00	-
KECAMATAN WONOTUNGGAL	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	9.735.500,00	9.735.500,00	-
KECAMATAN WONOTUNGGAL	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	-	-	-
KECAMATAN WONOTUNGGAL	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.483.049.804,00	1.490.572.465,00	7.522.661,00
KECAMATAN WONOTUNGGAL	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	16.080.000,00	16.080.000,00	-
KECAMATAN WONOTUNGGAL	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	37.380.000,00	37.380.000,00	-
KECAMATAN WONOTUNGGAL	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	3.600.000,00	3.600.000,00	-
KECAMATAN WONOTUNGGAL	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	-	-	-
KECAMATAN WONOTUNGGAL	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	27.000.000,00	25.200.000,00	- 1.800.000,00
KECAMATAN WONOTUNGGAL	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	5.000.000,00	4.970.000,00	- 30.000,00
KECAMATAN WONOTUNGGAL	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.792.200,00	7.561.400,00	2.769.200,00
KECAMATAN WONOTUNGGAL	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	25.085.000,00	25.085.000,00	-
KECAMATAN WONOTUNGGAL	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	24.950.000,00	24.950.000,00	-
KECAMATAN WONOTUNGGAL	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	6.595.000,00	6.905.000,00	310.000,00
KECAMATAN WONOTUNGGAL	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.440.000,00	1.440.000,00	-
KECAMATAN WONOTUNGGAL	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12.190.000,00	12.190.000,00	-
KECAMATAN WONOTUNGGAL	Pengadaan Mebel	13.800.000,00	13.800.000,00	-

SKPD	NAMA SUB KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ (BERKURANG)
KECAMATAN WONOTUNGGAL	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	200.000.000,00	200.000.000,00	-
KECAMATAN WONOTUNGGAL	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	13.250.000,00	13.250.000,00	-
KECAMATAN WONOTUNGGAL	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.875.000,00	1.500.000,00	- 375.000,00
KECAMATAN WONOTUNGGAL	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	24.556.960,00	20.244.160,00	- 4.312.800,00
KECAMATAN WONOTUNGGAL	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	34.802.100,00	36.950.700,00	2.148.600,00
KECAMATAN WONOTUNGGAL	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	56.793.500,00	56.793.500,00	-
KECAMATAN WONOTUNGGAL	Pemeliharaan Mebel		-	-
KECAMATAN WONOTUNGGAL	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	8.953.000,00	8.453.000,00	- 500.000,00
		2.057.229.164,00	2.062.951.825,00	5.722.661,00
RSUD BATANG	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	2.075.728.700	2.275.728.700,00	200.000.000,00
RSUD BATANG	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	69.750.000.000	78.259.092.272,00	8.509.092.272,00
RSUD BATANG	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/kota		-	-
RSUD BATANG	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	29.825.129.972	29.886.503.367,00	61.373.395,00
		101.650.858.672,00	110.421.324.339,00	8.770.465.667,00
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	1.929.425.000,00	1.929.499.500,00	74.500,00
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	161.455.000,00	161.380.500,00	- 74.500,00
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	757.330.000,00	748.630.000,00	- 8.700.000,00
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	4.571.484.000,00	4.584.184.000,00	12.700.000,00
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	Penyediaan Layanan dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perturan kepala daerah	50.000.000,00	50.000.000,00	-
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum	42.781.860,00	42.781.860,00	-
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah			-
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah	317.285.900,00	317.285.900,00	-
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	60.000.000,00	60.000.000,00	-
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS			-
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	105.000.000,00	105.000.000,00	-
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	1.375.181.600,00	1.163.345.600,00	- 211.836.000,00
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran			-
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri			-
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran			-
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	2.468.000.000,00	2.468.000.000,00	-
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	5.000.000,00	5.000.000,00	-
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran			-
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran			-
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat			-
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran	50.000.000,00	50.000.000,00	-
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan pada Peristiwa yang Menimpa, Membahayakan, dan/atau Mengancam Keselamatan Manusia			-
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	18.034.500,00	24.556.500,00	6.522.000,00
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.642.830.360,00	5.450.308.117,00	- 192.522.243,00
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	34.840.000,00	34.840.000,00	-
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	78.045.000,00	149.045.000,00	71.000.000,00
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	25.000.000,00	25.000.000,00	-
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan			-
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan			-
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	61.883.100,00	62.682.900,00	799.800,00
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	34.712.500,00	42.687.500,00	7.975.000,00
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	12.500.000,00	12.499.800,00	- 200,00
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2.400.000,00	2.400.000,00	-
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	135.779.195,00	106.763.352,00	- 29.015.843,00
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			-
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	35.957.800,00	35.957.800,00	-
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			-
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			-

SKPD	NAMA SUB KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ (BERKURANG)
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	103.680.000,00	103.680.000,00
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.500.000,00	1.500.000,00	-
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	64.000.000,00	67.000.000,00	3.000.000,00
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor			-
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	46.776.000,00	46.776.000,00	-
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	155.000.000,00	198.875.243,00	43.875.243,00
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	7.000.000,00	7.000.000,00	-
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	17.674.400,00	17.674.400,00	-
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			-
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			-
		18.266.876.215,00	18.074.353.972,00	- 192.522.243,00
SEKRETARIAT DAERAH	Penataan Administrasi Pemerintahan	70.100.000	70.100.000,00	-
SEKRETARIAT DAERAH	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	93.790.000	93.790.000,00	-
SEKRETARIAT DAERAH	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	439.422.000	489.422.000,00	50.000.000,00
SEKRETARIAT DAERAH	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	29.327.913.300	33.722.423.300,00	4.394.510.000,00
SEKRETARIAT DAERAH	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	87.735.000	97.735.000,00	10.000.000,00
SEKRETARIAT DAERAH	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	88.780.000	108.780.000,00	20.000.000,00
SEKRETARIAT DAERAH	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	182.526.300	192.690.300,00	10.164.000,00
SEKRETARIAT DAERAH	Fasilitasi Bantuan Hukum	461.278.450	459.478.450,00	- 1.800.000,00
SEKRETARIAT DAERAH	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	296.526.300	296.526.300,00	-
SEKRETARIAT DAERAH	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	37.248.000	37.248.000,00	-
SEKRETARIAT DAERAH	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	40.000.000	40.000.000,00	-
SEKRETARIAT DAERAH	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	150.000.000	200.000.000,00	50.000.000,00
SEKRETARIAT DAERAH	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	240.000.000	240.000.000,00	-
SEKRETARIAT DAERAH	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	125.000.000	125.000.000,00	-
SEKRETARIAT DAERAH	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	154.110.850	161.191.950,00	7.081.100,00
SEKRETARIAT DAERAH	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	213.826.150	206.745.050,00	- 7.081.100,00
SEKRETARIAT DAERAH	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	167.143.000	167.143.000,00	-
SEKRETARIAT DAERAH	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	315.336.500	365.336.500,00	50.000.000,00
SEKRETARIAT DAERAH	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	105.000.000	120.000.000,00	15.000.000,00
SEKRETARIAT DAERAH	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	142.215.300	177.215.300,00	35.000.000,00
SEKRETARIAT DAERAH	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	301.753.500	283.753.500,00	- 18.000.000,00
SEKRETARIAT DAERAH	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	117.860.660	117.860.660,00	-
SEKRETARIAT DAERAH	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3.045.000	3.045.000,00	-
SEKRETARIAT DAERAH	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	13.933.418.527	13.245.497.308,00	- 687.921.219,00
SEKRETARIAT DAERAH	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	452.332.000	480.844.000,00	28.512.000,00
SEKRETARIAT DAERAH	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	70.275.500	70.275.500,00	-
SEKRETARIAT DAERAH	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	50.000.000	50.000.000,00	-
SEKRETARIAT DAERAH	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	260.076.300	269.076.300,00	9.000.000,00
SEKRETARIAT DAERAH	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	225.026.600	261.047.600,00	36.021.000,00
SEKRETARIAT DAERAH	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	124.900.000	124.900.000,00	-
SEKRETARIAT DAERAH	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	164.250.000	123.810.000,00	- 40.440.000,00
SEKRETARIAT DAERAH	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	70.000.000	65.000.000,00	- 5.000.000,00
SEKRETARIAT DAERAH	Fasilitasi Kunjungan Tamu	456.000.000	481.000.000,00	25.000.000,00
SEKRETARIAT DAERAH	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	648.876.000	748.906.000,00	100.030.000,00
SEKRETARIAT DAERAH	Pengadaan Mebel	197.837.500	197.837.500,00	-
SEKRETARIAT DAERAH	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	391.337.800	331.337.800,00	- 60.000.000,00
SEKRETARIAT DAERAH	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	180.000.000	163.200.000,00	- 16.800.000,00
SEKRETARIAT DAERAH	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	870.000.000	828.000.000,00	- 42.000.000,00
SEKRETARIAT DAERAH	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	278.310.000	333.322.000,00	55.012.000,00
SEKRETARIAT DAERAH	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	456.442.600	452.958.600,00	- 3.484.000,00
SEKRETARIAT DAERAH	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	64.670.000	64.670.000,00	-
SEKRETARIAT DAERAH	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1.804.027.000	1.804.400.000,00	373.000,00
SEKRETARIAT DAERAH	Pemeliharaan Mebel	40.000.000	45.000.000,00	5.000.000,00
SEKRETARIAT DAERAH	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	283.000.000	339.700.000,00	56.700.000,00
SEKRETARIAT DAERAH	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	266.807.881	984.261.864,00	717.453.983,00
SEKRETARIAT DAERAH	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	55.866.069	55.866.069,00	-

SKPD	NAMA SUB KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ (BERKURANG)
SEKRETARIAT DAERAH	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	25.000.000	50.550.000,00	25.550.000,00
SEKRETARIAT DAERAH	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	390.000.000	390.000.000,00	-
SEKRETARIAT DAERAH	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	1.966.347.983	1.852.476.000,00	- 113.871.983,00
SEKRETARIAT DAERAH	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	94.140.000	104.292.000,00	10.152.000,00
SEKRETARIAT DAERAH	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	425.820.000	428.862.000,00	3.042.000,00
SEKRETARIAT DAERAH	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	227.883.800	227.883.800,00	-
SEKRETARIAT DAERAH	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	211.993.900	211.993.900,00	-
SEKRETARIAT DAERAH	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	50.491.000	50.491.000,00	-
SEKRETARIAT DAERAH	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	125.966.300	125.966.300,00	-
SEKRETARIAT DAERAH	Fasilitasi Keprotokolan	184.664.800	199.664.800,00	15.000.000,00
SEKRETARIAT DAERAH	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	148.527.200	148.527.200,00	-
SEKRETARIAT DAERAH	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	342.982.600	357.982.600,00	15.000.000,00
		58.697.881.670,00	63.445.084.451,00	4.747.202.781,00
SEKRETARIAT DPRD	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	150.000.000	150.000.000,00	-
SEKRETARIAT DPRD	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	1.214.303.720	1.214.303.720,00	-
SEKRETARIAT DPRD	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan		-	-
SEKRETARIAT DPRD	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik		-	-
SEKRETARIAT DPRD	Pembahasan KUA dan PPAS	80.000.000	80.000.000,00	-
SEKRETARIAT DPRD	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	60.000.000	60.000.000,00	-
SEKRETARIAT DPRD	Pembahasan APBD	60.000.000	390.000.000,00	330.000.000,00
SEKRETARIAT DPRD	Pembahasan APBD Perubahan	60.000.000	60.000.000,00	-
SEKRETARIAT DPRD	Pembahasan Laporan Semester	10.000.000	10.000.000,00	-
SEKRETARIAT DPRD	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	60.000.000	60.000.000,00	-
SEKRETARIAT DPRD	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	248.911.000	235.886.000,00	- 13.025.000,00
SEKRETARIAT DPRD	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	250.000.000	235.000.000,00	- 15.000.000,00
SEKRETARIAT DPRD	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	260.000.000	260.000.000,00	-
SEKRETARIAT DPRD	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	245.000.000	230.000.000,00	- 15.000.000,00
SEKRETARIAT DPRD	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	35.967.000	7.005.000,00	- 28.962.000,00
SEKRETARIAT DPRD	Pengawasan Penggunaan Anggaran	30.000.000	-	- 30.000.000,00
SEKRETARIAT DPRD	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	385.122.000	385.122.000,00	-
SEKRETARIAT DPRD	Pendalaman Tugas DPRD	2.200.000.000	2.428.697.000,00	228.697.000,00
SEKRETARIAT DPRD	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	318.000.000	279.000.000,00	- 39.000.000,00
SEKRETARIAT DPRD	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	429.500.000	432.500.000,00	3.000.000,00
SEKRETARIAT DPRD	Penyusunan Program Kerja DPRD	50.000.000	38.050.000,00	- 11.950.000,00
SEKRETARIAT DPRD	Publikasi dan Dokumentasi DPRD	160.000.000	160.000.000,00	-
SEKRETARIAT DPRD	Kunjungan Kerja dalam Daerah	50.000.000	16.820.000,00	- 33.180.000,00
SEKRETARIAT DPRD	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	25.000.000	25.000.000,00	-
SEKRETARIAT DPRD	Pelaksanaan Reses	813.575.000	482.932.000,00	- 330.643.000,00
SEKRETARIAT DPRD	Pengawasan Kode Etik DPRD	20.000.000	42.530.000,00	22.530.000,00
SEKRETARIAT DPRD	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	9.101.543.400	11.846.110.600,00	2.744.567.200,00
SEKRETARIAT DPRD	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	50.000.000	47.000.000,00	- 3.000.000,00
SEKRETARIAT DPRD	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	650.000.000	809.500.000,00	159.500.000,00
SEKRETARIAT DPRD	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	40.000.000	40.000.000,00	-
SEKRETARIAT DPRD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	50.000.000	50.000.000,00	-
SEKRETARIAT DPRD	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.412.339.351	3.315.052.439,00	- 97.286.912,00
SEKRETARIAT DPRD	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	199.572.000	179.479.091,00	- 20.092.909,00
SEKRETARIAT DPRD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	9.999.500	9.999.500,00	-
SEKRETARIAT DPRD	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	230.000.000	206.846.000,00	- 23.154.000,00
SEKRETARIAT DPRD	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	9.999.900	14.499.900,00	4.500.000,00
SEKRETARIAT DPRD	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	18.000.000	18.000.000,00	-
SEKRETARIAT DPRD	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	100.000.000	293.750.000,00	193.750.000,00
SEKRETARIAT DPRD	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	20.000.000	31.104.500,00	11.104.500,00
SEKRETARIAT DPRD	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	110.102.000	153.728.100,00	43.626.100,00
SEKRETARIAT DPRD	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	55.118.115	55.118.115,00	-
SEKRETARIAT DPRD	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	119.996.000	113.996.000,00	- 6.000.000,00
SEKRETARIAT DPRD	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	200.167.500	219.661.500,00	19.494.000,00
SEKRETARIAT DPRD	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	23.000.000	26.000.000,00	3.000.000,00

SKPD	NAMA SUB KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ (BERKURANG)
SEKRETARIAT DPRD	Fasilitasi Kunjungan Tamu	20.000.000	20.000.000,00	-
SEKRETARIAT DPRD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	155.000.000	197.960.000,00	42.960.000,00
SEKRETARIAT DPRD	Pengadaan Mebel	41.390.000	423.410.000,00	382.020.000,00
SEKRETARIAT DPRD	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	672.696.003	689.240.000,00	16.543.997,00
SEKRETARIAT DPRD	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	170.000.000	170.000.000,00	-
SEKRETARIAT DPRD	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	30.000.000	50.000.000,00	20.000.000,00
SEKRETARIAT DPRD	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	165.000.000	166.271.724,00	1.271.724,00
SEKRETARIAT DPRD	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	130.000.000	154.995.600,00	24.995.600,00
SEKRETARIAT DPRD	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	280.000.000	300.000.000,00	20.000.000,00
SEKRETARIAT DPRD	Pemeliharaan Mebel	20.000.000	40.000.000,00	20.000.000,00
SEKRETARIAT DPRD	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	271.830.000	334.830.000,00	63.000.000,00
SEKRETARIAT DPRD	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	50.000.000	70.000.000,00	20.000.000,00
SEKRETARIAT DPRD	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	20.000.000	35.000.000,00	15.000.000,00
SEKRETARIAT DPRD	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	31.660.171.500	30.909.780.200,00	- 750.391.300,00
SEKRETARIAT DPRD	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	505.000.000	505.000.000,00	-
SEKRETARIAT DPRD	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	100.000.000	100.000.000,00	-
SEKRETARIAT DPRD	Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	130.000.000	130.000.000,00	-
SEKRETARIAT DPRD	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	250.000.000	277.125.000,00	27.125.000,00
		56.286.303.989,00	59.286.303.989,00	3.000.000.000,00

4.4. PLAFON PERUBAHAN ANGGARAN SEMENTARA UNTUK BELANJA PEGAWAI, BUNGA, SUBSIDI, HIBAH, BANTUAN SOSIAL, BELANJA BAGI HASIL, BANTUAN KEUANGAN DAN BELANJA TIDAK TERDUGA

Komposisi Perubahan Belanja Daerah Kabupaten Batang tahun 2024 diuraikan sebagai berikut:

Tabel 4.4

Plafon Perubahan Anggaran Sementara untuk Belanja Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2024

KODE AKUN	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ (BERKURANG)
2	BELANJA OPERASI	1.764.112.747.942	1.516.912.358.103	247.200.389.839
2.1	Belanja Pegawai	837.068.660.855	912.516.984.058	75.448.323.203
2.1.01	Belanja Barang dan Jasa	825.271.615.534	491.759.627.009	333.511.988.525
2.1.02	Belanja Hibah	90.069.731.553	100.777.222.036	10.707.490.483
2.1.05	Belanja Bantuan Sosial	11.702.740.000	11.858.525.000	155.785.000
2.1.06	BELANJA MODAL	144.379.410.215	176.882.434.373	32.503.024.158
2.2	Belanja Modal Tanah	100.000.000	20.000.000	80.000.000
2.2.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	25.236.967.498	44.811.436.130	19.574.468.632
2.2.02	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	49.195.907.035	57.287.552.711	8.091.645.676
2.2.03	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	69.375.928.453	61.298.405.642	8.077.522.811
2.2.04	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	220.607.229	13.215.039.890	12.994.432.661
2.2.05	Belanja Modal Aset Lainnya	250.000.000	250.000.000	-
2.2.06	BELANJA TIDAK TERDUGA	12.000.000.000	7.669.716.371	4.330.283.629
2.3	Belanja Tidak Terduga	12.000.000.000	7.669.716.371	4.330.283.629
2.3.01	BELANJA TRANSFER	36.042.454.076	366.180.324.821	330.137.870.745
2.4	Belanja Bagi Hasil	13.959.954.076	14.653.167.421	693.213.345
2.4.01	Belanja Bantuan Keuangan	22.082.500.000	351.527.157.400	329.444.657.400
2.4.02	JUMLAH BELANJA	1.956.534.612.233	2.067.644.833.668	111.110.221.435

Sumber: BPKAD Kab Batang Tahun 2024

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa Perubahan Belanja Daerah Kabupaten Batang tahun 2024 direncanakan dari sebesar Rp 1.956.534.612.233 menjadi Rp. 2.067.644.833.668 mengalami

kenaikan belanja sebesar Rp. 111.110.221.435 atau sebesar 5,68%. Perubahan Belanja Daerah ini di pengaruhi oleh perubahan Belanja Operasi dari Rp. 1.764.112.747.942 menjadi Rp. 1.516.912.358.103, Perubahan Belanja Modal dari Rp. 144.379.410.215 menjadi Rp. 176.882.434.373, Perubahan Belanja Tak Terduga dari Rp. 12.000.000.000 menjadi Rp. 7.669.716.371 dan Perubahan Belanja Tranfer dari Rp. 36.042.454.076 menjadi Rp. 366.601.160.276.

Dengan rincian Perubahan Belanja Daerah sebagai berikut:

1. Belanja Operasi

Perubahan Alokasi Belanja Operasi pada tahun 2024 sebelumnya direncanakan sebesar Rp 1.764.112.747.942 menjadi Rp. 1.516.912.358.103 mengalami penurunan belanja operasi sebesar Rp. 247.200.389 atau turun sebesar 14,01% . Dengan rincian sebagai berikut:

- a. Perubahan Belanja Pegawai pada tahun 2024 direncanakan sebesar Rp 837.068.660.855 menjadi Rp. 912.516.984.058 mengalami kenaikan sebesar Rp. 75.448.323.203 atau sebesar 9,01%.
- b. Perubahan Belanja Barang dan Jasa pada tahun 2024 direncanakan sebesar Rp 825.271.615.534 menjadi Rp. 491.759.627.009 mengalami penurunan sebesar Rp. 333.511.988.525 atau turun sebesar 40,41%.
- c. Perubahan Belanja Hibah pada tahun 2024 direncanakan sebesar Rp 90.069.731.553 menjadi Rp. 100.777.222.036 mengalami kenaikan sebesar Rp. 10.707.490.483 atau sebesar 11,89%.
- d. Belanja Bantuan Sosial pada tahun 2024 direncanakan sebesar Rp. 11.702.740.000 mengalami kenaikan sebesar Rp. 155.785.000 atau sebesar 1,33% menjadi Rp. 11.858.525.250.

2. Belanja Modal

Belanja Modal pada tahun 2024 direncanakan sebesar Rp. 144.379.410.215 mengalami kenaikan sebesar Rp. 32.503.024.158 atau sebesar 22,51% menjadi Rp. 176.882.434.373. Dengan rincian sebagai berikut:

- a. Belanja Modal Tanah pada tahun 2024 direncanakan sebesar Rp. 100.000.000 mengalami penurunan sebesar Rp. 80.000.000 atau sebesar 80,00% menjadi Rp. 20.000.000.
- b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin pada tahun 2024 direncanakan sebesar Rp. 25.236.967.498 mengalami kenaikan sebesar Rp. 19.574.468.632 atau sebesar 77,56% menjadi Rp. 44.811.436.130,.
- c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan pada tahun 2024 direncanakan sebesar Rp. 49.195.907.035 mengalami kenaikan sebesar Rp. 8.091.645.676 atau sebesar 16,45% menjadi Rp. 57.287.552.711.
- d. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi pada tahun 2024 direncanakan sebesar Rp. 69.375.928.453 mengalami penurunan sebesar Rp. 8.077.522.811 atau sebesar 11,64% menjadi Rp. 61.298.405.642
- e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya pada tahun 2024 direncanakan sebesar Rp. 220.607.229 mengalami kenaikan sebesar Rp. 12.994.432.661 atau sebesar 5890,30% menjadi Rp. 13.215.039.890.
- f. Belanja Modal Aset Lainnya pada tahun 2024 direncanakan sebesar Rp. 250.000.000 tidak mengalami perubahan.

3. Belanja Tidak Terduga

Alokasi Belanja Tidak Terduga pada tahun 2024 direncanakan sebesar Rp. 12.000.000.000 mengalami penurunan sebesar Rp. 4.330.283.629 atau sebesar 36,09% menjadi Rp. 7.669.716.37.

4. Belanja Transfer

Alokasi Belanja Transfer pada tahun 2024 direncanakan sebesar Rp. 36.042.454.076 mengalami kenaikan sebesar Rp. 330.137.870.745 atau sebesar 915,97% menjadi Rp. 366.180.324.821. Dengan rincian sebagai berikut :

- a. Belanja Bagi Hasil pada tahun 2024 direncanakan sebesar Rp. 13.959.954.076 mengalami kenaikan sebesar Rp. 693.213.345 atau sebesar 4,97% menjadi Rp. 14.653.167.421.
- b. Belanja Bantuan Keuangan pada tahun 2024 direncanakan sebesar Rp. 22.082.500.000 mengalami kenaikan sebesar Rp. 329.444.657.400 atau sebesar 1491,88% menjadi Rp. 351.527.157.400.

BAB V
RENCANA PERUBAHAN PEMBIAYAAN DAERAH

5.1 Rencana Perubahan Penerimaan Pembiayaan

Pemerintah Kabupaten Batang dalam Tahun Anggaran 2024 perlu memahami semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan atau pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Adapun Rencana perubahan pembiayaan daerah di Kabupaten Batang untuk tahun 2024 dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 5.1

Rincian Plafon Perubahan Anggaran Pembiayaan Kabupaten Batang
Tahun Anggaran 2024

KODE AKUN	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ (BERKURANG)
3	PEMBIAYAAN DAERAH			
3.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	61.582.200.395	143.716.847.078	82.134.646.683
3.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	61.582.200.395	143.716.847.078	82.134.646.683
3.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	7.500.000.000	7.500.000.000,00	-
3.2.02	Penyertaan Modal Daerah	7.500.000.000	7.500.000.000	-
	PEMBIAYAAN NETTO	54.082.200.395	136.216.847.078	82.134.646.683

Sumber: BPKAD Kab Batang Tahun 2024

Kebijakan penerimaan pembiayaan yang akan dilaksanakan pada tahun 2024 mulanya diproyeksikan sebesar Rp 61.582.200.395 mengalami perubahan menjadi Rp. 143.716.847.078 bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya yang awalnya sebesar Rp. 61.582.200.395 menjadi Rp. 143.716.847.078 mengalami kenaikan sebesar Rp. 82.134.646.683 atau sebesar 133,37% dari target SiLPA sebelumnya.

5.2 Rencana Perubahan Pengeluaran Pembiayaan

Pada kebijakan pengeluaran pembiayaan sebesar Rp. 7.500.000.000 yang seluruhnya di gunakan untuk Penyertaan Modal Daerah. Besaran Pengeluaran Pembiayaan ini tidak mengalami perubahan dari target sebelum perubahan

Dari perubahan Kebijakan Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan didapat Perubahan Pembiayaan Netto dari Rp. 54.082.200.395 menjadi Rp. 136.216.847.078.

Berdasarkan uraian dari kebijakan penerimaan pembiayaan dan kebijakan pengeluaran pembiayaan diatas maka ringkasan APBD Kabupaten Batang secara keseluruhan (Pendapatan Belanja dan Pembiayaan) Tahun 2024 disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 5.2

Ringkasan APBD Perubahan Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2024

URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ (BERKURANG)
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	315.624.540.238	335.410.556.590	19.786.016.352
Pajak Daerah	136.775.000.000	153.366.894.000	16.591.894.000
Retribusi Daerah	69.887.676.738	161.512.542.588	91.624.865.850
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	16.175.527.000	16.602.120.002	426.593.002
Lain-lain PAD yang Sah	92.786.336.500	3.929.000.000	- 88.857.336.500
PENDAPATAN TRANSFER	1.586.347.871.600	1.595.537.430.000	9.189.558.400
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.439.103.780.000	1.437.567.692.000	- 1.536.088.000
Pendapatan Transfer Antar Daerah	147.244.091.600	157.969.738.000	10.725.646.400
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	480.000.000	480.000.000	-
Pendapatan Hibah	480.000.000	480.000.000	-
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	-	-	-

URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ (BERKURANG)
JUMLAH PENDAPATAN	1.902.452.411.838	1.931.427.986.590	28.975.574.752
BELANJA OPERASI	1.764.112.747.942	1.516.912.358.103	247.200.389.839
Belanja Pegawai	837.068.660.855	912.516.984.058	75.448.323.203
Belanja Barang dan Jasa	825.271.615.534	491.759.627.009	333.511.988.525
Belanja Hibah	90.069.731.553	100.777.222.036	10.707.490.483
Belanja Bantuan Sosial	11.702.740.000	11.858.525.000	155.785.000
BELANJA MODAL	144.379.410.215	176.882.434.373	32.503.024.158
Belanja Modal Tanah	100.000.000	20.000.000	80.000.000
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	25.236.967.498	44.811.436.130	19.574.468.632
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	49.195.907.035	57.287.552.711	8.091.645.676
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	69.375.928.453	61.298.405.642	8.077.522.811
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	220.607.229	13.215.039.890	12.994.432.661
Belanja Modal Aset Lainnya	250.000.000	250.000.000	-
BELANJA TIDAK TERDUGA	12.000.000.000	7.669.716.371	4.330.283.629
Belanja Tidak Terduga	12.000.000.000	7.669.716.371	4.330.283.629
BELANJA TRANSFER	36.042.454.076	366.180.324.821	330.137.870.745
Belanja Bagi Hasil	13.959.954.076	14.653.167.421	693.213.345
Belanja Bantuan Keuangan	22.082.500.000	351.527.157.400	329.444.657.400
JUMLAH BELANJA	1.956.534.612.233	2.067.644.833.668	111.110.221.435
Total Surplus/(Defisit)	- 54.082.200.395	- 136.216.847.078	-82.134.646.683
PENERIMAAN PEMBIAYAAN	61.582.200.395	143.716.847.078	82.134.646.683
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	61.582.200.395	143.716.847.078	82.134.646.683
PENGELUARAN PEMBIAYAAN	7.500.000.000	7.500.000.000	-
Penyertaan Modal Daerah	7.500.000.000	7.500.000.000	-
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	7.500.000.000	7.500.000.000	-

URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ (BERKURANG)
Pembiayaan Netto	54.082.200.395	136.216.847.078	82.134.646.683
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan (SILPA)	-	-	-

Sumber: BPKAD Kab Batang Tahun 2024

Sedangkan struktur APBD Perubahan tahun 2024 di proyeksikan tidak ada sisa lebih pembiayaan di tahun anggaran.

Tabel 5.3

Struktur APBD Perubahan Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2024

KODE AKUN	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ (BERKURANG)
1	PENDAPATAN DAERAH	1.902.452.411.838	1.931.427.986.590	28.975.574.752
2	BELANJA DAERAH	1.956.534.612.233	2.067.644.833.668	111.110.221.435
	SURPLUS/(DEFISIT)	(54.082.200.395)	(136.216.847.078)	(82.134.646.683)
3.1	Penerimaan pembiayaan	61.582.200.395	143.716.847.078	82.134.646.683
3.2	Pengeluaran pembiayaan	7.500.000.000	7.500.000.000	-
	PEMBIAYAAN NETTO	54.082.200.395	136.216.847.078	82.134.646.683
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan (SILPA)	-	-	-

Sumber: BPKAD Kab Batang Tahun 2024

BAB VI PENUTUP

Hal-hal yang disepakati antara Bupati dengan DPRD dalam pembahasan Perubahan KUA APBD Tahun 2024 diantaranya :

1. Pendapatan Daerah, setelah pembahasan menjadi Rp 1.931.427.986.590,00
2. Belanja Daerah, setelah pembahasan menjadi Rp 2.067.644.833.668,00
3. Defisit, setelah pembahasan menjadi Rp 136.216.847.078,00
4. Pembiayaan Daerah setelah pembahasan menjadi Rp 136.216.847.078,00

Demikian dokumen Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (P-PPAS) Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2024 dibuat untuk menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Batang dalam menyusun RAPBD Perubahan Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2024.

Batang, Agustus 2024

Penjabat (Pj)
BUPATI BATANG

PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BATANG

Selaku,
PIHAK PERTAMA

Selaku,
PIHAK KEDUA

Dra. LANI DWI REJEKI, MM

KETUA
H. MAULANA YUSUP. S.IP

WAKIL KETUA I
Hj.JUNAENAH

WAKIL KETUA II
H.NUR UNTUNG SLAMET, SE

WAKIL KETUA III

